



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SIDENRENG RAPPANG NOMO 36 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengalami perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

f

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6542);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disebut RKA-PD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah dokumen penganggaran tahunan perangkat daerah.
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD atau Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan antara Bupati dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan setelah RPJMD/RPD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan II (dua).
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. target sasaran pembangunan daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (8) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah perubahan RPJMD.

- (9) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (10) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Maksud Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua):
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - b. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- (2) Tujuan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 Pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang dan antar waktu serta antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; dan
 - c. mewujudkan keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Rancangan Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun berkenaan;
 - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI : Penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tertuang dalam Bab IV (empat) disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif dan tertuang pada Bab V (lima).
- (4) Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2023:
 - a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,


BASRA


BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR

f

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR XXX TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	6
1.4 Maksud Dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	1
2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro	1
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	2
2.1.2. PDRB Perkapita	8
2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	9
2.1.4. Angka Kemiskinan	10
2.1.5. Gini Ratio	12
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia.....	12
2.2. Evaluasi Capaian RKPD	14
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Triwulan Ke II	18
2.3.1. Capaian Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan II Tahun 2022.....	18
2.3.2. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 yang Terakomodir di APBD Tahun 2023	21
2.3.3. Evaluasi Capaian Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023.....	23
2.3.4. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 berdasarkan Urusan	28
2.3.5. Evaluasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	33
2.3.6. Evaluasi Capaian Indikator SDGs	35
BAB III	
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro	1
3.2 Tantangan Perekonomian Daerah	10

3.2.1	Aspek Eksternal	10
3.2.2	Aspek Internal.....	11
3.2.3	Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	13
3.3	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
3.3.1	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	16
3.3.2	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	20
3.3.3	Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	31

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	8
4.2.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	8
4.2.2. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	9
4.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	10
4.2.4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	11
4.2.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	14
4.2.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023	17
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023	30
4.3.1. Strategi Pembangunan Tahun 2023	30
4.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023.....	38

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	1
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023	1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	3
5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023	15

BAB VI

KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	1
6.1. Indikator Makro Pembangunan	1
6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	2
6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	3
6.4 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	11
6.5 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.....	15

BAB VII

PENUTUP	1
7.1. Kaidah Pelaksanaan.....	1
7.2. Kesimpulan.....	2

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023	7
--	---

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Gambar 4.1 : Visi Presiden Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024	8
Gambar 4.2 : Indikator Pembangunan Tahun 2023	10
Gambar 4.3 : Arah Kebijakan RKP Tahun 2023.....	10
Gambar 4.4 : Tema RKP Tahun 2023	11
Gambar 4.5 : Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	11

DAFTAR GRAFIK

BAB II EVALUASI HASIL RKPd SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Grafik 2.1	: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	3
Grafik 2.2	: Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022.....	10
Grafik 2.3	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ribu Orang)	11
Grafik 2.4	: Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah)	11
Grafik 2.5	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022	13

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Grafik 3.1	: Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 (Persen).....	5
Grafik 3.2	: Pertumbuhan Ekonomi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen).....	5
Grafik 3.3	: Inflasi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen).....	6
Grafik 3.4	: Tingkat Pengangguran Terbuka Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)	7
Grafik 3.5	: Tingkat Kemiskinan Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen).....	8
Grafik 3.6	: Gini Rasio Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin).....	9
Grafik 3.7	: Indeks Pembangunan Manusia Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin)	9

DAFTAR TABEL

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Tabel 2.1	: Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022...	1
Tabel 2.2	: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional (2018-2022)	2
Tabel 2.3	: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (Persen).....	2
Tabel 2.4	: Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	4
Tabel 2.5	: Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	4
Tabel 2.6	: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	5
Tabel 2.7	: Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)	6
Tabel 2.8	: Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)	6
Tabel 2.9	: Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Persen)	7
Tabel 2.10	: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen).....	8
Tabel 2.11	: PDRB Per Kapita dan PDB per kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022	8
Tabel 2.12	: PDRB Per Kapita Dan PDB Per Kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulatan. Dan Nasional Tahun 2018-2022(Juta Rupiah)	9
Tabel 2.13	: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional 2018-2022 (%).....	9
Tabel 2.14	: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)	10
Tabel 2.15	: Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara	11
Tabel 2.16	: Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022	12
Tabel 2.17	: Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara.....	12
Tabel 2.18	: Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...	13
Tabel 2.19	: Capaian Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2022	15
Tabel 2.20	: Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023.....	19
Tabel 2.21	: Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 Yang Terakomodir di APBD Tahun 2023.....	21

Tabel 2.22	: Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	24
Tabel 2.23	: Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022.....	26
Tabel 2.24	: Capaian Kinerja RKPD berdasarkan Urusan	30
Tabel 2.25	: Capaian Indikator SPM Tahun 2022 – Triwulan II Tahun 2023.....	33
Tabel 2.26	: Capaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)	37

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	: Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021–2022 (Persen, YoY)	4
Tabel 3.2	: Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 (Persen)	4
Tabel 3.3	: Pertumbuhan Ekonomi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen).....	5
Tabel 3.4	: Inflasi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen).....	6
Tabel 3.5	: Tingkat Pengangguran Terbuka Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen).....	7
Tabel 3.6	: Tingkat Kemiskinan Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen).....	8
Tabel 3.7	: Gini Rasio Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin)	8
Tabel 3.8	: Indeks Pembangunan Manusia Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin).....	9
Tabel 3.9	: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022	12
Tabel 3.10	: Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023	14
Tabel 3.11	: Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023	19
Tabel 3.12	: Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023	30
Tabel 3.13	: Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 3.14	: Kewajiban Kab. Sidenreng Rappang selama Tahun 2020 s/d Tahun 2022	33

Tabel 3.15	: Perubahan Pagu Belanja Per Urusan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023	34
------------	---	----

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.1	: Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Pokok Visi.....	1
Tabel 4.2	: Perumusan Penjelasan Misi RPJMD	3
Tabel 4.3	: Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023	4
Tabel 4.4	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Indikator dan Target Kinerja Perubahan RPJMD	6
Tabel 4.5	: Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan.....	17
Tabel 4.6	: Tabel Prioritas Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	19
Tabel 4.7	: Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah aan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023	23
Tabel 4.8	: Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Misi RPJMD untuk Tahun 2023	26
Tabel 4.9	: Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang	27
Tabel 4.10	: Keterkaitan antara prioritas sasaran Daerah dengan Prioritas sasaran RKP 2023	28
Tabel 4.11	: Sasaran, Strategi dan Penjelasan Strategi Pembangunan Tahun 2023	34
Tabel 4.12	: Keterkaitan Proriotas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023 sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023	40

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tabel 5.1	: Kerangka Pendanaan RKPDP Pokok 2023, Perubahan RPJMD Dan Perubahan RKPDP Tahun 2023.....	1
Tabel 5.2	: Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPDP Tahun 2023	5
Tabel 5.3	: Pencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPDP Tahun 2023	16

BAB VI KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.1	: Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Perubahan Tahun 2023	1
Tabel 6.2	: Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	2
Tabel 6.3	: Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perubahan RKPDP Tahun 2023...	3
Tabel 6.4	: Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023	12
Tabel 6.5	: Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023	15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG
RAPPANG NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Di samping itu, perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat tersebut, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan daerah dan kemampuan sumber daya keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dokumen tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Tahun 2023, asumsi-asumsi dan target-target indikator kinerja perlu disesuaikan dengan keadaan atau fakta yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu penyesuaian yang dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial memuat penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur dan tepat waktu. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *Top-Down/ Bottom-Up*.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan tahun berjalan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 dan juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023, mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman Adil dan Sejahtera”***. Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan demikian, proses Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 meliputi: (1) penyusunan rancangan Perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan (semester I) serta dinamika dampak sosial dan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan II), yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,86 persen; Tingkat Kemiskinan 5,11 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,56 persen; Gini Rasio 0,354; Indeks Pembangunan Manusia 72,06; dan PDRB Perkapita sebesar 51,00 Juta Rupiah (Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2022).

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD dan penetapannya. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah, kabupaten/ kota dan memberi ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6542);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 3Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, Nomor 36).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

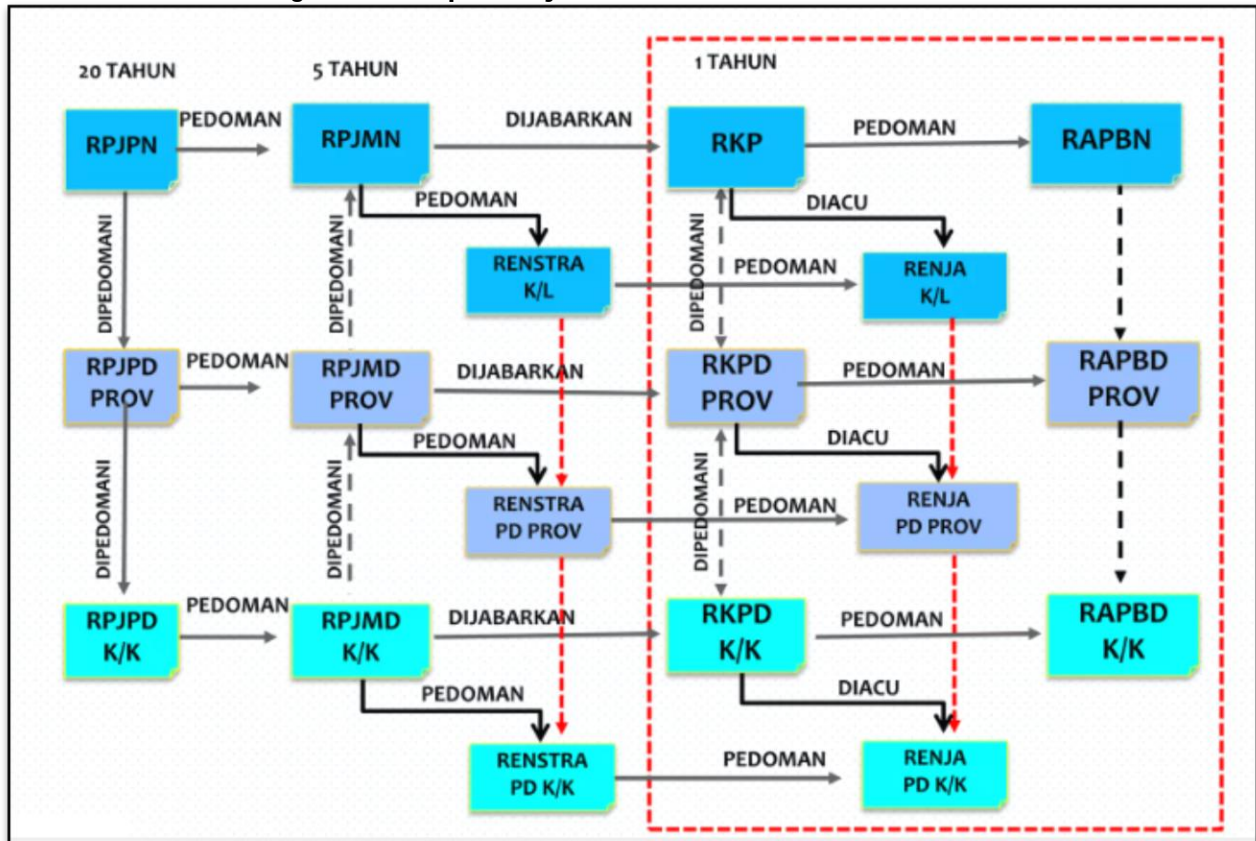
Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mendukung Pembangunan Nasional;
- b. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2013 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur serta merupakan pelaksanaan Tahun Kelima Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

- c. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2023;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan peraturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD 2018-2023 serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memaparkan rancangan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2023 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDG's pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan poin-poin kesimpulan serta harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

BAB II**EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2023, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

Kondisi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari kondisi ekonomi makronya. Ekonomi makro perekonomian yang lebih kompleks dan luas secara menyeluruh, dimana perubahan ekonomi yang terjadi dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Tabel 2.1
Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun					Ket.
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70.6	71.05	71.2	71.54	72.06	
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.16	4.79	5.05	5.04	5.11	
3	Tingkat Pengangguran (TPT)	Persen	4.7	4.75	5.91	4.93	3.56	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.02	4.65	-0.59	5.54	4.86	
5	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0.340	0.284	0.349	0.358	0.354	
6	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	43.25	46.49	44.12	47.19	51.00	

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2023.

Indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami kenaikan atau pertumbuhan ke arah yang lebih baik diantaranya: (1) Indeks Pembangunan Manusia yang konsisten mengalami pertumbuhan dari angka 70.6 poin Tahun 2018 menjadi 72.06 poin pada Tahun 2022, (2) Tingkat pengangguran terbuka yang menunjukkan tren penurunan yang pada Tahun 2018 mencapai 4.7 persen menjadi 3.56 persen di Tahun 2022, (3) PDRB Perkapita yang bertumbuh selama lima tahun dari angka 43.25 juta rupiah naik menjadi 51.00 juta rupiah di Tahun 2022, sedangkan indikator makro yang mengalami penurunan atau kinerja memburuk antara lain: (1) Angka kemiskinan dengan capaian terakhir Tahun 2022 5.11 persen, tetapi pernah mencapai angka 4.79 pada Tahun 2019, (2) Pertumbuhan ekonomi yang pernah mencapai angka terbesar pada Tahun 2021 5.54

persen, turun pada Tahun 2022 menjadi 4.86 persen, (3) Rasio gini dengan capaian Tahun 2022 sebesar 0.354 poin, tetapi pernah mencapai angka 0.284 pada Tahun 2019.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi sepanjang periode ini yaitu Tahun 2021, dengan nilai sebesar 5.54 persen, kemudian angka paling rendah pada tahun 2020 yaitu -0,59 persen. Fenomena terkontraksinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi covid-19 dan menurunnya produksi pertanian sebagai sektor penopang perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2021, perekonomian kembali membaik yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 5,54 persen. angka ini juga melampaui target RKPD 2021 yang berada di range 4,5-5,5%. Dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu di angka 4.86%. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sudah mulai dapat dikendalikan tetapi mengalami perlambatan pada beberapa lapangan usaha seperti produksi pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, yang berada di angka 5.09 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,31 persen untuk nasional di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah setara yang nilainya sebesar 4,80 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di atas rata-rata.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional (2018-2022)

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sidenreng Rappang	%	5,02	4,65	-0,59	5,54	4,86
Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,04	6,91	-0,7	4,65	5,09
Nasional	%	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023

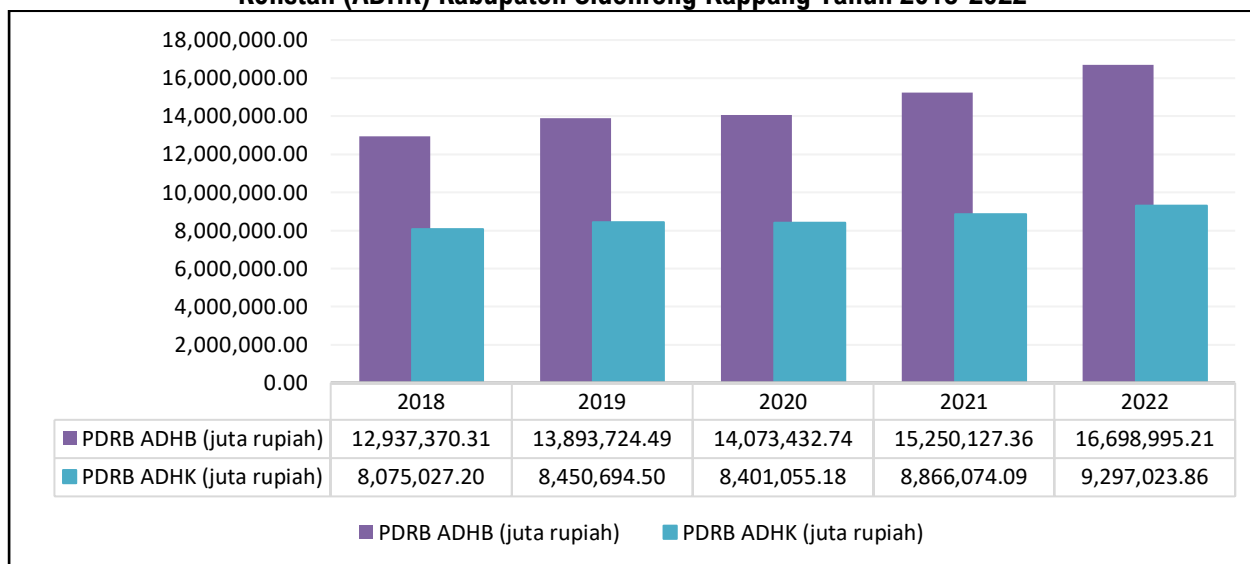
Tabel 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Daerah Setara (Persen)

No	Kab/ Kota	PDRB ADHK 2021	PDRB ADHK 2022	Pertumbuhan Ekonomi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Setara
1	Takalar	6.908.047,89	7.228,40	4,64	4.80
2	Jeneponto	7.058.349,94	7.327,53	3,81	
3	Sinjai	7.576.834,94	7.945,62	4,87	
4	Soppeng	7.585.976,28	8.054,42	6,18	
5	Luwu Utara	8.491.499,08	8.876,97	4,54	
6	Sidenreng Rappang	8.866.074,09	9.297.023,86	4,86	

No	Kab/ Kota	PDRB ADHK 2021	PDRB ADHK 2022	Pertumbuhan Ekonomi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Setara
7	Bulukumba	9.013.584,47	9.357,11	3,81	
8	Luwu	10.449.750,24	11.044,67	5,69	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Grafik 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini dominan digerakkan oleh lapangan usaha pertanian, dapat dilihat dari kontribusinya terhadap struktur ekonomi daerah yang hampir sepertiga dari total nilai tambah barang dan jasa lima tahun terakhir. Lebih spesifik, nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak disumbang oleh komoditas tanaman pangan yaitu padi, sebab hampir semua masyarakat mengusahakan komoditas ini dan seringkali disebut sebagai komoditas andalan. Namun setelah puluhan tahun mengambil peran penting terhadap pembentukan nilai tambah, ada fenomena menarik terkait sektor pertanian beberapa tahun terakhir. Lapangan usaha pertanian mulai menunjukkan tanda “kejujuran” diperhatikan dari kontribusinya yang perlahan turun. Pada Tahun 2018, Kontribusi sektor pertanian mencapai 32,37 persen dan mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya pada tahun 2022 hanya mencapai 28,52 persen. Walaupun kontribusinya turun, belum ada satupun penanda sektor lain bisa menggantikan dominasi sektor pertanian.

Selain pertanian, ada tiga sektor lain penyangga perekonomian daerah yaitu konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan besar. Pada tahun 2018 kontribusi sektor Konstruksi mencapai 16,00 persen dan mengalami peningkatan setiap tahun sampai pada tahun 2021 mencapai 18,24 persen, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 17,72 persen. Pada tahun 2018 kontribusi industri pengolahan mencapai 13,64 persen namun juga mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya sektor pertanian

hingga akhirnya pada tahun 2021 mencapai 13,61 persen, tetapi pada tahun 2022 menalami kenaikan menjadi 14,52 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan mencapai 9,84 persen dan mengalami peningkatan setiap tahun sampai akhirnya pada tahun 2022 mencapai 10,46 persen. Meskipun tiga sektor ini berkontribusi cukup besar terhadap ekonomi Sidenreng Rappang, namun belum terlihat sinyal salah satunya berpotensi menggantikan pertanian sebagai lapangan usaha andalan.

Tabel 2.4
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,37	29,80	28,65	28,75	28,52
Pertambangan dan Penggalian	4,78	4,89	5,00	5,13	5,12
Industri Pengolahan	13,64	13,56	13,47	13,61	14,52
Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	16,00	17,00	17,85	18,24	17,72
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,84	10,45	10,07	10,12	10,46
Transportasi dan Pergudangan	1,96	2,14	1,99	2,09	2,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,73	0,70	0,74	0,79
Informasi dan Komunikasi	2,38	2,59	2,92	2,88	2,84
Jasa Keuangan	3,00	2,94	3,07	3,14	3,10
Real Estate	4,04	4,05	4,10	3,95	3,86
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,90	5,08	5,10	4,52	4,16
Jasa Pendidikan	3,75	3,95	4,14	3,81	3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,53	1,69	1,74	1,62
Jasa lainnya	1,01	1,08	1,04	1,04	1,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Tabel 2.5
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,37	29,80	28,65	28,75	28,52
Pertambangan dan Penggalian	4,78	4,89	5,00	5,13	5,12
Industri Pengolahan	13,64	13,56	13,47	13,61	14,52
Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	16,00	17,00	17,85	18,24	17,72
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,84	10,45	10,07	10,12	10,46
Transportasi dan Pergudangan	1,96	2,14	1,99	2,09	2,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,73	0,70	0,74	0,79
Informasi dan Komunikasi	2,38	2,59	2,92	2,88	2,84
Jasa Keuangan	3,00	2,94	3,07	3,14	3,10
Real Estate	4,04	4,05	4,10	3,95	3,86

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,90	5,08	5,10	4,52	4,16
Jasa Pendidikan	3,75	3,95	4,14	3,81	3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,53	1,69	1,74	1,62
Jasa lainnya	1,01	1,08	1,04	1,04	1,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah sektor pertanian melambat akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahannya adalah Kabupaten Sidenreng Rappang berhadapan dengan fenomena kedua, yaitu kondisi dimana nilai tambah lapangan usaha pertanian melambat, bahkan mengalami kontraksi.

Setidaknya ada dua penyebab penurunan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, pertama, masih banyak lahan pertanian sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki irigasi sama sekali, sehingga mengandalkan musim hujan untuk mengairi lahan mereka. Faktor kedua adalah kekeringan panjang (El Nino) di Sulawesi Selatan. Dua faktor tersebut mengancam usaha pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan akan bertambah parah jika pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang lebih strategis, terbukti dari penurunan signifikan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,04	-1,38	-4,01	5,38	4,00
Pertambangan dan Penggalian	9,32	9,10	2,77	9,84	5,98
Industri Pengolahan	1,10	3,72	-1,70	7,13	12,17
Pengadaan Listrik, Gas	6,94	8,09	5,31	10,85	9,09
Pengadaan Air	8,44	1,33	2,14	3,64	7,12
Konstruksi	8,40	8,42	3,16	6,31	0,32
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,12	8,35	-2,67	6,77	7,27
Transportasi dan Pergudangan	13,82	15,13	-8,55	6,21	11,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,49	17,56	-4,63	11,34	11,90
Informasi dan Komunikasi	11,75	12,10	10,40	6,26	5,11
Jasa Keuangan	3,78	1,60	5,75	6,82	-0,69
Real Estate	5,64	5,86	0,88	3,09	5,49
Jasa Perusahaan	11,11	13,16	-2,82	4,23	6,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,02	8,56	0,01	-4,79	-0,01
Jasa Pendidikan	9,90	9,10	3,28	2,97	2,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,97	8,80	9,03	5,9	2,23

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa lainnya	12,64	9,90	-3,21	6,77	5,92
Pertumbuhan PDRB	5,02	4,65	-0,59	5,44	4,86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Industri pengolahan merupakan sektor yang mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi tahun 2022 yaitu 12,17 persen yang diikuti oleh sector penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11.90 persen, dan sector transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan 11.56 persen. kemudian sector usaha yang mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib yang mengalami perlambatan sebesar -0.01 persen.

Perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran, terlihat masih ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Aktivitas konsumsi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan, terlihat dari perkembangan nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2018 mencapai Rp. 7.32 triliun. Aktivitas ekonomi dari konsumsi rumah tangga kembali bertambah hingga nilainya sampai Rp. 7.88 triliun, Rp. 7,96 triliun, Rp. 8,48 triliun dan masing-masing di tahun 2019, 2020, dan 2021. Hingga akhirnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 9.51 triliun. Kenaikan dan besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga menggambarkan dominasi komponen ini terhadap PDRB sisi pengeluaran.

Dari aspek pengeluaran pemerintah, kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terus bertambah hingga menghabiskan Rp. 1,30 triliun pada tahun 2018, serta Rp. 1,44 triliun di tahun 2019, dan mencapai 1,53 triliun pada tahun 2022.

Tabel 2.7
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,32	7,88	7,96	8,48	9,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,20	0,26	0,26	0,26	0,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,30	1,44	1,44	1,44	1,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,95	5,48	5,74	6,26	6,67
Perubahan Inventori	0,14	-0,03	-0,03	-0,008	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,98	-1,13	-1,26	-1,23	-1,31
Produk Domestik Regional Bruto	12,94	13,89	14,07	15,25	16,69

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tabel 2.8
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,78	5,07	5,06	5,30	5,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,12	0,17	0,153	0,151	0,163
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,75	0,82	0,797	0,823	0,838
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,08	3,249	3,352	3,523	3,611

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Perubahan Inventori	0,074	0,013	-0,015	-0,0052	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,74	-0,85	-0,95	-0,93	-0,95
Produk Domestik Regional Bruto	8,07	8,45	8,40	8,86	9,29

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadikannya sebagai komponen yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran. Selama lima tahun terakhir, komposisi PDRB disumbang lebih dari 50 persen oleh konsumsi rumah tangga, kemudian tertinggi kedua setelah itu adalah investasi. Lebih dari 1/3 PDRB pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang dikontribusi oleh investasi, dimana angkanya cenderung membesar setiap tahun.

Peran pelaku usaha dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlihat lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah. Kontribusi pengeluaran pemerintah tak mengalami banyak perubahan selama lima tahun terakhir periode 2018-2022, pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan pengeluaran hingga akhirnya mengalami penurunan tahun 2020-2022. Penurunan konsumsi pemerintah diakibatkan menurunnya transfer dana dari pusat apakah itu DAU dan DAK untuk pembangunan dan juga adanya refocussing anggaran untuk dialihkan ke penanganan covid-19. Dua komponen penentu perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan pengeluaran rumah tangga dan investasi, sehingga ketika dua komponen ini berubah, maka akan mempengaruhi perekonomian daerah.

Tabel 2.9
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,58	56,73	56,61	55,63	56,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,54	1,85	1,85	1,73	1,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,01	10,33	10,05	9,75	9,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,3	39,44	40,83	41,06	39,95
Perubahan Inventori	1,11	-0,20	-0,18	-0,06	0
Net Ekspor Barang dan Jasa	-7,54	-8,15	-9,15	-8,11	-7,86
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif, terutama pada dua komponen dominan yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga tahun 2018 sekaligus menjadi angka tertinggi selama lima tahun terakhir dengan pencapaian sebesar 6,40 persen dan di tahun 2020 merosot ke level -0,25 persen karena pada tahun 2020 mendapatkan dampak pandemic yang paling besar. Walaupun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,8 persen.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut
Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,40	4,75	6,01	-0,25	4,8
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,04	11,35	39,45	-8,25	-0,85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,80	9,05	8,38	-2,58	3,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,33	4,83	5,50	3,19	5,08
Perubahan Inventori	-27,87	14,54	-118,85	9,12	-65,13
Ekspor barang dan jasa	7,04	4,49	3,39	-0,39	9,13
Impor barang dan jasa	5,66	5,45	5,84	3,04	5,92
Pertumbuhan PDRB	7,09	5,02	4,65	-0,59	5,54

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang melambat dalam beberapa tahun terakhir perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Produktivitas sektor pertanian, sebagai sektor andalan, tidak banyak mengalami perubahan, bahkan cenderung turun. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sampai pada titik optimum, tapi pemerintah daerah harus siap dengan kondisi tersebut. Jika benar, kapasitas produksi lapangan usaha pertanian sudah sampai titik optimum, maka perlu mengidentifikasi sumber pertumbuhan baru.

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari setengah PDRB pengeluaran tumbuh lambat, walau secara absolut nilainya terus meningkat. Secara umum, lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa disebabkan oleh penurunan daya beli akibat dari tingginya inflasi atau faktor kedua, penurunan pendapatan rumah tangga. Serupa dengan konsumsi rumah tangga, investasi Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan intervensi pemerintah daerah, sebab laju pertumbuhannya juga melambat.

2.1.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren fluktuatif. Masyarakat menikmati standar hidup lebih tinggi di tahun 2018 karena rata-rata setiap satu penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menikmati kue ekonomi sebesar Rp. 43,25 juta per tahun. Pada tahun 2019, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp. 46,49 juta, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp 44,12 juta dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 47,19 Juta per orang per tahun dan meningkat pula pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 51 juta per orang per tahun.

Tabel 2.11
PDRB Per Kapita dan PDB per kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan,
Dan Nasional Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sidenreng Rappang	Juta	43,25	46,49	44,12	47,19	51,00
Sulawesi Selatan	Juta	52,64	57,18	55,68	59,65	65,59
Nasional	Juta	56,00	59,30	57,29	62,26	71,03

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 51,00 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah. Bila dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 yang senilai 48,76 juta rupiah, capaian tahun 2022 telah mencapai target.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan Kabupaten Luwu Utara, Sinjai, Maros, Luwu, Bone, Kepulauan Selayar, dan Kota Palopo.

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Dan PDB Per Kapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulatan.
Dan Nasional Tahun 2018-2022(Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	2021	2022	Pertumbuhan PDRB ADHK 2022	Rata2 pertumbuhan PDRB Per kapita ADHK
1	Luwu Utara	44,33	48,96	0,10	0,111
2	Kota Palopo	46,52	51,18	0,10	
3	Sinjai	47,05	51,29	0,09	
4	Sidenreng Rappang	47,19	51,00	0,08	
5	Maros	47,88	58,31	0,22	
6	Luwu	48,55	54,03	0,11	
7	Bone	48,80	53,67	0,10	
8	Kepulauan Selayar	49,54	53,76	0,09	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, diolah; 2023

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah salah satu permasalahan makro ekonomi daerah, selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tentang pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pelambatan dalam lima tahun terakhir, sementara inflasi nampak berhasil dikendalikan. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka, selama lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 4.70 persen menjadi 5.91 persen ditahun 2020 akibat adanya pandemic *covid-19*, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 4.93 dan 3.56 persen.

Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata perubahan tingkat pengangguran terbuka daerah setara, perubahan TPT Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 ke 2022 lebih rendah dibanding capaian rata-rata daerah setara dan masih lebih rendah juga dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Tabel 2.13
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
Dan Nasional 2018-2022 (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sidenreng Rappang	4,70	4,75	5,91	4,93	3,56
Provinsi Sul-Sel	5,34	4,62	6,31	5,72	4,51
Nasional	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2023

Tabel 2.14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara (%)

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	2021	2022	Perubahan TPT	Rata2 Perubahan TPT Daerah Setara
Sidenreng Rappang	4,93	3,56	-1,37	-1,03
Luwu Timur	4,96	4,48	-0,48	
Pangkajene Dan Kepulauan	5,86	5,23	-0,63	
Maros	6,30	5,04	-1,26	
Kota Parepare	6,72	5,6	-1,12	
Barru	6,74	5,32	-1,42	
Kota Palopo	8,83	8,2	-0,63	
Kota Makassar	13,18	11,82	-1,36	

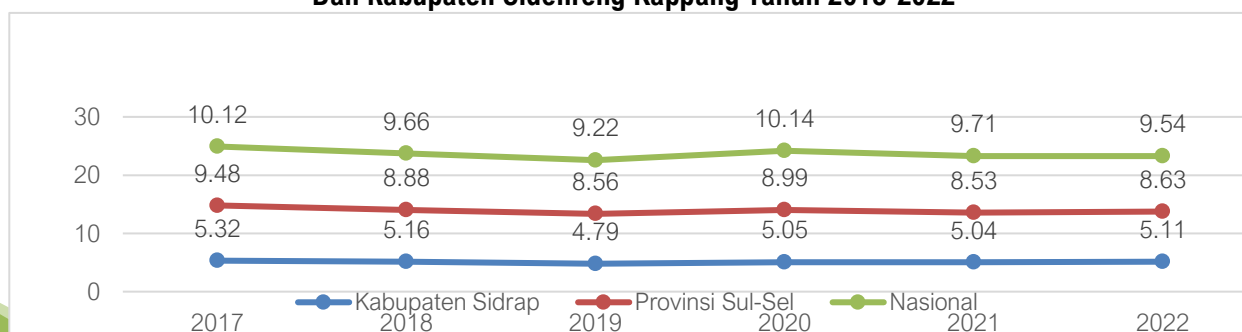
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

2.1.4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama beberapa tahun terakhir, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepertinya memperlihatkan kinerja cukup baik, dinilai dari penurunan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Tahun 2018, angka kemiskinan mencapai 5,16%. Kemudian turun pada tahun 2019 sebesar 4,79% dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 sebesar 5,11%. Angka terendah pada tahun 2019 mencapai 4,79%. Akibat adanya pandemic *COVID-19*, pada tahun 2020 dan 2021 sampai dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 signifikan mengalami kenaikan. Kenaikan angka kemiskinan merupakan Efek pandemi *COVID-19* menjadi faktor utama terjadinya peningkatan masyarakat miskin karena banyaknya penduduk kehilangan pekerjaan dan adanya pembatasan sosial dalam mencari nafkah. Presentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mencapai target Bila dibandingkan dengan target RKPD 2022, yang senilai 4,11 persen.

Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, angka kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih baik dalam kurun waktu 2018-2022. Di tahun 2018 terdapat 9,48 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dan 10,12 persen di Indonesia. Angka ini mengalami tren penurunan hingga mencapai 8,63 persen di tahun 2022 untuk provinsi dan 9,54 persen untuk nasional.

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023

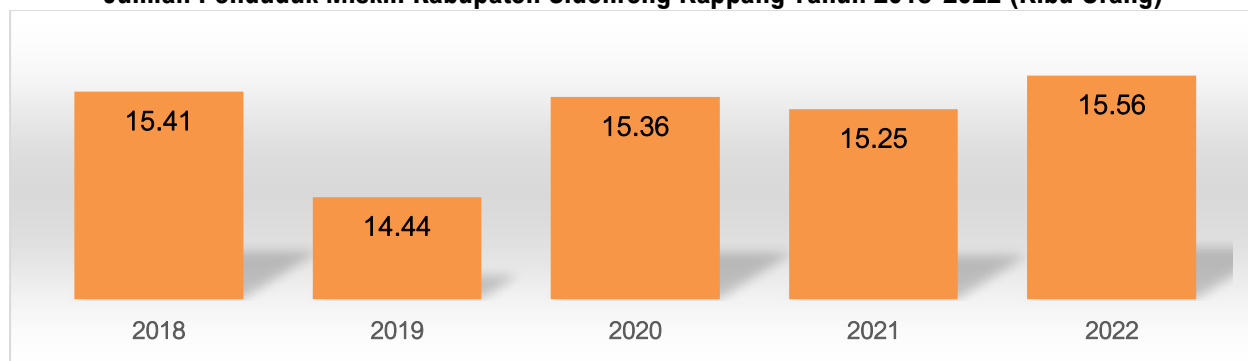
Bila dibandingkan dengan perubahan rata-rata daerah setara, perubahan angka kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkurang sebesar 0,07 persen lebih besar dibanding dengan perubahan rata-rata daerah setara sebesar 0,055 persen.

Tabel 2.15
Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara

Kabupaten/Kota	2021	2022	Perubahan % Penduduk Miskin	Rata-Rata Perubahan % Penduduk Miskin Daerah Setara
Kota Makassar	4,82	4,58	-0.24	0,055
Sidenreng Rappang	5,04	5,11	0,07	
Kota Parepare	5,40	5,41	0,01	
Wajo	6,46	6,57	0.11	
Luwu Timur	6,94	6,81	-0.13	
Bulukumba	7,43	7,39	-0.04	
Soppeng	7,53	7,49	-0.04	
Gowa	7,54	7,36	-0.18	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah;2022

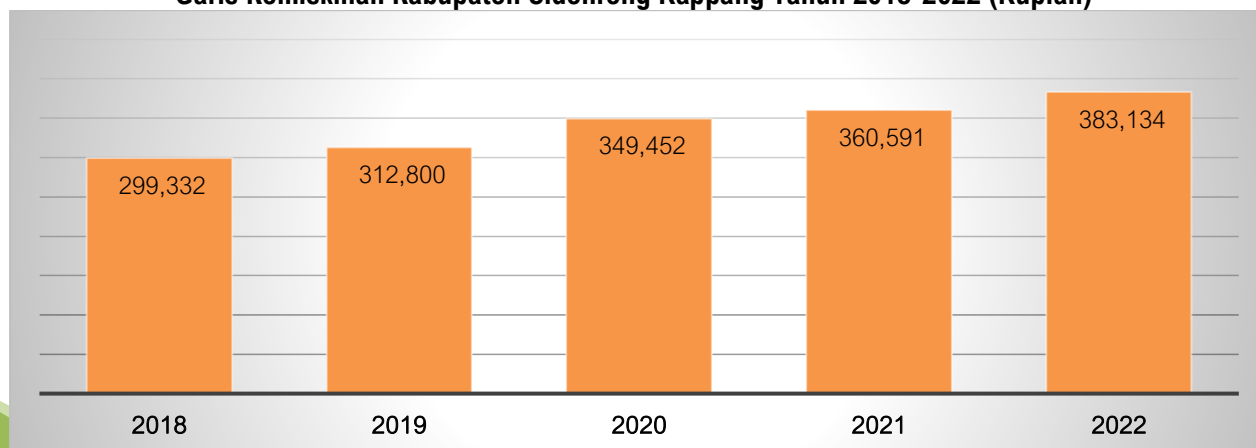
Grafik 2.3
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Ribu Orang)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Dari segi jumlah, penduduk miskin di kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami penurunan dari 15,7 ribu jiwa di tahun 2017 menjadi 15, 25 ribu jiwa di tahun 2021.

Grafik 2.4
Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

2.1.5. Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akseleratif, seringkali pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa atau kelompok mana yang menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren fluktuatif. Di tahun 2018, indeks gini menyentuh angka 0,340 poin, hanya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 0,349 dan 0,385 di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan menjadi 0,354 poin. Bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,377 dan nasional yang berada pada angka 0,381 poin, ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik. Target angka ketimpangan RKPD 2022 yang diukur dengan gini rasio tahun 2022 senilai 0,335 tidak berhasil dicapai seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.16
Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	Capaian 2022
Sidenreng Rappang	Poin	0,340	0,284	0,349	0,358	0,354
Sulawesi Selatan	Poin	0,397	0,389	0,389	0,382	0,377
Nasional	Poin	0,404	0,391	0,389	0,381	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik; 2023

Bila dibandingkan dengan capaian daerah setara, perubahan rasio gini di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata rasio gini daerah setara. Ini berarti ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan di Kabupaten Bantaeng, Luwu Utara, Jeneponto, Selayar, Gowa, Kota Palopo, dan Kabupaten Barru.

Tabel 2.17
Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	Perubahan Rasio Gini	Rata2 Perubahan Daerah Setara
1	Bantaeng	0,332	0,320	-0,012	-0,00013
2	Luwu Utara	0,341	0,349	0,008	
3	Jeneponto	0,353	0,338	-0,015	
4	Kepulauan Selayar	0,354	0,350	-0,004	
5	Gowa	0,358	0,364	0,006	
6	Sidenreng Rappang	0,358	0,354	-0,004	
7	Kota Palopo	0,358	0,371	0,013	
8	Barru	0,359	0,366	0,007	

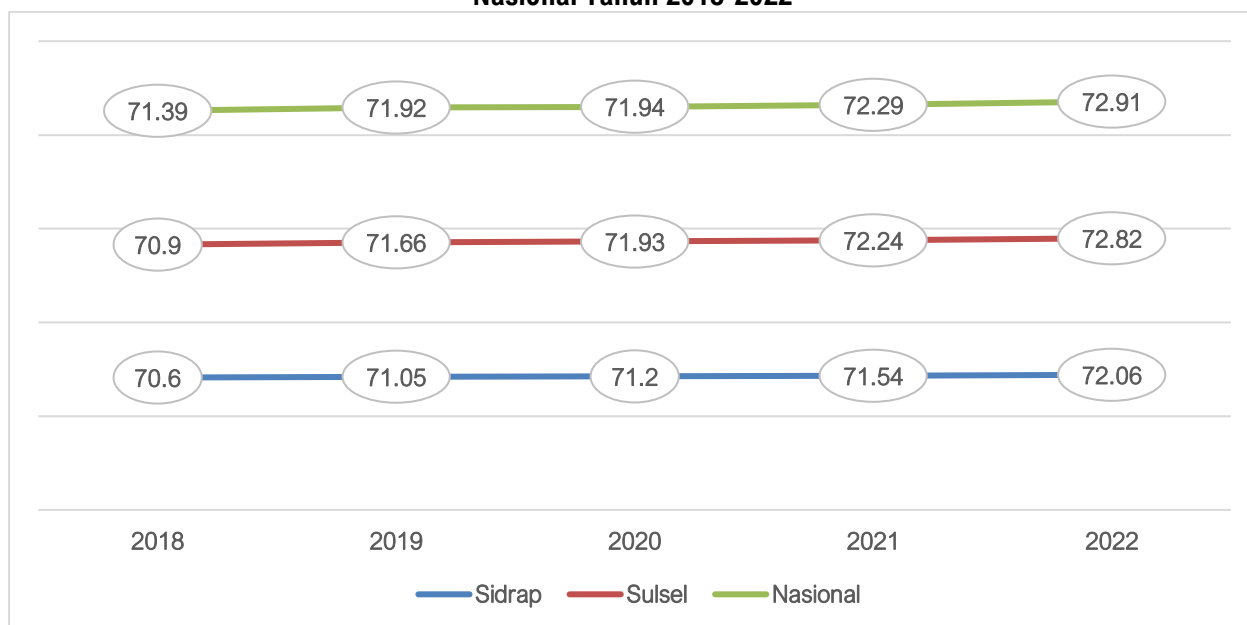
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai IPM yang konsisten meningkat. Status IPM Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir tahun 2018-2022 sudah mencapai level tinggi

dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 IPM masih di angka 70.6 dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya sampai pada tahun 2022 mampu mencapai angka 72.06. Bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pertumbuhan IPM daerah setara, yang nilainya sebesar 0,65 persen, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang terbaik ketiga setelah Kota Makassar dan Luwu Timur, dan juga bila dibandingkan dengan target RKPD 2022 yang nilainya sebesar 71.73 poin, maka capaian tahun 2022 telah menapai target.

Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Tabel 2.18
Perbandingan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Setara (%)

No.	Kabupaten/ Kota	IPM 2021	IPM 2022	Pertumbuhan	Rata-rata Pertumbuhan IPM pada daerah setara
1	Barru	71,13	71,53	0,56	0,65
2	Pinrang	71,45	71,97	0,73	
3	Sidenreng Rappang	71,54	72,06	0,73	
4	Enrekang	72,91	73,39	0,66	
5	Luwu Timur	73,34	73,92	0,79	
6	Kota Parepare	78,21	78,54	0,42	
7	Kota Palopo	78,38	78,91	0,68	
8	Kota Makassar	72,24	72,82	0,80	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah; 2023

Posisi IPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicapai saat ini tentu tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

2.2. Evaluasi Capaian RKPD

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan RPJMD dan RKPD dalam menghitung capaian pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 terdapat 16 indikator dengan capaian “Sangat Tinggi” antara $91\% \leq 100\%$ dengan persentase ketercapaian dari keseluruhan IKU mencapai 76.20 persen yaitu: (1) Indeks pembangunan manusia, (2) Indeks pendidikan, (3) Indeks Kesehatan, (4) Indeks pemberdayaan gender, (5) PDRB Perkapita, (6) Gini ratio, (7) Tingkat pengangguran terbuka, (8) Nilai investasi, (9) Pertumbuhan PDRB infrastruktur, (10) Indeks layanan infrastruktur, (11) Indeks kualitas lingkungan hidup, (12) Indeks kepuasan masyarakat, (13) Indeks SPBE, (14) Indeks desa membangun, (15) Indeks Persentase desa maju dan mandiri, dan (16) Angka kriminalitas yang tertangani. Indikator dengan capaian $76\% \leq 90\%$ dengan kriteria “Tinggi” sebanyak 4 indikator dengan tingkat ketercapaian 19.05 persen yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Angka kemiskinan, (3) Indeks reformasi birokrasi, dan (4) Nilai Sakip. Satu indikator dengan capaian “Sangat Rendah” $\leq 50\%$ adalah angka kriminalitas dengan capaian Tahun 2022 sebesar 621 kasus dari target 347 kasus, meskipun angka kriminalitas mengalami kenaikan namun angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan dengan capaian 98.85 persen. Angka kriminalitas dengan capaian sangat rendah dipengaruhi diantaranya oleh: ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi, kondisi sosial-ekonomi seperti kurangnya pendidikan masyarakat dan angka kemiskinan yang bertambah. Upaya pemerintah daerah dalam mengurangi angka kriminalitas dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban melalui pendirian pos siskamling, pemenuhan sarana dan prasarana pos siskamling, peningkatan kemitraan antara aparat polisi pamong praja dengan penegak hukum dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta peningkatan pelaksanaan sosialisasi penegakan perda dan perkara kepada masyarakat.

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Utama RKPd Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Tahun 2022						
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian			
Visi " Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera"										
Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat										
Misi 1	Tujuan 1	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.05	71.94	72.06	100.17	ST
		Sasaran 1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	2	Indeks Pendidikan	Indeks	62.02	63.07	62.94	99.79	ST
		Sasaran 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3	Indeks Kesehatan	Indeks	76.29	77.22	77.55	100.43	ST
		Sasaran 3 Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembangunan	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56.86	58.84	53.84	91.5	ST
Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										
Misi 2	Tujuan 2	Meningkatkan pendapatan masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	46.01	48.76	51	104.59	ST
		Sasaran 4 Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.65	5.86-7.48	4.86	72.86	T
		Sasaran 5 Menurunnya tingkat kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	%	4.79	4.24	5.11	79.48	T
		Sasaran 6 Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	8	Gini Ratio	Poin	0.284	0.34	0.354	95.88	ST

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Tahun 2022						
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian			
Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru												
Misi 3	Tujuan 3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja		9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.75	4.79	3.56	125.68	ST	
		Sasaran 7	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah		10	Nilai Investasi	Rp. Triliun	3,235.98	3,780.68	4,468.56	118,19	ST
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan												
Misi 4	Tujuan 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan		11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	9.21	8.14-8.96	9.06	105.96	ST	
		Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas		12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	66.75	76.99	76.02	98.74	ST
		Sasaran 9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.53	66.91	66.42	99.27	ST
Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan Electronic Governance												
Misi 5	Tujuan 5	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	30.02	62.87	54.8	87.16	T	
		Sasaran 10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah		15	Nilai SAKIP	Poin	55.33	71.46	63.53	88.9	T

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2019	Tahun 2022				
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	
	Sasaran 11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	74.58	84.32	78.85	93.51	ST
	Sasaran 12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.91	2.38	2.32	97.48	ST
Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri										
Misi 6	Tujuan 6	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6479	0.7572	0.7825	103.34	ST
		Sasaran 13	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	%	8.82	75	83.82	111.76
Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif										
Misi 7	Tujuan 7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya	20	Angka Kriminalitas	Kasus	474	347	621	21.04	SR
		Sasaran 14	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	73.63	74.93	74.07	98.85

Sumber Data: Dokumen Evaluasi RKPd Tahun 2022.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Triwulan Ke II

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dengan format sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan RKPD, maka hasil evaluasi Renja PD yang disampaikan oleh PD dianalisis dan diolah. Gambaran yang diinformasikan dalam laporan evaluasi hasil ini adalah pagu dan realisasi, pagu dan realisasi RKPD Triwulan II Tahun 2023.

2.3.1. Capaian Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan II Tahun 2022

Tingkat capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan II Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.20
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Pagu APBD (Rp.)	Realisasi s.d Triwulan II (Rp.)	Persentase	
				Kinerja (%)	Keuangan (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	370,730,732,000	116,469,318,404	12.26	31.42
2	Rsud Nene Mallomo	68,779,429,000	12,822,345,694	12.50	18.64
3	Rsud Arifin Numang	48,120,539,000	5,813,189,869	25.00	12.08
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	143,740,446,000	30,872,280,385	9.38	21.48
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	12,771,757,000	3,439,832,223	27.50	26.93
6	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	114,311,981,000	1,548,253,477	40.35	1.35
7	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8,495,503,000	3,733,311,287	50.00	43.94
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,622,014,000	750,520,807	29.39	28.62
9	Dinas Sosial	3,161,025,000	930,384,310	25.00	29.43
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	13,398,649,000	2,784,932,540	18.50	20.79
11	Dinas Lingkungan Hidup	13,973,232,000	3,797,866,866	11.00	27.18
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3,314,956,000	1,107,610,843	12.50	33.41
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4,798,357,000	71,082,000	50.00	1.48
14	Dinas Perhubungan	12,608,608,000	3,209,327,470	25.00	25.45
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6,350,526,000	2,419,565,175	29.06	38.10
16	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14,414,496,000	326,962,806	12.36	2.27
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,101,183,000	954,111,334	13.67	30.77
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	10,898,047,000	1,520,987,557	13.34	13.96
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3,285,982,000	591,000,000	65.43	17.99
20	Dinas Peternakan Dan Perikanan	9,665,328,000	3,857,542,157	14.62	39.91
21	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	22,765,056,000	1,521,919,223	18.65	6.69
22	Sekretariat Daerah	25,926,547,000	8,213,923,808	5.56	31.68
23	Sekretariat DPRD	46,501,256,000	3,701,259,899	18.54	7.96
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	7,542,050,000	2,203,935,918	50.31	29.22
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	184,105,782,000	1,096,432,345		0.60
26	Badan Pendapatan Daerah	21,058,674,000	3,807,076,521	28.86	18.08

No.	Perangkat Daerah	Pagu APBD (Rp.)	Realisasi s.d Triwulan II (Rp.)	Persentase	
				Kinerja (%)	Keuangan (%)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,803,948,000	1,428,607,809	17.54	29.74
28	Inspektorat	10,000,249,000	1,952,383,735	50.00	19.52
29	Kecamatan Panca Lautang	3,258,833,000	562,523,135	12.88	17.26
30	Kecamatan Tellu Limpoe	5,203,073,000	353,350,605	16.76	6.79
31	Kecamatan Watang Pulu	5,484,230,000	238,152,457	26.39	4.34
32	Kecamatan Maritengngae	7,684,244,000	1,338,200,550	15.00	17.41
33	Kecamatan Wattang Sidenreng	3,362,922,000	647,065,762	12.50	19.24
34	Kecamatan Dua Pitue	3,104,144,000	822,606,890	17.40	26.50
35	Kecamatan Pitu Riawa	2,830,899,000	1,016,909,915	24.09	35.92
36	Kecamatan Pitu Riase	2,581,835,000	736,341,117	14.25	28.52
37	Kecamatan Baranti	5,347,984,000	673,621,090	12.50	12.60
38	Kecamatan Panca Rijang	5,217,530,000	1,446,908,401	23.75	27.73
39	Kecamatan Kulo	1,580,256,000	490,935,238	12.50	31.07
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4,458,644,000	1,024,811,483	13.67	22.98
TOTAL		1,241,360,946,000	230,297,391,105	22.77	18.55

Sumber: Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan APBD pada triwulan II Tahun 2023 adalah pelaksanaan APBD pergeseran anggaran dengan total belanja APBD Rp. 1.241.360.946.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah Rp. 230.297.391.105, dengan capaian rata-rata realisasi kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 22.77% dan rata-rata realisasi keuangan sebesar 18.55%. Berdasarkan kelompok kategori capaian kinerja dan pendanaan berdasarkan tingkat capaian yang diharapkan pada triwulan II yaitu: (1) Rendah apabila capaian antara 0 - 20%, kategori sedang apabila lebih dari >20 - 43%, dan (3) kategori Tinggi apabila capaian lebih dari 43%, maka capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2023 berkategori “sedang” dan keuangan berkategori “rendah”. Adapun penyebab masih rendahnya capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2023 di antaranya adanya pergeseran anggaran pada triwulan pertama dalam rangka mengakomodir dana bagi hasil pajak rokok ke dalam APBD tahun anggaran 2023 yang mengakibatkan proses penatausahaan SIPD terhenti untuk sementara sebelum proses pergeseran APBD selesai dan adanya kebijakan penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum yang mengharuskan pemerintah kabupaten untuk menggunakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk membiayai belanja-belanja prioritas kepala daerah dan belanja pembangunan lainnya yang berasal dari sumber pendanaan pendapatan asli daerah yang menyebabkan kesulitan bagi pemerintah daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang tergolong kecil.

2.3.2. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 yang terakomodir di APBD Tahun 2023

Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2023 yang terakomodir di APBD Tahun 2023 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.21
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023
Yang Terakomodir di APBD Tahun 2023

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	17	75	12	20	75
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	31	121	8	31	121
3	RSUD Nene Mallomo	2	7	12	2	7	12
4	RSUD Arifin Nu'mang	3	5	7	3	5	7
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat	15	29	118	15	29	118

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	7	18	2	7	18
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	8	18	3	8	18
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	9	25	2	9	25
9	Dinas Sosial	6	12	21	6	12	21
10	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	17	37	10	17	37
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	9	15	33	9	15	38
12	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	9	18	42	9	18	61
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	16	36	10	16	39
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	17	56	4	17	56
15	Dinas Perhubungan	2	12	25	2	12	25
16	Dinas Komunikasi & Informatika	5	12	27	5	12	35
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	24	6	12	24
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7	16	27	7	16	27
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	11	27	5	14	29
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	9	15	31	9	15	31
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	12	25	7	15	28
22	Sekretariat Daerah	3	19	65	8	19	64
23	Sekretariat DPRD	2	15	48	2	18	48
24	Inspektorat	3	9	25	3	9	25
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	16	54	7	15	54
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	12	72	3	11	72
27	Badan Pendapatan Daerah	2	8	37	2	8	37
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	12	29	3	12	29
29	Panca Lautang	4	10	24	4	10	24
30	Tellu Limpoe	4	9	24	4	9	24

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
31	Watang Pulu	4	10	22	4	10	22
32	Maritengngae	4	9	25	4	9	25
33	Watang Sidenreng	4	8	21	4	8	21
34	Dua Pitue	4	9	21	4	9	21
35	Pitu Riawa	4	9	23	4	9	23
36	Pitu Riase	4	9	20	4	8	20
37	Baranti	4	9	24	4	9	24
38	Panca Rijang	4	9	21	4	9	20
39	Kulo	4	7	16	4	7	16
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	25	6	11	25
TOTAL		202	498	1401	214	507	1.439

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah program RKPD yang dilaksanakan pada APBD Tahun 2023 sebanyak 202 program, kegiatan sebanyak 498 dan sub kegiatan sebanyak 1.401 sedangkan jumlah indikator berturut-turut 214, 507 dan 1.439. Terdapat perbedaan jumlah antara jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah indikator yang disebabkan karena terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki lebih dari satu indikator (belum menggunakan Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021).

2.3.3. Evaluasi Capaian Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Evaluasi terhadap capaian kinerja dan pendanaan keluaran program, kegiatan dan sub kegiatan memberikan gambaran tentang capaian kinerja pendanaan pada tingkatan program (*outcome*), kegiatan (*intermediate outcome*) dan sub kegiatan (*output*) di perangkat daerah berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yang dikelompokkan menjadi tiga (3) tingkatan : (1) Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori (2) Sedang Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari 20% - 45% dan kategori (3) Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 45%.

Tabel 2.22
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1	6	1	17	15	1	1	75	60	5	10
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	3	4	1	31	24	6	1	121	104	11	6
3	RSUD Nene Mallomo	2	1	0	1	7	2	4	1	12	5	4	3
4	RSUD Arifin Numang	3	2	0	1	5	2	1	2	7	4	1	2
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	15	8	4	3	29	19	1	9	118	101	7	10
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	0	1	1	7	3	3	1	18	5	8	5
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	0	1	2	8	1	1	6	18	7	0	11
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	1	1	9	3	3	3	25	12	3	10
9	Dinas Sosial	6	4	0	2	12	8	3	1	21	12	5	4
10	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	7	0	3	17	9	6	2	37	25	4	8
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	9	1	2	6	15	1	10	4	33	12	7	14
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	9	7	1	1	18	11	2	5	42	29	4	9
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	5	3	2	16	7	5	4	36	11	11	14
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	1	1	2	17	7	1	9	56	36	3	17
15	Dinas Perhubungan	2	0	0	2	12	6	4	2	25	13	9	3
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	5	1	2	2	12	11	0	1	27	10	2	15
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	2	1	3	12	5	1	6	24	10	2	12
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7	2	2	3	16	14	2	0	27	19	5	3

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian kinerja		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	1	3	1	11	3	4	4	27	13	1	13
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	9	1	2	6	15	2	2	11	31	15	2	14
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	4	2	1	12	9	0	3	25	15	1	9
22	Sekretariat Daerah	3	0	2	1	19	5	7	7	65	35	7	23
23	Sekretariat DPRD	2	0	1	1	15	15	0	0	48	30	3	15
24	Inspektorat	3	2	0	1	9	5	4	0	25	12	6	7
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	4	0	1	3	16	9	6	1	54	3	6	45
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	0	2	1	12	1	9	2	72	19	20	33
27	Badan Pendapatan Daerah	2	1	0	1	8	1	3	4	37	16	6	15
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	1	2	12	4	6	2	29	13	8	8
29	Kecamatan Panca Lautang	4	0	0	4	10	5	3	2	24	15	2	7
30	Kecamatan Tellu Limpoe	4	0	0	4	9	2	6	1	24	12	6	6
31	Kecamatan Watang Pulu	4	0	1	2	10	5	2	3	22	10	1	11
32	Kecamatan Maritengngae	4	2	0	2	9	1	3	5	25	6	10	9
33	Kecamatan Watang Sidenreng	4	2	1	1	8	2	3	3	21	7	3	11
34	Kecamatan Dua Pitue	4	0	3	1	9	1	7	1	21	12	1	8
35	Kecamatan Pitu Riawa	4	0	3	1	9	4	1	4	23	13	5	5
36	Kecamatan Pitu Riase	4	2	1	1	9	2	4	3	20	12	4	4
37	Kecamatan Baranti	4	0	3	1	9	1	6	2	24	15	7	2
38	Kecamatan Panca Rijang	4	0	2	2	9	2	6	1	21	13	6	2
39	Kecamatan Kulo	4	0	3	1	7	3	3	1	16	7	6	3
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	2	1	3	11	3	3	5	25	7	1	17
TOTAL		202	62	61	78	498	233	142	123	1401	775	203	423

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.23
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 - 43%	>43%		0 - 20%	>20 - 43%	>43%		0 - 20%	>20 - 43%	>43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	5	2	1	17	9	6	2	75	53	15	7
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	8	-	-	31	21	1	9	121	111	4	7
3	RSUD Nene Mallomo	2	1	-	1	7	6	-	1	12	5	3	4
4	RSUD Arifin Numang	3	3	-	-	5	4	1	-	7	3	1	3
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	15	15	-	-	29	29	-	-	118	118	-	-
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	-	1	1	7	1	2	4	18	8	3	7
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	-	2	1	8	2	2	4	18	8	5	5
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	1	1	-	9	6	3	-	25	16	8	1
9	Dinas Sosial	6	4	-	2	12	6	3	3	21	9	4	8
10	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	7	2	1	17	9	4	4	37	23	7	7
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	9	3	3	3	15	7	5	3	33	16	9	8
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	9	7	-	2	18	11	3	4	42	26	5	11
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	6	2	2	16	7	3	6	36	10	10	16
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	1	2	1	17	10	4	3	56	43	9	4
15	Dinas Perhubungan	2	-	-	2	12	3	1	8	25	7	5	13
16	Dinas Komunikasi dan Informasi	5	1	2	2	12	3	4	5	27	5	11	11
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	2	2	2	12	4	4	4	24	10	6	8
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7	2	2	3	16	11	1	4	27	19	3	5

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 - 43%	>43%		0 - 20%	>20 - 43%	>43%		0 - 20%	>20 - 43%	>43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	2	3	-	11	5	3	3	27	13	6	8
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	9	6	2	1	15	10	4	1	31	21	6	4
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	4	2	1	12	5	5	2	25	14	7	4
22	Sekretariat Daerah	3	-	3	-	19	5	8	6	65	27	23	15
23	Sekretariat DPRD	2	-	2	-	15	7	8	-	48	30	12	6
24	Inspektorat	3	2	1	-	9	8	1	-	25	13	10	2
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	4	-	2	2	16	3	8	5	54	20	12	22
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	-	3	-	12	3	6	2	72	32	23	17
27	Badan Pendapatan Daerah	2	1	1	-	8	3	4	1	37	18	15	4
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	1	-	2	12	4	5	3	29	15	11	3
29	Kecamatan Panca Lautang	4	2	-	2	10	6	2	2	24	14	7	3
30	Kecamatan Tellu Limpoe	4	2	1	1	9	6	2	1	24	16	4	4
31	Kecamatan Watang Pulu	4	2	-	2	10	5	-	5	22	10	1	11
32	Kecamatan Maritengngae	4	2	1	1	9	3	2	4	25	11	7	7
33	Kecamatan Watang Sidenreng	4	2	2	-	8	3	4	1	21	9	9	3
34	Kecamatan Dua Pitue	4	2	1	1	9	4	2	3	21	12	1	8
35	Kecamatan Pitu Riawa	4	3	1	-	9	8	1	-	23	14	7	2
36	Kecamatan Pitu Riase	4	3	-	1	9	8	-	1	20	17	2	1
37	Kecamatan Baranti	4	4	-	-	9	9	-	-	24	24	-	-
38	Kecamatan Panca Rijang	4	3	1	-	9	8	1	-	21	18	3	-
39	Kecamatan Kulo	4	3	-	1	7	4	2	1	16	7	5	4
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	2	3	1	11	3	4	4	25	6	7	12
TOTAL		202	112	50	40	498	269	119	109	1,401	851	286	265

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.21 dan tabel 2.22 di atas dapat digambarkan capaian kinerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pada tabel rekapitulasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan menggambarkan pelaksanaan program dengan capaian 0-20% sebanyak 62 program atau sekitar 30% dari total program, capaian > 20-43% sebanyak 61 program dengan persentase 30% dan capaian di atas 43% sebanyak 78 program dengan persentase 38%. Berdasarkan capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja program sampai dengan triwulan II Tahun 2022 terbilang cukup tinggi karena sekitar 68% capaian program sudah lebih dari 20%. Sedangkan capaian kegiatan menggambarkan jumlah kegiatan dengan capaian kurang dari 20% sebanyak 233, di atas 20%-43% sebanyak 142 dan di atas 43% sebanyak 123 kegiatan, demikian juga dengan sub kegiatan di bawah 20% sebanyak 775, antara 20-43% sebanyak 203 dan di atas 43% sebanyak 423.
2. Pada tabel rekapitulasi capaian pendanaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan menggambarkan bahwa capaian pendanaan pada program bahwa lebih dari 55% program masih mempunyai capaian di bawah 20%, sedangkan berturut-turut capaian antara 20-43% dan di atas 43% adalah 24% dan 19%. Sama halnya pada capaian kegiatan sekitar 54% kegiatan masih mempunyai capaian di bawah 20%, antara 20-43% sekitar 23% dan di atas 43% sebanyak 21%. Untuk capaian sub kegiatan berturut-turut di bawah 20%, antara 20-43%, dan di atas 43% adalah 60%, 20% dan 18%.

2.3.4. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 berdasarkan Urusan

Realisasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan urusan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari 6 bidang urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Urusan Sosial, dari 6 urusan tersebut terdapat 5 urusan dengan capaian kinerja sedang yaitu antara 20-43%, sedangkan capaian keuangan 3 urusan dengan capaian sedang dan 3 urusan dengan capaian rendah;
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat 18 urusan dengan capaian kinerja dua belas urusan dengan predikat sedang, dua urusan dengan predikat tinggi dan 4 urusan dengan predikat rendah
3. Pada urusan pemerintahan pilihan dengan enam urusan bidang terdapat dua urusan dengan capaian tinggi yaitu urusan bidang pariwisata dan pertanian, tiga urusan dengan capaian sedang dan satu urusan dengan capaian rendah yaitu urusan bidang perindustrian;
4. Pada urusan pendukung pemerintahan terdapat dua urusan bidang yaitu kesekretariatan DPRD dan Sekretriati Daerah dengan capaian tinggi dan sedang

5. Pada urusan penunjang dengan lima bidang urusan dengan capaian tertinggi yaitu bidang pendidikan dan pelatihan dengan capaian 87.30%. Hal tersebut dikarenakan telah dilaksnakannya pelatihan dasar bagi CASN dan juga evaluasi jabatan bagi ASN pratama pada triwulan I dan II.
6. Pada urusan pengawasan, urusan kewilayahan dan urusan kesatuan bangda dan politik masing-masing dengan capaian kinerja sedang.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja RKPd berdasarkan Urusan

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran				Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPd			
		RKPd	APBD	Realisasi	%	K (%)	K	Rp	
1	2	3		4		5			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	359,774,318,100	370,062,336,500	116,469,318,404	31.47	12.26	R	S
1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	254,682,953,154	254,950,439,036	74,566,906,464	29.25	15.63	R	S
1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	111,377,806,000	126,566,297,800	4,988,085,700	3.94	40.35	S	R
1	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8,610,000,000	317,440,000	0	-	40.35	S	R
1	5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13,994,720,000	11,117,517,000	4,483,832,094	40.33	39.70	S	S
1	6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	3,829,687,000	3,161,025,000	930,384,310	29.43	25.00	S	S
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1,519,702,000	1,469,138,000	326,962,806	22.26	12.36	R	S
2	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	435,000,000	597,000,000	71,082,000	11.91	50.00	T	R
2	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	12,253,313,000	10,950,036,000	2,784,932,540	25.43	18.50	R	S
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	249,200,000	200,000,200	0	-	40.35	S	
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	19,186,954,000	13,973,232,000	3,797,866,866	27.18	11.00	R	S
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,836,288,000	3,314,956,000	1,107,610,843	33.41	12.50	R	S
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4,092,378,000	4,201,357,000	1,208,610,557	28.77	50.00	T	S
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4,301,046,846	5,689,974,964	434,502,500	7.64	9.38	R	R

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran				Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPd			
		RKPd	APBD	Realisasi	%	K (%)	K	Rp	
1	2	3		4		5			
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3,723,790,000	12,608,608,000	3,209,327,470	25.45	25.00	S	S
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	6,781,059,300	6,199,969,000	2,419,565,175	39.03	29.06	S	S
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	13,245,407,000	12,930,358,000	1,352,392,528	10.46	50.00	T	R
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3,021,047,000	3,101,183,000	954,111,334	30.77	13.67	R	S
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	8,692,781,000	7,061,027,600	1,520,987,557	21.54	13.34	R	S
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	170,957,500	17,001,000	5,479,000	32.23	29.06	S	S
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	79,835,200	133,556,000	24,310,000	18.20	29.06	S	R
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	145,000,000	668,395,500	12,350,000	1.85	12.26	R	R
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	724,378,600	832,188,000	591,000,000	71.02	65.43	T	T
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2,815,047,400	2,453,794,000	717,557,921	29.24	65.43	T	S
3	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	9,342,778,000	8,764,954,000	3,857,542,157	44.01	14.62	R	S
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	18,942,635,000	3,837,019,400	0	-	13.34	R	R
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	11,052,138,000	3,348,987,000	0	-	18.50	R	R
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7,031,805,000	3,749,204,000	1,521,919,223	40.59	18.65	R	S
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	19,428,827,000	19,015,852,000	0	-	18.65	R	R
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	394,163,000	15,000,000	0	-	12.36	R	R

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran				Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja RKPd		
		RKPd	APBD	Realisasi	%	K (%)	K	Rp
1	2	3		4		5		
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan							
4 1	Sekretariat Daerah	35,063,860,800	25,926,547,000	8,213,923,808	31.68	5.56	R	S
4 2	Sekretariat DPRD	38,591,839,000	46,501,256,000	3,701,259,899	7.96	18.54	R	R
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5 1	Perencanaan	8,633,931,100	7,172,550,000	2,203,935,918	30.73	50.31	T	S
5 2	Keuangan	185,281,115,000	205,164,456,000	4,903,508,866	2.39	28.86	S	R
5 3	Kepegawaian	4,720,883,000	4,425,323,000	1,428,607,809	32.28	17.54	R	S
5 4	Pendidikan Dan Pelatihan	1,010,579,000	378,625,000	0	-	17.54	R	R
5 5	Penelitian Dan Pengembangan	729,092,100	369,500,000	45,185,754	12.23	50.31	T	R
6	Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan							
6 1	Inspektorat Daerah	10,038,512,000	10,000,249,000	1,952,383,735	19.52	50.00	T	R
7	Unsur Kewilayahan							
7 1	Kecamatan Administrasi	48,045,394,000	45,655,950,000	9,346,808,089	20.47	16.81	R	S
8	Unsur Pemerintahan Umum							
8 1	Kesatuan Bangsa Dan Politik	4,459,144,000	4,458,644,000	1,024,811,483	22.98	13.67	R	S
	Jumlah	1,240,309,365,100	1,241,360,946,000	230,297,391,105	18.55	22.77		

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPd sampai dengan triwulan II Tahun 2023

2.3.5. Evaluasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. Legalitas Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun capaian penerapan indikator standar pelayanan minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2023 berdasarkan capaian di e-SPM Kemendagri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Capaian Indikator SPM Tahun 2022 – Triwulan II Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan II Tahun 2023
I Pendidikan				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	86%	76.71%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	87%	83.75%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	44.07%	-
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92%	69.56%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	54.87%	-
II Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83%	42.74%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96%	51.40%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99%	51.55%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82%	45.13%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99%	49.07%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	73%	44.56%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan II Tahun 2023
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	76%	48.19%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27%	29.34%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94%	81.04%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96%	79.57%
11	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	62.4%
12	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97%	48.53%
III Pekerjaan Umum				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93%	82.31%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87%	78.37%
IV Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	80.00%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	20.00%
V Trantibumlinmas				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	99.58%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	96%	41.49%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan II Tahun 2023
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	91.01%	38.86%
4	Pelayanan penyelamtn dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	92.00%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	95.78%
VI	Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	27.49%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	51.33%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	51.51%
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya glandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	54.56%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	324.00%

Sumber Data: Laporan Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2022- 2023.

2.3.6. Evaluasi Capaian Indikator SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan

Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat daerah. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.26
Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)

No	Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
	Tujuan 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	7%	4.90%	5.16%	4.78	5.05%	5.04%	5.11%	Dinas Sosial
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
2	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	75%	80%	66%	63%	67.20%	-	-	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
3	1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat		30%	13.86%	14.86%	20.82%	20.82%	27.89%	Dinkop, UKM, Nakertrans
4	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	17.12%	11.73%	525 KPM	260 KPM	305 KPM	369 KPM	17 KPM	2075 KPM	Dinas Sosial
5	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2,8 juta RT	178.594 RT	11.000 RT	7416 RT	7424 RT	8448 RT	11215 RT	10575 RT	Dinas Sosial
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro											
6	1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	70%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.70%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB

7	1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63%	63%	75%	36.70%	89%	67.10%	64.40%	100%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8	1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	85%	79.76%	77.75%	76.25%	77.63%	54.29%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat.	Meningkat	101%	95%	87.80%	85.34%	85.85%	92.42%	96.81	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10	1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat.	Meningkat	105.40%	80%	65.50%	67.68%	73.49	60.67%	62.78	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
11	1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	77.40%	77.40%	95%	83.29%	85.41%	87.09%	98%	93.03%	Dinas Duk Dan Capil
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											
12	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	39 daerah	24 Kab/Kota	13 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	10 lokasi	4 lokasi	9 lokasi	BPBD
13	1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat		3 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	4 lokasi	24 lokasi	BPBD
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 2. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
14	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun		7%	7.95%	7.65%	10.14%	7.93%	13.81%	DTPHPKP

15	2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17%	22.10%	4%	7.20%	6.88%	4.50%	4.24%	6.16%	DTPHPKP
16	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	33.86%	3.85%	6.78%	4.83%	4.33%	4.02%	4.73%	Dinas Tanaman Pangan, HPKP
17	2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8.50%	15.87%	7.50%	8.20%	7.70%	10.10%	8.70%	9.08%	
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
18	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	33.86%	6%	11.40%	9.81%	8.40%	7.12%	6.31%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
19	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	7.25%	0%	1.35%	1.96%	0.01%	0.01%	1.98%	
20	2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28%	28.50%	7%	5.24%	13.60%	10.51%	12.40%	8.67%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
21	2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50%	44%	75%	61%	55.83%	68.61%	59.44%	64.50%	
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.											
22	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat		Rp 250 Juta	91,34 Jt	96,54 Jt	195,2 Jt	208,5 Jt	250,38 Jt	Dinkop, UKM, Nakertrans
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											

23	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306	104	3 kasus	2 kasus	4 kasus	6 kasus	7 kasus	3 kasus	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
24	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.70%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
25	3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	85%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.30%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.											
26	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	0	0	0	0	0.4	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
27	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun		0/1000	2.2	2.3	3	7	10.3	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
28	3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24		2/1000	3.5	4	3.7	9.5	1	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
29	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	< 0,5%	< 0,5%	0.001%	0,4/10000	1,4/10.000	0.005%	0.010%	0.001%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
30	3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	245	158	80/100 rb	256/100 rb	199/100 rb	86/100 rb	141/100 rb	202/100 rb	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
31	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	<1	0 kasus	17 kasus	13 kasus	3 kasus	14 kasus	39 kasus	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
32	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	338.635	5 Orang	24 Orang	20 Orang	18 Orang	22 Orang	23 Orang	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB

Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
33	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	5.40%	6%	10%	4.80%	5.40%	11%	11.60%		Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
34	3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	24.30%	19.82%	0.40%	0.34%	0.38%	0.56%	0.65%	0.20%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
35	3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15.40%	13.60%	0.20%	0.15%	0.15%	0.25%	0.32%	0.39%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
36	3.4.2. (a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.			11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
37	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	65%	68%	70%	79.76%	77.75%	54.82%	47.39%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
38	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23.50%	11%	7500 Orang	12.51%	14.66%	6065 kasus	6528 kasus	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
39	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	38	-	43%	41.60%	40%	40%	41.60%	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
40	3.7.2. (a)	<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>	2.28	-	2%	2.14%	2.28%	2.13%	2.08%	2.19%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.											
41	3.8.1. (a)	<i>Unmet Need</i> pelayanan kesehatan.	9.91%	-	5.5%	5%	12.48%	8.86%	5.75%	8.32%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
42	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	83%	90%	85%	87%	85%	88%	90%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas						2018	2019	2020	2021	2022	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
43	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat.	114.09%	-	105%	112.48%	112.05%	110.38%	107.61%	111.63%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
44	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	106.94%	-	101%	82.85%	79.43	103.92	98.19%	102.30%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
45	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	77.20%	-	55%	58.47%	55.96%	52.49%	54.63%	59.06%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 5. Kesenjangan Gender						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.											

46	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16	10	35 Kebijakan	31 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	32 Kebijakan	33 Kebijakan	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
47	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	0 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
48	5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun	-	0 Kasus	5 Kasu	5 Kasu	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
49	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
50	5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
51	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	35%	33 Orang	30 Orang	46 Orang	50 Orang	125 Orang	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											

52	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	16.60%	60 Orang	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	4 kursi	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
53	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat		15 Orang	4 Orang	5 Orang	11 Orang	11 Orang	13 Orang	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.											
54	5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9.90%	-	5%	5%	12.48%	8.86%	5.75%	8.32%	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
55	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	-	94%	86.36%	89.19%	90.43%	91.56%	93.49%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
56	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	-	11%		9.60%	9.87%	11%	12%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
57	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	100%	87%	93.14%	83.27%	85.04%	85.74%	93.14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
58	6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45000	-	106 desa/kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

59	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	-	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	106 Desa/Kel	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentingan.											
60	6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	108 Rencana	-	40 Rencana	38 Rencana	38 Rencana	38 Rencana	38 Rencana	38 Rencana	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
61	6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 Wilayah	-	2 Wilayah	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	
62	6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 Wilayah	-	2 Wilayah	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	1 Wilayah Sungai	
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
63	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	9.29%	6.34%	10%	7.48%	7.50%	-5.10%	6.95%	8.09%	Bappeda Litbang
64	8.1.1. (a)	PDRB per kapita.	50 juta	48,21 juta	47 juta	43,25 JT	46,01 JT	43,98 JT	47,19 JT	51 JT	
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											
65	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	-	8%	7.79%	7.64%	6.73%	6.75%	7.09%	Dinkop, UKM, Nakertrans
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											

66	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	-	30%	20.51%	20.73%	20.80%	20.90%	44.89%	Dinkop, UKM, Nakertrans
67	8.3.1. (a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	44.97%	66%	64.30%	64.70%	64.80%	65%	42%	Nakertrans
68	8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	39.42%	40%	36.10%	36.70%	36.80%	36.85%	28.11%	Dinkop, UKM, Nakertrans
69	8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	20%	1.20%	0.54%	0.55%	0.76%	0.96%	1.80%	Nakertrans
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
70	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	-	Rp 18.000	Rp 16475	Rp 17045	Rp 17100	Rp 17500	Rp 17800	Dinkop, UKM, Nakertrans
71	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	-	5%	4.70%	4.35%	5.91%	4.93%	3.56%	Nakertrans
72	8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Menurun	8.50%	5.82%	9.63%	11.69%	8.78%	5.59%	Dinkop, UKM, Nakertrans
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
73	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	meningkat	25%	10.24	19.91	19.17	11.95	11	Dinkop, UKM, Nakertrans
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
74	8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	20 Juta Orang	151 763 Orang	250 Orang	135 Orang	285 Orang	199 Orang	92 Orang	45 Orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
75	8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	6.000.000 Orang	70.000 Orang	486.964 Orang	39.683 Orang	62.767 Orang	84.023 Orang	170.580 Orang	Dinkop, UKM, Nakertrans
76	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Meningkat	2.25%	1.72%	1.76%	1.80%	1.85%	1.92%	Nakertrans

Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											
77	8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	20%	75%	20.10%	22.40%	30%	55%	70%	Dinkop, UKM, Nakertrans
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
78	9.1.1 (a)	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik	-	-	60%	51.10%	53.40%	51.10%	56.10%	59.00%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
79	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Meningkat	14.25%	18%	13.64	13.56	13.47	13.61	14.52	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
80	9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Meningkat	9.25%	10%	1.1	3.72	-1.7	7.13	12.17	Dinkop, UKM, Nakertrans
81	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	287269 Orang	25.50%	14.55%	21.03%	24.40%	25%	25.19%	Dinkop, UKM, Nakertrans
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											

82	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	53,000	0.10%	0	0.004%	0.008%	0.010%	0.054%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
83	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	-	1%	0	0.10%	0.13%	0.15%	-	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.											
84	9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	-	77%	66.50%	69.67%	70.17%	77.21%	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
85	10.1.1*	Koefisien Gini.	0.36	0.36	0.3	0.34	0.284	0.349	0.358	0.354	Dinas Sosial
86	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Meningkat	-	1 Desa	0 Desa	9 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	Dinas Pemdes, Dan PPA
87	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	Menurun	-	0 Desa	10 Desa	4 Desa	3 Desa	2 Desa	0 Desa	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
88	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat	-	15 Desa	1 Desa	4 Desa	12 Desa	20 Desa	21 Desa	Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak
89	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	Meningkat	0.65	0.4128	0.4437	0.429	0.478	0.5166	Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
90	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Menurun	-	0 Kebijakan	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah

Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana	
Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan					2018	2019	2020	2021	2022		
Target 11.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Dan Pelayanan Dasar, Serta Menata Kawasan Kumuh.											
91	11.1.1*	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurun	-	45%	-	49%	49%	49%	48.66%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
92	11.1.1. (a)	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.	3,7 Juta rumah	-	15%	9.73%	10.94%	10.94%	11.1%	11.1%	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Pera
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
93	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	5.598 Orang	0/ 100 rb	0	0	0	0	0,02/ 100 rb	BPBD
94	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	30%	24%	116.15	119.2	119.2	119.2	119.2	119.2	
95	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	75	1 Sistem	0	0	0	0	0	BPBD
96	11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	-	Rp 4.555.000	Rp 6.490.000 .000	Rp 23.045.00 0.000	Rp 12.375.86 5.000	Rp 5.365.08 8.000	Rp 5.365.08 8.000	
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
97	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80%	80%	99.30%	96.41%	99.41%	99.08%	99.14%	99.15%	Dinas LH
Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana	
Tujuan 12. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan					2018	2019	2020	2021	2022		
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
98	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 Ton/Hari	20 Ton/Hari	10.000 Ton	8.423 Ton	8707,36 Ton	8559,44 Ton	9057,27 Ton	7417,17 Ton	Dinas LH

Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana	
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim					2018	2019	2020	2021	2022		
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.											
99	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	1 Dok	1 Dok	0	0	0	0	0	BPBD
Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana	
Tujuan 14. Ekosistem Lautan					2018	2019	2020	2021	2022		
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.											
100	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%	-	85%	55%	58%	57%	110.90%	121.90%	Dinas Peternakan Dan Perikanan
Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana	
Tujuan 15. Ekosistem Daratan					2018	2019	2020	2021	2022		
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.											
101	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	1 Dok	2 Dok	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	-	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan / Indikator		Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana	
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh					2018	2019	2020	2021	2022		
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											

102	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	-	0 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
103	16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	-	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
104	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	-	200 Kasus	235 Kasus	174 Kasus	367 Kasus	30 Kasus	49 Kasus	
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
105	16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
106	16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	-	0 Kasus	6 Kasus	5 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	
107	16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
108	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Rp. 190.759.499.612	97%	75.31%	85.60%	92.49%	-	-	Bappelitbang da
109	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Menurun	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
110	16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	75%	BB	62.25	41.98	55.33	60.03	61.37	-	Inspektorat
111	16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	80%	100%	50%	39.68%	31.14%	44.35%	48.93%	-	Sekretariat Daerah

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
112	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat	60 Orang	8.57%	5.71%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
113	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	-	21%	10%	20%	20%	20%	20%	Dinas Duk dan Capil
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
114	16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85%	-	90%	75%	80%	87.09%	98%	93.03%	Dinas Duk dan Capil
Tujuan / Indikator			Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten (2023)	Capaian					OPD Pelaksana
Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan						2018	2019	2020	2021	2022	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
115	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Meningkat	Rp. 9.292.958.272.501	10%	9.22%	8.89%	8.43%	7.87%	13.52%	Badan Pendapatan Daerah
116	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Meningkat	-	0.50%	0.36%	0.24%	0.27%	0.30%	0.49%	Badan Pendapatan Daerah
117	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	-	35%	25.11%	26.74%	28.78%	17.09%	4.72%	Badan Pendapatan Daerah
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
118	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Duk dan Capil

Sumber: Data diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

2.3.7. Permasalahan/Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Permasalahan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 antara lain:

1. Adanya kebijakan penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum yang mengharuskan pemerintah kabupaten untuk menggunakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk membiayai belanja-belanja prioritas kepala daerah dan belanja pembangunan lainnya yang berasal dari sumber pendanaan pendapatan asli daerah yang menyebabkan kesulitan bagi pemerintah daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang tergolong kecil.
2. Sering terjadinya *maintenance* pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri baik di perencanaan maupun di penganggaran dan penatausahaan;
3. Masih rendahnya pemahaman dalam penentuan target kinerja maupun realisasi kinerja yang menyebabkan laporan hasil evaluasi tidak akurat atau bahkan tidak valid;
4. Menu Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Aplikasi SIPD Kemendagri belum berjalan yang menyebabkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan secara manual;
5. Adanya pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pada awal triwulan II Tahun 2023 disebabkan adanya penyesuaian dana transfer DBH cukai tembakau dan pajak rokok yang harus diakomodir dalam APBD Tahun 2023;
6. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan DBH dari Kementerian terkait yang terbit setelah penetapan APBD yang menyebabkan pergeseran APBD yang baru saja ditetapkan;
7. Keterlambatan penyampaian laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap triwulannya;
8. Terdapat kegiatan yang bersifat fisik yang terkendala proses lelang.

2.3.8. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2023 sampai dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh OPD dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan indikator dan target kinerja antara perangkat daerah dengan bappelitbangda;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;

5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme lelang agar memperhitungkan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan;
8. Adanya komitmen pimpinan perangkat daerah untuk melaporkan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara kontinu dan tepat waktu.

2.3.9. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2023

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Peran aktif seluruh Kepala Pengguna Anggaran (KPA) dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berjalan;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
3. Verifikasi dokumen perencanaan untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana dengan melakukan pelatihan, diklat dan sejenisnya dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan;
5. Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri;
6. Penggunaan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RKPD dan APBD;
7. Penyusunan strategi khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik;
8. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi yang kontinyu dan tepat waktu.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan gambaran ekonomi makro daerah serta keuangan daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan menjadi salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2023.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi di tahun 2022 sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh impresif mencapai 5,31% (CtC) yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang sepuluh tahun terakhir. Menghadapi tahun 2023, Pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator domestik dan eksternal yang menunjukkan ketahanan yang impresif. Keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi perekonomian global ke depan.

Beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen bergerak di level optimis yakni 123,0 dan PMI Manufaktur berada di level ekspansif yakni 51,3. Sementara itu, indikator eksternal juga menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang terlihat dari peningkatan Cadangan Devisa per Januari 2023 yakni sebesar 139,4 milyar USD. Sejumlah kebijakan utama lainnya yang juga dipersiapkan Pemerintah menghadapi perekonomian ke depan adalah terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi *game changer* di masa pandemi *Covid-19* dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menerapkan *green economy* yang pada KTT G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di tahun 2023 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka. Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap resilien. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I

2023 tumbuh sebesar 5,03 persen melampaui sebagian besar perkiraan analisis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada level 4,5 persen pada triwulan yang sama.

- **PMI Manufaktur global melemah**

Aktivitas manufaktur global kembali berkontraksi di penghujung triwulan I 2023. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur di hampir 60 persen negara G-20 dan ASEAN-6 masih melemah. Bahkan Vietnam yang selama ini cukup resilien pun telah mengalami hantaman perlemahan dari PMI manufaktur sebagai imbas perlemahan negara-negara tujuan ekspor Vietnam. Sementara 27,3 persen negara lainnya termasuk Thailand, Rusia dan Tiongkok berada di zona ekspansi namun melambat. Di tengah perlambatan PMI global tersebut, Indonesia bersama India dan Turki menjadi sebagian kecil (13,6 persen) negara yang PMI manufakturnya ekspansif dan terus melesat.

- **Harga komoditas global menurun**

Kondisi perekonomian dunia juga masih dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Meskipun secara umum tren penurunan terjadi, dibandingkan tahun 2022 terutama pada pertengahan tahun, yang sempat mengalami *boom* komoditas. Harga gas alam dan batu bara terkoreksi tajam yaitu menurun sebesar 48,5 persen dan 52,8 persen. Sebaliknya, harga minyak mentah menunjukkan kenaikan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan pemangkasan produksi minyak oleh organisasi pengekspor minyak bumi (OPEC). Sementara, harga komoditas pangan juga menunjukkan penurunan, kecuali CPO yang sedikit mengalami penguatan. Kedelai masih berada di level yang cukup tinggi, sedangkan jagung dan gandum sedikit menurun.

- ***Higher for longer***

Harga komoditas mempengaruhi tingkat inflasi. Berbagai negara kemudian merespon kenaikan inflasi tersebut melalui kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan agregat. Tingkat inflasi di Eropa dan Jepang misalnya mengalami kenaikan dan masih relatif jauh di atas suku bunga acuan. Sementara, inflasi Amerika Serikat walaupun menurun namun secara historis juga masih berada pada level yang tinggi, saat ini di level 5 persen. Risiko global lainnya yang masih cukup dominan antara lain tekanan di sektor keuangan, potensi krisis utang di berbagai negara, eskalasi perang di Ukraina serta adanya fragmentasi geoekonomi.

International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada World Economy Outlook (WEO) April 2023, yaitu sebesar 2,8 persen (yoy). Meski tahun ini perekonomian global melambat, namun IMF memprakirakan pertumbuhan global akan membaik di tahun 2024 yaitu sebesar 3,0 persen (yoy). Sementara itu, IMF memprediksi inflasi global masih tinggi di 2023 yaitu di level 7,0 persen. Sedangkan negara berkembang diproyeksi mengalami inflasi sebesar 8,6 persen dan negara maju 4,7 persen. Inflasi diprediksi baru akan mulai menurun tahun depan. Namun, secara historis masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi. Perlambatan kondisi perekonomian di negara maju tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara

berkembang yang sangat mengandalkan ekspor. Kebijakan reopening Tiongkok belum mampu mendorong pemulihan ekonomi. Sehingga sumber pertumbuhan ekonomi dunia masih sangat lemah tahun ini. Begitu pula dengan volume perdagangan antarnegara yang akan mengalami penurunan.

Kinerja APBN sampai dengan triwulan I 2023 tetap positif. Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang pemulihan ekonomi. Realisasi pendapatan negara selama triwulan I 2023 mencapai Rp647,15 triliun atau 26,27% dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98% yoy. Pada periode yang sama, penyerapan belanja negara mencapai Rp518,66 triliun (16,94% dari Pagu APBN). Posisi fiskal Pemerintah relatif kuat, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp228,76 triliun dan surplus keseimbangan fiskal sebesar Rp128,50 triliun, ekuivalen dengan 0,61% PDB.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp504,48 triliun (24,95% dari target APBN) atau tumbuh 25,36% yoy. Realisasi PPN mencapai Rp185,70 triliun atau tumbuh 42,37% yoy, sementara PPh Nonmigas mencapai Rp225,95 triliun atau tumbuh 31,03%. Secara sektoral, kinerja penerimaan pajak yang masih kuat ditopang oleh penerimaan dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan transportasi yang tetap stabil. Di tengah moderasi harga komoditas global, penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih mampu tumbuh signifikan (113,55%). Sementara itu, Realisasi PNBP mencapai Rp142,66 triliun (32,32% dari target APBN) atau tumbuh 43,75% yoy. Kinerja PNBP tersebut terutama ditopang oleh Penerimaan SDA nonmigas sebesar Rp44,28 triliun (tumbuh 194,04%) dan PNBP Lainnya Rp44,31 triliun (tumbuh 30,21%).

Kinerja belanja negara yang tumbuh positif tersebut ditopang oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp347,23 triliun (15,46% dari pagu APBN) atau tumbuh 10,52% yoy. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp171,39 triliun atau 21,04% dari pagu APBN. Kinerja belanja negara tersebut mampu menjadi penopang tetap kuatnya kinerja ekonomi nasional. Secara langsung, peran belanja Pemerintah dalam PDB triwulan I 2023 yang baru dirilis oleh BPS tercermin pada pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP) yang tumbuh positif sebesar 3,99%. Secara tak langsung, peran belanja negara juga sangat krusial dalam menopang perekonomian nasional dengan menjaga daya beli masyarakat, melalui pengendalian harga maupun berbagai program bantuan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong permintaan agregat.

Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023, terealisasi sebesar Rp224,79 triliun (32,28% Target). Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah, serta kebutuhan pembiayaan.

Dalam perspektif jangka menengah-panjang, Pemerintah akan terus mendorong peran kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Peran ini antara lain dilaksanakan melalui dukungan pada berbagai agenda reformasi struktural, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi guna menciptakan iklim investasi dan bisnis yang mempunyai daya saing tinggi. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran,

pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*).

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021–2022 (Persen, YoY)

Uraian	Realisasi Tahun 2021 (a)	Target RPJMN Tahun 2022 (b)	Target RKP Tahun 2022 (c)
Pertumbuhan PDB	3,69	5,7 - 6,0	5,2 - 5,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,84	3,8 - 3,9	3,6 - 3,7
Pertambangan dan Penggalian	4,00	1,9 - 2,0	1,8 - 1,9
Industri Pengolahan	3,39	6,2 - 6,5	5,3 - 5,7
Pengadaan Listrik dan Gas	5,55	5,2 - 5,6	5,5 - 5,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,5 - 4,6	5,2 - 5,3
Konstruksi	2,81	6,1 - 6,4	6,0 - 6,5
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,65	5,9 - 6,5	4,8 - 5,3
Transportasi dan Pergudangan	3,24	7,3 - 7,7	7,5 - 7,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,89	6,3 - 6,5	6,0 - 6,3
Informasi dan Komunikasi	6,81	8,4 - 9,2	8,5 - 9,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56	6,7 - 7,1	5,5 - 5,7
Real Estate	2,78	5,0 - 5,2	5,3 - 5,4
Jasa Perusahaan	0,73	8,5 - 8,5	7,5 - 7,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,33	5,1 - 5,4	3,2 - 3,5
Jasa Pendidikan	0,11	5,2 - 5,3	5,5 - 5,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,46	8,1 - 8,2	6,9 - 7,1
Jasa Lainnya	2,12	9,5 - 9,6	6,7 - 7,0

Sumber: a) Berita Resmi Statistik BPS, 2022; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, November 2021

b. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

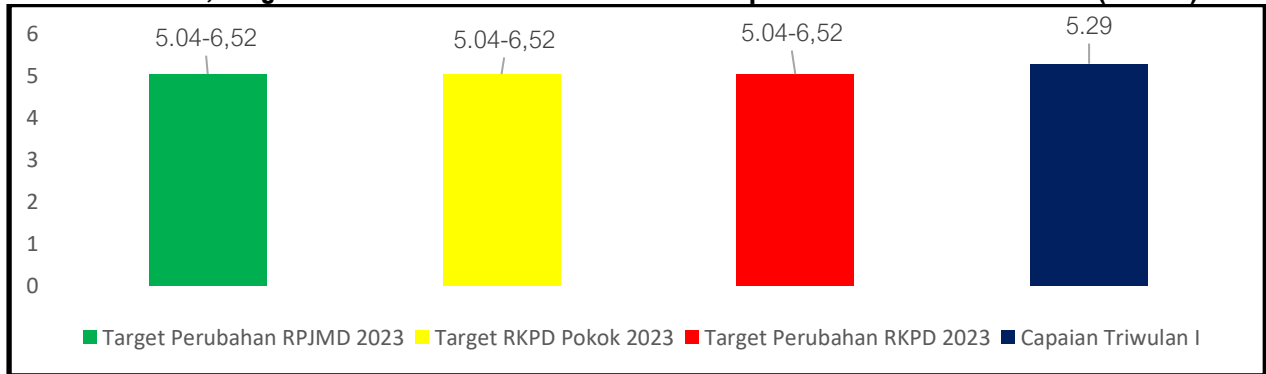
Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonominya masih mengalami perkembangan yang fluktuatif, maka di tahun 2024 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23-6,71 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,70 persen. Sementara di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,04-6,52 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,9 persen.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPDPokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPDPokok Tahun 2023 dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 (Persen)

Uraian	Nilai (persen)
Target Perubahan RPJMD 2023	5,04-6,52
Target RKPDPokok 2023	5,04-6,52
Target Perubahan RKPDPokok 2023	5,04-6,52
Capaian Triwulan I	5,29

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan

c. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang

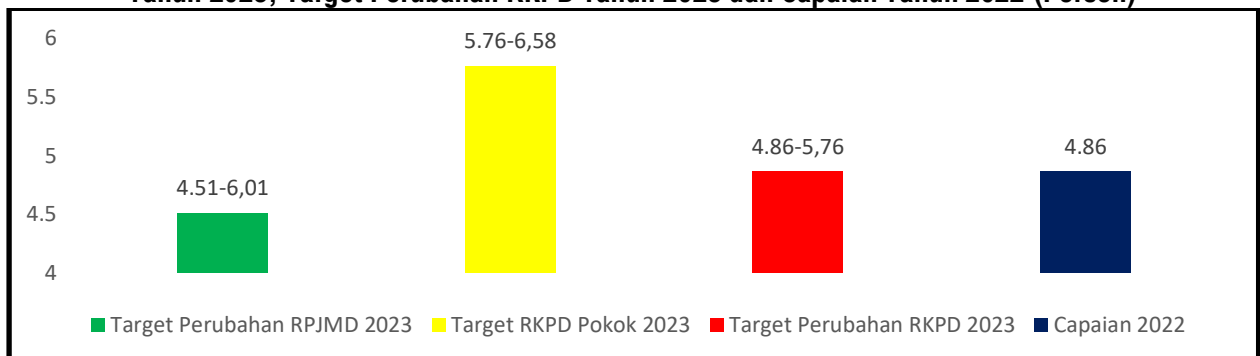
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2022 tercatat sebesar 4,86 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target RKPD 2022 yang senilai 5,8-7,48 persen. Pemulihan ekonomi ini diharapkan terus berlanjut di tahun 2023 sehingga perekonomian ditargetkan bisa tumbuh sebesar 4,86-5,76 persen di tahun 2023.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
Target Perubahan RPJMD 2023	4,51-6,01
Target RKPD Pokok 2023	5,76-6,58
Target Perubahan RKPD 2023	4,86-5,76
Capaian 2022	4,86

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

Grafik 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

3.1.1.2 Inflasi

Inflasi di Kabupaten Sidenreng Rappang merujuk pada inflasi Kota Parepare karena hanya lima daerah di Sulawesi Selatan yang dijadikan wilayah perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota

Palopo, Kota Parepare, dan Kabupaten Bulukumba. Karena Kabupaten Sidenreng Rappang lebih dekat dengan Kota Parepare, maka angka inflasi yang digunakan adalah Kota Parepare.

Berdasarkan Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, pada Juni 2023 di Kota Parepare (Sidrap) terjadi inflasi Year on Year sebesar 3,55 persen dengan IHK sebesar 117,64 persen. Berdasarkan 5 (lima) kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 4,71 persen dengan IHK sebesar 116,05 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Watampone sebesar 2,16 persen dengan IHK sebesar 114,23. Inflasi di Kota Parepare (Sidrap) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,03 persen; kelompok transportasi sebesar 10,34 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,34 persen; kelompok pendidikan sebesar 13,84 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen. Tingkat inflasi Month to Month (m-to-m) Kota Parepare Juni 2023 sebesar -0,03 persen dan tingkat inflasi Year to Date (y-to-d) Juni 2023 sebesar 1,43 persen.

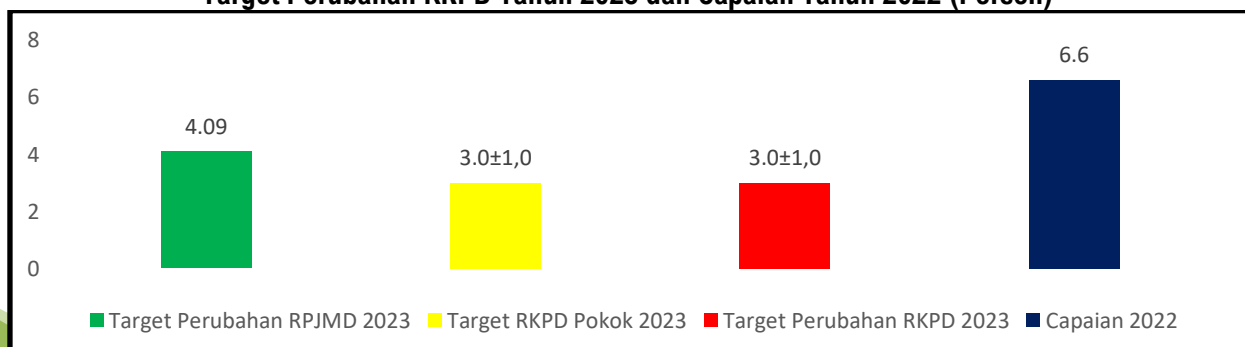
Laju inflasi di Kota Parepare (Sidrap) pada tahun 2022 sebesar 6,6 persen, lebih tinggi dibanding target RKPD dan Perubahan RPJMD yang berkisar di angka $3,0 \pm 10$ persen.

Tabel 3.4
Inflasi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Nilai inflasi (Persen)
Target Perubahan RPJMD 2023	4,09
Target RKPD Pokok 2023	$3,0 \pm 1,0$
Target Perubahan RKPD 2023	$3,0 \pm 1,0$
Capaian 2022	6,6

Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

Grafik 3.3
Inflasi Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi *Covid-19* di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan dan lapangan usaha industri pengolahan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data BPS tahun 2022, peningkatan dipengaruhi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha industri pengolahan.

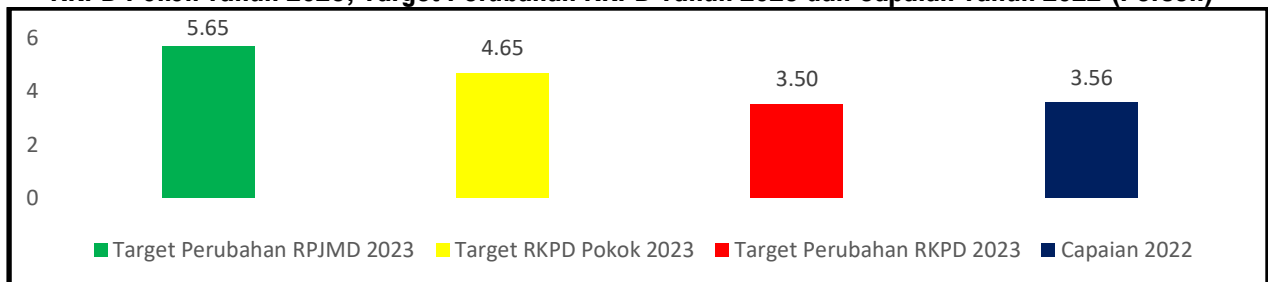
Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang pada 2022 sebesar 3,56 persen. Capaian tersebut sudah lebih rendah dari yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 4,65 persen dan ditargetkan pada Perubahan RKPd mencapai 3,50 persen.

Tabel 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Target Perubahan RPJMD 2023	5,65
Target RKPd Pokok 2023	4,65
Target Perubahan RKPd 2023	3,50
Capaian 2022	3,56

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPd Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPd Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

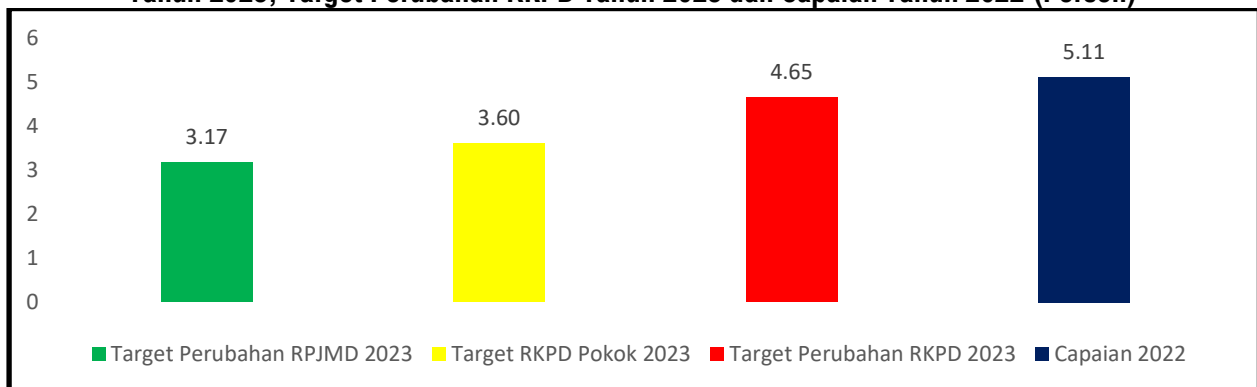
Seperti halnya dengan prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan adanya pandemi *Covid-19* maka sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang juga terkena dampaknya, terkhusus pada masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 3,60 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,11 persen (naik 0,07 persen dari capaian tahun 2021) dan pada Perubahan RKPd ditargetkan berada di angka 4,65 persen dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat diharapkan lebih membaik.

Tabel 3.6
Tingkat Kemiskinan Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)

Uraian	Tingkat Kemiskinan (Persen)
Target Perubahan RPJMD 2023	3,17
Target RKPD Pokok 2023	3,60
Target Perubahan RKPD 2023	4,65
Capaian 2022	5,11

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2023

Grafik 3.5
Tingkat Kemiskinan Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Persen)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

3.1.1.5 Gini Rasio

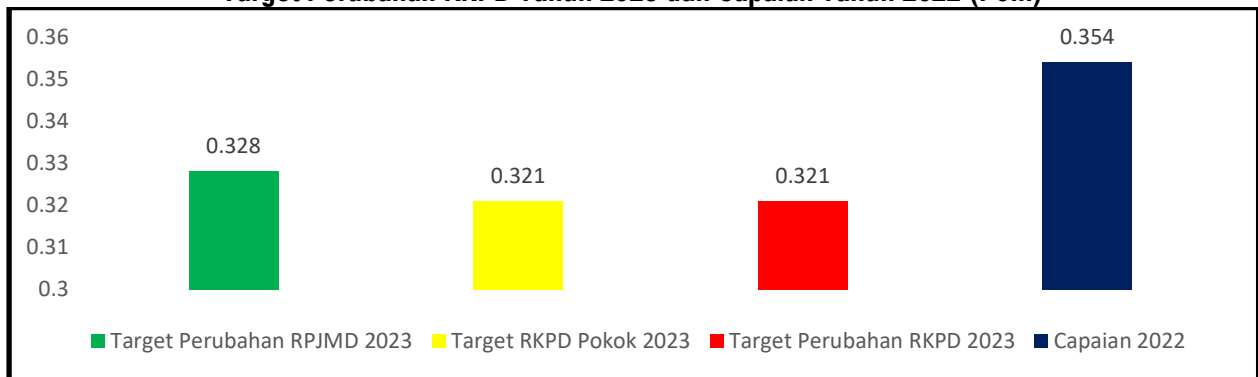
Gini Rasio atau yang disebut juga dengan indeks Gini atau Koefisien Gini, adalah sebuah metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Sebagai sebuah alat ukur, Gini Rasio digunakan agar bisa mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 (0 persen) sampai 1 (100 persen). Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksempurnaan. Capaian Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebesar 0,354 poin, telah menurun 0,004 poin dari capaian Tahun 2021 yang sebesar 0,358 poin dan ditargetkan pada Perubahan RKPD, Gini Rasio berada di angka 0,321 poin.

Tabel 3.7
Gini Rasio Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin)

Uraian	Gini Rasio (Poin)
Target Perubahan RPJMD 2023	0,328
Target RKPD Pokok 2023	0,321
Target Perubahan RKPD 2023	0,321
Capaian 2022	0,354

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2023

Grafik 3.6
Gini Rasio Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

3.1.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

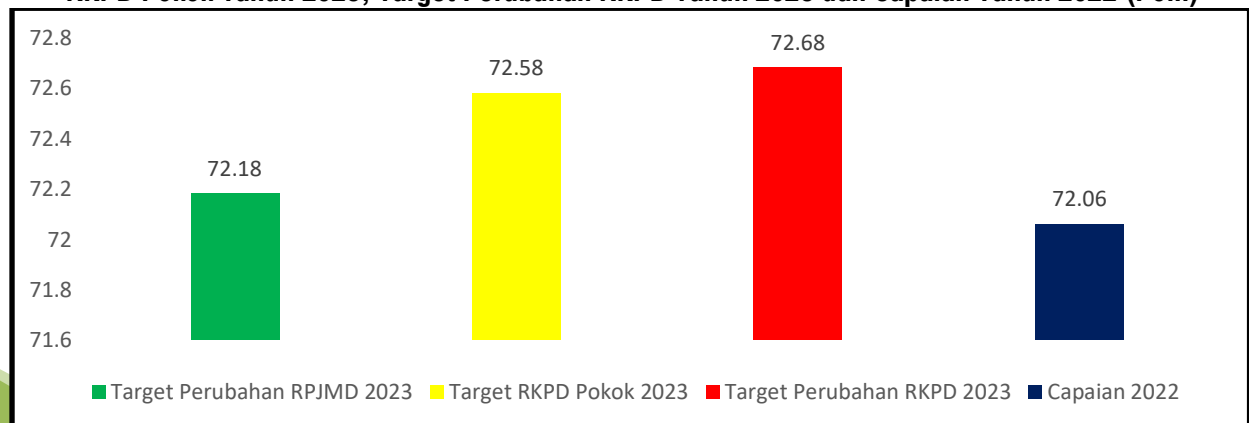
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebesar 72,06 poin, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian 2021 yang sebesar 71,54 poin dan ditargetkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 naik menjadi 72,68 poin.

Tabel 3.8
Indeks Pembangunan Manusia Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin)

Uraian	IPM (Poin)
Target Perubahan RPJMD 2023	72,18
Target RKPD Pokok 2023	72,58
Target Perubahan RKPD 2023	72,68
Capaian 2022	72,06

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2023

Grafik 3.7
Indeks Pembangunan Manusia Sidenreng Rappang Target Perubahan RPJMD Tahun 2023, Target RKPD Pokok Tahun 2023, Target Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2022 (Poin)



Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023

3.2 Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1 Aspek Eksternal

Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun-tahun sekarang dan ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber, perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti *Covid-19* yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Selain keempat tantangan besar tersebut, perekonomian global tahun 2023 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi *higher for longer*.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan.

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antar provinsi maupun antar subsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi *Covid-19* juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan *learning loss* dan *earnings penalty*. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN 2020–2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi *Covid-19* diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi *Covid-19* juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap

kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat *base effect*). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi *Covid-19*. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan ekspor barang disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diperkirakan meningkat; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran *Covid-19* masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program.

3.2.2 Aspek Internal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2022 didominasi oleh empat kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sidenreng Rappang pada Tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, selanjutnya lapangan usaha Konstruksi, disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Pada tahun 2022, diantara keempat lapangan usaha tersebut semuanya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya masing-masing hanya berkisar antara 0,02-5,12 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan

ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, kemunduran dan membutuhkan penyesuaian. Dampak pandemi *Covid-19* membuat perekonomian terjerembab, terparah dalam Sejarah. Di tengah upaya tata ulang prioritas Pembangunan, satu agenda akan tetap digenjut. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga akan menjadi fokus pembangunan tahun 2023. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai dari produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan hingga migas.

Tabel 3.9
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/ Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	32,37	29,80	28,65	28,75	28,52
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,78	4,89	5,00	5,13	5,12
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	13,64	13,56	13,47	13,61	14,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	16,00	17,00	17,85	18,24	17,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	9,84	10,45	10,07	10,12	10,46
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,96	2,14	1,99	2,09	2,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,65	0,73	0,70	0,74	0,79
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2,38	2,59	2,92	2,88	2,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,00	2,94	3,07	3,14	3,10
L	Real Estat/ <i>Real Estat Insurance Activities</i>	4,04	4,05	4,10	3,95	3,86
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,90	5,08	5,10	4,52	4,16
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,75	3,95	4,14	3,81	3,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,48	1,53	1,69	1,74	1,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,01	1,08	1,04	1,04	1,06
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023.

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pertumbuhan yang masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Selama tahun 2022, mengalami perlambatan yang hanya berada di angka 4,86 persen. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir ini juga menjadi perhatian pemerintah hal tersebut dipengaruhi beberapa hal seperti, nilai produksi padi menurun, luas area sawah menurun akibat konversi lahan perumahan, bencana banjir dan kemarau panjang, kelangkaan pupuk serta serangan hama. Persoalan ini terus saja menjadi isu dalam kebijakan pemerintah, namun belum memberikan hasil yang signifikan. Untuk itu, perlu upaya untuk menemukan sumber pertumbuhan baru, sehingga perekonomian Sidenreng Rappang tidak hanya bergantung besar dari lapangan usaha pertanian. Tentu dengan catatan bahwa menemukan sumber pertumbuhan baru bukan berarti meninggalkan lapangan usaha pertanian.

Untuk mencegah ekonomi agar tidak semakin terpuruk, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perizinan, pemberian bantuan, dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tetap optimis dalam pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2023. Perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah masih dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Berdasarkan hasil analisa, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Penguatan infrastruktur fisik (jalan dll.) dan non fisik (kualitas kelembagaan, kualitas manusia, dll.) untuk kemudian mendorong industri pengolahan yang berbasis pertanian dan kawasan pariwisata. Sehingga hal ini mampu mendorong partisipasi dunia usaha, baik besar, menengah, atau kecil.
- b. Mendorong lapangan usaha industri pengolahan yang memerlukan peningkatan investasi di lapangan usaha ini. Sumber pertumbuhan lainnya adalah lapangan usaha penyediaan jasa akomodasi dan makan minum (pariwisata). Mengingat lapangan usaha ini memiliki pertumbuhan yang tertinggi dan inpresif dalam beberapa tahun terakhir ini.
- c. Sumber pertumbuhan yang perlu juga diamati adalah ekonomi digital. Perkembangan teknologi saat ini cukup besar memberikan peluang bagi generasi muda dalam mengembangkan lapangan usaha informasi dan komunikasi karena kebutuhan terkait informasi dan komunikasi ke depan diprediksi relatif tinggi.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No.	Indikator	Target Perubahan RPJMD Tahun 2023	Target RKPDPokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPDP Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,51-6,01	5,76-6,58	4,86-5,76
2	Laju Inflasi (Persen)	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,65	4,65	3,50
4	Tingkat Kemiskinan (Persen)	3,17	3,60	4,65
5	Gini Rasio (Poin)	0,328	0,321	0,321
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,18	72,58	72,68

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Dalam pencapaian sasaran Indikator Makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain berperan secara langsung dalam implementasi program Pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, dimulai dari Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi yang stabil, PDRB perkapita, persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi dan Tingkat Pengangguran yang semakin menurun. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan ekonomi daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target perubahan RKPDP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Bersama dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Desember 2022. Selanjutnya

Peraturan Daerah ini diatur secara teknis dan terinci dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Disusun setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, sehingga diperlukan adanya perubahan dengan pertimbangan RKPD sudah tidak sesuai dengan kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adanya perubahan kebijakan dan strategi baik ditingkat Nasional maupun ditingkat Pemerintah Daerah, terdapat penambahan kegiatan baru dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2023 sebagai landasan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Sesuai amanat Pasal 316 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dapat dilakukan perubahan APBD apabila terjadi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) Keadaan darurat; dan/atau
- d) Keadaan luar biasa.

Dalam penyusunan perubahan kebijakan umum APBD, akan disesuaikan dengan asumsi perkembangan ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, dengan melihat kondisi perekonomian saat ini. Oleh karena itu, dalam penyusunan perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2023, tentunya akan mempengaruhi asumsi –asumsi yang telah disepakati dalam KUA APBD Tahun Anggaran 2023, sehingga dengan sendirinya dalam perubahan APBD tahun 2023 juga mengalami perubahan asumsi.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 perlu dilakukan dengan pertimbangan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Gubernur Nomor : 601/III/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.01/I/10217/2022 Perihal Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023

Adapun Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah untuk penyesuaian Peraturan tersebut diatas dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tanggal 18 April 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dari Perubahan Peraturan Bupati Tersebut Akan diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah, kebijakan umum pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan capaian realisasi dan kondisi yang berkembang dalam semester I (pertama) Tahun Anggaran 2023, anggaran Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami

penyesuaian dengan berbagai perubahan asumsi dari Anggaran Pendapatan pada APBD murni yang telah ditetapkan sehingga dengan penyesuaian dan perubahan tersebut diharapkan realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 dapat lebih optimal dan akurat.

Pada tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi berjalan lebih lambat dibandingkan perkiraan dalam penyusunan APBD Pokok Tahun Anggaran 2023. Kondisi ini berdampak pada Pendapatan Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat yaitu sebesar Rp. 1,218 Triliun lebih atau 1,27 persen dari APBD Pokok yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 1,203 Triliun lebih.

Pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan.

Dana Transfer yang dianggarkan dalam usulan Perubahan APBD ini telah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, terkhusus pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak.

3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Sampai dengan akhir semester I (pertama) tahun 2023, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp. 507.737.893.654 atau baru sekitar 41,66 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,218 Triliun lebih pada APBD Pokok Tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 68.437.287.719 atau sekitar 37,89 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 180,63 Milyar lebih. Pendapatan Transfer terealisasi Rp. 439.240.605.935 atau 43,16 persen dari target sebesar Rp. 1,017 Triliun lebih dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 60.000.000 atau sebesar 1,17 persen dari target sebesar Rp. 5,11 Milyar.

3.3.1.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Tabel Target Perubahan Pendapatan dapat disimpulkan bahwa pada Perubahan RKPD Tahun 2023, secara total Pendapatan Daerah menurun sebesar 1,74 persen dari Rp. 1.240.278.228.000 menjadi sebesar Rp. 1.218.710.946.000. Pada Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp. 55.886.000.000 mengalami kenaikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar 1,6 milyar lebih atau peningkatan sekitar 2,95 persen menjadi Rp. 57.536.000.000. Peningkatan target Pajak Daerah dimaksud didasarkan pada target optimis mengingat banyaknya beberapa potensi pajak daerah yang dapat dimanfaatkan daerah melalui peningkatan upaya optimalisasi seperti sosialisasi terhadap wajib pajak dan penyediaan kemudahan pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak secara digital. Begitu pula pada Retribusi Daerah yang juga mengalami peningkatan sebesar 2,83 persen dari Rp. 13.182.074.174 menjadi sebesar Rp. 13.555.653.000. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan dari Rp. 6.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000 atau meningkat sebesar 25 persen. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan sebesar

11,31 persen dari Rp. 91.677.195.000 menjadi Rp. 102.047.195.000.

3.3.1.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pada Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 3,37 persen dari Rp. 1.068.932.958.826 menjadi Rp. 1.032.956.658.000. Pendapatan Transfer ini terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan dari Rp. 998.421.118.826 menjadi Rp. 938.144.818.000 atau menurun sebesar 6,04 persen. Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan 34,46 persen dari Rp. 70.511.840.000 menjadi Rp. 94.811.840.000.

3.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari Rp. 4.600.000.000 menjadi Rp. 5.115.440.000 atau naik sekitar 11,21 persen. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ini terbagi atas Hibah yang meningkat dari Rp. 3.100.000.000 menjadi Rp. 5.115.440.000 atau sebesar 65,01 persen. Namun terjadi penurunan 100 persen pada Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Rp. 1.500.000.000 menjadi Rp. 0.

Adapun struktur Pendapatan Daerah pada rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	TARGET RKPd POKOK TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN RKPd TAHUN 2023	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5	6= (5-3)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.240.278.228.000,00	1.299.859.550.000,00	1.218.710.946.000,00	- 21.567.282.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	166.745.269.174,00	136.722.868.000,00	180.638.848.000,00	13.893.578.826,00
4.1.1	Pajak Daerah	55.886.000.000,00	39.266.690.000,00	57.536.000.000,00	1.650.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	13.182.074.174,00	23.595.786.000,00	13.555.653.000,00	373.578.826,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	7.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	91.677.195.000,00	65.860.392.000,00	102.047.195.000,00	10.370.000.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.068.932.958.826,00	1.110.949.082.000,00	1.032.956.658.000,00	- 35.976.300.826,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	998.421.118.826,00	1.051.964.670.000,00	938.144.818.000,00	- 60.276.300.826,00
4.2.1.1	Dana Transfer Umum	669.281.123.343,00		615.286.645.000,00	- 53.994.478.343,00
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	16.167.200.000,00		11.345.560.000,00	- 4.821.640.000,00
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	653.113.923.343,00		603.941.085.000,00	- 49.172.838.343,00
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	261.913.583.483,00		322.858.173.000,00	60.944.589.517,00
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus	261.913.583.483,00		243.153.346.000,00	- 18.760.237.483,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	8.505.823.000,00		20.900.516.000,00	12.394.693.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	58.720.589.000,00		58.804.311.000,00	83.722.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.511.840.000,00	58.984.412.000,00	94.811.840.000,00	24.300.000.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.511.840.000,00		79.811.840.000,00	9.300.000.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya			15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.2.2.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah				-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.600.000.000,00	52.187.600.000,00	5.115.440.000,00	515.440.000,00
4.3.1	Hibah	3.100.000.000,00	14.425.000.000,00	5.115.440.000,00	2.015.440.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya				-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				-
4.3.7	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.500.000.000,00	37.762.600.000,00		- 1.500.000.000,00

Sumber : BKAD dan Bapenda Kab Sidenreng Rappang, 2023

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Keberhasilan penanganan dampak pandemi *Covid-19* menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih tumbuh kuat pada angka 5,44 persen pada Q2 tahun 2022, dan dengan inflasi yang masih terkendali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Belum selesai dengan tantangan pandemi *Covid-19*, negara-negara di dunia saat ini dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi dan pupuk melambung tinggi. Hal ini mengakibatkan tingkat inflasi yang sangat tinggi baik di Amerika maupun negara-negara Eropa, yaitu inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar Rp. 3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.246,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 814,7 triliun. Belanja Pemerintah Pusat tersebut diarahkan untuk:

- ✓ Melanjutkan reformasi terutama dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, akselerasi perlindungan sosial sepanjang hayat, serta meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;
- ✓ Melanjutkan agenda pembangunan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor, adaptasi teknologi hijau dan pengembangan EBT, dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN; serta
- ✓ Meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas, ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta meningkatkan sinkronisasi belanja bantuan Pemerintah.

Sehingga Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka mempercepat pemulihan di bidang ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, dunia usaha, dan UMKM. Kebijakan Belanja Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3.3.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanjapegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PPPK sesuai formasi Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau

pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan

- kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
 - g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah

- Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom;
 - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom;
 - 5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - 4) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

3.3.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - 1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau

bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja Tak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- d. Pengeluaran untuk mendanai:
 - 1) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Keperluan mendesak; dan/atau
 - 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- e. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Pagu Perubahan RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6= (5-3)
5	BELANJA DAERAH	1.240.278.228.000,00	1.304.859.550.000,00	1.241.360.946.000,00	1.082.718.000,00
5.1	Belanja Operasi	849.385.454.000,00	894.666.154.979,00	889.949.829.000,00	40.564.375.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	519.575.404.000,00	525.751.496.787,00	536.275.134.746,00	16.699.730.746,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	292.831.693.000,00	321.798.382.369,00	329.257.681.602,00	36.425.988.602,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.050.000.000,00	1.224.120.000,00	900.000.000,00	- 150.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	35.928.357.000,00	45.753.779.258,00	23.249.012.652,00	-12.679.344.348,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	138.376.565,00	268.000.000,00	268.000.000,00
5.2	Belanja Modal	260.063.856.000,00	268.527.550.215,00	217.961.318.000,00	-42.102.538.000,00
5.2.01	Belanja Modal	260.063.856.000,00	268.527.550.215,00	217.961.318.000,00	-42.102.538.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	3.060.300.000,00	6.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	3.060.300.000,00	6.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	123.828.918.000,00	138.605.544.806,00	127.449.799.000,00	3.620.881.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.000.000.000,00	3.025.732.891,00	7.144.166.000,00	2.144.166.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	118.828.918.000,00	135.579.811.915,00	120.305.633.000,00	1.476.715.000,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Berdasarkan tabel proyeksi Belanja diatas dapat disimpulkan bahwa pada total Belanja Daerah pada perubahan RKPD mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen dari RKPD Pokok tahun 2023 sebesar Rp. 1.240.278.228.000 menjadi Rp. 1.241.360.946.000 dengan rincian Belanja Pegawai yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 519.575.404.000 menjadi Rp. 536.275.134.746 atau sebesar 3,21 persen, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan 12,44 persen dari Rp. 292.831.693.000 menjadi Rp. 329.257.681.602, penurunan pada Belanja Bunga sebesar Rp. 1.050.000.000 menjadi Rp. 900.000.000 atau 14,29 persen, Belanja Hibah dari Rp. 35.928.357.000 menjadi Rp. 23.249.012.652 atau menurun sebesar 35,29 persen dan Belanja Bantuan Sosial yang semula Rp. 0 menjadi Rp. 268.000.000. Pada Belanja Modal juga mengalami penurunan sebesar 16,19 persen dari Target RKPD Pokok tahun 2023 yang sebesar Rp. 260.063.856.000 menjadi Rp. 217.961.318.000 pada Target RKPD Perubahan Tahun 2023. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 14,29 persen dari Rp. 7.000.000.000 menjadi Rp. 6.000.000.000 dan Belanja Transfer yang mengalami peningkatan sebesar 2,92 persen dari Rp. 123.828.918.000 menjadi Rp. 127.449.799.000.

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan Pembiayaan Daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. SiLPA diupayakan menjadi nol seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan antara lain untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Provinsi akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.13
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023

Jenis Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	TARGET RKPD Pokok 2023	Target Perubahan RPJMD 2023	Target Perubahan RKPD 2023	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	-	7.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	-	7.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	2.350.000.000	2.500.000.000	2.350.000.000	-
Penyertaan Modal	-			-
Pembayaran Cicilan Pokok	2.350.000.000	2.500.000.000	2.350.000.000	-
Pembiayaan Netto	(2.350.000.000)	5.000.000.000	22.650.000.000	25.000.000.000
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Pada aspek Pengeluaran Pembiayaan, kebijakan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk melakukan pembayaran utang jangka panjang yang telah jatuh tempo.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada Masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan

setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang, jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban per 31 Desember 2022 berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 124.211.005.965,46, yang terdiri atas:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 67.579.046,00;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp. 2.274.086.498,00;
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp. 1.107.138.904,76;
- 4) Utang Beban sebesar Rp. 65.100.426.346,00;
- 5) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 55.661.775.170,70.

Dengan membandingkan jumlah Kewajiban Jangka Pendek tersebut dengan jumlah SILPA TA. 2022 sebesar Rp. 24.477.102.422,00 maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang belum sehat untuk menyelesaikan Kewajiban Jangka Pendek yang ada.

Gambaran Kewajiban 3 (tiga) tahun terakhir Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Kewajiban Kab. Sidenreng Rappang selama Tahun 2020 s/d Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran		
		2020	2021	2022
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.349.919,00	115.845.606,00	67.579.046,00
2	Utang Bunga	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00	2.274.086.498,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	1.618.334.997,33	1.603.096.304,42	1.107.138.904,76
4	Utang Beban	17.316.495.243,00	61.279.548.422,67	65.100.426.346,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	136.753.304.448,46	100.715.704.303,70	55.661.775.170,70
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	157.963.571.105,79	165.988.281.134,79	124.211.005.965,46

Sumber : BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Tabel 3.15
Perubahan Pagu Belanja Per Urusan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023

URUSAN/ OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
TOTAL	1.240.278.228.000	1.241.360.946.000	1.082.718.000
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	752.238.347.154	766.175.055.336	13.936.708.182
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	359.743.181.000	370.062.336.500	10.319.155.500
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	359.743.181.000	370.062.336.500	10.319.155.500
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	254.682.953.154	254.950.439.036	267.485.882
Rsud Nene Mallomo	70.475.031.000	68.779.429.000	-1.695.602.000
Rsud Arifin Numang	54.691.170.000	48.120.539.000	-6.570.631.000
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	129.516.752.154	138.050.471.036	8.533.718.882
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	111.377.806.000	126.566.297.800	15.188.491.800
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13.484.783.000	12.771.757.000	- 713.026.000
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	97.893.023.000	113.794.540.800	15.901.517.800
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8.610.000.000	317.440.000	- 8.292.560.000
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	8.610.000.000	317.440.000	-8.292.560.000
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13.994.720.000	11.117.517.000	- 2.877.203.000
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	10.919.988.000	8.495.503.000	- 2.424.485.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.074.732.000	2.622.014.000	- 452.718.000
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	3.829.687.000	3.161.025.000	- 668.662.000
Dinas Sosial	3.829.687.000	3.161.025.000	- 668.662.000
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	85.273.184.846	86.401.774.264	1.128.589.418
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1.519.702.000	1.469.138.000	- 50.564.000
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.519.702.000	1.469.138.000	- 50.564.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	435.000.000	597.000.000	162.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	435.000.000	597.000.000	162.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	12.253.313.000	10.950.036.000	- 1.303.277.000
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	12.253.313.000	10.950.036.000	-1.303.277.000

URUSAN/ OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	249.200.000	200.000.200	- 49.199.800
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	249.200.000	200.000.200	- 49.199.800
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	19.186.954.000	13.973.232.000	- 5.213.722.000
Dinas Lingkungan Hidup	19.186.954.000	13.973.232.000	-5.213.722.000
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.836.288.000	3.314.956.000	- 521.332.000
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.836.288.000	3.314.956.000	- 521.332.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.092.378.000	4.201.357.000	108.979.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.092.378.000	4.201.357.000	108.979.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.301.046.846	5.689.974.964	1.388.928.118
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.301.046.846	5.689.974.964	1.388.928.118
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3.723.790.000	12.608.608.000	8.884.818.000
Dinas Perhubungan	3.723.790.000	12.608.608.000	8.884.818.000
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.781.059.300	6.199.969.000	- 581.090.300
Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.781.059.300	6.199.969.000	- 581.090.300
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	13.245.407.000	12.930.358.000	- 315.049.000
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	13.245.407.000	12.930.358.000	- 315.049.000
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3.021.047.000	3.101.183.000	80.136.000
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.021.047.000	3.101.183.000	80.136.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	8.692.781.000	7.061.027.600	- 1.631.753.400
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	8.692.781.000	7.061.027.600	-1.631.753.400
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	170.957.500	17.001.000	- 153.956.500
Dinas Komunikasi Dan Informatika	170.957.500	17.001.000	- 153.956.500
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	79.835.200	133.556.000	53.720.800
Dinas Komunikasi Dan Informatika	79.835.200	133.556.000	53.720.800
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	145.000.000	668.395.500	523.395.500
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	145.000.000	668.395.500	523.395.500
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	724.378.600	832.188.000	107.809.400
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	724.378.600	832.188.000	107.809.400

URUSAN/ OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.815.047.400	2.453.794.000	- 361.253.400
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.815.047.400	2.453.794.000	- 361.253.400
Urusan Pemerintahan Pilihan	66.192.346.000	38.731.016.400	- 27.461.329.600
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	9.342.778.000	8.764.954.000	- 577.824.000
Dinas Peternakan Dan Perikanan	9.342.778.000	8.764.954.000	- 577.824.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	18.942.635.000	3.837.019.400	- 15.105.615.600
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	18.942.635.000	3.837.019.400	- 15.105.615.600
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	11.052.138.000	3.348.987.000	- 7.703.151.000
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	10.192.138.000	2.448.613.000	-7.743.525.000
Dinas Peternakan Dan Perikanan	860.000.000	900.374.000	40.374.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7.031.805.000	3.749.204.000	- 3.282.601.000
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	7.031.805.000	3.749.204.000	-3.282.601.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	19.428.827.000	19.015.852.000	- 412.975.000
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	19.428.827.000	19.015.852.000	- 412.975.000
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	394.163.000	15.000.000	- 379.163.000
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	394.163.000	15.000.000	- 379.163.000
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	73.655.699.800	72.427.803.000	- 1.227.896.800
Sekretariat Daerah	35.063.860.800	25.926.547.000	- 9.137.313.800
Sekretariat Daerah	35.063.860.800	25.926.547.000	-9.137.313.800
Sekretariat DPRD	38.591.839.000	46.501.256.000	7.909.417.000
Sekretariat DPRD	38.591.839.000	46.501.256.000	7.909.417.000
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	200.375.600.200	217.510.454.000	17.134.853.800
Perencanaan	8.633.931.100	7.172.550.000	- 1.461.381.100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	8.633.931.100	7.172.550.000	-1.461.381.100
Keuangan	185.281.115.000	205.164.456.000	19.883.341.000
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	165.129.875.000	184.105.782.000	18.975.907.000
Badan Pendapatan Daerah	20.151.240.000	21.058.674.000	907.434.000
Kepegawaian	4.720.883.000	4.425.323.000	- 295.560.000
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.720.883.000	4.425.323.000	- 295.560.000

URUSAN/ OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Pendidikan Dan Pelatihan	1.010.579.000	378.625.000	- 631.954.000
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.010.579.000	378.625.000	- 631.954.000
Penelitian Dan Pengembangan	729.092.100	369.500.000	- 359.592.100
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	729.092.100	369.500.000	- 359.592.100
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10.038.512.000	10.000.249.000	- 38.263.000
Inspektorat Daerah	10.038.512.000	10.000.249.000	- 38.263.000
Inspektorat	10.038.512.000	10.000.249.000	- 38.263.000
Unsur Kewilayahan	48.045.394.000	45.655.950.000	- 2.389.444.000
Kecamatan	48.045.394.000	45.655.950.000	- 2.389.444.000
Kecamatan Panca Lautang	3.435.243.000	3.258.833.000	- 176.410.000
Kecamatan Tellu Limpoe	5.495.166.000	5.203.073.000	- 292.093.000
Kecamatan Watang Pulu	5.718.706.000	5.484.230.000	- 234.476.000
Kecamatan Maritengngae	8.084.155.000	7.684.244.000	- 399.911.000
Kecamatan Wattang Sidenreng	3.477.917.000	3.362.922.000	- 114.995.000
Kecamatan Dua Pitue	3.371.705.000	3.104.144.000	- 267.561.000
Kecamatan Pitu Riawa	2.949.992.000	2.830.899.000	- 119.093.000
Kecamatan Pitu Riase	2.684.392.000	2.581.835.000	- 102.557.000
Kecamatan Baranti	5.626.125.000	5.347.984.000	- 278.141.000
Kecamatan Panca Rijang	5.429.142.000	5.217.530.000	- 211.612.000
Kecamatan Kulo	1.772.851.000	1.580.256.000	- 192.595.000
Unsur Pemerintahan Umum	4.459.144.000	4.458.644.000	- 500.000
Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.459.144.000	4.458.644.000	- 500.000
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.459.144.000	4.458.644.000	- 500.000

Sumber : Data Diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renja Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (kelima) atau tahun terakhir yang sekaligus merupakan penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**. Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi, yakni “Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan Masyarakat yang Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, kelima pokok visi tersebut dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan di masa depan, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Pokok Visi

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Berkembangnya Sidenreng Rappang menjadi daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Religius	Terwujudnya masyarakat Sidenreng Rappang menjadi insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
	Adil	Terbangunnya Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan, serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

Sebagai upaya mewujudkan visi maka dirumuskan Misi yang berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur. Untuk mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera, maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan;
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*;
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*), sehat dan mandiri;
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Berdasarkan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok visi, dengan maksud untuk menunjukkan langkah-langkah nyata yang hendak dilakukan untuk mencapai impian dan kondisi ideal yang dikehendaki lima tahun ke depan. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Adil dan Sejahtera	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan SDM dan akses kualitas pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat
2.	Agribisnis yang Maju dan Sejahtera	Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mengembangkan potensi pertanian dan daya saing produk yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan dan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan agribisnis, UMKM, dan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah.
3.	Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera	Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	Membangun kerjasama investasi dan usaha melalui peningkatan daya saing dan kualitas SDM dan produk unggulan daerah untuk memperluas penyediaan lapangan kerja baru.
4.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang mencakup infrastuktur jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, irigasi, serta sarana dan prasarana permukiman.
5.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i> .	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme, penataan kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan public yang responsif
6.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (<i>smart village</i>), sehat dan mandiri.	Menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan Bumdes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang profesional, kreatif dan inovatif.
7.	Religius, Aman	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, pelestarian seni budaya serta pembinaan keolahragaan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang religius, aman, dan kondusif.

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

No	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023	Misi RPJMD Kab. Sidenreng Rappang 2018-2023
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	<u>Misi 4</u> Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter.	<u>Misi 1</u> Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	<u>Misi 3</u> Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.	<u>Misi 2</u> Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
		<u>Misi 5</u> Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan.	<u>Misi 3</u> Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
3	Pembangunan Berkeadilan Yang Merata Dan berkeadilan	<u>Misi 2</u> Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.	<u>Misi 4</u> Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan
			<u>Misi 6</u> Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (<i>smart village</i>), sehat dan mandiri
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	<u>Misi 5</u> Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan.	<u>Misi 4</u> Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan
5	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	<u>Misi 1</u> Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	<u>Misi 7</u> Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		

No	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023	Misi RPJMD Kab. Sidenreng Rappang 2018-2023
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		<p><i>Misi 5</i> Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i></p>
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

Berdasarkan Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPd.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPd sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 yang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, menjadi landasan Perubahan RKPd Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum tabel berikut:

Tabel 4.4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Indikator dan Target Kinerja Perubahan RPJMD

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja tujuan / Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD 2023			
Misi 1	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat							
	Tujuan 1	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	72.18	
		Sasaran 1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	2	Indeks Pendidikan	Indeks	62.94	63.93
		Sasaran 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Indeks Kesehatan	Indeks	77.55	77,34
		Sasaran 3	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53.84	59,01
Misi 2	Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
	Tujuan 2	Meningkatkan pendapatan masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	51.00	51,26	
		Sasaran 4	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.86	4.51-6,01
		Sasaran 5	Menurunnya tingkat kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	%	5.11	3,17
		Sasaran 6	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	8	Gini Ratio	Poin	0.354	0.328
Misi 3	Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru							
	Tujuan 3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.56	5.65	
Sasaran 7		Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	10	Nilai Investasi	Rp. Triliun	4.46856	3.946,04	
Misi 4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan							
Tujuan 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	9.06	5,81-7,71		

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja tujuan / Sasaran		Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD 2023	
		Sasaran	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76.02	77,22
		8						
		Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66.42	67,48
		9						
Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i>								
Misi 5	Tujuan 5		Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54.8	71,11 (BB)
		Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	15	Nilai SAKIP	Poin	63.53	78,78 (BB)
		10						
		Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78.85	88,35 (A)
		11						
		Sasaran	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.32	2,60
		12						
Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri								
Misi 6	Tujuan 6		Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7825	0,7854
		Sasaran	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	%	83.82	85,29
		13						
Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif								
Misi 7	Tujuan 7		Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya	20	Angka Kriminalitas	Kasus	621	339
		Sasaran	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	74.07	76,11
		14						

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan sekaligus merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025.

Dokumen RPJPN Tahun 2005-2025 mengamanatkan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Gambar 4.1
Visi Presiden Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024



Sumber: Data diolah Tim RKPd Tahun 2023

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan kedalam Sembilan poin Nawacita yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri Dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan System Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya; (7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; Serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan Tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi public, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemic *covid-19*, dan isu strategis yang menjadi perhatian. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industry dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan *decent job*, serta percepatan pemabngunan infrastruktur dasar yang anantara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

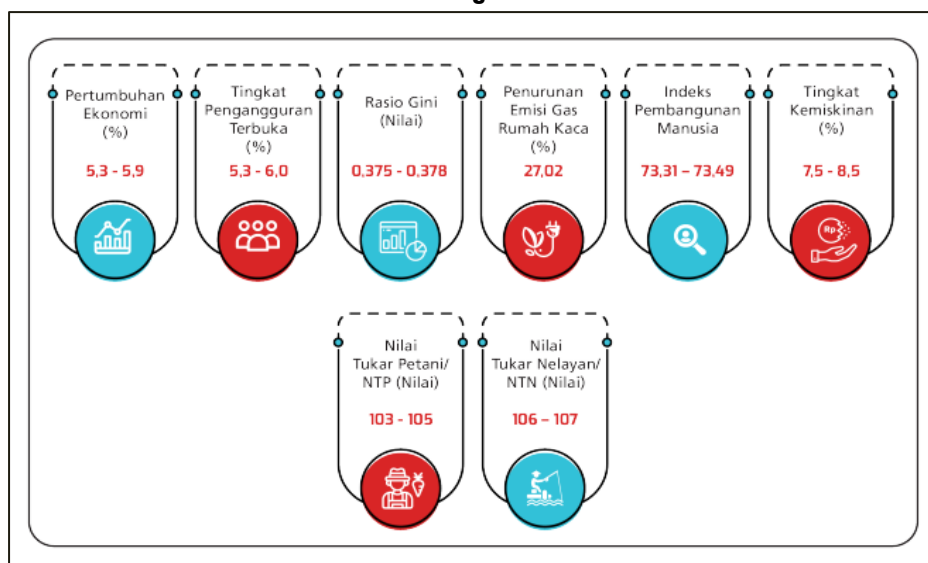
4.2.2. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah:

- a. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi; (b) tingkat pengangguran terbuka; (c) rasio gini; (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Gambar 4.2
Indikator Pembangunan Tahun 2023



Sumber data: RKP Tahun 2023

4.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan; (3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*; (4) Mendorong pemulihan dunia usaha; (5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); (7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan (8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pemabngunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis dibawah ini:

Gambar 4. 3
Arah Kebijakan RKP Tahun 2023



Sumber: Narasi RKP Tahun 2023

Gambar 4. 4
Tema RKP Tahun 2023

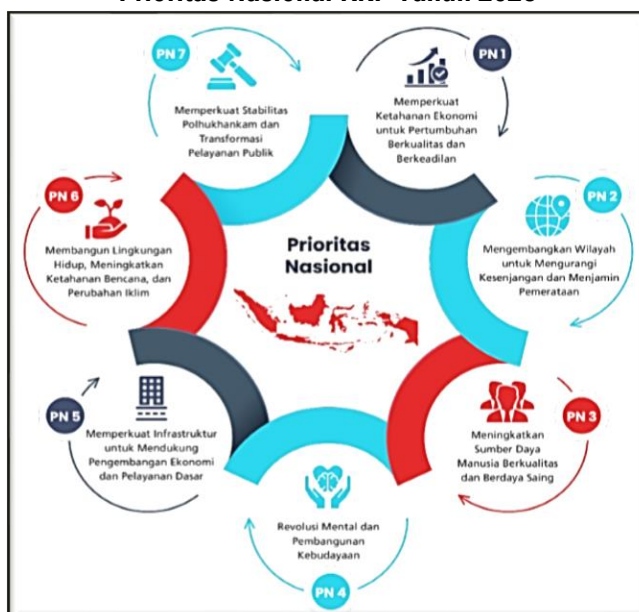


Sumber: Narasi RKP Tahun 2023

4.2.4. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.

Gambar 4.5
Prioritas Nasional RKP Tahun 2023



Sumber: Narasi RKP Tahun 2023.

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN diuraikan sebagai berikut:

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan:

Sasaran PN1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industry pengolahan, (e) kontribusi PDB industry pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industry pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

Sasaran PN2 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN3 adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan social, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan Pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;

4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

PN 4: Revolusi Mental; dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN4 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental. dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN5 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;

3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan system angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
4. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sector energi (juta ton);
5. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN7 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
3. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan public nasional;
5. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

4.2.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang teralhir dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu ***Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Peningkatan Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tema yang ditetapkan Pemerintah Sulawesi Selatan pada tahun 2023 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2018 - 2023 dalam bentuk pernyataan – pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah. Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2021-2023). Sasaran ini juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018- 2023 berdasarkan Misi, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penjabaran tujuan pada Misi 1 adalah Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - 2) Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- b. Penjabaran tujuan pada Misi 2 adalah Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
- c. Penjabaran tujuan pada Misi 3 adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
 - 2) Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat
- d. Penjabaran tujuan pada Misi 4 adalah Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 3) Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
 - 4) Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
- e. Penjabaran tujuan pada Misi 5 terbagi atas 2 tujuan yaitu:
- 1) Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
 - 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan rumusan sasaran:
 - Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dijabarkan diatas, selanjutnya disertai dengan indikator tujuan dan sasaran setiap tahun untuk menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur. Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, khususnya pemulihan perekonomian yang terdampak pandemic Covid-19, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan inovasi.

Pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan diarahkan untuk meningkatkan produktifitas komoditas unggulan sebagai upaya mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekspor.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kedalam pembangunan kawasan Parepare. Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan

pusat pertumbuhan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai lumbung pangan, optimalisasi fungsi Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat dan peningkatan kemantapan jalan provinsi.

Target indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Makro Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD 2023	Target Perubahan RKPD 2023
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5.09	5.04-6.52	5.04-6.52
2	Tingkat kemiskinan	%	8.66	7.45	7.45
3	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4.51	5.69	5.69
4	Gini Rasio	Poin	0.365	0.381	0.380
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72.82	73.05	73.05
6	PDRB perkapita (ADHB)	Juta Rp	65.59	65.88	65.98

Sumber Data: Rahnir Perubahan RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2023.

4.2.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 diarahkan untuk menyelesaikan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum tuntas sampai dengan periode tahun 2018-2023 sesuai dengan visi dan misi yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah **“Pemantapan daya saing dan pembangunan manusia yang mandiri menuju masyarakat yang sejahtera”**. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Penguatan perekonomian daerah;
- c. Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;
- d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;
- e. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. Pengembangan kawasan pedesaan;

g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 difokuskan pada sasaran pembangunan sebagaimana pada sajian tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.6
Tabel Prioritas Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023			Ket.			
					P-RPJMD	RKPD Pokok	P-RKPD				
1	Peningkatan akses layanan Pendidikan dan kesehatan	1	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,06	72,18	72,58	72,68	<i>Mengalami perubahan target akibat perubahan target pada indeks kesehatan</i>
		2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	2	Indeks Pendidikan	Indeks	62,94	63,93	64,03	64,03	
		3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Indeks Kesehatan	Indeks	77,55	77,34	77,51	77,85	<i>Mengalami perubahan target karena capaian telah melampaui target</i>
		4	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56,71	59,01	59,01	59,01	
2	Penguatan perekonomian daerah	5	Meningkatkan pendapatan masyarakat	5	PDRB Perkapita AHB	Juta Rupiah	51,00	51,26	51,88	51,88	
		6	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86	4,51-6,01	5,76-6,58	5,76-6,58	
		7	Menurunnya angka kemiskinan	7	Tingkat kemiskinan	%	5,11	3,17	3,60	3,60	

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023			Ket.			
					P-RPJMD	RKPD Pokok	P-RKPD				
		8	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	8	Gini Ratio	Poin	0,354	0,328	0,321	0,321	
3	Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah	9	Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,56	5,65	4,65	3,50	<i>Mengalami perubahan target karena capaian telah melampaui target</i>
		10	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	10	Nilai Investasi	Rp. Triliun	4.468,56	3.946,04	3.946,04	3.946,04	
4	Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	11	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)	%	9,06	5,81-7,71	5,81 -7,71	9,06-10,96	<i>Mengalami perubahan target karena capaian telah melampaui target</i>
		12	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76,02	77,22	77,22	77,22	
		13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,42	67,48	67,48	67,48	
5	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	14	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	54,80	71,11 (BB)	71,11 (BB)	71,11 (BB)	

Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023			Ket.			
					P-RPJMD	RKPD Pokok	P-RKPD				
		15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	15	Nilai SAKIP	Poin	63,53	78,78 (BB)	78,78 (BB)	78,78 (BB)	
		16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78,85	88,35 (A)	88,35 (A)	88,35 (A)	
		17	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,32	2,60	2,60	2,60	
6	Pengembangan Kawasan pedesaan	18	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7825	0,7854	0,7854	0,7854	
		19	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	19	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	%	83,82	85,29	85,29	85,29	
7	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	20	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya	20	Angka Kriminalitas	Kasus	621	339	339	339	
		21	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	74,07	76,11	76,11	76,11	

Sumber: Data diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023.

Perubahan terhadap target capaian indikator kinerja utama pembangunan pada perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terjadi pada beberapa indikator yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami perubahan target capaian pada perubahan RKPD Tahun 2023 akibat adanya perubahan target pada komponen pembentuknya yakni indeks Kesehatan dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 77.55 telah melampaui target Tahun 2023 yang hanya 77.51;

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang selama dua tahun terakhir Tahun 2021 sebesar 4.93 persen mengalami penurunan menjadi 3.56 persen pada Tahun 2022 dengan penurunan sebesar 1.37 persen dan capaian Tahun 2022 ini telah melampaui target RKPD Tahun 2022 dan juga target RKPD Tahun 2023 4.65 persen.

3. Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi & Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)

Capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi & Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK) pada Tahun 2021 mencapai 6.29 persen dan mengalami peningkatan menjadi 9.06 persen di Tahun 2022 dan capaian Tahun 2022 ini telah melampaui target Tahun 2022 sebesar 3.91-5.81 dan telah melampaui Target 2023 sebesar 5.81-7.71 persen.

Perumusan isu strategis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi Tahun 2022, arah kebijakan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan arah kebijakan RKP Tahun 2023 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penyusunan isu strategis dan hubungannya dengan permasalahan dan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.7
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah aan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja				
		Global	Nasional	Provinsi	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Indeks Pembangunan Manusia Masih Berada Dibawah Rata-rata Provinsi dan Nasional	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang diimbangi dengan Perluasan Kesempatan Kerja	SDM Berkualitas	Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
							Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan				
							Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan				
							Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
2	Belum Optimalnya Pengelolaan Sektor Pariwisata	Pandemi covid-19	Defisit APBN dan Investasi	Belum optimalnya integrasi antar sector ekonomi dan ekosistem UMKM	Daya Saing Pariwisata	Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	Nilai Investasi				
3	Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka						Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka				
4	Masih Tingginya Angka Kemiskinan						Inflasi dan Daya Beli	Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Penguatan perekonomian daerah	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan	
5	Masih Tingginya Ketimpangan Masyarakat									Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio	
6	Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi						Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)	Rantai Nilai	Hilirisasi Komoditas Unggulan Berbasis Sumber Daya Alam belum optimal	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB
										Revitalisasi Sektor Pertanian	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja
		Global	Nasional	Provinsi	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Belum optimalnya infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	Perubahan Iklim	Pasokan ketersediaan pangan dan pasokan energi	Belum Optimalnya Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan bencana	Infrastruktur Ekonomi	Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)
				Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas			Indeks Layanan Infrastruktur	
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
				Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah		Pengembangan Kawasan pedesaan	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun
						Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)	
8	Belum optimalnya Tata Kelola pemerintahan	Transformasi Digital		Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Perwujudan Good Governance	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah			Nilai SAKIP	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja
		Global	Nasional	Provinsi	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
							Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman	Angka Kriminalitas
							Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani

Sumber Data: RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Misi RPJMD untuk Tahun 2023

No.	Misi P-RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	2	3	4	5
1	Misi 1: Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	PD1 Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;	Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2	Misi 2: Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PD 2 Penguatan perekonomian daerah;	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB
			Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi
			Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
			Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio
3	Misi 3: Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	PD 3 Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;	Meningkatkan Penyerapan Tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
			Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	Nilai Investasi
4	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	PD 4 Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi (ADHK)
			Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No.	Misi P-RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	2	3	4	5
5	Misi 5: Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i>	PD 5 Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6	Misi 6: Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (<i>smart village</i>), sehat dan mandiri	PD 6 Pengembangan kawasan pedesaan;	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun
			Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju Dan Mandiri (IDM)
7	Misi 7: Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	PD 7 Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius Dan Berbudaya	Angka Kriminalitas
			Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani

Sumber: RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Dalam penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 dan juga RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dengan demikian sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Adapun keselarasan prioritas pembangunan, tema dan sasaran pemabangunan daerah dengan RKP 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang

Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PD4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	PD2	Penguatan perekonomian daerah;
		PD6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	PD3	Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;

Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	PD6	Pengembangan kawasan pedesaan;
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD5	Peningkatan Pembangunan manusia	PD1	Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			PD7	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD2	Penguatan infrastruktur wilayah	PD4	Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PD7	Pelestarian lingkungan hidup		
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD1	Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	PD5	Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;

Sumber: RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RKP 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Dari 2 (dua) tabel dibawah dapat dilihat bahwa seluruh sasaran RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat mendukung seluruh sasaran RKP 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Keselarasan sasaran dan prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang, Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah:

Tabel 4.10
Keterkaitan antara prioritas sasaran Daerah dengan Prioritas sasaran RKP 2023

Nasional		Provinsi Sulawesi Selatan		Kabupaten Sidenreng Rappang	
Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	Penguatan perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah
			Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat		Menurunnya angka kemiskinan

Nasional		Provinsi Sulawesi Selatan		Kabupaten Sidenreng Rappang	
Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah		Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah
		Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah	Pengembangan Kawasan pedesaan	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri
			Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah	Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah					
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		
PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif	Peningkatan Pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan		Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat

Nasional		Provinsi Sulawesi Selatan		Kabupaten Sidenreng Rappang	
Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
			Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat		
PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		Perbaiki tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik	Perbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2023

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Adapun rumusan strategi untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.3.1. Strategi Pembangunan Tahun 2023

1. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan

Meningkatkan pemerataan akses Pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan unit sekolah baru, penambahan dan rehabilitasi ruang kelas baru dan ruang guru/kepala sekolah/TU, sarana dan prasarana utilitas sekolah seperti pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir serta pengadaan pakaian seragam sekolah yang merupakan program nyata Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang sebagai bentuk dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Pendidikan gratis. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan melalui pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

2. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat

Meningkatkan akses terhadap layanan Kesehatan melalui peningkatan kualitas pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita, Pelayanan Kesehatan lansia, usia pendidikan dasar dan usia produktif, Pelayanan Kesehatan bagi penderita penyakit menular dan tidak menular dan lain-lain. Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan seperti pembangunan rumah sakit khusus penanganan narkoba, pembangunan/rehabilitasi rumah sakit, puskesmas dan fasilitas Kesehatan lainnya. Perbaiki pola hidup dan sistem gizi masyarakat melalui promosi Kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat di masyarakat yang disertai peningkatan kualitas tenaga Kesehatan melalui pendidikan pelatihan, diklat dan bimbingan teknis serta peningkatan kemampuan tenaga Kesehatan lainnya.

3. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Olehnya itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan PUG, penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan jabatan publik serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

4. Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual disertai dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam rangka peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB adalah pemenuhan sarana dan prasarana pertanian melalui pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, jalan tani/ jalan produksi, embung, dam parit, dan sumur bor, pengendalian hama, pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan benih/ bibit ternak, inseminasi buatan, penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan, dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh dan petani. Sebagai upaya peningkatan produksi sektor perikanan dilakukan kegiatan restocking, pembuatan kolam percontohan, dan peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh dan nelayan.

Selain itu untuk meningkatkan daya saing produk dilakukan melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan

teknologi yang didukung pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro. Upaya memperluas akses bagi promosi dan pemasaran produk lokal UMKM dibangun pasar ole-ole dan mengikuti kegiatan pameran pembangunan baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

5. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin serta meningkatkan pendapatan kelompok penduduk terbawah dengan memperluas skema perlindungan dan bantuan sosial

Dalam rangka penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan dukungan aktif para pemangku kepentingan dan perbaikan sistem koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang menjadi garda terdepan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan tugas utama melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan diantaranya pengelolaan dan pemutakhiran data penduduk miskin, pemenuhan SPM social meliputi rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti.

Masalah kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di kalangan masyarakat, olehnya itu dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya kelompok penduduk dengan pendapatan terbawah di Kabupaten Sidenreng Rappang maka dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin.

6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan, pengendalian disertai dengan pendekatan sosial kemasyarakatan

Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya dilakukan pembinaan dan penyuluhan, pengamanan dan pengawalan serta melakukan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada. Disamping itu, dilakukan pendekatan sosial kemasyarakatan melalui pembinaan kepemudaaan yang disertai penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, Pembangunan/Rehabilitasi Pesantren, pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA), pemberian insentif imam dan pegawai syara' serta umroh untuk ASN berprestasi.

7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan investasi serta daya saing pariwisata

Meningkatkan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan membangun jaringan kemitraan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk mempermudah investor dalam berinvestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata dengan melakukan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Dalam upaya meningkatkan persentase desa maju dan mandiri pada aspek ketahanan sosial, ekonomi,

dan lingkungan, maka dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan desa yang berbasis Teknologi dan informasi desa;
- b. Penyediaan sarana transportasi desa;
- c. Peningkatan penyerapan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk mendukung prioritas pembangunan daerah;
- d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan ;
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES.

9. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.

Sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan indeks layanan infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

- a. Pemenuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
- b. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
- c. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
- d. Pembangunan dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan perdesaan
- e. Pembangunan dan pemeliharaan system pengelolaan air limbah

10. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terhadap pemanfaatan lingkungan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana melalui pengelolaan limbah, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah, pengendalian emisi gas rumah kaca untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang merupakan komponen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

11. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan, serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan, serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Mengoptimalkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Penataan dan penguatan organisasi.

12. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas maka perlu ditingkatkan kualitas SDM dan peningkatan pada institusi pelayanan yang terdiri dari delapan unit pelayanan yaitu pelayanan

kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan & pencatatan sipil, pelayanan di kecamatan, pelayanan pajak dan pelayanan pasar.

13. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan, maka perlu adanya peningkatan pelayanan pemerintah berbasis elektronik melalui peningkatan layanan, kelembagaan, layanan administrasi pemerintahan dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga semua instansi pemerintah menggunakan aplikasi atau system dalam administrasi dan pelayanannya.

Bila dihubungkan dengan prioritas pembangunan daerah, maka dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.11
Sasaran, Strategi dan Penjelasan Strategi Pembangunan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Penjelasan Strategi
1	PD1 Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses Pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan unit sekolah baru, penambahan dan rehabilitasi ruang kelas baru dan ruang guru/kepala sekolah/TU, sarana dan prasarana utilitas sekolah seperti pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir serta pengadaan pakaian seragam sekolah yang merupakan program nyata Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang sebagai bentuk dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Pendidikan gratis. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan melalui pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
		Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat	Meningkatkan akses terhadap layanan Kesehatan melalui peningkatan kualitas pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita, Pelayanan Kesehatan lansia, usia pendidikan dasar dan usia produktif, Pelayanan Kesehatan bagi penderita penyakit menular dan tidak menular dan lain-lain. Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan seperti pembangunan rumah sakit khusus penanganan narkoba, pembangunan/ rehabilitasi rumah sakit, puskesmas dan fasilitas Kesehatan lainnya. Perbaikan pola hidup dan sistem gizi masyarakat melalui promosi Kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat di masyarakat yang disertai peningkatan kualitas tenaga Kesehatan melalui pendidikan pelatihan, diklat dan bimbingan teknis serta peningkatan kemampuan tenaga Kesehatan lainnya.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Penjelasan Strategi
		Meningkatkan peran kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.	Pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Olehnya itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan PUG, penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan jabatan publik serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
2	PD 2 Penguatan perekonomian daerah;	Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual disertai dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian	Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam rangka peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB adalah pemenuhan sarana dan prasarana pertanian melalui pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, jalan tani/ jalan produksi, embung, dam parit, dan sumur bor, pengendalian hama, pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan benih/ bibit ternak, inseminasi buatan, penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan, dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh dan petani. Sebagai upaya peningkatan produksi sektor perikanan dilakukan kegiatan restocking, pembuatan kolam percontohan, dan peningkatan kapasitas sumber daya penyuluh dan nelayan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing produk dilakukan melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi yang didukung pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro. Upaya memperluas akses bagi promosi dan pemasaran produk lokal UMKM dibangun pasar ole-ole dan mengikuti kegiatan pameran pembangunan baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
		Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin serta meningkatkan pendapatan kelompok penduduk terbawah dengan memperluas skema perlindungan dan bantuan sosial.	Dalam rangka penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan dukungan aktif para pemangku kepentingan dan perbaikan sistem koordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang menjadi garda terdepan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan tugas utama melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan diantaranya pengelolaan dan pemutakhiran data

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Penjelasan Strategi
			<p>penduduk miskin, pemenuhan SPM social meliputi rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti.</p> <p>Masalah kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di kalangan masyarakat, olehnya itu dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya kelompok penduduk dengan pendapatan terbawah di Kabupaten Sidenreng Rappang maka dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin.</p>
3	PD 7 Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan, pengendalian disertai dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.	Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya dilakukan pembinaan dan penyuluhan, pengamanan dan pengawalan serta melakukan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada. Disamping itu, dilakukan pendekatan sosial kemasyarakatan melalui pembinaan kepemudajaan yang disertai penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, Pembangunan/ Rehabilitasi Pesantren, pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA), pemberian insentif imam dan pegawai syara' serta umroh untuk ASN berprestasi.
4	PD 3 Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan investasi serta daya saing pariwisata.	Meningkatkan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan membangun jaringan kemitraan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk mempermudah investor dalam berinvestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata dengan melakukan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata.
5	PD 6 Pengembangan kawasan pedesaan;	Meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	<p>Dalam upaya meningkatkan persentase desa maju dan mandiri pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan desa yang berbasis Teknologi dan informasi desa. 2. Penyediaan sarana transportasi desa 3. Peningkatan penyerapan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Penjelasan Strategi
			4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
6	PD 4 Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES Sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan indeks layanan infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai melalui upaya: a. Memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan b. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi c. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin d. Pembangunan dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan perdesaan Pembangunan dan pemeliharaan system pengelolaan air limbah
		Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.	Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terhadap pemanfaatan lingkungan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana melalui pengelolaan limbah, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah, pengendalian emisi gas rumah kaca untuk meningkatkan indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan yang merupakan komponen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
7	PD 5 Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan, serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.	Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan, serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Mengoptimalkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Penataan dan penguatan organisasi.
		Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah.	Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas maka perlu ditingkatkan kualitas SDM dan peningkatan pada institusi pelayanan yang terdiri dari delapan unit pelayanan yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan di kecamatan, pelayanan pajak dan pelayanan pasar.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Penjelasan Strategi
		Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan.	Dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan, maka perlu adanya peningkatan pelayanan pemerintah berbasis elektronik melalui peningkatan layanan, kelembagaan, layanan administrasi pemerintahan dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga semua instansi pemerintah menggunakan aplikasi atau system dalam administrasi dan pelayanannya.

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

Dalam mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan Arah Kebijakan pada tiap sasaran Pembangunan pada Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut:

4.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Di samping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun arah kebijakan Tahun 2023 sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan
2. Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat serta modernisasi pelayanan kesehatan pada rumah sakit hingga puskesmas dan jaringannya
3. Pemantapan peran serta perempuan dalam pembangunan dan perluasan cakupan perlindungan perempuan dan anak melalui pemberian bantuan hukum bagi kasus kekerasan
4. Pemantapan pengelolaan sistem agribisnis berbasis petik, olah, kemas dan jual yang ditunjang dengan Inovasi dan teknologi serta dukungan jaringan kerjasama dalam keseluruhan rantai pasok hingga konsumen
5. Pengembangan sinergi multipihak dalam intervensi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terpadu baik untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin
6. Pemantapan akses lapangan kerja, sistem investasi dan daya saing industri pariwisata daerah
7. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

8. Pemantapan kapasitas sistem pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan kesadaran serta partisipasi masyarakat
9. Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat
10. Pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar
11. Pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik di semua instansi pemerintah daerah
12. Pembinaan BUMDes melalui Pengembangan kerjasama antar desa serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan potensi desa yang produktif dan berkelanjutan
13. Pemantapan sarana prasarana peribadatan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, serta pembinaan dan penyiapan sarana dan prasarana olahraga.

Keterkaitan antara Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12

Keterkaitan Proriotas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023 sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2023	Penjelasan Arah Kebijakan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera					
Misi – 1 : Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat					
1	PD1 Peningkatan akses Pendidikan dan kesehatan	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan;	Peningkatan kualitas lulusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan akses layanan pendidikan seperti ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, mobiler, alat praktik dan peraga siswa serta peningkatan tenaga pendidik dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik tingkat anak usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan kesetaraan
		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, menciptakan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.	Perbaiki pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat serta modernisasi pelayanan kesehatan pada rumah sakit hingga puskesmas dan jaringannya	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta modernisasi pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan.
		Sasaran 3: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarkan informasi kesetaraan gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.	Pemantapan peran serta perempuan dalam pembangunan dan perluasan cakupan perlindungan perempuan dan anak melalui pemberian bantuan hukum bagi kasus kekerasan	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, pelaksanaan dan pendampingan pengarusutamaan gender, pemberian advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum social dan ekonomi serta menyediakan layanan pengaduan dan rujukan lanjutan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2023	Penjelasan Arah Kebijakan
Misi – 2 : Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.					
2	PD 2 Penguatan perekonomian daerah	Sasaran 4:	Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual disertai dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian	Pemantapan pengelolaan sistem agribisnis berbasis petik, olah, kemas dan jual yang ditunjang dengan Inovasi dan teknologi serta dukungan jaringan kerjasama dalam keseluruhan rantai pasok hingga konsumen	pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan dilakukan dengan sinergi berbagai pihak mulai dari bahan baku sampai pengolahan dan pengemasan dengan menggunakan teknologi serta pengembangan inovasi.
		Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah.			
		Sasaran 5:			
		Menurunnya tingkat kemiskinan.			
		Sasaran 6:	Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin serta meningkatkan pendapatan kelompok penduduk terbawah dengan memperluas skema perlindungan dan bantuan sosial.	Pengembangan sinergi multipihak dalam intervensi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terpadu baik untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.	Terlaksananya pendataan keluarga miskin, pemberian bantuan pengembangan ekonomi masyarakat miskin, fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan SDM serta desain dan teknologi,
	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan.				
Misi – 3 : Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru					
3	PD 3 Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Sasaran 7 :	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan investasi serta daya saing pariwisata.	Pemantapan akses lapangan kerja, sistem investasi dan daya saing industri pariwisata daerah	Penciptaan lapangan kerja dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industry kreatif, UMKM; terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan strategis pariwisata daerah
		Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah			
Misi – 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.					
4	PD 4	Sasaran 8:	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan	Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.	Pembangunan jalan kabupaten, jalan dusun, jalan lingkungan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, perintisan dan peningkatan jalan tani yang secara langsung dan tidak langsung dapat

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2023	Penjelasan Arah Kebijakan
			dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.		mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan
		Sasaran 9: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.	Pemantapan kapasitas sistem pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan kesadaran serta partisipasi masyarakat	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Kawasan permukiman yang sehat, pelaksanaan pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
Misi – 5 : Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan Electronic Governance.					
5	PD 5 Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sasaran 10: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan, serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat	Pengembangan sistem akuntabilitas pemerintah daerah melalui peningkatan SDM pengelola kinerja, peningkatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kinerja secara terpadu dengan dukungan tim pengawasan pemerintah daerah
		Sasaran 11: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah	Pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai bidang diantaranya pelayanan publik bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan, kependudukan dan catatan sipil, air bersih, perdagangan, tenaga kerja, pendapatan daerah dan pelayanan publik di kecamatan
		Sasaran 12:	Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan	Pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik di semua instansi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan jangkauan internet di semua perangkat daerah sampai kecamatan serta pengembangan aplikasi pemerintah daerah seperti proses bisnis pemerintah berbasis elektronik dan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2023	Penjelasan Arah Kebijakan
Misi – 6 : Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat dan Mandiri.					
6	PD 6 Pengembangan Kawasan pedesaan	Sasaran 13 : Terwujudnya desa maju dan mandiri.	Mengembangkan sistem Meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan BUMDes melalui Pengembangan kerjasama antar desa serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan potensi desa yang produktif dan berkelanjutan	Pengembangan dan pemanfaatan potensi desa dengan pengaktifan bumdes pada setiap desa yang berfungsi memberikan keuntungan bagi kas desa melalui penambahan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa
Misi – 7 : Memajukan dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif.					
7	PD 7 Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religious, berbudaya dan aman	Sasaran 14 : Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan, pengendalian disertai dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.	Pemantapan sarana prasarana peribadatan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, serta pembinaan dan penyiapan sarana dan prasarana olahraga.	Pemberian bantuan pembangunan masjid, pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemberian insentif imam dan pegawai syara serta peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan.

Sumber: RKPД Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu tahun, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah untuk masa satu tahun pada tahun rencana.

Adapun kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan RKPD Pokok 2023, Perubahan RPJMD Dan Perubahan RKPD Tahun 2023

No.	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6= (5-3)
4	PENDAPATAN DAERAH	1,240,278,228,000	1,299,859,550,000	1,218,710,946,000	(21,567,282,000)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	166,745,269,174	136,722,868,000	180,638,848,000	13,893,578,826
4.1.1	Pajak Daerah	55,886,000,000	39,266,690,000	57,536,000,000	1,650,000,000
4.1.2	Retribusi Daerah	13,182,074,174	23,595,786,000	13,555,653,000	373,578,826
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,000,000,000	8,000,000,000	7,500,000,000	1,500,000,000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	91,677,195,000	65,860,392,000	102,047,195,000	10,370,000,000
4.2	Pendapatan Transfer	1,068,932,958,826	1,110,949,082,000	1,032,956,658,000	(35,976,300,826)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	998,421,118,826	1,051,964,670,000	938,144,818,000	(60,276,300,826)
4.2.1.1	Dana Transfer Umum	669,281,123,343		615,286,645,000	(53,994,478,343)
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	16,167,200,000		11,345,560,000	(4,821,640,000)
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	653,113,923,343		603,941,085,000	(49,172,838,343)
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	261,913,583,483		322,858,173,000	60,944,589,517
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus	261,913,583,483		243,153,346,000	(18,760,237,483)
4.2.1.2.2	Dana Insentif Daerah	8,505,823,000		20,900,516,000	12,394,693,000

No.	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6= (5-3)
4.2.1.5	Dana Desa	58,720,589,000		58,804,311,000	83,722,000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70,511,840,000	58,984,412,000	94,811,840,000	24,300,000,000
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70,511,840,000		79,811,840,000	9,300,000,000
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya			15,000,000,000	15,000,000,000
4.2.2.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah				-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,600,000,000	52,187,600,000	5,115,440,000	515,440,000
4.3.1	Hibah	3,100,000,000	14,425,000,000	5,115,440,000	2,015,440,000
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya				-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				-
4.3.7	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1,500,000,000	37,762,600,000		(1,500,000,000)
5	BELANJA DAERAH	1,240,278,228,000	1,304,859,550,000	1,241,360,946,000	1,082,718,000
5.1	Belanja Operasi	849,385,454,000	894,666,154,979	889,949,829,000	40,564,375,000
5.1.01	Belanja Pegawai	519,575,404,000	525,751,496,787	536,275,134,746	16,699,730,746
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	292,831,693,000	321,798,382,369	329,257,681,602	36,425,988,602
5.1.03	Belanja Bunga	1,050,000,000	1,224,120,000	900,000,000	(150,000,000)
5.1.05	Belanja Hibah	35,928,357,000	45,753,779,258	23,249,012,652	(12,679,344,348)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	138,376,565	268,000,000	268,000,000
5.2	Belanja Modal	260,063,856,000	268,527,550,215	217,961,318,000	(42,102,538,000)
5.2.01	Belanja Modal	260,063,856,000	268,527,550,215	217,961,318,000	(42,102,538,000)
5.3	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000	3,060,300,000	6,000,000,000	(1,000,000,000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000	3,060,300,000	6,000,000,000	(1,000,000,000)
5.4	Belanja Transfer	123,828,918,000	138,605,544,806	127,449,799,000	3,620,881,000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	5,000,000,000	3,025,732,891	7,144,166,000	2,144,166,000

No.	Uraian	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RPJMD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6= (5-3)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	118,828,918,000	135,579,811,915	120,305,633,000	1,476,715,000
	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	-	7,500,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	-	7,500,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
	Pengeluaran Pembiayaan	2,350,000,000	2,500,000,000	2,350,000,000	-
	Penyertaan Modal	-			-
	Pembayaran Cicilan Pokok	2,350,000,000	2,500,000,000	2,350,000,000	-
	Pembiayaan Netto	(2,350,000,000)	5,000,000,000	22,650,000,000	25,000,000,000
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Data diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023

Program prioritas merupakan program-program yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan resntra perangkat daerah dan renja perangkat daerah termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta pendanaannya.

Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 5.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPd Tahun 2023

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPd Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPd Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas					122,719,314,700		151,605,756,550	
	Sasaran 1:		Indeks Pendidikan	64.03%	83,850,711,300	64.03%	105,125,422,280	
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	72,757,357,300	100%	94,098,096,180	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%		100%		
			Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	100%		100%		
			Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	100%		100%		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	99.56%	11,093,354,000	99.56%	11,027,326,100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Sasaran 2:		Indeks Kesehatan	77.51%	38,676,123,400	77.51%	46,423,743,270	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15%	47,570,031,700	15%	53,965,747,180	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	96%	3,292,648,000	96%	5,800,000,000	RSUD Nene Mallomo

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	100%	812,219,000	80%	450,000,000	RSUD Arifin Nu'mang
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	90%	111,337,400	90%	1,703,340,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
			Cakupan Tenaga Kesehatan yang terlatih	15,12%	70,000,000	-	-	RSUD Arifin Nu'mang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80%	1,447,799,500	80%	48,040,000	Dinas Kesehatan, Dalduk Dan KB
	Sasaran 3:		Indeks Pemberdayaan Gender	80%	192,480,000	80%	56,591,000	
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	99%	170,990,000	99%	506,591,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	100%	71,490,000	-	-	
Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Perlindungan Sosial					64,335,677,600		43,741,999,100	
	Sasaran 4:		Pertumbuhan Ekonomi	5.76-6.58%	15,245,239,000	5.76-6.58%	3,755,881,000	
	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	100%	6,603,167,000	100%	1,606,637,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan KP

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Produksi daging	5.358.011 Kg	356,300,000	5.358.011 Kg	587,999,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Jumlah produksi telur	83,362,100 Kg		83,362,100 Kg		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100%	1,856,370,000	100%	340,145,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, PKP
			Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	21%	273,700,000	21%	245,575,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	100%	331,761,000	100%	240,231,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	100%	144,840,000	100%	6,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP	1:15	1,576,601,000	1:15	495,331,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Usaha Peternakan/ Kelompok Ternak	1 : 12 Rasio	215,000,000	1 : 12 Rasio	58,000,000	

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM	91.80 %	737,500,000	91.80%	25,000,000	Dinkop. UKM, Tenaga Kerja Dan Transmgrsi
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	6.20%	3,150,000,000	6.20%	150,463,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Sasaran 5:		Tingkat Kemiskinan	3.60%	20,122,341,400	3.60%	19,425,597,700	
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina	100%	231,514,400	100%	253,745,700	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang DiBina	100%	287,000,000	100%	107,785,000	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin	100%	175,000,000	100%	48,215,000	Dinas Sosial
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapat pembinaan	20.52%	19,403,827,000	20.52%	19,017,852,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pertumbuhan IKM	1%	25,000,000	-	-	
	Sasaran 6:		Gini Ratio	0.321 Poin	10,127,626,200	0.321 Poin	10,575,518,200	
	Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	137,374,200	100%	139,452,200	Dinas Sosial
		Program Hubungan Industrial	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan	91.20%	1,294,453,000	91.20%	1,264,453,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	75.20%	8,695,799,000	75.20%	9,171,613,000	Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Sasaran 14:		Persentase Desa Maju dan Mandiri	85.29%	18,840,471,000	85.29%	9,985,002,200	
	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda	100%	2,341,198,400	100%	1,887,357,700	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban	100%	4,287,904,800	100%	2,546,453,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100%	775,100,000	100%	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Presentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	77.43%	4,604,000,000	77.43%	2,031,631,500	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintah Daerah	100%	716,000,000	100%	204,780,000	Sekretariat Daerah
			Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang mengajukan proposal	100%	5,499,450,800	100%	1,801,025,000	
			Jumlah produk hukum yang dihasilkan	730 Dokumen	441,278,000	100%	685,000,000	
			Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	100%	165,044,000	100%	128,686,000	
					19,653,061,600		4,306,833,000	
	Sasaran 7:		Nilai Investasi	4.46856 Triliun Rp.	18,458,627,000	4.46856 Triliun Rp.	2,459,330,400	
Membangun Daya Saing Daerah Berbasis Inovasi Dan Potensi Lokal	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	100%	225,249,000	100%	204,685,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan promosi penanaman modal	100%	70,678,000	100%	30,018,000	DMPTSP
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	19,61%	16,844,950,000	19,61%	2,056,412,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	32,41%	1,317,750,000	32,41%	168,215,400	
	Sasaran 13:		Terwujudnya desa maju dan mandiri	85.29%	1,194,434,600	85.29%	1,847,502,600	

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Perkembangan Desa	-	-	-	-	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	25%	498,792,000	25%	502,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa/ Kelurahan dengan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100%	100,500,000	100%	500,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	595,142,600	100%	845,002,600	
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang berwawasan lingkungan					104,497,545,350		109,565,446,675	
	Sasaran 8:		Indeks Layanan Infrastruktur	77.22%	90,593,720,950	77.22%	100,960,377,875	
	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	75%	4,505,999,200	75%	4,310,122,400	Dinas PSDA
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	10%	250,000,000	10%	600,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	100%	2,700,000,000	100%	3,160,004,775	
Program Penyelenggaraan Jalan		Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	61%	69,809,186,350	61%	89,566,250,700		

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	600,000,000	-	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100%	5,281,003,400	100%	1,070,000,000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	7,447,532,000	100%	2,255,000,000	
	Sasaran 9:		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.48 Poin	13,903,824,400	67.48 Poin	8,605,068,800	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100%	1,068,923,000	100%	90,709,600	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	20%	2,813,467,300	20%	1,484,781,600	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	47.50%	10,021,434,100	47.50%	7,029,577,600	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					7,345,226,800		6,569,515,100	
	Sasaran 10:		Nilai Sakip	78.78 (BB) Poin	4,212,456,400	78.78 (BB) Poin	3,382,564,800	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	1,737,872,300	100%	1,150,199,800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	98%		98%		
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	729,092,100	100%	369,500,000	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	96%	1,745,492,000	96%	1,822,045,000	
	Sasaran 11:		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.35 (A) Poin	479,666,100	88.35 (A) Poin	890,152,800	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	92%	212,265,600	92%	226,135,100	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	97.53%	224,230,200	97.53%	80,505,600	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	43,170,300	100%	570,312,100	Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (impact/outcome)	RKPD Pokok Tahun 2023		Perubahan RKPD Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 12:		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.60 Poin	2,653,104,300	2.60 Poin	2,296,797,500	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	2,653,104,300	100%	2,296,797,500	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sumber: Data diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023

Program perangkat daerah adalah keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun dalam rangka menjalankan pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dijabarkan pada Tabel 5.3. berikut:

Tabel 5.3
Rencana Kerja Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			359,743,181,000	370,062,336,500					387,868,330,397			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	275,892,469,700	264,936,914,220				100 Persen	272,026,379,993		
1	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							201,455,622		
1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6,433,700	8,816,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	6,433,771	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11,345,500	11,345,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11,345,552	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9,773,300	9,773,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,773,578	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16,107,500	16,107,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	36,340,042	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	39,772,679	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	81,070,400	93,070,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	81,070,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	136,720,000	8,496,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	16,720,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				274,580,540,900	263,980,653,820			270,095,575,429	
1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37548 Orang/bulan	37548 Orang/bulan	274,545,573,000	263,914,517,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	37548 Orang/bulan	270,058,066,352	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	29,674,400	55,593,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	29,674,709	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,050,000	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	4,590,450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30 Dokumen	30 Dokumen	2,243,500	6,493,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Dokumen	3,243,918	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				209,887,500	164,224,500			355,100,500	
1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	4,985,500	4,985,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27 Paket	5,100,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	50 Laporan	204,902,000	159,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Laporan	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				94,512,000	13,766,000			383,500,000	
1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	44,504,000	3,126,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	50,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1 Unit	50,008,000	10,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	131,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diadakan	8 Unit	8 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 Unit	202,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				608,436,900	495,918,400			866,141,187	
1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1,530,150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	108,084,000	102,048,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	130,613,604	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	499,352,900	392,870,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	733,997,433	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112,642,000	109,742,000					124,607,255	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	70 Unit	82,642,000	69,742,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Unit	94,004,255	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 Unit	17 Unit	30,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	30,603,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100 Persen	100 Persen	72,757,357,300	94,098,096,180				100 Persen	101,060,773,836	
						Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/ MI)	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
						Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/ MTs)	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
						Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan	100 Persen	100 Persen	46,324,120,000	56,868,389,600				100 Persen	55,332,575,951	
1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung Sekolah Baru yang dibangun dan siap digunakan	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	1 Unit	606,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Unit		
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	10 Ruang	4,160,000,000	2,822,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	10 Ruang	232,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	1,217,750,000	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	4 Ruang	1,111,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	7 Ruang	1,890,000,000	586,600,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	7 Ruang	484,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35 Unit	35 Unit	983,228,000	14,361,592,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	35 Unit	2,234,109,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD					
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/ Berat	5 Ruang	5 Ruang	2,768,312,000	1,752,974,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	5 Ruang	12,063,708,840	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
							Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik								
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	30 Ruang	30 Ruang	535,530,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	30 Ruang	2,651,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di Rehabilitasi Sekolah	5 Ruang	5 Ruang	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	5 Ruang	48,480,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang Direhabilitasi	15 Paket	15 Paket	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	15 Paket	1,090,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Sekolah	15 Paket	15 Paket	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	15 Paket	353,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket	45 Paket	5,045,000,000	1,881,028,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	45 Paket	4,464,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Buku-buku dan Alat Tulis yang Diadakan	0 Siswa	0 Siswa	1,014,000,000	4,706,640,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	0 Siswa	2,083,564,451	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Buku-buku dan Alat Tulis yang Diadakan	5300 Unit	5300 Unit					5300 Unit		
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11772 Peserta Didik	11772 Peserta Didik	15,000,000	118,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	11772 Peserta Didik	20,402,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	243 Satuan Pendidikan	243 Satuan Pendidikan	25,000,000	162,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	243 Satuan Pendidikan	32,631,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	50,000,000	327,511,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	30 Peserta Didik	303,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	234 Satuan Pendidikan	234 Satuan Pendidikan	28,590,300,000	29,234,300,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Anak Usia Sekolah	234 Satuan Pendidikan	27,491,286,960	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	234 Orang	234 Orang	30,000,000	114,082,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	234 Orang	61,842,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan	100 Persen	100 Persen	16,823,638,000	19,720,501,830			100 Persen	32,095,516,500	
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	280,000,000	430,000,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Anak Usia Sekolah	2 Ruang	280,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1,640,000,000	900,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Anak Usia Sekolah	2 Ruang	1,640,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	25 Unit	486,070,000	2,222,582,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	25 Unit	505,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	8 Ruang	8 Ruang	1,300,733,300	1,349,445,800		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	8 Ruang	8,848,068,169	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS Kondisi Baik	5 Paket	5 Paket	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	5 Paket	36,360,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang Direhabilitasi	32 Unit	32 Unit	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	32 Unit	830,321,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang Direhabilitasi	10 Paket	10 Paket	250,002,700	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	10 Paket	1,458,086,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/ Aula	Jumlah ruang serba Guna/ Aula yang Direhabilitasi	8 Paket	8 Paket	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	8 Paket	102,313,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	8 Paket	8 Paket	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Sekolah	8 Paket	969,325,280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	24 Paket	24 Paket	278,930,000	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	24 Paket	4,191,479,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	3400 Paket	3400 Paket	996,000,000	2,343,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	3400 Paket	2,032,559,451	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3600 Peserta Didik	3600 Peserta Didik	17,001,000	15,174,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	3600 Peserta Didik	15,301,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	48 Peserta Didik	48 Peserta Didik	15,000,000	81,331,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	48 Peserta Didik	26,878,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	24 Peserta Didik	24 Peserta Didik	52,000,000	448,613,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	24 Peserta Didik	109,080,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	11,487,900,000	11,633,800,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Anak Usia Sekolah	48 Satuan Pendidikan	11,030,341,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49 Orang	49 Orang	20,001,000	21,042,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Sekolah	49 Orang	20,402,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah lembaga/ satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola	100 -	100 -	8,551,699,300	11,559,977,750				100 -	11,080,982,843		
						Jumlah lembaga/ satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola	231 PAUD	231 PAUD						231 PAUD			
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Dini	5 Unit	326,593,369	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	295,012,000	4,106,358,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Dini	5 Unit	1,515,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	7 Unit	7 Unit	1,562,187,000	1,075,085,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Anak Usia Dini	7 Unit	2,423,142,480	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	9997 Peserta Didik	9997 Peserta Didik	17,624,800	17,624,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Dini	9997 Peserta Didik	22,271,843	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	100,400,500	253,034,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Usia Dini	235 Satuan Pendidikan	504,714,877	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	6,576,475,000	6,107,875,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Anak Usia Dini	235 Satuan Pendidikan	6,289,260,274	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dibangun	140 Lembaga	140 Lembaga	1,057,900,000	5,949,227,000				140 Lembaga	2,551,698,542		
						Jumlah lembaga (PKBM)/ Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	110 Lembaga	110 Lembaga						110 Lembaga			
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	766 Peserta Didik	766 Peserta Didik	7,500,000	4,833,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		766 Peserta Didik	43,358,330	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	140 Satuan Pendidikan	30,000,000	110,127,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		140 Satuan Pendidikan	129,569,022	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	10 Orang	10 Orang	1,020,400,000	1,005,600,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Orang	2,378,771,190	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	100 Persen	100 Persen	11,093,354,000	11,027,326,100				99.50 Persen	14,781,176,568		
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah PTK Yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (orang)	4201 PTK	4201 PTK	11,093,354,000	11,027,326,100				4201 PTK	14,781,176,568		
						Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidiks Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Orang)	5000 Orang	5000 Orang						5000 Orang			
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	13 Dokumen	13 Dokumen	40,183,000	46,183,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Dokumen	48,841,368	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	12 Laporan	12 Laporan	11,053,171,000	10,981,143,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	14,732,335,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik							
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			145,000,000	668,395,500				802,968,280				
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Kebudayaan yang Dikembangkan	100 Persen	100 Persen	40,000,000	325,000,000		100 Persen	240,347,680			
2	22	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dilestarikan	11 Kelompok	11 Kelompok	40,000,000	325,000,000		11 Kelompok	240,347,680		
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	40,000,000	325,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Objek	240,347,680	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	0 Persen	0 Persen	0	0		100 Persen	100,000,000			
2	22	3	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0	0		100,000,000			
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Pelatihan Kesenian Tradisional	50 Peserta	50 Peserta	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Peserta	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	3	2.01	2	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Kesenian Tradisional yang Tersertifikasi	10 Kesenian	10 Kesenian	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Kesenian	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Dokumen Sejarah yang direvitalisasi	21,88 Persen	21,88 Persen	40,000,000	103,395,500		21,88 Persen	15,301,500			
2	22	4	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang Dibina	57 Persen	57 Persen	40,000,000	103,395,500		57 Persen	15,301,500		
					Jumlah Sejarah Lokal yang Didata	2 Sejarah	2 Sejarah				2 Sejarah			
2	22	4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000	103,395,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	15,301,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	46,30 Persen	46,30 Persen	50,000,000	100,000,000		55 Persen	84,057,800			
2	22	5	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	10 Cagar	10 Cagar	50,000,000	100,000,000		10 Cagar	33,052,800		
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	50,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Objek	33,052,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
2	22	5	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	1 Cagar	1 Cagar	0	0		1 Cagar	51,005,000		
					Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota yang Dikelola	25 Cagar	25 Cagar				25 Cagar			
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Dilestarikan	1 Cagar	1 Cagar	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Cagar	51,005,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	48,31 Persen	48,31 Persen	15,000,000	140,000,000		70 Persen	363,261,300			
2	22	6	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten	100 Pengunjung	100 Pengunjung	15,000,000	140,000,000		100 Pengunjung	363,261,300		
					Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten	172 Orang	172 Orang				172 Orang			
2	22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1450 Unit	1450 Unit	15,000,000	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1450 Unit	13,261,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	6	2.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dan Museum Kondisi Baik	2 Unit	2 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.475.031.000	68.779.429.000				97.711.029.420		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	67.182.383.000	62.979.429.000				67.822.210.820		
		Persentase Ketersediaan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen								
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	14 Bulan	14 Bulan	22.133.089,000	21.741.423,000				20.493.083,820		
1 2 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	293 Orang/bulan	293 Orang/bulan	22.133,089,000	21.741,423,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		293 Orang/bulan	20.493,083,820	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran Daerah	100 Persen	100 Persen	80,000,000		0			80,000,000		
1 2 1 2.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	80,000,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Dokumen	80,000,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	60 Kali	60 Kali	177.520,000	177.520,000				60 Kali	177.631,000	
1 2 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	147,520,000	147,520,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Laporan	147,631,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	30,000,000	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	30,000,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,798,200,000	3,615,240,000				100 Persen	7,788,840,000	
1 2 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,173,000,000	1,071,840,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2,712,840,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,625,200,000	2,543,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	5,076,000,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	21,106,000	21,106,000				100 Persen	66,264,000	
1 2 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	20,000,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	65,000,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	1,106,000	1,106,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	1,264,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 1 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	39,972,468,000	37,424,140,000				100 Persen	39,216,392,000	
1 2 1 2.1	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	39,972,468,000	37,424,140,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Unit Kerja	39,216,392,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	96.00 Persen	96.00 Persen	3,292,648,000	5,800,000,000				100 Persen	29,888,818,600	RSUD NENE MALLOMO
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	3,000,000,000	5,800,000,000				100 Persen	29,566,905,800	
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/ kota	100 %	100 %						100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.01 5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	3,000,000,000	5,800,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Rijang Pitu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	11,500,000,000	RSUD NENE MALLOMO
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	81 Unit	81 Unit	0	0	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/ Provinsi/ Regional/ Pariwisata		81 Unit	18,066,905,800	RSUD NENE MALLOMO
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Hasil Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	292,648,000	0				100 Persen	321,912,800	
		Terpenuhinya capaian hasil akreditasi rumah sakit	100 %	100 %						100 %		
1 2 2 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	1 Unit	1 Unit	292,648,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Rijang Pitu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	321,912,800	RSUD NENE MALLOMO
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			54,691,170,000	48,120,539,000					102,215,441,748	
1 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			53,808,951,000	47,670,539,000					92,465,065,336	
1 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0					54,000,000	
1 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	22,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	6,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	8,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,439,694,000	15,813,739,000					27,596,389,336	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	230 Orang/ Bulan	230 Orang/ Bulan	16,439,694,000	15,813,739,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		230 Orang/ Bulan	27,106,189,336	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230 Dokumen	230 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		230 Dokumen	8,200,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	400 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Dokumen	184,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	178,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	102,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Laporan	4 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	4,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	0					152,000,000	
1 2 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	6,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	115,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.03 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	7,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0	0					152,000,000	
1 2 1 2.04 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	87,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Lokasi
1 2 1 2.04 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	53,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.04 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	7,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.04 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0				400,000,000	
1 2 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7 Unit	7 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7 Unit	200,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	524 Paket	524 Paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	524 Paket	200,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				291,000,000	0				478,000,000	
1 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	24,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket					12 Paket		
1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Paket	20,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	50,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	22 Paket					22 Paket		
1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Paket	20,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	4,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen					12 Dokumen		
1 2 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Paket	20,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	10,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	114 Laporan	291,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	114 Laporan	320,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	10,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0				470,000,000	
1 2 1 2.07 3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	110,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					1 Unit		
1 2 1 2.07 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Unit	100,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Unit	110,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	150,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,856,271,000	3,634,804,000					9,553,274,000	
1 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	750,600,000	620,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1,600,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4,105,671,000	3,014,804,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7,953,274,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221,986,000	221,996,000					564,202,000	
1 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	69,350,000	69,350,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	138,330,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	152,636,000	152,646,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	305,872,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Unit	20,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	100,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 1 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD				32,000,000,000	28,000,000,000					53,045,200,000	
1 2 1 2.1 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	32,000,000,000	28,000,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	53,045,200,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	100 Persen	100 Persen	812,219,000	450,000,000				100 Persen	9,490,376,412	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan				537,500,000	450,000,000					7,495,874,412	
1 2 2 2.01 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	537,500,000	440,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	1,075,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.01 5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		1 Unit	0	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	20,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Unit	5,063,374,412	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center	20 Unit	20 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	200,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	200,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuikan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				200,164,000	0					1,768,502,000	
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	560 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		560 Orang	140,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	140,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang	260 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		260 Orang	112,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Beroptensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Beroptensi Bencana Sesuai Standar	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	100,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	160,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	500,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	40 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Dokumen	200,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	16,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	1 Unit	1 Unit	200,164,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	400,502,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				74,555,000	0					226,000,000	
1 2 2 2.03 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	96,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 2 2.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	74,555,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	130,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terlatih	15,12 Persen	0 Persen	70,000,000	0				15,12 Persen	260,000,000	
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				0	0					36,000,000	
1 2 3 2.02 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	100 Persen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	7,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50 Dokumen	50 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	9,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 3 2.02 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50 Dokumen	50 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	20,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1 2 3 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				70,000,000	0					224,000,000	
1 2 3 2.03 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	70,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	224,000,000	RSUD ARIFIN NUMANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2															
1	2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
			persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	104,833,128,254	110,761,468,036				101,984,842,496					
			Presentase Kelengkapan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	55,575,559,754	55,021,505,256				51,010,213,720					
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, yang tersedia	100 Persen	100 Persen	71,594,500	67,098,500		100 Persen	95,250,000				
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4,985,000	41,571,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	45,662,000	3,091,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB					
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,076,000	2,811,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,046,500	5,060,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,056,000	2,790,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	7,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4,017,000	2,227,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Laporan	6,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3,752,000	9,548,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Laporan	11,250,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47,978,406,454	47,017,374,256					44,960,853,520	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ bulan	1 Orang/ bulan	47,929,014,154	46,976,648,256		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Orang/ bulan	44,906,260,820	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD YANG TERSEDIA	1 Dokumen	1 Dokumen	3,699,700	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3,700,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1,500,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	15 Laporan	44,192,600	40,726,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	49,392,700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1 2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9,445,300	9,445,300					3,057,000	
1 2 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,418,500	1,418,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1 2 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,026,800	5,026,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1 2 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	1,057,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				145,750,400	353,600,000					147,552,000	
1 2 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	18,850,400	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	126,900,000	348,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	147,552,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				521,159,100	450,059,200					367,571,900	
1 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2,310,000	1,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	894,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39,734,500	28,698,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	36,190,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	9,315,800	9,315,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	7,936,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	19,812,000	10,987,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	7,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	449,986,800	399,968,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	315,550,300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	104,765,000					0		
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	74,765,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,546,650,000	6,744,210,000					5,117,580,000		
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	763,250,000	759,810,000				12 Laporan	643,280,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5,783,400,000	5,984,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	4,474,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302,554,000	274,953,000					318,349,300		
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	245 Unit	245 Unit	172,500,000	144,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		245 Unit	172,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345 Unit	345 Unit	22,500,000	40,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		345 Unit	22,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	80,145,000	85,444,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	84,407,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4,909,000	4,909,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	26,999,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	22,500,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	11,942,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2	2												
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15,00 Persen	15,00 Persen	47,570,031,700	53,965,747,180			15,00 Persen	49,094,475,497		
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			33,662,965,000	38,422,363,270				39,612,790,567		
1	2	2	2.01	1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	25,165,353,000	25,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	10,100,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB			
1	2	2	2.01	2 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1,408,920,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	9,988,930,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.01	4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				752,911,000	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		756,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1,100,000,000	1,713,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	7,807,448,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			
											Dana Insentif Daerah			
1	2	2	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	1,243,470,000	1,522,213,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Unit	5,862,141,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			
1	2	2	2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	135 Paket	135 Paket	1,976,004,000	1,961,562,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135 Paket	3,060,210,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	2	2	2.01	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	1,976,100,000	4,641,298,170		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Paket	1,995,861,567	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB			
1	2	2	2.01	18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	19,100,000	3,233,689,800	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan								
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik	14 PKM	14 PKM	21,107,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 PKM	22,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuikan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			13,866,694,100	15,101,183,810			9,126,634,930			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5932 Orang	5932 Orang	113,448,400	906,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5932 Orang	55,803,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6644 Orang	6644 Orang	27,473,000	32,729,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6644 Orang	27,743,730	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5392 Orang	5392 Orang	36,960,000	47,415,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5392 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24852 Orang	24852 Orang	36,780,000	29,387,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24852 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54192 Orang	54192 Orang	56,260,000	29,585,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	54192 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191908 Orang	191908 Orang	19,458,000	798,563,910	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	191908 Orang	19,458,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	1500 Orang	55,000,000	179,371,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1500 Orang	55,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17810 Orang	17810 Orang	25,000,000	42,894,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17810 Orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2768 Orang	2768 Orang	576,576,000	42,370,000		Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2768 Orang	576,576,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB					
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	550 Orang	550 Orang	1,910,000	25,026,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		550 Orang	1,929,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	160 Orang	160 Orang	1,380,326,000	230,652,500		Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160 Orang	1,380,326,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB					
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	15 Orang	157,311,500	283,272,500			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	117,069,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB					
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	14 PKM	14 PKM	10,000,000	0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 PKM	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	549,022,600	935,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB					
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	25,865,000	244,220,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	23,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	313,100,000	38,400,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	310,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif										
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan															
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	38700 Dokumen	38700 Dokumen	471,740,000	143,282,500		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK									
												PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38700 Dokumen	47,000,000					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB									
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK									
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	9,857,800	2,755,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,050,000					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	58,165,000	31,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	58,165,000					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang		0	96,341,500		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang					0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
													DAK Non Fisik - BOKKB-BOK								
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang	200 Orang	113,527,500	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	113,527,000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB								
													DAK Non Fisik - BOKKB-BOK								
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	40,930,900	4,182,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,050,000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	93,843,000	808,061,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	35,138,000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB								
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik								
													DAK Non Fisik - BOKKB-BOK								
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	8,336,812,600	9,464,163,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	5,918,488,000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1400 orang	1400 orang	40,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1400 orang	20,000,000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK								
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional				10,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Kecamatan mengikuti program Kabupaten Sehat	11 Kec	11 Kec	300,000,000	80,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kec	4,040,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	24,484,600	5,000,000		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	2 Unit	2 Unit	800,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	24,330,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	122,842,200	150,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	122,842,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	14 Puskesmas	14 Puskesmas	50,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Puskesmas	50,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				10,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				33,930,600	599,400					35,050,000	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,055,600	599,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,050,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				30,875,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				6,442,000	441,600,700					320,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		14 Unit	0	439,138,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		14 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,442,000	2,462,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	90.00 Persen	90.00 Persen	111,337,400	1,703,340,000	332041000	85	247116000	90	249,587,160	
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota				5,831,400	0					33,510,285	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1350 orang	1350 orang	5,831,400	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1350 orang	33,510,285	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				19,208,300	26,037,000					129,778,455	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19,208,300	26,037,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	129,778,455	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				86,297,700	1,677,303,000					86,298,420	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	8 Orang	8 Orang	86,297,700	1,677,303,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Orang	86,298,420	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin	100 Persen	100 Persen	128,399,900	22,835,600				100 Persen	182,766,570	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				9,886,000	22,835,600					39,676,570	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	9,886,000	22,835,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	39,676,570	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
1	2	4	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				36,570,000	0					36,360,000	
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				17,400,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,170,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	4	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				19,170,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,190,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikat Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Persen	100 Persen	10,563,900	0				100 Persen	35,350,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 4 2.03 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				10,563,900	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Industri Rumah Tangga dan Apotek		35,350,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 4 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				33,000,000	0					33,000,000	
1 2 4 2.04 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				33,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 4 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				38,380,000	0					38,380,000	
1 2 4 2.06 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				38,380,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,380,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80 Persen	80 Persen	1,447,799,500	48,040,000				80 Persen	1,447,799,549	
1 2 5 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				832,460,000	0					832,460,000	
1 2 5 2.01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah puskesmas yang melakukan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	14 puskesmas	14 puskesmas	832,460,000	0		Pendapatan Pajak Daerah		14 puskesmas	832,460,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				309,665,500	0					309,665,549	
1 2 5 2.02 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	309,665,500	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	309,665,549	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				305,674,000	48,040,000					305,674,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	305,674,000	48,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	305,674,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4,301,046,846	5,689,974,964					218,437,750	
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pembinaan Kampung KB	100.00 Persen	100.00 Persen	215,822,500	1,271,572,600				100.00 Persen	0	
2 14 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				53,630,900	115,572,600					0	
2 14 2 2.01 1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	26 OPD	26 OPD	3,131,300	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 OPD	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
2 14 2 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26 Laporan	26 Laporan	50,499,600	65,572,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB						
2	14	2	2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							0		
2	14	2	2.02	9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA)	1 kali	1 kali	42,066,000	400,000,000		1 kali	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB						
							DAK Non Fisik-BOKB-BOKB						
2	14	2	2.02	12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	5,100,500	96,000,000		1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB						
							DAK Non Fisik-BOKB-KB						
2	14	2	2.02	13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	115,025,100	660,000,000		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB						
							DAK Non Fisik-BOKB-KB						
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS Peserta KB Aktif	90,00 Persen	90,00 Persen	4,068,137,346	2,477,302,364		90,00 Persen	218,437,750	
2	14	3	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				775,586,900	811,070,500			218,437,750	
2	14	3	2.01	1 Advokasi Program KKBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	11 Organisasi	11 Organisasi	218,437,500	303,036,500		11 Organisasi	218,437,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11 Dokumen	11 Dokumen	96,439,400	149,984,000		11 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB						
							DAK Non Fisik-BOKB-KB						
2	14	3	2.01	7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	11 Laporan	460,710,000	358,050,000		11 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)				1,572,368,000	266,000,000			0	
2	14	3	2.02	1 Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/ PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/ PLKB	106 Organisasi	106 Organisasi	303,000,000	54,000,000		106 Organisasi	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB	11 Balai KB	11 Balai KB	328,250,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Balai KB	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB							
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusangan-Keluarga Berencana							
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	106 pkb	106 pkb	427,230,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106 pkb	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	444 Orang	444 Orang	513,888,000	212,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	444 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota				1,324,584,946	1,158,754,364			0	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 faskes	17 faskes	7,771,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 faskes	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							
2	14	3	2.03	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	17 faskes	17 faskes	247,449,600	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 faskes	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	43966 Orang	43966 Orang	189,463,420	352,792,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43966 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	17 Unit	17 Unit	744,081,000	765,936,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB							
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17 Laporan	17 Laporan	9,537,500	15,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	17 faskes	17 faskes	41,938,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 faskes	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							DAK Non Fisik-BOKB-KB							

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 14 3 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah faskes yang mendapatkan peningkatan kompetensi & SDM tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	17 faskes	17 faskes	72,434,200	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 faskes	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2 14 3 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	17 Laporan	17 Laporan	2,002,726	24,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2 14 3 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	11 Balai KB	11 Balai KB	9,907,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Balai KB	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				395,597,500	241,477,500					0	
2 14 3 2.04 1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	454 Organisasi	454 Organisasi	134,260,000	232,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		454 Organisasi	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2 14 3 2.04 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	15 Laporan	15 Laporan	261,337,500	8,977,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKB-KB				
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen	100 Persen	17,087,000	1,941,100,000				100 Persen	0	
2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,515,000	1,941,100,000					0	
2 14 4 2.01 1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	106 Kelompok	106 Kelompok	303,000	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		106 Kelompok	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 4 2.01 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	320 Laporan	320 Laporan	303,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 4 2.01 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	320 Laporan	320 Laporan	303,000	1,556,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 4 2.01 12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	11 Kecamatan	11 Kecamatan	303,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kecamatan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 4 2.01 13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	11 Kecamatan	11 Kecamatan	303,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Kecamatan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 4 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				15,572,000	0					0	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah kelompok yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (perayaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Provinsi dan Pusat	320 kelompok	320 kelompok	15,572,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 kelompok	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,970,014,000	2,067,353,500				3,997,738,970			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				1,237,209,000	1,215,593,000				2,000,000,000			
1	2	1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD				1,237,209,000	1,215,593,000				2,000,000,000			
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,237,209,000	1,215,593,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	2,000,000,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	732,805,000	846,740,500				1,954,106,970			
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					0				3,323,000			
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	7 Unit	7 Unit		0	3,988,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	7 Unit	3,323,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rulukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				732,805,000	842,752,500				1,950,783,970			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	54,805,000	90,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	120 Orang	123,691,670		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	6,000,000	0		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	31,200,000	0		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	115,580,000	27,400,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	500 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	2500 Orang	52,900,000	5,200,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2500 Orang	23,634,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1900 Orang	1900 Orang	93,300,000	23,700,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1900 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang	26,400,000	25,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1200 Orang	2,434,100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	790 Orang	790 Orang	6,600,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		790 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang	6,600,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		600 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	21 Orang	1,200,000	20,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan			21 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	800 Orang	800 Orang	10,000,000	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		800 Orang	16,160,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang	10,000,000	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		12 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	53,900,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		1 Dokumen	74,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	170,212,500	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	87,466,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	14,400,000	22,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	27,068,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	44,400,000	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	44,844,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23,100,000	6,654,500	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	23,331,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	32,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	24,240,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang	11,000,000	10,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		50 Orang	11,110,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	70,300,000	153,217,500	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	198,768,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah peserta jkn puskesmas Rappang	16143 orang	16143 orang	0	39,126,000		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		16143 orang	1,237,209,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan					
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan		15 Paket	0	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		15 Paket	5,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	51,520,000	163,042,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	44,468,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1,600,000	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	2,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		500 Orang	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	5,020,000				6,060,000		
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	5,020,000				6,060,000		
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen	0	5,020,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3 Dokumen	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,037,874,000	2,254,357,000				2,338,077,500		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan BLUD	100 Persen	100 Persen	1,241,526,000	1,149,597,000			100 Persen	0		
1 2 1 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan layanan BLUD	100 Persen	100 Persen	1,241,526,000	1,149,597,000			100 Persen	0		
1 2 1 2.1 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,241,526,000	1,149,597,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								Pendapatan dari BLUD				
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	759,148,000	1,094,560,000				2,243,977,500		
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	25,418,000				20,000,000		
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	0	25,418,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuikan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				759,148,000	1,069,142,000				2,223,977,500		
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1400 Orang	1400 Orang	67,770,000	209,958,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1400 Orang	109,215,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	18,000,000	0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	100 Orang	18,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1050 Orang	1050 Orang	18,000,000	0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1050 Orang	18,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1 2 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2100 Orang	2100 Orang	58,550,000	49,500,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2100 Orang	58,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1 2 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3078 Orang	3078 Orang	38,261,000	24,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3078 Orang	42,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	1500 Orang	43,200,000	11,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1500 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	1100 Orang	22,500,000	4,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1100 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	380 Orang	18,400,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		380 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	18,200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		500 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	6 Orang	10,800,000	18,600,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		6 Orang	21,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	449 Orang	449 Orang	47,800,000	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		449 Orang	53,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	24,300,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Orang	24,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	27,207,000		Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	94,603,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2040 Dokumen	2040 Dokumen	28,700,000	291,451,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2040 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1550 Dokumen	1550 Dokumen	26,200,000	4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1550 Dokumen	27,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	36,400,000	28,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	32,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27,100,000	51,770,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		6 Dokumen	0	27,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		6 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				24,300,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			24,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	111,500,000	71,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	316,913,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	70,360,000	226,163,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	41,520,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	21,600,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Laporan	10,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		500 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	37,200,000	0				80 Rasio	37,200,000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				37,200,000	0					37,200,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan yang ikut perjanjian kontrak bok	4 Orang	4 Orang	37,200,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	4 Orang	37,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			0	10,200,000					20,000,000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	0	10,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Limpoe, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,460,789,000	1,123,006,000				1,471,349,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	1,355,389,000	1,123,006,000				1,365,949,000	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	7,336,000				0	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	0	7,336,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	15 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1,355,389,000	1,115,670,000				1,365,949,000	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	102,650,000	113,610,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	65 Orang	102,650,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	16,200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	60 Orang	16,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	16,200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	60 Orang	16,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 balita	300 balita	61,800,000	36,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	300 balita	61,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	800 Orang	80,550,000	5,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	800 Orang	80,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2800 Orang	2800 Orang	97,200,000	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2800 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang	43,200,000	32,940,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		600 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Orang	265 Orang	5,400,000		Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		265 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	5,400,000		Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		50 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	5,400,000	5,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		35 Orang	5,400,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	14,400,000	7,650,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		120 Orang	14,400,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	80 Orang	5,400,000	9,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		80 Orang	5,400,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	135,403,000		Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	135,229,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	75,000,000	209,646,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	75,000,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	34,200,000	28,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	34,200,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	46,350,000	13,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	46,350,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	27,600,000	4,137,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	27,600,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	28,960,000	3,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	12 Dokumen	29,134,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang	5,400,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	50 Orang	5,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus	100 Persen	100 Persen	113,400,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	113,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Persen	100 Persen	59,700,000	104,125,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	100 Persen	210,900,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	0 Dokumen		
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	256,876,000	329,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Persen	256,876,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0 Dokumen		
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan		10 Paket	0	2,550,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	10 Paket	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	113,300,000	173,491,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	113,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	5,400,000	4,950,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Laporan	5,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	4,950,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	3,150,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	500 Orang	4,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	105,400,000	0			80 Rasio	105,400,000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				105,400,000	0				105,400,000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	105,400,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	105,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1												
1	2											
1	2	1										
1	2	1	2.1									
1	2	1	2.1	1								
1	2	2										
1	2	2	2.01									
1	2	2	2.01	15								
1	2	2	2.01	20								
1	2	2	2.02									
1	2	2	2.02	1								
1	2	2	2.02	2								
1	2	2	2.02	3								
1	2	2	2.02	4								
1	2	2	2.02	5								
1	2	2	2.02	6								
1	2	2	2.02	7								

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	800 Orang	4,800,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan		800 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang	4,800,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan		130 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	106 Orang	106 Orang	9,600,000	15,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	106 Orang	9,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	255 Orang	255 Orang	11,000,000	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	255 Orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	255 Orang	255 Orang	13,200,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	255 Orang	13,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	46,026,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Dokumen	49,626,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	30,600,000	203,801,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	30,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	16,200,000	28,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Dokumen	16,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	10,600,000	19,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Dokumen	10,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	13,500,000	42,990,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Dokumen	13,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	800,000	8,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	12 Orang	2,400,000	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Orang	2,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	12567 orang	12567 orang	114,000,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12567 orang	114,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	80,172,500	164,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	107,172,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3 orang	3 orang	400,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		3 orang	600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	83,688,000	220,116,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	83,688,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	3,500,000	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Laporan	3,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		500 Orang	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80.00 Persen	80.00 Persen	48,000,000	5,020,000					48,000,000	
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				48,000,000	5,020,000					48,000,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	18 UKBM	18 UKBM	48,000,000	5,020,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		18 UKBM	48,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,911,875,000	3,475,562,000					3,148,108,000	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2,012,481,000	2,012,545,000					2,012,481,000	
1 2 1 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD				2,012,481,000	2,012,545,000					2,012,481,000	
1 2 1 2.1 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,012,481,000	2,012,545,000		Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	2,012,481,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	899,394,000	1,451,017,000					1,115,627,000	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	26,661,000					0	
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	12 Unit	0	26,661,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		12 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				899,394,000	1,424,356,000					1,115,627,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	850 Orang	55,075,000	103,560,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		850 Orang	55,075,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan					
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	810 Orang	810 Orang	14,400,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		810 Orang	15,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	780 Orang	780 Orang	3,600,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		780 Orang	3,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2350 Orang	2350 Orang	40,800,000	35,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2350 Orang	40,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8600 Orang	8600 Orang	73,700,000	45,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		8600 Orang	73,700,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27000 Orang	27000 Orang	46,200,000	11,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		27000 Orang	46,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30000 Orang	30000 Orang	39,600,000	5,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		30000 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	2500 Orang	13,200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2500 Orang	13,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	400 Orang	13,200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		400 Orang	13,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	16,000,000	12,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		35 Orang	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	950 Orang	950 Orang	26,400,000	23,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		950 Orang	26,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Lokasi	Sumber Dana				
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang	16,500,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1200 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	98,933,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		12 Dokumen	10,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	566,805,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		12 Dokumen	484,035,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	22,200,000	15,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		12 Dokumen	15,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	39,900,000	20,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		12 Dokumen	20,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	85,100,000	72,779,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		12 Dokumen	106,894,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		2 Dokumen	0	11,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				6,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			2,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				51,400,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				76,900,000	157,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			67,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				145,886,000	304,312,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			60,363,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2,400,000	3,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	11,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	2,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	500 Orang	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	12,000,000				20,000,000		
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	12,000,000				20,000,000		
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		3 Dokumen	0	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,406,760,000	2,783,725,000				2,432,355,080		
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	2,372,660,000	2,783,725,000				2,397,914,080		
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	21,029,000				0		
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 Unit	0	21,029,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Unit		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riiukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				2,372,660,000	2,762,696,000				2,397,914,080		
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	634 Orang	634 Orang	41,750,000	52,675,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	634 Orang	42,167,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	17,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Orang	17,170,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	576 Orang	5,000,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	576 Orang	5,050,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	54,800,000	67,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang	55,348,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2320 Orang	2320 Orang				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2320 Orang		
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5568 Orang	5568 Orang	42,900,000	52,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		5568 Orang	43,329,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25332 Orang	25332 Orang	13,200,000	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		25332 Orang	13,332,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5231 Orang	5231 Orang	41,000,000	20,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		5231 Orang	41,410,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2323 Orang	2323 Orang	11,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		2323 Orang	11,110,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	367 Orang	367 Orang	9,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		367 Orang	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	4,000,000	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		65 Orang	5,050,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	673 Orang	673 Orang	29,000,000	14,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		673 Orang	29,290,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	962 Orang	962 Orang	10,000,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		962 Orang	11,110,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100,565,500	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	107,078,180	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	24,400,000	332,131,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	21,614,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Orang/ Kelompok yang memperoleh pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga di wilayah Kerja Puskesmas	10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	18,600,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		10 Desa/ Kelurahan	18,786,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	42,000,000	20,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	42,420,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13,200,000	15,387,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	13,332,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	17,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	53 Orang	53 Orang	10,600,000	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		53 Orang	10,706,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan Pelayanan PIS PK	10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	76,000,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		10 Desa/ Kelurahan	96,960,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	183,100,000	167,280,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan		1 Dokumen	184,931,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2 Dokumen	1,564,252,000	1,716,143,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,564,252,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
												Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
												Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS				
												DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	61,292,500	223,980,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	57,408,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	0	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	0 Laporan		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	2,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik- BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik- BOKKB-BOK			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	34,100,000	0			80 Rasio	34,441,000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				34,100,000	0				34,441,000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Perjanjian Kerja	1 Orang	1 Orang	34,100,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Orang	34,441,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,057,846,000	1,144,017,000				617,494,730	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	1,020,646,000	1,140,252,000				559,922,730	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	2,953,000				20,000,000	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	0	2,953,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	15 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik- BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuikan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1,020,646,000	1,137,299,000				539,922,730	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	6,050,000	71,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	200 Orang	13,503,700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB								
							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK								
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	6,800,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	200 Orang	6,868,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	190 Orang	7,320,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	190 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	850 Orang	6,690,000	42,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	850 Orang	6,756,900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	14,000,000	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2000 Orang	17,877,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7500 Orang	7500 Orang	3,700,000	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	7500 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	28,800,000	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	2000 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	800 Orang	41,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	800 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110 Orang	110 Orang	13,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	110 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	34 Orang	34 Orang	7,200,000	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	34 Orang	7,272,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	180 Orang	180 Orang	5,700,000	6,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		180 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang	5,700,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		240 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	87,313,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	88,186,130	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	48,500,000	147,144,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	48,985,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	4,500,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	4,545,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	14,400,000	13,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	14,544,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	9,600,000	13,650,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	9,696,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		2 Dokumen	0	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				30,000,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			84,840,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	94,200,000	101,260,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	135,744,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	525,673,000	513,970,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
												Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen	60,500,000	149,275,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Dokumen	61,105,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	0	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2 Laporan	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	0	3,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	0	3,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	37,200,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	80 Rasio	37,572,000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				37,200,000	0			37,572,000		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				37,200,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		37,572,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	3,765,000				20,000,000	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	3,765,000			20,000,000		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,765,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
							DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB											
							DAK Non Fisik-BOKKB-BOK											
1																		
1																		
1	2	1																
1	2	1																
1	2	1	2.1															
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	861,459,000	843,138,500	861,459,000	843,138,500	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	1 Unit Kerja	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	838,868,000	1,008,996,500						1,731,127,000		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					0	17,615,000					0		
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 Unit		0	17,615,000				0 Unit		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP <i>Rivukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>				838,868,000	991,381,500						1,731,127,000		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	79,150,000	82,945,000	79,150,000	82,945,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	300 Orang	79,150,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290 Orang	290 Orang	5,000,000				Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	290 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	270 Orang	5,000,000				Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	270 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1350 Orang	1350 Orang	119,950,000	39,800,000			Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1350 Orang	119,950,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3000 Orang	3000 Orang	34,000,000	14,850,000			Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	3000 Orang	34,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12000 Orang	12000 Orang	38,850,000	26,150,000			Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12000 Orang	38,850,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3400 Orang	3400 Orang	23,100,000	52,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		3400 Orang	23,100,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1100 Orang	1100 Orang	5,000,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan			1100 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170 Orang	170 Orang	5,000,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan			170 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	39,300,000	36,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		35 Orang	39,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	340 Orang	340 Orang	17,850,000	14,100,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		340 Orang	17,850,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	40,650,000	8,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		25 Orang	40,650,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	116,188,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	126,188,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	8,800,000	267,631,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	8,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	22,200,000	14,400,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	22,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	30,150,000	6,300,000		Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	30,150,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	38,200,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	38,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	0	23,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1 Dokumen	30,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan jiwa dan napza sesuai standar	100 Persen	100 Persen	13,850,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	13,850,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	100 Persen	100 Persen	21,000,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	21,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	48,350,000	62,922,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Dokumen	48,350,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar	100 Persen	100 Persen				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen		
1 2 2 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya capaian pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar	17325 Orang	17325 Orang	0	134,968,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17325 Orang	861,459,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
								Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS				
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya capaian operasional pelayanan puskesmas sesuai standar	100 Persen	100 Persen	104,180,000	191,715,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	104,180,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya capaian investigasi awal kejadian tidak diharapkan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	23,100,000	10,500,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	23,100,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	5,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0	600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	8,740,000					10,000,000	
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	8,740,000					10,000,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	0	8,740,000	Kab. Sidenreng Rappang, Panca Lautan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,211,304,000	1,435,051,000					1,313,416,240	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	1,174,104,000	1,430,203,500					1,255,844,240	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							0			
1	2	2	2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 Unit	0	7,731,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuikan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1,174,104,000	1,422,472,500				1,255,844,240	
1	2	2	2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 Orang	110 Orang	26,010,000	125,725,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	110 Orang	26,270,100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 orang	110 orang	18,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	110 orang	18,180,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 Orang	110 Orang	6,000,000		Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	110 Orang	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 Orang	110 Orang	38,000,000	42,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan AKI dan AKB	110 Orang	38,380,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1675 Orang	1675 Orang	20,600,000	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1675 Orang	20,806,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	43,800,000	13,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	500 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1598 Orang	1598 Orang	32,400,000	18,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1598 Orang	32,724,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	6,000,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	500 Orang	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	520 Orang	6,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	520 Orang	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	3,000,000	16,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	20 Orang	3,030,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Lokasi	Sumber Dana			
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	135 Orang	135 Orang	12,000,000	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	135 Orang	12,120,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80 Orang	80 Orang	10,000,000	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	80 Orang	10,100,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	64,691,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	65,236,910	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	20,400,000	180,151,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	20,604,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	11,600,000	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	11,716,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	12,120,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	3,660,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	12,726,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	16,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Dokumen	5,050,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	20 Orang	11,000,000	8,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	20 Orang	11,110,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Pelayanan Upaya Kesehatan Khusus	100 Persen	100 Persen	39,600,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	39,996,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	86,400,000	99,852,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Dokumen	130,997,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	645,523,000	647,246,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	651,978,230	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKT				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
							Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	44,080,000	177,538,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	44,520,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		2 Laporan	0	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2 Laporan	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	5,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	37,200,000	0			80 Rasio	37,572,000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				37,200,000	0				37,572,000	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	37,200,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	37,572,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	4,847,500				20,000,000	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	4,847,500				20,000,000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	0	4,847,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,528,824,000	1,766,525,000				1,634,112,240	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	1,491,624,000	1,750,295,000				1,576,540,240	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	5,558,000				50,000,000	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	0	5,558,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	15 Unit	50,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Target		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
								DAK Non Fisik - BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuikan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1,491,624,000	1,744,737,000		1,526,540,240			
1	2	2	2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	48,870,000	39,450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	300 Orang	49,358,700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	287 Orang	4,800,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	287 Orang	4,848,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273 Orang	273 Orang	10,800,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	273 Orang	10,908,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1518 Orang	1518 Orang	19,200,000	46,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1518 Orang	19,392,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	38,100,000	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	100 Orang	38,481,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	1500 Orang	44,000,000	50,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1500 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2747 Orang	2747 Orang	44,000,000	33,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2747 Orang	55,550,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	1600 Orang	11,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan		1600 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	11,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	2,400,000	9,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan		0 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	10,800,000	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	100 Orang	10,908,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	7,200,000	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Orang	7,272,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	84,708,000		Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	85,555,080		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	53,200,000	206,410,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	53,732,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	30,600,000	50,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Dokumen	30,906,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	13,200,000	48,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	15,756,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	22,600,000	10,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	12 Dokumen	22,826,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4,800,000	26,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	4,848,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	12,000,000	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Orang	12,120,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	cakupan pelayanan kesehatan khusus	100 %	100 %	39,600,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 %	39,996,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	125,600,000	96,614,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	182,406,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	790,426,000	849,824,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	798,330,260	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
											Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS				
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan		30 Paket	0	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	30 Paket	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	59,120,000	194,438,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Dokumen	59,711,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	3,600,000	3,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Laporan	3,636,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				0	7,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0	18,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	37,200,000	0				80 Rasio	37,572,000	
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				37,200,000	0					37,572,000	
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	cakupan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar	1 petugas	1 petugas	37,200,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 petugas	37,572,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	16,230,000					20,000,000	
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	16,230,000					20,000,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	0	16,230,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Baranti	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,195,310,000	1,899,607,000					2,116,260,000	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	2,127,110,000	1,886,006,000					2,028,060,000	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	17,275,000					20,000,000	
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	0	17,275,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		15 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				2,127,110,000	1,868,731,000					2,008,060,000	
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang	182,050,000	163,350,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		120 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	271 Orang	271 Orang	24,300,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		271 Orang	24,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	258 Orang	39,600,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		258 Orang	39,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1431 Orang	1431 Orang	144,700,000	77,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1431 Orang	147,700,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3217 Orang	3217 Orang	39,900,000	20,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	3217 Orang	39,900,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	1600 Orang	41,400,000	36,300,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1600 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2585 Orang	2585 Orang	18,600,000	27,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	2585 Orang	18,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	478 Orang	478 Orang	13,800,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	478 Orang	13,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19471 Orang	19471 Orang	10,200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	19471 Orang	10,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang	25,800,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	54,300,000	18,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	200 Orang	54,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang	49,500,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	11 Orang	49,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	166,262,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	166,262,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,375,000	235,572,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Dokumen	100,375,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	0	2,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	35,900,000	31,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1 Dokumen	35,900,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	105,850,000	28,490,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	105,850,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,400,000	19,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	20,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	45 Orang	0	12,900,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		45 Orang	25,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Meningkatnya pelayanan upaya kesehatan Khusus sesuai standar	19471 orang	19471 orang	129,600,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		19471 orang	129,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	132,100,000	115,290,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	173,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1 2 2 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	718,473,000	796,062,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	718,473,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN				
1 2 2 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan		10 Paket	0	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10 Paket	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	66,800,000	231,467,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	66,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	7,200,000	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Laporan	7,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	33,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		500 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	68,200,000	0				80 Rasio	68,200,000	
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				68,200,000	0					68,200,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar	100 Persen	100 Persen	68,200,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	68,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	13,601,000					20,000,000	
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	13,601,000					20,000,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	0	13,601,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							DAK Non Fisik- BOKKB-BOK				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,424,599,000	1,688,246,500					1,534,904,990	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	1,387,399,000	1,649,646,500					1,409,760,990	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	8,606,000					10,000,000	
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	0	8,606,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		15 Unit	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1,387,399,000	1,641,040,500					1,399,760,990	
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	210 Orang	44,038,500	130,408,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		210 Orang	44,478,885	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	9,050,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		200 Orang	9,140,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200 bayi baru lahir	200 bayi baru lahir	1,650,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		200 bayi baru lahir	1,666,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 balita	800 balita	71,580,000	43,900,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		800 balita	72,295,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	1600 Orang	8,250,000	11,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1600 Orang	8,332,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8500 Orang	8500 Orang	13,000,000	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		8500 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	1500 Orang	18,200,000	53,640,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Orang	18,382,000	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	800 Orang	13,000,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		800 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	130 Orang	10,700,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		130 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	25 Orang	7,000,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		25 Orang		0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	13,000,000	29,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		300 Orang	13,130,000	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	19,500,000	13,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		300 Orang	19,695,000	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	72,461,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	73,185,610	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	35,900,000	218,664,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	36,259,000	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	36,704,000	11,397,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	37,071,040	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	31,850,000	27,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	32,168,500	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	42,520,000	1,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	12 Dokumen	49,510,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		2 Dokumen	0	12,450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	13,000,000	4,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	13,130,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	30 Orang					30 Orang		
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Keluarga Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	21,450,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	21,664,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	125,476,500	82,214,500	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	12 Dokumen	126,731,265	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7908 orang	7908 orang	678,961,000	724,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7908 orang	685,750,610	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
												Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS			
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan		15 Paket	0	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	15 Paket	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan operasional Puskesmas	100 Persen	100 Persen	79,608,000	210,206,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	80,404,080	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	20,500,000	21,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	100 Persen	20,705,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	11,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	3,900,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		500 Orang	6,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	37,200,000	0				80 Rasio	75,144,000	
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				37,200,000	0					75,144,000	
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan	2 orang	2 orang	37,200,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2 orang	75,144,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	38,600,000					50,000,000	
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	38,600,000					50,000,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	0	38,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		2 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2,196,597,000	2,496,913,000					2,956,807,000	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				1,397,072,000	1,446,472,000					2,000,000,000	
1 2 1 2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD				1,397,072,000	1,446,472,000					2,000,000,000	
1 2 1 2.1 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,397,072,000	1,446,472,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1 Unit Kerja	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	765,425,000	1,023,381,000					936,807,000	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	13,260,000					20,000,000	
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		15 Unit	0	13,260,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		15 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Riuukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				765,425,000	1,010,121,000					916,807,000	
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	521 Orang	50,600,000	97,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		521 Orang	62,950,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	450 Orang	5,500,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		450 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	1,100,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		300 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	96,800,000	49,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		300 Orang	113,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2400 Orang	2400 Orang	38,500,000	30,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		2400 Orang	66,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1560 Orang	1560 Orang	26,400,000	35,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		1560 Orang	27,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	1600 Orang	16,500,000	24,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1600 Orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1230 Orang	1230 Orang	11,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		1230 Orang	16,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	500 Orang	5,500,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		500 Orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang	5,500,000	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		30 Orang	14,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	38,500,000	19,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		250 Orang	30,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	30,800,000	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		60 Orang	27,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	31,900,000	260,275,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	29,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		1 Dokumen	75,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	53,900,000	27,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1 Dokumen	33,100,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	58,300,000	49,850,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		1 Dokumen	9,100,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	17,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	22,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 Orang	150 Orang	17,600,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		150 Orang	8,700,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0 Dokumen	0 Dokumen	44,000,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	83,100,000	56,690,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	26,525,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0	38,774,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		1 Dokumen	200,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan		10 Paket	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		10 Paket	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	94,925,000	218,232,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1 Dokumen	30,632,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		2 Laporan	0	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		2 Laporan	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		500 Orang	0	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		500 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	27,060,000					20,000,000	
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	27,060,000					20,000,000	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	0	27,060,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		2 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,381,480,900	1,674,485,000					1,390,481,000	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	15.00 Persen	15.00 Persen	1,310,180,900	1,632,005,000					1,319,181,000	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	6,637,000					0	
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		0 Unit	0	6,637,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				1,310,180,900	1,625,368,000					1,319,181,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320 Orang	320 Orang	68,700,000	75,284,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		320 Orang	68,700,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	300 Orang	17,200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		300 Orang	17,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Bayi Baru Lahir	300 Bayi Baru Lahir	4,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		300 Bayi Baru Lahir	4,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Balita	1500 Balita	30,800,000	54,300,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1500 Balita	30,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3500 Orang	3500 Orang	25,000,000	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		3500 Orang	44,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13500 Orang	13500 Orang	19,200,000	34,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		13500 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2600 Orang	2600 Orang	8,000,000	20,225,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2600 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1200 Orang	6,400,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		1200 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB-BOK				
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	1,600,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		200 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	9,000,000	16,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		20 Orang	9,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	400 Orang	400 Orang	9,600,000	11,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB-BOK		400 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	420 Orang	420 Orang	9,600,000	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		420 Orang	9,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	83,302,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	87,302,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	4,800,000	255,821,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		12 Dokumen	4,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	16,000,000	17,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	16,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	28,000,000	11,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	28,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	52,800,000	2,096,500	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	52,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	8,000,000	5,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		12 Dokumen	5,600,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35 Orang	35 Orang	8,000,000	12,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		35 Orang	17,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Meningkatnya Pelayanan PIS PK	100 Persen	100 Persen	44,800,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	44,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	68,450,000	90,615,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Dokumen	84,450,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Meningkatnya Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	100 Persen	100 Persen				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 2 2 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		0 Dokumen	737,928,900	768,306,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		0 Dokumen	737,929,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Peserta JKN Puskesmas Empageae	9799 orang	9799 orang						9799 orang		
1 2 2 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan		0 Paket		6,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Paket		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya Pelayanan Puskesmas	100 Persen	100 Persen	45,000,000	189,120,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	45,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya Pelayanan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	100 Persen	100 Persen	4,000,000	8,800,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	4,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang		12,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang		4,800,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Orang		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90.00 Persen	0 Persen	71,300,000	0				80 Rasio	71,300,000	
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota				71,300,000	0					71,300,000	
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	100 Persen	71,300,000	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 Persen	71,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	0 Persen	80.00 Persen	0	42,480,000					0	
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				0	42,480,000					0	
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen		42,480,000	Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		0 Dokumen		0 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 3 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				13,484,783,000	12,771,757,000					38,180,626,530	
1 3 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	8,978,783,800	8,461,634,600				100 Persen	9,135,626,530	
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60,000,000	48,000,000					60,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1.3.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	30,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	24,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	30,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Peranokot Daerah				8,004,737,000	7,878,569,900					8,247,037,530	
1.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	7,990,737,000	7,829,513,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		103 Orang/bulan	8,218,037,530	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14,000,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	14,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	18 Laporan	0	29,056,900	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	15,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				201,488,000	129,761,800					301,109,000	
1.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	0	1,072,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	8,500,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0				0 Paket	30,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	0	5,536,200	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	26,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36,509,000	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	36,509,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0				0 Dokumen	15,100,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.3.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	0	0				0 Laporan	20,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	164,979,000	120,153,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Laporan	165,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			620,278,000	305,471,700						387,480,000	
1 3 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	0	0				0 Laporan	3,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	47,000,000	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	58,850,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	6,765,300	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	25,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	548,278,000	248,706,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	300,630,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			92,280,800	99,831,200						140,000,000	
1 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	30 Unit	92,280,800	99,831,200	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	90,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0	0				0 Unit	0	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0				0 Unit	50,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	75,00 Persen	75,00 Persen	4,505,999,200	4,310,122,400				75,00 Persen	29,045,000,000	
1 3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			2,692,734,500	1,884,250,000						10,740,000,000	
1 3 2 2.01 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	33,916,000	0				0 Dokumen	900,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.01 6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		0 Unit	0	0				0 Unit	2,450,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.01 9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 KM	0 KM	0	0				0 KM	805,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	628,644,100	85,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1,530,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.01 31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi		0 Unit	0	0				0 Unit	1,150,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 2 2.01 46	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	7 KM	6 KM	1,908,799,900	1,699,250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 KM	2,175,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	30 Orang	86,123,500	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	1,150,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun		0 Dokumen	35,251,000	0				0 Dokumen	290,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Orang	0 Orang	0	0				0 Orang	290,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1,813,264,700	2,425,872,400					18,305,000,000	
1 3 2 2.02 8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4 KM	0.6 KM	777,564,000	441,358,300	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.6 KM	3,240,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.9 KM	0.9 KM	950,000,000	1,031,764,100	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0.9 KM	13,800,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	2 KM	46,035,500	952,750,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 KM	690,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1 3 2 2.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		0 DI	39,665,200	0				0 DI	575,000,000	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	7 DI	7 DI						7 DI		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				97,893,023,000	113,794,540,800					204,498,513,880	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	7,055,301,250	6,922,418,025				100 Persen	8,090,000,000	
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	70,000,000	154,000,000				100 Persen	70,000,000	
1 3 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	4 Dokumen	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	106,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	5 Laporan	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	3 Laporan	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5,366,843,450	5,307,653,325				100 Persen	5,435,000,000	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5,321,843,450	5,236,259,725		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Daerah	61 Orang/bulan	5,400,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Daerah	12 Laporan	20,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	15,000,000	56,393,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Daerah	18 Laporan	15,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	0	34,726,000				100 Persen	50,000,000	
1 3 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	34,726,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aset / Barang Milik Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan rakvat	1 Dokumen	40,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	604,019,400	341,340,400				100 Persen	680,000,000	
1 3 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,150,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakvat	1 Paket	20,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8,869,400	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakvat	1 Paket	15,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70,000,000	40,194,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakvat	1 Paket	80,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	1,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakvat	5 Dokumen	15,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	500,000,000	300,021,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakvat	130 Laporan	500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	480,903,000	500,520,000				100 Persen	760,000,000	
1 3 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	700 Laporan	7,983,000	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	700 Laporan	20,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	232,020,000	225,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	12 Laporan	240,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240,900,000	258,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	12 Laporan	500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	543,535,400	584,178,300				100 Persen	995,000,000	
1 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	256,325,000	271,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	15 Unit	420,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.09 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	237,210,400	232,428,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	12 Unit	420,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
1 3 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	12 Unit	15,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	12 Unit	40,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50,000,000	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	2 Unit	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	100 Persen	100 Persen	5,281,003,400	1,070,000,000				100 Persen	16,243,906,000	
1 3 3 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	100 Persen	100 Persen	5,281,003,400	1,070,000,000				100 Persen	16,243,906,000	
1 3 3 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Tersusun	2 Dok	2 Dok	150,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Dok	609,440,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 3 2.01 2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi sasi SPAM	1 Dok	1 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dok	52,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 3 2.01 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	1.2 Liter/ Detik	1.2 Liter/ Detik	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1.2 Liter/ Detik	2,360,900,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 3 2.01 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/ SPAM Berbasis Masyarakat	614 SR	614 SR	0	50,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	614 SR	1,449,725,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
								Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 3 2.01 5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1.2 Liter/ Detik	1.2 Liter/ Detik	400,752,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1.2 Liter/ Detik	861,120,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 3 2.01 6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			0	2,314,235,000	1,020,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	0	8,371,861,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/ Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	1.2 Liter/ Detik	1.2 Liter/ Detik			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1.2 Liter/ Detik			
1 3 3 2.01 7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	240 SR	240 SR	1,216,016,400	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	240 SR	1,456,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 3 2.01 8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Unit	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 3 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Badan Usaha	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
							Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
1 3 3 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Unit	240,860,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
							Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
1 3 3 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Unit	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 3 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	70 SR	70 SR	1,200,000,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	70 SR	442,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 3 2.01 20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Unit	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	100 Persen	7,447,532,000	2,255,000,000			100 Persen	12,547,212,000		
1 3 5 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	100 Persen	100 Persen	7,447,532,000	2,255,000,000			100 Persen	12,547,212,000		
1 3 5 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	2 Dok	2 Dok	0	106,845,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Dok	763,500,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	3	5	2.01	2	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Dok	1 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	1 Dok	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	150 Rumah Tangga	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	4	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	150 Rumah Tangga	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	0	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	150 Rumah Tangga	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1000 Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	7,447,532,000	2,147,155,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	1000 Rumah Tangga	10,910,489,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3	5	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Orang	10 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	10 Orang	10,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3	5	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11 Kelompok	11 Kelompok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	11 Kelompok	108,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Orang	10 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	10 Orang	85,223,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	2 Unit	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	3	5	2.01	11	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dok	1 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	1 Dok	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	10 Rumah Tangga	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3	5	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	1 Unit	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	600 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	0	500,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	400 Rumah Tangga	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun		10 M ³ / Hari	0	250,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	10 M ³ / Hari	0	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	16	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	10 M ³ / Hari	10 M ³ / Hari	0	250,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	10 M ³ / Hari	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	5	2.01	17	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dok	1 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten sidenreng Rappang	1 Dok	20,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik / pembuangan akses air tidak tersumbat	10 Persen	10 Persen	250,000,000	600,000,000				10 Persen	9,340,250,000	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	10 Persen	10 Persen	250,000,000	600,000,000				10 Persen	9,340,250,000	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dok	2 Dok	250,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Dok	821,085,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	6	2.01	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan Pada Kawasan Genangan yang Disusun	2 Dok	2 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Dok	200,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Dok	1 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dok	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	8200 Meter	8200 Meter	0	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	8200 Meter	5,243,250,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 6 2.01 6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2500 Meter	2500 Meter	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	2500 Meter	1,100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	500 Meter	500 Meter	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	500 Meter	150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Unit	150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang dioperasikan dan dipelihara	1000 Meter	1000 Meter	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1000 Meter	450,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 10	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	2 Dok	2 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Dok	150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000 Meter	1000 Meter	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1000 Meter	498,750,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang ditingkatkan	500 Meter	500 Meter	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	500 Meter	150,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	500 Meter	500 Meter	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	500 Meter	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Unit	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 6 2.01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dok	1 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dok	277,165,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	70 Persen	70 Persen	5,000,000,000	9,758,452,300				70 Persen	16,687,836,880	
1 3 7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	70 Persen	70 Persen	5,000,000,000	9,758,452,300				70 Persen	16,687,836,880	
1 3 7 2.01 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota	50 Sistem Jaringan	50 Sistem Jaringan	5,000,000,000	9,758,452,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	50 Sistem Jaringan	16,469,436,880	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		0 Sistem Jaringan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Sistem Jaringan		
1 3 7 2.01 3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	50 Sistem Jaringan	50 Sistem Jaringan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	50 Sistem Jaringan	218,400,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan ber - IMB per satuan bangunan	100 Persen	100 Persen	2,700,000,000	3,160,004,775				100 Persen	22,884,150,000	
1 3 8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang ber - IMB	100 Persen	100 Persen	2,700,000,000	3,160,004,775				100 Persen	22,884,150,000	
1 3 8 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3 Dok	3 Dok	300,000,000	192,065,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bangunan Gedung di Kabupaten Sidenreng Rappang	3 Dok	351,500,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 8 2.01 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota		0 Dokumen	2,400,000,000	2,967,939,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bangunan Gedung di Kabupaten Sidenreng Rappang	0 Dokumen	22,532,650,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	15 Dok	15 Dok				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		15 Dok		
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata	0 Persen	0 Persen	0	0				100 Persen	18,641,227,000	
1 3 9 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bangunan yang tertata	100 Persen	100 Persen	0	0				100 Persen	18,641,227,000	
1 3 9 2.01 2	Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Kawasan	853,600,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 9 2.01 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan	2 Kawasan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Kawasan	17,737,627,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 9 2.01 6	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dok	1 Dok	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dok	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 Persen	61 Persen	69,809,186,350	89,566,250,700				61 Persen	99,094,532,000	
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	61 Persen	61 Persen	69,809,186,350	89,566,250,700				61 Persen	99,094,532,000	
1 3 10 2.01 5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	30 Km	30 Km	46,561,525,000	43,142,372,700		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	30 Km	14,000,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
								Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1 3 10 2.01 9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	20 KM	19,921,129,600	43,202,478,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	20 KM	83,500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
1 3 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	20 KM	20 KM	2,893,631,750	2,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	20 KM	594,532,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik									
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M	10 M	432,900,000	1,021,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	10 M	500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	20 M	20 M	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	20 M	500,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga ahli bersertifikat	100 Persen	100 Persen	100,000,000	187,415,000			100 Persen	545,000,000		
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang terlatih	100 Persen	100 Persen	100,000,000	187,415,000			100 Persen	40,000,000		
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	50 Orang	100,000,000	119,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tenaga Ahli di Kabupaten Sidenreng Rappang	50 Orang	250,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara	100 Persen	100 Persen	0	68,300,000			100 Persen	95,000,000		
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2 Dokumen	2 Dokumen	0	68,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	2 Dokumen	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pemanfaatan jasa konstruksi	100 Persen	100 Persen	0	0			100 Persen	50,000,000		
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat konstruksi di Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Laporan	50,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Yang Tersusun	100.00 Persen	0 Persen	100	0	0	100	440000000	100	424,400,000	
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota				0	0				20,400,000		
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,400,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah dokumen tersusun	100 Persen	100 Persen	250,000,000	275,000,000			100 Persen	368,650,000		
1	3	12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	275,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	1 Dokumen	202,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
											Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 3 12 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	1 Dokumen	151,500,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 12 2.02 3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	1 Dokumen	15,150,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota				0	0				35,350,000		
1 3 12 2.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20,200,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 3 12 2.03 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,150,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8,610,000,000	317,440,000				13,995,560,000		
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	170,000,000	190,530,000			100 Persen	867,000,000		
1 4 2 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni	100 Persen	100 Persen	170,000,000	190,530,000			100 Persen	467,000,000		
1 4 2 2.01 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	170,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	1 Dokumen	200,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 4 2 2.01 4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	190,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	1 Dokumen	42,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	100.00 Persen	100.00 Persen	200,000,000	126,910,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		954,250,000		
1 4 3 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				0	0				100,000,000		
1 4 3 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 4 3 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				200,000,000	126,910,000				854,250,000		
1 4 3 2.02 1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dok	2 Dok	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dok	301,500,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1 4 3 2.02 2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2 Dok	2 Dok	200,000,000	126,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dok	552,750,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik								
1	4	4									2,399,810,000				
1	4	4	2.01								2,399,810,000				
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	600,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit Rumah	2,199,810,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	4	4	2.01	2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	4	4	2.01	3	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang didukung dengan PSU / Lampu Jalan	80,19 Persen	0 Persen	7,640,000,000	0			80,19 Persen	9,774,500,000	
						Cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang didukung dengan PSU / Lampu Jalan	80,19 Persen	80,19 Persen					80,19 Persen		
1	4	5	2.01		Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan	80,19 Persen	80,19 Persen	7,640,000,000	0			80,19 Persen	9,774,500,000	
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dokumen	100,000,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11 Lokasi	11 Lokasi	7,640,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	11 Lokasi	9,674,500,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				249,200,000	200,000,200				2,790,130,000	
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 Persen	100 Persen	249,200,000	200,000,200			100 Persen	2,790,130,000	
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tanah yang dibebaskan	100 Persen	100 Persen	249,200,000	200,000,200			100 Persen	2,790,130,000	
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	249,200,000	200,000,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Biciptapera	1 Dokumen	2,790,130,000	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10,919,988,000	8,495,503,000				10,894,885,000	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Tahun	100 Tahun	4,290,884,800	4,061,692,300			100 Tahun	4,059,885,000	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 Tahun	100 Tahun	48,270,400	0			100 Tahun	28,735,000	
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	9,639,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	9 Dokumen	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terlaksana	9 Dokumen	9 Dokumen	9,033,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	9 Dokumen	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 5 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	29,597,600	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	6,735,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan					0 Laporan			
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3,764,173,700	3,641,175,000			12 bulan	3,641,750,000		
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3,764,173,700	3,641,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	50 Orang/bulan	3,641,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
1 5 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	0				5,000,000		
1 5 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Dokumen	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Laporan	2,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	112,450,000				20,000,000		
1 5 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Unit	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	0	112,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	156,483,200	124,323,600			12 bulan	110,000,000		
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	1,325,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Paket	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,628,200	3,074,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Paket	3,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23283 exlamp ar	23283 exlamp ar	12,500,000	11,744,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	23283 exlamp ar	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	2,700,000	1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	3,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	135,330,000	107,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	35 Laporan	90,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	91,770,000	0			7 Unit	25,500,000		
1 5 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0 Unit	5,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	91,770,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Unit	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	120,287,500	84,113,700			12 bulan	117,900,000		
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan	820,000	820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Laporan	900,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	47,600,000	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1 5 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	11,200,000	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Laporan	2,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	60,667,500	48,643,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	65,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	91 Unit	91 Unit	109,900,000	99,630,000				91 Unit	111,000,000	
		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	91 Unit	91 Unit						91 Unit		
1 5 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	91 Unit	91 Unit	88,900,000	88,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	91 Unit	90,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan yang terlaksana	4 Unit	4 Unit	11,000,000	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Unit	11,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	10,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Unit	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari peneakanan Hukum Perda	100 Persen	100 Persen	2,341,198,400	1,887,357,700				100 Persen	2,555,000,000	
1 5 2 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	120 Kali	120 Kali	1,741,198,400	1,587,357,700				120 Kali	1,925,000,000	
1 5 2 2.01 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	15 Kasus	15 Kasus	1,435,967,700	1,382,015,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Kasus	1,460,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.01 2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	4 Kasus	4 Kasus	0	16,209,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Kasus	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.01 4	Pemberdayaan Perlingungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlingungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	124,136,700	119,183,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.01 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlingungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlingungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	7 Orang	91,999,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	7 Orang	35,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.01 6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	0 Dokumen	39,147,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.01 7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	40,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Unit	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
1 5 2 2.01 8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,946,600	8,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.01 9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	2 Laporan	0	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumah Penegakan Perda, Perbup dan Pearturan Lainnya	96 Kali	96 Kali	600,000,000	300,000,000				96 Kali	630,000,000	
1 5 2 2.02 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	0 Laporan	0 Laporan	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0 Laporan	30,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 2 2.02 3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	15 Laporan	15 Laporan	600,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	0	15 Laporan	600,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban	100 Persen	100 Persen	4,287,904,800	2,546,453,000				100 Persen	4,280,000,000	
1 5 4 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penanganan Bahaya Kebakaran	12 Kali	12 Kali	4,287,904,800	2,546,453,000				12 Kali	4,280,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 5 4 2.01 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	4 Dokumen	2,687,904,800	2,546,453,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	2,600,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 4 2.01 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	1 Unit	1,600,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	1,650,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5 4 2.01 7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0 Orang	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0 Orang	30,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3,074,732,000	2,622,014,000					4,101,953,357	
1 5 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,418,292,400	2,348,964,000				100 Persen	2,865,166,357	
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	58,233,500	6,000,000				5 Dokumen	97,000,000	
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	27,601,000	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30,632,500	3,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	47,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	18 Laporan	18 Laporan	2,026,817,800	1,927,007,000				18 Laporan	2,191,466,357	
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,017,006,400	1,912,007,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	20 Orang/bulan	2,174,066,357	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	9,811,400	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa		Aparatur	18 Laporan	17,400,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	0					8,000,000	
1 5 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0					15,000,000	
1 5 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	106,610,200	185,792,000				12 Bulan	197,500,000	
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	799,200	701,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Paket	8,600,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Dokumen	2,400,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4,498,000	4,496,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	4,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	101,313,000	180,595,000			Aparatur	40 Laporan	182,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	19 Unit	19 Unit	36,562,000	0				19 Unit	101,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 5 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	7,022,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	2 Unit	24,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	29,540,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	3 Unit	77,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	113,826,000	101,679,000				12 Bulan	137,800,000	
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan	18 Laporan	2,800,000	5,154,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa		Aparatur	18 Laporan	2,800,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22,026,000	28,026,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Laporan	28,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	89,000,000	68,499,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa		Aparatur	12 Laporan	107,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan Pemeliharaan	19 Unit	19 Unit	76,242,900	128,486,000				19 Unit	117,400,000	
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	59,888,000	97,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	12 Unit	70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	6,354,900	6,286,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	8 Unit	7,400,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,000,000	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur	1 Unit	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	100 Persen	100 Persen	656,439,600	273,050,000				100 Persen	1,236,787,000	
1 5 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen	100 Persen	70,049,000	50,000,000				100 Persen	140,287,000	
1 5 3 2.01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tersebut	57933 Orang	57933 Orang	70,049,000	50,000,000			Aparatur dan Masyarakat	57933 Orang	140,287,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen	440,222,500	193,685,000				100 Persen	909,000,000	
1 5 3 2.02 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	100 Orang	48,001,000	5,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	72,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 5 3 2.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	28,801,400	36,000,000				1 Dokumen	120,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	10 Unit	62,760,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	160,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota			0	47,002,900	17,500,000				0	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah dokumen penanganan pasca bencanaKabupaten/ Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
1 5 3 2.02 8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	18 Orang	18 Orang	95,012,500	107,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Orang	160,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.02 9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	94,896,200	5,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	147,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	400 Orang	63,748,500	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen	146,168,100	29,365,000				100 Persen	187,500,000	
1 5 3 2.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	38,328,800	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	63,755,700	5,169,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Orang	12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1000 Orang	21,476,000	13,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Orang	87,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 3 2.03 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	22 Laporan	22 Laporan	22,607,600	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Laporan	63,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3,829,687,000	3,161,025,000					5,374,347,573	
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,987,687,000	2,601,085,800				100 Persen	3,492,312,993	
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
1 6 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				125,780,100	51,572,600					49,568,083	
1 6 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	125,780,100	51,572,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	49,568,083	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2,137,600,600	2,082,088,000				100 Persen	2,255,835,000	
1 6 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bulan	276 Orang/ bulan	2,128,938,800	2,074,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	276 Orang/ bulan	2,222,000,000	DINAS SOSIAL
		Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
1 6 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	8,661,800	7,452,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	12 Dokumen	5,050,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				298,648,500	153,590,000					373,350,000	
1 6 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	39,464,500	2,588,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	15,150,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	210 Laporan	259,184,000	151,002,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		210 Laporan	311,080,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96,013,000	0					207,555,000	
1 6 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	44,888,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	71,205,000	DINAS SOSIAL

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 6 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	51,125,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	136,350,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174,022,800	202,433,600					210,080,000	
1 6 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1500 Laporan	2,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1500 Laporan	2,020,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	36,360,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	172,022,800	171,433,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	171,700,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155,622,000	111,401,600					369,054,000	
1 6 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	155,622,000	97,311,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	153,924,000	DINAS SOSIAL
1 6 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	0	14,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	13,130,000	DINAS SOSIAL
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Dibina	100 Persen	100 Persen	231,514,400	253,745,700					1,003,183,510	DINAS SOSIAL
1 6 2 2.03	Bengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				231,514,400	253,745,700					1,003,183,510	DINAS SOSIAL
1 6 2 2.03 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Menerima Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	10614 KK	10614 KK	31,514,400	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10614 KK	94,183,510	DINAS SOSIAL
		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	10614 Keluarga	10614 Keluarga						10614 Keluarga		
1 6 2 2.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	200,000,000	253,745,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Lembaga	878,700,000	DINAS SOSIAL
		Jumlah Lembaga yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga						6 Lembaga		
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang di Bina	100 Persen	100 Persen	287,000,000	107,785,000				100 Persen	440,640,000	
1 6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				287,000,000	107,785,000					440,640,000	
1 6 4 2.01 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	15 Orang	37,000,000	51,595,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Orang	140,640,000	DINAS SOSIAL
		Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	15 Orang	15 Orang				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		15 Orang		
1 6 4 2.01 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	31 Orang	31 Orang	250,000,000	56,189,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		31 Orang	300,000,000	DINAS SOSIAL
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	2170 Orang	2170 Orang				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2170 Orang		
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	1549 Orang	1549 Orang						1549 Orang		
		Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	590 Orang	590 Orang						590 Orang		
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin	100 Persen	100 Persen	175,000,000	48,215,000					156,401,070	DINAS SOSIAL
1 6 5 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				175,000,000	48,215,000					149,331,070	DINAS SOSIAL
1 6 5 2.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Masyarakat Miskin yang Dikelola	12951 KK	12951 KK	175,000,000	125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12951 KK	140,000,000	DINAS SOSIAL
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	12951 Keluarga	12951 Keluarga						12951 Keluarga		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1 6 5 2.02 3	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	12951 Keluarga	12951 Keluarga	0	48,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12951 Keluarga	9,331,070	DINAS SOSIAL
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Keluarga yang Mendapat Fasilitas Bantuan Sosial	5000 KK	5000 KK						5000 KK		
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/ Kota Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	100 Persen	137,374,200	139,452,200				100 Persen	200,000,000	
1 6 6 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota				100,000,000	127,647,600					30,000,000	
1 6 6 2.01 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	80 Orang	80 Orang	100,000,000	127,647,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		80 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 6 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota				37,374,200	11,804,600					170,000,000	
1 6 6 2.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	37 Orang	37 Orang	37,374,200	11,804,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Orang	170,000,000	DINAS SOSIAL
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TAGANA yang Diberdayakan	37 Orang	37 Orang						37 Orang		
		Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	11,111,400	10,741,300				100 Persen	80,295,000	
1 6 7 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota				11,111,400	10,741,300					80,295,000	
1 6 7 2.01 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	11,111,400	10,741,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	80,295,000	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				12,253,313,000	10,950,036,000					14,259,748,200	
2 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				11,225,213,000	10,859,061,000					11,547,902,000	
2 9 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64,704,000	66,001,000					100,000,000	
2 9 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	41,204,000	52,501,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	60,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2 9 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	23,500,000	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	40,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2 9 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,993,736,000	9,900,626,000					9,929,135,000	
2 9 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/ bulan	106 Orang/ bulan	9,943,736,000	9,864,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		106 Orang/ bulan	9,871,135,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2 9 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	58,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2 9 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	0					36,000,000	
2 9 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Disediakan Jasa Jaminan	8 Unit	8 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	36,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2 9 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				339,574,000	235,250,000					341,142,000	
2 9 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,064,000	2,058,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2,352,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	337,510,000	233,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	338,790,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			79,939,000	70,092,000				164,250,000		
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	17 Unit	17 Unit	29,925,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	17 Unit	54,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit					0 Unit		
2	9	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	50,014,000	70,092,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	110,250,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			521,176,000	499,089,000				663,875,000		
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2,346,000	2,346,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	5,520,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70,020,000	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	120,190,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7,685,000	7,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	16,665,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	441,125,000	423,058,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	521,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			226,084,000	88,003,000				313,500,000		
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	199,219,000	71,138,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	31 Unit	255,400,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	50,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	6,865,000	6,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	8,100,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	0 Persen	0 Persen	0	0			1,010,000,000		
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			0	0				1,010,000,000		
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	1,010,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Unit			
2	9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	94.00 Persen	94.00 Persen	948,100,000	57,510,000				1,589,581,200	
2	9 3	2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			100,000,000	31,795,000					75,000,000	
2	9 3	2.01 1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	21,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan		15,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9 3	2.01 4 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	10,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen		10,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9 3	2.01 5 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit		50,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang Dibina	0 Kelompok	0 Kelompok						0 Kelompok		
2	9 3	2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			848,100,000	25,715,000					1,514,581,200	
2	9 3	2.04 1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	25,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		30,221,200	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9 3	2.04 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	818,100,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan		1,484,360,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
2	9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	100.00 Persen	100.00 Persen	80,000,000	33,465,000				112,265,000	
2	9 4	2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			30,000,000	10,535,000					77,265,000	
2	9 4	2.01 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	10,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen		77,265,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	9 4	2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota			50,000,000	22,930,000					35,000,000	
2	9 4	2.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	22,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan		35,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			10,192,138,000	2,448,613,000					20,293,611,000	
3	27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	6,603,167,000	1,606,637,000				6,162,740,000	
3	27 2	2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			6,603,167,000	1,606,637,000					6,162,740,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	6,247,197,000	379,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	4,845,240,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	355,970,000	1,226,687,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1,317,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	1,856,370,000	340,145,000					8,639,425,000	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian				43,600,000	24,270,000					54,025,000	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	43,600,000	24,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	54,025,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian				1,812,770,000	315,875,000					8,585,400,000	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	286,090,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	800,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	281,910,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	3,065,400,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	978,770,000	205,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3,170,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	75,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
3	27	3	2.02	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	50,600,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 27 3 2.02 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	66,000,000	600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	750,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 3 2.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	200,000,000	10,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	674,400,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	100.00 Persen	100.00 Persen	144,840,000	6,500,000					579,170,000	
3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota				144,840,000	6,500,000					579,170,000	
3 27 5 2.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	650 Ha	650 Ha	144,840,000	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		650 Ha	579,170,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100.00 Persen	0 Persen	11,160,000	0					11,160,000	
3 27 6 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				11,160,000	0					11,160,000	
3 27 6 2.01 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	11,160,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11,160,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP	1:15 Rasio	1:15 Rasio	1,576,601,000	495,331,000					4,901,116,000	
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1,576,601,000	495,331,000					4,901,116,000	
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	11 Unit	130,000,000	176,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	170,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1999 Unit	1999 Unit	231,312,000	283,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1999 Unit	1,990,491,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	11 Unit	1,166,259,000	28,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	2,525,625,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 7 2.01 4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	1 Unit	25,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	15,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
3 27 7 2.01 5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	1 Unit	24,030,000	1,991,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19,186,954,000	13,973,232,000					14,627,661,385	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4,731,641,700	4,562,500,600				100 Persen	4,488,143,545	
2 11 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	92,000,000	48,259,100				100 Persen	80,000,000	
2 11 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	4,270,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	8,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	49,000,000	16,489,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	37,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,704,458,100	3,638,923,500					3,550,000,000	
2 11 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	3,679,459,100	3,606,928,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		560 Orang/bulan	3,525,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	6,999,000	8,359,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	7,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan						1 Laporan		
2 11 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	18,000,000	23,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	18,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan						20 Laporan		
2 11 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				167,340,000	215,502,000					130,000,000	
2 11 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	6,000,000	3,402,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	6,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	4,005,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	4,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	157,335,000	212,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Laporan	120,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,860,000	61,386,000					50,000,000	
2 11 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7 Unit	100,860,000	61,386,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421,183,600	394,360,000					458,143,545	
2 11 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Laporan	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	68,040,000	74,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	69,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	348,143,600	315,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	384,143,545	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan						12 Laporan		
2 11 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245,800,000	204,070,000					220,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 11 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	40,300,000	42,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit						1 Unit		
		Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
2 11 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	135,670,000	130,203,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	135,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	70 Unit						70 Unit		
		Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
2 11 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	29,830,000	16,467,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	210,265,100	615,725,000					907,178,000	
2 11 2 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota				171,044,900	115,725,000					222,178,000	
2 11 2 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	171,044,900	115,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	222,178,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota				39,220,200	500,000,000					685,000,000	
2 11 2 2.02 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	13,059,200	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2 2.02 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26,161,000	330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	435,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	1,068,923,000	90,709,600					140,983,000	
2 11 3 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota				984,290,000	48,594,000					60,000,000	
2 11 3 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	30,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
2 11 3 2.01 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	954,290,000	28,594,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengurusan-Lingkungan Hidup				
2 11 3 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota				70,000,000	42,115,600					70,000,000	
2 11 3 2.02 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	11 Laporan	11 Laporan	40,000,000	21,612,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Laporan	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 3 2.02 3	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	11 Titik	11 Titik	30,000,000	20,503,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Titik	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 3 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota				14,633,000	0					10,983,000	
2 11 3 2.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	7,333,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	3,683,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 11 3 2.03 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	0 Dokumen	0 Dokumen	3,650,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	3,650,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 3 2.03 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	0 Dokumen	0 Dokumen	3,650,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	3,650,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	20.00 Persen	20.00 Persen	2,813,467,300	1,484,781,600					2,717,793,000	
2 11 4 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota				2,813,467,300	1,484,781,600					2,717,793,000	
2 11 4 2.01 2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Ha	0 Ha	8,550,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Ha	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 4 2.01 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Ha	0 Ha	1,804,302,000	1,462,712,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Ha	2,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 4 2.01 5	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Ha	0 Ha	1,000,615,300	22,069,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Ha	367,793,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3	100.00 Persen	100.00 Persen	22,230,100	30,000,100					22,230,000	
2 11 5 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3				5,000,100	5,000,100					5,000,000	
2 11 5 2.01 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5 Laporan	5 Laporan	5,000,100	5,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 5 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				17,230,000	25,000,000					17,230,000	
2 11 5 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5 Dokumen	5 Dokumen	17,230,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	17,230,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota	100.00 Persen	100.00 Persen	48,255,600	45,000,000					46,460,000	
2 11 6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				48,255,600	45,000,000					46,460,000	
2 11 6 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	18,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 6 2.01 3	Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	35 Laporan	35 Laporan	28,255,600	25,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Laporan	28,260,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100.00 Persen	100.00 Persen	120,689,100	15,000,000					42,655,000	
2 11 7 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				120,689,100	15,000,000					42,655,000	
2 11 7 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	120,689,100	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	42,655,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	100	100	63428000	100	80000000	100	80,800,000	
2 11 9 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				100,000,000	74,937,500					80,800,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5 Entitas	100,000,000	74,937,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Entitas	80,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	100.00 Persen	50,048,000	25,000,000				75,048,000		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota			50,048,000	25,000,000				75,048,000			
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	10 Dokumen	10 Dokumen	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	0 Dokumen	0 Dokumen	25,048,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	25,048,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	47.50 Persen	47.50 Persen	10,021,434,100	7,029,577,600				6,106,370,840		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			10,021,434,100	7,029,577,600				6,106,370,840			
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	9 Laporan	9 Laporan	1,029,997,800	1,676,259,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Laporan	1,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	0 Ton	0 Ton	5,441,436,300	3,688,623,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Ton	4,112,641,840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	10 Unit	10 Unit	3,550,000,000	1,664,694,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	993,729,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
												DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				3,836,288,000	3,314,956,000				4,218,299,521		
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,921,315,100	2,637,382,700				100 Persen	3,746,019,011	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	91,000,000	26,414,000				100 Persen	377,710,084	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	91,000,000	26,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	37,399,674	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1,931,850,200	1,897,996,000				100 Persen	1,807,341,692	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	252 Orang/ bulan	1,931,850,200	1,897,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	252 Orang/ bulan	1,787,341,692	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	268,328,400	156,257,200				100 Persen	1,215,527,225	
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5,997,000	5,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	5,769,260	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,991,000	7,991,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	3,989,510	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	112,370,900	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	17,899,907	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	7,980,000	10,533,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	8,019,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	220 Laporan	133,989,500	131,736,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	220 Laporan	225,728,940	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	0	3,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 12 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	0	82,584,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	12,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54,600,000	39,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	41,209,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40,794,200	45,602,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	44,303,650	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	459,436,700	306,876,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	54,712,710	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	75,305,600	78,307,600				100 Persen	119,181,290	
2 12 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	68,025,600	59,698,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	60,999,940	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	7,280,000	18,609,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		23 Unit	6,181,350	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	100 Persen	100 Persen	598,321,700	518,668,200				100 Persen	197,280,510	
2 12 2 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	100 Persen	100 Persen	598,321,700	518,668,200				100 Persen	110,000,000	
2 12 2 2.01 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24 Dokumen	24 Dokumen	178,000,000	101,462,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	17,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 2 2.01 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan	36 Laporan	406,825,700	403,641,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	78,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 2 2.01 6	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	72 Laporan	72 Laporan	13,496,000	13,564,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		72 Laporan	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	96,00 Persen	96,00 Persen	92,421,000	78,399,500				96,00 Persen	160,000,000	
2 12 3 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase pelayanan pencatatan sipil	100 Persen	100 Persen	57,286,000	58,264,500				100 Persen	87,778,021	
2 12 3 2.01 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2700 Dokumen	2700 Dokumen	16,286,000	18,714,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2700 Dokumen	22,778,021	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 3 2.01 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	6 Layanan	41,000,000	39,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Layanan	45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 3 2.02 3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	35,135,000	20,135,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	97,53 Persen	97,53 Persen	224,230,200	80,505,600				97,53 Persen	115,000,000	
2 12 4 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	persentase database kependudukan	100 Persen	100 Persen	69,356,600	18,877,000				100 Persen	20,000,000	
2 12 4 2.01 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	69,356,600	18,877,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 4 2.03 4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	93,103,100	51,006,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 4 2.03 8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	12 Dokumen	61,770,500	10,622,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				435,000,000	597,000,000					2,774,991,000	
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang Aktif	99,00 Persen	99,00 Persen	170,990,000	506,591,000				99,00 Persen	1,121,480,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 8 2 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut Dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender	96.01 Persen	96.01 Persen	120,990,000	56,591,000				96.01 Persen	446,480,000	
		Ini isi Bu	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
2 8 2 2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				101,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD		100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD		167,848,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 2 2.01	4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	19,990,000	56,591,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD	29 Perangkat Daerah	178,632,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 8 2 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55.01 Persen	55.01 Persen	50,000,000	450,000,000				55.01 Persen	475,000,000	
2 8 2 2.02	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	450,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Organisasi	4 Dokumen	475,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Rujukan yang tersedia Bagi Perempuan Korban Kekerasan	100 Persen	100 Persen	71,490,000	0				100 Persen	160,000,000	
2 8 3 2.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota				71,490,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	0,30 Persen	0,30 Persen	24,000,000	20,000,000				0,30 Persen	258,832,000	
2 8 4 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Layanan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	24,000,000	20,000,000				100 Persen	158,832,000	
2 8 4 2.02	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	4 Lembaga	24,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluarga	4 Lembaga	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	100 Persen	0 Persen	20,000,000	0				100 Persen	38,607,000	
2 8 5 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data yang dikumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	100 Persen	100 Persen	20,000,000	0				100 Persen	38,607,000	
2 8 5 2.01	1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota				20,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		30,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kekerasan terhadap Anak	0.001 Persen	0.001 Persen	148,520,000	70,409,000				0.001 Persen	347,754,000	
2 8 6 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak	100 Persen	100 Persen	123,520,000	49,409,000				100 Persen	157,000,000	
2 8 6 2.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Usaha pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	4 Organisasi	39,210,000	49,409,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga	4 Organisasi	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 8 6 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				84,310,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga		82,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak	2 Dokumen	40,754,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4,092,378,000	4,201,357,000					9,300,831,000	
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	3,481,086,000	3,186,357,000				100 Persen	3,461,730,000	
2	13	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	14,000,000	14,000,000				12 Bulan	15,206,000	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,829,000	2,829,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	2 Dokumen	3,535,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,264,000	2,264,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	1 Dokumen	2,364,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,264,000	2,264,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	1 Dokumen	2,364,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,264,000	2,264,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	1 Dokumen	2,364,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,264,000	2,264,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	1 Dokumen	2,364,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2,115,000	2,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	2 Laporan	2,215,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Bulan	100 Bulan	2,919,270,000	2,801,691,000				100 Bulan	2,885,335,000	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan	2,907,270,000	2,789,691,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	31 Orang/ bulan	2,866,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	1 Laporan	18,585,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	162,121,000	101,060,000				100 Persen	139,730,000	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				5,577,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA		20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166 Laporan	166 Laporan	156,544,000	101,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	166 Laporan	119,730,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63,125,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA		30,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	196,970,000	198,880,000				100 Persen	196,724,000	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,350,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA		1,364,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42,720,000	42,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPM DPPA	12 Laporan	43,147,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 13 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	152,900,000	156,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DMPDPPA	12 Laporan	152,213,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				125,600,000	70,726,000					124,435,000	
2 13 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	67,450,000	65,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	49,385,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 1 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	8,150,000	4,746,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	5,050,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama			12,000,000	12,500,000					141,123,000	
2 13 3 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				12,000,000	12,500,000					141,123,000	
2 13 3 2.01 3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	26,255,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal			498,792,000	502,500,000					4,785,661,000	
2 13 4 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				498,792,000	502,500,000					4,785,661,000	
2 13 4 2.01 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				9,770,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,303,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4 2.01 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	68 Dokumen	68 Dokumen	24,448,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Dokumen	60,998,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4 2.01 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	19 Dokumen	19 Dokumen	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Dokumen	85,345,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4 2.01 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	308,292,000	435,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Laporan	1,700,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	68 Dokumen	68 Dokumen	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		68 Dokumen	16,312,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68 Dokumen	68 Dokumen	10,782,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Dokumen	122,987,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	68 Desa	68 Desa	110,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Desa	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 4 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				13,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,448,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	100.00 Persen	100.00 Persen	100,500,000	500,000,000					301,241,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 13 5 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota				100,500,000	500,000,000				301,241,000		
2 13 5 2.01 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	17,317,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 5 2.01 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	21 Lembaga	21 Lembaga	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Lembaga	26,630,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 5 2.01 4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27 Unit	27 Unit	13,000,000	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Unit	17,170,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 5 2.01 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 5 2.01 8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 5 2.01 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	425,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	179,087,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				3,723,790,000	12,608,608,000					5,144,708,235	
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2,986,493,500	3,082,306,000					3,402,175,635	
2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,100,775,000	2,081,587,000					2,276,754,635	
2 15 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	2,100,775,000	2,081,587,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Orang/ bulan	2,276,754,635	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0					15,000,000	
2 15 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		30 Paket	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				131,658,000	190,876,500					136,800,000	
2 15 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3,187,000	3,187,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 Paket	3,100,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8,963,000	8,859,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	8,700,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	6,385,500	6,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	55 Laporan	113,122,500	172,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55 Laporan	115,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 15 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				38,842,600	69,752,000				80,000,000		
2 15 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	17,115,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	8,393,000	69,752,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 15 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	13,334,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit						1 Unit		
2 15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				578,987,900	559,010,500					658,917,000	
2 15 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	1,300,000	1,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1,750,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39,144,000	45,074,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	45,456,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 15 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	538,543,900	512,636,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	611,711,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				136,230,000	181,080,000					234,704,000	
2 15 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	34,750,000	39,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	52,604,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 15 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	101,480,000	103,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	130,100,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 15 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	52,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Dapat Berfungsi Baik	98.00 Persen	98.00 Persen	737,296,500	9,526,302,000					1,742,532,600	
2 15 2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				201,614,000	0					292,500,000	
2 15 2 2.01 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	201,614,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	292,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				0	0					77,651,000	
2 15 2 2.03 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	4 Unit	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 Unit	77,651,000	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit						0 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				0	0				77,561,300		
2 15 2 2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Laporan	0 Laporan	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0 Laporan	77,561,300	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.05	Penelitian Berkala Kendaraan Bermotor				352,357,500	119,019,000				482,259,000		
2 15 2 2.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	226,057,500	22,717,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	247,259,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.05	4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	36,300,000	41,302,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	85,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				92,959,000	8,521,154,000				460,000,000		
2 15 2 2.06	2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas	50 Unit	50 Unit	60,168,000	8,481,563,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	285,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 15 2 2.06	4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	10 Laporan	10 Laporan	32,791,000	39,591,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				63,034,000	863,729,000				275,000,000		
2 15 2 2.09	2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan	63,034,000	863,729,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	275,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
								Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
2 15 2 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				27,332,000	22,400,000				77,561,300		
2 15 2 2.14	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan	27,332,000	22,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	77,561,300	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6,781,059,300	6,199,969,000				6,399,389,853		
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,860,623,300	2,883,085,500				100 Persen	2,851,574,853	
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
2 16 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kominfo	100 Persen	100 Persen	8,493,300	11,444,000				100 Persen	15,226,000	
2 16 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4,428,300	4,919,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4 Dokumen	5,555,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4,065,000	6,525,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5,555,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	16	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,217,342,853				
2	16	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan	288 Orang/bulan	2,421,316,000	2,371,486,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	288 Orang/bulan	2,206,404,853	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	3,802,000	4,102,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	10,938,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1,340,000	1,515,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	1,845,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1,588,500	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	3,060,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	200 Dokumen	200 Dokumen	27,418,000	51,235,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Dokumen	25,569,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	350 Laporan	102,025,000	128,114,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350 Laporan	189,880,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	10,640,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa		0 Unit	15,414,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216,500,500	189,376,000				236,324,000	
2	16	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Laporan	2,448,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73,500,000	76,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	86,355,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	141,000,500	110,876,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	142,399,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78,140,000	113,173,500				134,774,000	
2	16	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	75,436,000	104,929,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	106,494,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	2,704,000	8,244,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	20,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen	100 Persen	1,267,331,700	1,020,086,000			0	1,297,096,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 16 2 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1,267,331,700	1,020,086,000				1,297,096,000		
2 16 2 2.01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	480 Dokumen	480 Dokumen	85,644,100	180,316,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		480 Dokumen	265,690,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 2.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	25 Dokumen	25 Dokumen	187,687,600	102,129,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Dokumen	48,204,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 2.01 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	3 Layanan	994,000,000	737,641,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Layanan	965,572,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	100 Persen	2,653,104,300	2,296,797,500				100 Persen	2,250,719,000	
2 16 3 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				1,966,527,800	1,807,342,000					1,822,888,000	
2 16 3 2.01 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	6,010,800	6,001,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	3,070,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3 2.01 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	50 Unit	50 Unit	1,960,517,000	1,801,341,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	1,819,818,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				686,576,500	489,455,500					427,831,000	
2 16 3 2.02 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	32,284,600	120,767,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	9,674,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3 2.02 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	457,603,900	77,057,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	94,940,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3 2.02 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	5 Unit	196,688,000	291,631,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	309,217,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				170,957,500	17,001,000					71,105,000	
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	170,957,500	17,001,000				0	71,105,000	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
2 20 2 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota				170,957,500	17,001,000					71,105,000	
2 20 2 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	5 Dokumen	170,957,500	17,001,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	61,105,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				79,835,200	133,556,000					95,010,000	
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	79,835,200	133,556,000				100 Persen	95,010,000	
2 21 2 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				47,054,600	34,324,000					45,520,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 21 2 2.01 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	17,697,200	7,119,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa			1 Dokumen	13,163,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 2 2.01 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Laporan	2 Laporan	11,820,100	6,811,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa			2 Laporan	15,815,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 2 2.01 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	10,335,100	7,398,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa			2 Laporan	5,033,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 2 2.01 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	7,202,200	12,996,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Perangkat Daerah	11,509,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 2 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				32,780,600	99,232,000					49,490,000	
2 21 2 2.02 1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	32,780,600	99,232,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Perangkat Daerah	49,490,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1,519,702,000	1,469,138,000					2,245,317,000	
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	100 Persen	100 Persen	225,249,000	204,685,000				100 Persen	725,180,000	
2 7 3 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	47 persen	47 persen	225,249,000	204,685,000				47 persen	725,180,000	
2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	94 Orang	215,249,000	154,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencari kerja	94 Orang	41,180,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
								DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
								Dana Insentif Daerah				
2 7 3 2.01 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	1 Unit	10,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencari kerja	1 Unit	684,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	91.20 Persen	91.20 Persen	1,294,453,000	1,264,453,000				91.20 Persen	1,520,137,000	
2 7 5 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Besaran Pemeriksa Perusahaan	37 persen	37 persen	15,000,000	15,000,000				37 persen	25,502,000	
2 7 5 2.01 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penujoahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Penujoahan	15 Laporan	15 Laporan	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencari kerja	15 Laporan	25,502,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 5 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tenaga Honorer Pemda yang dilindungi Asuransi Ketenagakerjaan	100 Persen	100 Persen	1,279,453,000	1,249,453,000				100 Persen	1,494,635,000	
2 7 5 2.02 5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5067 Orang	5067 Orang	1,279,453,000	1,249,453,000		Dana Insentif Daerah	Pekerja	5067 Orang	1,494,635,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13,245,407,000	12,930,358,000					6,481,937,123	
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,774,758,000	3,718,745,000				100 Persen	5,819,822,123	
2 17 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	16,000,000	14,100,000				100 Persen	26,500,000	
2 17 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9,000,000	7,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN lingkup dinas	3 Dokumen	16,300,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 17 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN lingkup dinas	3 Laporan	10,200,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3,119,205,000	3,215,175,000				100 Persen	4,867,999,123	
2 17 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,102,205,000	3,200,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	35 Orang/bulan	4,844,669,123	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2 17 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	725 Dokumen	725 Dokumen	10,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	725 Dokumen	15,077,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	17 Laporan	8,253,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7,000,000	5,000,000				100 Persen	30,490,000	
2 17 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya	35 paket	35 paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	35 paket	20,290,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan	35 paket	35 paket						35 paket		
2 17 1 2.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	35 Dokumen	35 Dokumen	7,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	35 Dokumen	10,200,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	210,893,000	148,142,000				100 Persen	374,155,000	
2 17 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	37 Paket	1,461,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4752 paket	4752 paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	4752 paket	109,069,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12500 paket	12500 paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	12500 paket	5,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	389 paket	389 paket	1,800,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	389 paket	3,550,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan	230 Laporan	5,000,000	7,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	230 Laporan	5,075,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	202,593,000	138,942,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	100 Laporan	250,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	36,000,000	95,198,000				100 Persen	208,189,000	
2 17 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3 paket	3 paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BMD	3 paket	90,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BMD	3 Unit	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	19,013,000	82,948,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BMD	8 Unit	51,202,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	16,987,000	12,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BMD	2 Unit	16,987,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	285,600,000	156,199,000				100 Persen	206,982,000	
2 17 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	81,600,000	45,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	12 Laporan	70,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	204,000,000	110,799,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN	12 Laporan	136,982,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100,060,000	84,931,000				100 Persen	105,507,000	
2 17 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	66,170,000	66,157,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BMD	12 Unit	83,617,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16 unit	16 unit	23,690,000	18,774,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BMD	16 unit	11,690,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 paket	0 paket	10,200,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BMD	0 paket	10,200,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Memenuhi Prinsip Perkoperasian	57,20 Persen	57,20 Persen	24,745,000	15,000,000				57,20 Persen	24,745,000	
2 17 3 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	21 persen	21 persen	24,745,000	15,000,000				21 persen	24,745,000	
2 17 3 2.01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	24,745,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	koperasi berbadan hukum	15 Unit Usaha	24,745,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang berkualitas	8,20 Persen	0 Persen	12,605,000	0				8,20 Persen	12,605,000	
2 17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				12,605,000	0					12,605,000	
2 17 5 2.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	30 Orang	12,605,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	koperasi	30 Orang	12,605,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Meningkatkan Volume Usahanya Setelah Diberdayakan	75.20 Persen	75.20 Persen	8,695,799,000	9,171,613,000				75.20 Persen	95,525,000	
2 17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemanaku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan	24 Unit	24 Unit	8,695,799,000	9,171,613,000				24 Unit	95,525,000	
2 17 7 2.01 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UMKM	1 Dokumen	45,525,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 7 2.01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	8,425,799,000	9,121,613,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UMKM	100 Unit Usaha	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
								Dana Insentif Daerah				
								Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
2 17 7 2.01 6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	100 Orang	270,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UMKM	100 Orang	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Total UMKM	91.80 Persen	91.80 Persen	737,500,000	25,000,000				91.80 Persen	529,240,000	
2 17 8 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil	1 persen	1 persen	737,500,000	25,000,000				1 persen	529,240,000	
2 17 8 2.01 1	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	10 Unit Usaha	737,500,000	25,000,000		Dana Insentif Daerah	UMKM	10 Unit Usaha	529,240,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				394,163,000	15,000,000					1,143,355,000	
3 32 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman yang Dibina	2,30 Persen	2,30 Persen	381,895,000	10,000,000				2,30 Persen	1,091,845,000	
3 32 3 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				381,895,000	10,000,000					1,091,845,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 32 3 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	181,895,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transmigran	1 Laporan	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 3 2.01 2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transmigran	3 Dokumen	991,845,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 3 2.01 6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang dilatih	50 paket	50 paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transmigran	50 paket	50,000,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3 32 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Lepas Bina/ Mandiri	24,70 Persen	24,70 Persen	12,268,000	5,000,000				24,70 Persen	51,510,000	
3 32 4 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha	46 persen	46 persen	12,268,000	5,000,000				46 persen	51,510,000	
3 32 4 2.01 2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	50 Satuan Permukiman	50 Satuan Permukiman	12,268,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transmigran	50 Satuan Permukiman	51,510,000	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3,021,047,000	3,101,183,000					4,180,752,551	
2 18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,371,164,400	2,385,728,800					3,130,620,870	
2 18 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	11,397,900	20,490,100				4 Dokumen	24,927,000	
2 18 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,655,900	2,655,900	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa		0	1 Dokumen	2,709,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,092,200	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	10,488,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,930,000	1,930,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,968,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6,812,000	6,812,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	6,948,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1,984,045,000	1,960,414,000				1 Laporan	2,228,364,300	
2 18 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,981,445,000	1,957,814,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Orang/bulan	2,223,056,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,600,000	2,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,652,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	117,451,800	97,526,800				12 Bulan	173,585,170	
2 18 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	3,248,800	3,248,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 Paket	3,248,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 18 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	2 Paket	2 Paket	4,904,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Paket	6,284,220	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3,344,000	6,394,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Paket	27,724,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	3,035,000	3,634,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	3,681,450	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	22 Laporan	102,920,000	84,250,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	22 Laporan	132,646,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	50,460,800	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Unit	51,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	160,110,900	193,990,900				12 Bulan	290,071,400	
2 18 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	230 Laporan	230 Laporan	2,300,000	2,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	230 Laporan	2,300,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39,696,000	46,467,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	40,584,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	0	10,504,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	10,504,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	116,114,900	134,719,900	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	236,683,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	47,698,000	113,307,000				100 Persen	293,048,000	
2 18 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	47,698,000	58,307,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	13 Unit	54,048,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	0	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Unit	39,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.00 Persen	100.00 Persen	4,322,000	28,000,100					29,008,535	
2 18 2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0	13,010,600					13,129,658	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 18 2 2.01 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	0	13,010,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan Usaha	13,129,658	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 2 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				4,322,000	14,989,500					15,878,877	
2 18 2 2.02 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4,322,000	14,989,500	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	15,878,877	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi penanaman modal	100.00 Persen	100.00 Persen	70,678,000	30,018,000					187,058,000	
2 18 3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				70,678,000	30,018,000					187,058,000	
2 18 3 2.01 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	55,060,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 3 2.01 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	20,678,000	30,018,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	131,998,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	92.00 Persen	92.00 Persen	212,265,600	226,135,100					271,135,646	
2 18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				212,265,600	226,135,100					271,135,646	
2 18 4 2.01 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	187,265,600	188,055,100	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5000 Pelaku Usaha	198,255,100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 4 2.01 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	230 Kegiatan Usaha	230 Kegiatan Usaha	19,425,000	16,080,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		230 Kegiatan Usaha	27,749,697	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 4 2.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Tatalakolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	20 Orang	5,575,000	22,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Orang	40,044,995	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		0 Orang						0 Orang		
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	90.00 Persen	90.00 Persen	87	87	322348000	90	322573000	90	520,358,000	
2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				355,476,000	423,160,000					520,358,000	
2 18 5 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	240 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	75,583,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		240 Kegiatan Usaha	75,583,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	260 Pelaku Usaha	260 Pelaku Usaha	185,847,700	325,940,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		260 Pelaku Usaha	325,940,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	110 Kegiatan Usaha	110 Kegiatan Usaha	94,045,300	97,220,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 Kegiatan Usaha	118,835,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dapat diakses	100.00 Persen	100.00 Persen	7,141,000	8,141,000					42,571,500	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				7,141,000	8,141,000					42,571,500	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Laporan	4 Laporan	7,141,000	8,141,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	42,571,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8,692,781,000	7,061,027,600					12,406,386,331	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3,328,781,000	2,992,120,500				100 Persen	3,411,929,631	
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	15,000,000	10,953,200				100 Persen	20,000,000	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	10,953,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Dokumen	15,000,000	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	1 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Laporan	5,000,000	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan						0 Laporan		
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2,580,635,200	2,509,733,000				100 Persen	2,839,539,141	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2,559,813,000	2,495,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	29 Orang/bulan	2,819,539,141	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	20,822,200	14,247,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Dokumen	20,000,000	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	220,625,000	178,286,300				100 %	163,500,000	
						Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2,051,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Paket	3,000,000	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25,399,000	11,149,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Paket	17,500,000	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3,732,000	4,802,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Paket	3,000,000	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 19 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	18,835,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Laporan	15,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2 19 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	169,443,000	143,499,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	15 Laporan	125,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2 19 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	136,037,800	11,970,000				100 Persen	80,000,000	
2 19 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	32,205,000	11,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	20 Unit	10,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2 19 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	103,832,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Unit	70,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	238,537,000	207,990,000				100 Persen	199,390,490	
2 19 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Laporan	1,200,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Laporan	54,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	19,997,000	8,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Laporan	4,190,490	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	174,040,000	153,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	9 Laporan	140,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	137,946,000	73,188,000				100 Persen	109,500,000	
2 19 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	107,946,000	73,188,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	13 Unit	90,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Unit	7,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	12,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,31 Persen	3,31 Persen	715,000,000	1,987,275,600				3,31 Persen	2,111,436,700	
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Cakupan pembinaan kegiatan kepemudaan	100 Persen	100 Persen	425,000,000	1,125,594,900				100 Persen	1,125,000,000	
2 19 2 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	10 Orang	50,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Orang	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 2 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 Orang	200 Orang	100,000,000	1,100,594,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	200 Orang	110,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 19 2 2.01 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	200 Orang	200 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	200 Orang	110,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 19 2 2.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	34 Orang	34 Orang	275,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	34 Orang	855,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 2 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pembinaan pemuda dan Organisasi kepemudaan	100 Persen	100 Persen	290,000,000	861,680,700				100 Persen	986,436,700	
2 19 2 2.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	10 Dokumen	10 Dokumen	290,000,000	861,680,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Dokumen	986,436,700	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	77.43 Persen	77.43 Persen	4,604,000,000	2,031,631,500				85 Persen	6,681,520,000	
2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pembinaan dan pengembangan Olahraga	100 Persen	100 Persen	2,214,000,000	326,316,000				100 Persen	3,654,020,000	
2 19 3 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	204,020,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	10 Unit	2,214,000,000	326,316,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Unit	3,450,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	240,000,000	221,017,600				100 Persen	2,390,000,000	
2 19 3 2.02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	180,000,000	221,017,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Dokumen	350,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
2 19 3 2.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	0 Orang	0 Orang	60,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Orang	2,040,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 3 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi	100 Persen	100 Persen	0	0				100 Persen	277,500,000	
2 19 3 2.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0 Orang	0 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Orang	175,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 3 2.03 4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Menerima Penghargaan	0 Orang	0 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Orang	72,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 3 2.03 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	100 Persen	100 Persen	1,950,000,000	1,148,091,300				100 Persen	110,000,000	
2 19 3 2.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	2 Organisasi	1,950,000,000	1,148,091,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Organisasi	110,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi	100 Persen	100 Persen	200,000,000	336,206,600				100 Persen	250,000,000	
2 19 3 2.05 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000	336,206,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan kegiatan kepramukaan	75,00 Persen	75,00 Persen	45,000,000	50,000,000				75,00 Persen	201,500,000	
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan	100 Persen	100 Persen	45,000,000	50,000,000				100 Persen	201,500,000	
2 19 4 2.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	45,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Organisasi	50,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 19 4 2.01 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Orang	50,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
2 19 4 2.01 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Laporan	50,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
2 19 4 2.01 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	0 Unit	0 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
2 19 4 2.01 8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	0 Organisasi	0 Organisasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Organisasi	50,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									5,515,315,872		
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	19,61 Persen	19,61 Persen	16,844,950,000	2,056,412,000			19,61 Persen	3,487,000,000		
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Capaian pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	100 Persen	100 Persen	16,844,950,000	2,056,412,000			100 Persen	3,487,000,000		
3 26 2 2.03 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen	400,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
3 26 2 2.03 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	1,000,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Lokasi	2,832,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
							DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengawasan					
3 26 2 2.03 4	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	15,844,950,000	2,056,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Unit	200,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
							DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengawasan					
3 26 2 2.03 5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
3 26 2 2.03 7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Lokasi	25,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	32,41 Persen	32,41 Persen	1,317,750,000	168,215,400			32,41 Persen	709,045,000		
3 26 3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	100 Persen	100 Persen	1,317,750,000	168,215,400			100 Persen	709,045,000		
3 26 3 2.01 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1,142,750,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	102,010,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
							DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengawasan					
3 26 3 2.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	2 Laporan	175,000,000	168,215,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Laporan	357,035,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
3 26 3 2.01 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Dokumen	250,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha Ekonomi	31,11 Persen	31,11 Persen	779,935,000	1,612,392,000			31,11 Persen	1,319,270,872		
3 26 5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 Persen	100 Persen	779,935,000	1,612,392,000			100 Persen	1,319,270,872		
3 26 5 2.01 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang	779,935,000	1,612,392,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	200 Orang	819,270,872	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	
							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 26 5 2.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0 Orang	0 Orang	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Orang	500,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				724,378,600	832,188,000					1,230,000,000	
2 23 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	60,00 Persen	60,00 Persen	709,200,000	821,876,000				60,00 Persen	1,180,000,000	
		Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional	5,09 Persen	5,09 Persen						5,09 Persen		
2 23 2 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	60 persen	60 persen	638,777,200	777,709,000					995,000,000	
2 23 2 2.01 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100,000,000	130,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	100 Perpustakaan	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.01 3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan Jenis Kekhasan Koleksi yang Dikembangkan	50 eksemplar	50 eksemplar	100,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	50 eksemplar	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.01 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka yang Diadakan	1000 eksemplar	1000 eksemplar	100,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	1000 eksemplar	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dibina	100 unit	100 unit						100 unit		
2 23 2 2.01 5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	100,000,000	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	30 Perpustakaan	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 23 2 2.01 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimtek Perpustakaan	50 orang	50 orang	40,372,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	50 orang	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.01 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan	3 Layanan	25,000,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	3 Layanan	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.01 8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan		500 Eksemplar	57,000,000	151,876,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	500 Eksemplar	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2 23 2 2.01 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Diolah dan Diadakan	2000 eksemplar	2000 eksemplar	86,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	2000 eksemplar	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 23 2 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30,405,200	15,833,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar, Anak-anak dan Masyarakat pada Umumnya	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/ kota	100 Persen	100 Persen	70,422,800	44,167,000				100 Persen	185,000,000	
2 23 2 2.02 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	11 Lokus	11 Lokus	36,771,600	44,167,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat pada umumnya	11 Lokus	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.02 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan Jenis Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan Dipelihara	1 unit	1 unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat pada umumnya	1 unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.02 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan GBGM	2 orang	2 orang	10,178,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat pada umumnya	2 orang	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.02 5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Duta Baca Tingkat Kabupaten	11 orang	11 orang	23,472,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat pada umumnya	11 orang	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100 Persen	100 Persen	15,178,600	10,312,000				100 Persen	50,000,000	
2 23 3 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	100 Persen	100 Persen	10,178,600	10,312,000				100 Persen	40,000,000	
2 23 3 2.01 2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	20 Eksemplar	20 Eksemplar	10,178,600	10,312,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Naskah Kuno Milik Masyarakat	20 Eksemplar	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 3 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Budaya Etnis Nusantara yang Dikembangkan	100 Persen	100 Persen	5,000,000	0				100 Persen	10,000,000	
2 23 3 2.02 1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah dan Jenis Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diadakan	10 Naskah	10 Naskah	5,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Naskah Kuno Milik Daerah	10 Naskah	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				2,815,047,400	2,453,794,000					3,138,690,000	
2 24 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2,653,138,600	2,423,794,000				100 Persen	2,858,690,000	
2 24 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	13,145,800	13,646,000				100 Persen	14,300,000	
2 24 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3,192,000	3,192,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,223,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,125,000	1,926,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 24 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,178,600	2,075,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,178,600	2,975,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,471,600	2,255,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	0 persen	0 persen	2,238,305,600	2,164,762,000				0 persen	2,302,000,000	
2 24 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	24 orang	2,236,305,600	2,162,762,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Laporan Keuangan dan Daftar Gaji PNS	24 orang	2,300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Laporan Keuangan dan Daftar Gaji PNS	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	20,000,000	0				100 Persen	10,000,000	
2 24 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD SKPD yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen BMD PD	2 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen BMD PD	2 Dokumen	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	35,120,200	2,280,000				100 Persen	0	
2 24 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	20,441,000	2,280,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Kepegawaian PD	1 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen laporan Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	14,679,200	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Kepegawaian PD	1 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	124,022,000	48,010,000				100 Persen	143,500,000	
2 24 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	600,000	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Umum PD	6 Paket	500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	3,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Umum PD	10 Paket	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Umum PD		3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Umum PD	12 Laporan	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2	24	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	42 Laporan	112,092,000	43,130,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Umum PD	42 Laporan	120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	4,330,000	2,280,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Umum PD	12 Dokumen	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Admin SPBE	120 bulan	120 bulan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Administrasi Umum PD	120 bulan	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	17,555,000	0				100 Persen	35,000,000	
2	24	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebel yang Diadakan	4 unit	4 unit	17,555,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	4 unit	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	3 unit	3 unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	3 unit	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1000 persen	1000 persen	131,100,000	135,600,000				1000 persen	251,100,000	
2	24	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	1,100,000	1,100,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jasa Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantorn	200 Laporan	1,100,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	90,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jasa Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantorn	12 Laporan	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	44,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jasa Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantorn	12 Laporan	210,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	24	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	73,890,000	59,496,000				100 Persen	102,790,000	
2	24	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	57,005,000	45,948,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah PD	9 Unit	57,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	24	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	11,160,000	8,064,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah PD	2 Unit	11,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dipelihara secara rutin	12 unit	12 unit	241,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah PD	12 unit	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
2 24 1 2.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	5,484,000	5,484,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Daerah PD	12 Unit	4,790,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	85,00 Persen	85,00 Persen	52,700,000	15,000,000				85,00 Persen	140,000,000	
2 24 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				40,734,000	0					40,000,000	
2 24 2 2.01 1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang Diciptakan dan Digunakan	50 box	50 box	20,286,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota	50 box	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 2 2.01 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah dan Jenis Arsip Dinamis yang Dipelihara	30 box	30 box	10,286,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota	30 box	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 2 2.01 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat daerah yang Diaudit Kearsipan	10 unit	10 unit	10,162,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota	10 unit	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 2 2.02 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	45 Arsip	45 Arsip	10,316,000	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip Statis Daerah	45 Arsip	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 2 2.03 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah Peserta Sosialisasi/ Bimtek Kearsipan	200 orang	200 orang	1,650,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aplikasi SIKN dan SIKD	200 orang	65,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bermegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	85,00 Persen	85,00 Persen	60,506,300	15,000,000				85,00 Persen	80,000,000	
2 24 3 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Sesuai NSPK	100 Persen	100 Persen	25,822,200	15,000,000				100 Persen	25,000,000	
2 24 3 2.01 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	120 Arsip	120 Arsip	15,350,200	15,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip Statis dilingkungan Pemda	120 Arsip	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 3 2.01 2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah dan Jenis Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Dimusnahkan	20 box	20 box	10,472,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip Statis dilingkungan Pemda	20 box	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 3 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK	100 Persen	100 Persen	13,878,500	0				100 Persen	15,000,000	
2 24 3 2.02 1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah dan Jenis Arsip yang Dievaluasi dan diidentifikasi akibat bencana	20 box	20 box	9,554,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip dan dokumen daerah	20 box	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 3 2.02 2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah dan Jenis Arsip Daerah yang Dipelihara dan Disimpan Akibat Bencana	20 box	20 box	4,324,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip dan dokumen daerah	20 box	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 3 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Tingkat kesesuaian penyelamatan Arsip PD yang digabung dan/ atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	100 Persen	100 Persen	20,805,600	0				100 Persen	20,000,000	
2 24 3 2.03 1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan Jenis Arsip Penggabungan Perangkat Daerah yang Didata, Disusun dan Dimusnahkan	30 box	30 box	10,472,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip PD yang digabungkan atau dibubarkan	30 box	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 3 2.03 2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				10,333,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Arsip PD yang digabungkan atau dibubarkan		10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	100 Persen	0 Persen	48,702,500	0				100 Persen	60,000,000	
2 24 4 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	48,702,500	0				100 Persen	60,000,000	
2 24 4 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah dan Jenis SOP Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup yang ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	26,139,400	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Layanan penggunaan arsip	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 4 2.01 2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah dan Jenis Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup yang ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	22,563,100	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Layanan penggunaan arsip	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3												
3	25											
3	25	1										
3	25	1	2.01									
3	25	1	2.01	1								
3	25	1	2.01	2								
3	25	1	2.01	3								
3	25	1	2.01	4								
3	25	1	2.01	5								
3	25	1	2.01	6								
3	25	1	2.02									
3	25	1	2.02	1								
3	25	1	2.02	5								
3	25	1	2.06									
3	25	1	2.06	1								
3	25	1	2.06	2								
3	25	1	2.06	9								
3	25	1	2.08									
3	25	1	2.08	1								
3	25	1	2.08	2								
3	25	1	2.08	3								
3	25	1	2.08	4								
3	25	1	2.09									

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 25 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	41,751,000	41,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas peternakan dan perikanan	4 Unit	42,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas peternakan dan perikanan	1 Unit	10,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 1 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1,750,000	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas peternakan dan perikanan	10 Unit	3,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	100 Persen	100 Persen	173,739,000	12,500,000				100 Persen	138,384,000	
3 25 3 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				173,739,000	12,500,000					112,500,000	
3 25 3 2.01 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	10,000,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok nelayan	1 Unit	7,500,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 3 2.01 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	62 Unit	62 Unit	163,739,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok nelayan	62 Unit	105,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 3 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota				0	0					25,884,000	
3 25 3 2.02 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	40 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	25,884,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	100 Persen	100 Persen	331,761,000	240,231,000				100 Persen	320,230,000	
3 25 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				331,761,000	240,231,000					320,230,000	
3 25 4 2.04 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 Unit	10 Unit	205,000,000	190,231,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok pembudidaya ikan	10 Unit	270,230,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 4 2.04 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3 Unit	3 Unit	126,761,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok pembudidaya ikan	3 Unit	50,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 25 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	75 Persen	75 Persen	18,000,000	5,000,000				75 Persen	5,000,000	
3 25 5 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Kepatuhan pelaku Usaha Perikanan	294 Orang	294 Orang	18,000,000	5,000,000				294 Orang	5,000,000	
3 25 5 2.01 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	18,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	5,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				860,000,000	900,374,000					3,228,051,300	
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Daging	5.358.011 Kg	5.358.011 Kg	356,300,000	587,999,000				5.358.011 Kg	1,669,863,050	
		Jumlah produksi telur	83.362.100 Kg	83.362.100 Kg								
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Akseptor yang Dilayani	10 persen	10 persen	100,000,000	0				10 persen	100,000,000	
3 27 2 2.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	276 Dokumen	276 Dokumen	100,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok peternak	276 Dokumen	100,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 2 2.06	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Persentase Ternak yang Disebar	100 Persen	100 Persen	256,300,000	587,999,000				100 Persen	1,569,863,050	
3 27 2 2.06 1	Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	16583 Ekor	16583 Ekor	256,300,000	587,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok peternak	16583 Ekor	1,463,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 2 2.06 2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok peternak		106,863,050	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	0 Persen	0 Persen	0	0				100 Persen	1,210,813,250	
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				0	0					1,210,813,250	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 27 3 2.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,210,813,250	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	21.00 Persen	21.00 Persen	273,700,000	245,575,000				21.00 Persen	270,575,000	
3 27 4 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	20 persen	20 persen	198,700,000	225,575,000				20 persen	250,575,000	
3 27 4 2.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	11 Laporan	11 Laporan	198,700,000	225,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	11 Laporan	250,575,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 4 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet	75 persen	75 persen	75,000,000	20,000,000				75 persen	20,000,000	
3 27 4 2.04 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	75,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok masyarakat Ternak	4 Laporan	20,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100 Persen	100 Persen	15,000,000	8,800,000				100 Persen	8,800,000	
3 27 6 2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	100 Persen	100 Persen	15,000,000	8,800,000				100 Persen	8,800,000	
3 27 6 2.02 1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	75 Dokumen	75 Dokumen	15,000,000	8,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok ternak	75 Dokumen	8,800,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Usaha Peternakan/ Kelompok Ternak	1 : 12 Rasio	1 : 12 Rasio	215,000,000	58,000,000				1 : 12 Rasio	68,000,000	
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas penyuluh	100 Persen	100 Persen	215,000,000	58,000,000				100 Persen	68,000,000	
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	11 Unit	105,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penyuluh pertanian	11 Unit	50,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	110,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	penyuluh pertanian	1 Unit	18,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7,031,805,000	3,747,204,000					8,850,045,121	
3 30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3,654,931,000	3,506,741,000				100 Persen	4,626,316,121	
3 30 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	14,875,000	14,771,000				100 Persen	15,150,000	
3 30 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4,913,000	4,913,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,040,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,018,000	3,018,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,525,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1,755,000	1,710,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,525,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 30 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,710,000	1,710,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,020,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1,769,000	1,710,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,020,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1,710,000	1,710,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2,020,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3,075,772,000	2,915,330,000				100 Persen	4,027,848,741	
3 30 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	3,074,022,000	2,913,553,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	420 Orang/bulan	4,025,828,741	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
3 30 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,750,000	1,777,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Laporan	2,020,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100 Persen	0	3,000,000				100 Persen	15,150,000	
3 30 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	0	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	15,150,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	175,856,100	223,924,100				100 Persen	111,403,000	
3 30 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	1,045,600	1,045,600	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20 Paket	1,515,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0 Paket	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30 Dokumen	1,500,000	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30 Dokumen	1,818,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	110 Laporan	173,310,500	222,378,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	110 Laporan	108,070,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	0	25,107,000				100 Persen	40,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		0		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	8 Unit	0	25,107,000		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	337,244,900	271,208,900			
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68 Laporan	68 Laporan	1,505,000	1,745,000		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56,760,000	58,360,000		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	278,979,900	211,103,900		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	51,183,000	53,400,000			
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	36,400,000	36,280,000		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	12,028,000	14,460,000		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit	0	0		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2,755,000	2,660,000		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/ Berkala	23 Unit	23 Unit	0	0		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
						Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/ Berkala	12 Unit	12 Unit					
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Kepemilikan Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan	100 Persen	0 Persen	7,253,000	0		100 Persen	18,180,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
3	30	2	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		0 Persen	7,253,000		0			0 Persen	18,180,000		
3	30	2	2.01	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0 Dokumen	7,253,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	18,180,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai	6.20 Persen	6.20 Persen	3,150,000,000	150,463,000				6.20 Persen	3,742,050,000		
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.2 Persen	6.2 Persen	3,150,000,000	150,463,000				6.2 Persen	3,742,050,000		
3	30	3	2.01	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	3,150,000,000	150,463,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kab.Sidrap Secara Keseluruhan	1 Unit	3,742,050,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
											Dana Insentif Daerah					
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 Persen	100 Persen	17,747,000	20,000,000				100 Persen	60,600,000		
3	30	4	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,494,000	13,100,400				1 Kegiatan	14,645,000		
3	30	4	2.01	3 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	10,494,000	13,100,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kab.Sidrap Secara Keseluruhan	1 Laporan	14,645,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	4	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal		0 Laporan	0	0				0 Laporan	36,865,000		
3	30	4	2.02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		0 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	36,865,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	4	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	7,253,000	6,899,600				12 Laporan	9,090,000		
3	30	4	2.03	3 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	7,253,000	6,899,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kab.Sidrap Secara Keseluruhan	12 Laporan	9,090,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP yang Sesuai Standar Ukuran	100 Persen	100 Persen	201,874,000	70,000,000				100 Persen	265,529,000		
3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan	100 Persen	100 Persen	201,874,000	70,000,000				100 Persen	265,529,000		
3	30	6	2.01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	4000 Unit	104,874,000	40,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kab.Sidrap Secara Keseluruhan	4000 Unit	145,844,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	6	2.01	2 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	50 Orang	97,000,000	30,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kab.Sidrap Secara Keseluruhan	50 Orang	119,685,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	0 Persen	0 Persen	0	0				50 Persen	137,370,000	
3 30 7 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		0 Persen	0	0				0 Persen	137,370,000	
3 30 7 2.01 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota		0 UMKM	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 UMKM	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 30 7 2.01 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		0 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	37,370,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				19,428,827,000	19,017,852,000					1,714,706,860	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	20.52 Persen	20.52 Persen	19,403,827,000	19,017,852,000				20.52 Persen	1,692,486,860	
3 31 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri	20.52 Persen	20.52 Persen	19,403,827,000	19,017,852,000				20.52 Persen	1,692,486,860	
3 31 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Dokumen	110,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok IKM	1 Dokumen	153,520,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31 2 2.01 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	19,243,827,000	14,930,852,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok IKM	1 Dokumen	1,334,462,500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
								DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Pengawasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM				
3 31 2 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,085,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok IKM	1 Dokumen	181,129,360	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
3 31 2 2.01 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		0 Dokumen	50,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok IKM	0 Dokumen	23,375,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pertumbuhan IKM	1.00 Persen	0 Persen	25,000,000	0				1.00 Persen	22,220,000	
3 31 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri		0 Persen	25,000,000	0				0 Persen	22,220,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
3 31 4 2.01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		0 Dokumen	25,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	22,220,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				169,396,200	159,177,000					122,418,000	
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100 Persen	100 Persen	169,396,200	159,177,000				100 Persen	122,418,000	
4 1 3 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data pembangunan yang dilaporkan	100 Persen	100 Persen	169,396,200	159,177,000				100 Persen	122,418,000	
4 1 3 2.02 1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	80 Dokumen	80 Dokumen	55,102,000	50,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidrap	80 Dokumen	40,810,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 2.02 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	59,189,200	63,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidrap	12 Laporan	40,804,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 3 2.02 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	55,105,000	45,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidrap	12 Laporan	40,804,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				5,499,450,800	1,801,025,000					10,904,681,510	
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	100 Persen	100 Persen	5,499,450,800	1,801,025,000				100 Persen	10,904,681,510	
4 1 2 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	5,499,450,800	1,801,025,000				100 Persen	10,904,681,510	
4 1 2 2.02 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	96 Dokumen	96 Dokumen	5,131,965,500	1,728,716,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	96 Dokumen	10,480,044,610	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 2.02 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	11 Dokumen	188,740,100	29,162,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	11 Dokumen	235,293,400	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 2 2.02 3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	33 Dokumen	33 Dokumen	178,745,200	43,146,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	33 Dokumen	189,343,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				12,317,832,500	11,868,901,500					12,092,442,155	
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	12,317,832,500	11,868,901,500				100 Persen	12,092,442,155	
4 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 Persen	100 Persen	38,192,800	24,933,900				100 Persen	56,572,000	
4 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	13,977,700	5,067,700	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	2 Dokumen	15,010,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,585,000	2,315,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,946,000	2,766,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,370,900	3,870,900	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,826,800	4,325,800	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen	7,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5,577,400	4,263,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	2 Laporan	7,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2,909,000	2,325,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	2 Laporan	12,362,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,264,234,000	10,894,143,900				10,935,370,155		
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/ bulan	107 Orang/ bulan	11,146,166,000	10,782,415,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		107 Orang/ bulan	10,795,870,155	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	360 Dokumen	31,213,300	37,245,400	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		360 Dokumen	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	28 Dokumen	70,930,000	59,710,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Dokumen	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11,827,500	11,827,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	13,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	4,097,200	2,946,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Laporan	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,769,200	3,887,200				5,500,000		
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4,769,200	3,887,200	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1,010,636,500	945,936,500				1,095,000,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	210,599,000	210,599,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/ Bulan	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	75 Paket	75 Paket	150,037,500	100,337,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene			75 Paket	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang	50,000,000	35,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	55,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	600,000,000	600,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/ Bulan	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				280,022,000	248,201,400					483,226,000	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	280,022,000	248,201,400				100 Persen	483,226,000	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	100 Persen	100 Persen	76,000,000	64,211,000				100 Persen	191,992,000	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	22,000,000	25,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat	4 Dokumen	57,574,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	28,000,000	21,211,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat	2 Laporan	40,247,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	26,000,000	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat	4 Dokumen	94,171,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen	100 Persen	204,022,000	183,990,400				100 Persen	291,234,000	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	18 Dokumen	18 Dokumen	182,522,000	170,490,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat	18 Dokumen	258,055,000	SEKRETARIAT DAERAH
											DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)					
											DBH CHT					
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	11,609,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,500,000	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	21,570,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				716,000,000	204,780,000					655,000,000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	716,000,000	204,780,000				100 Persen	655,000,000	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	100 Persen	100 Persen	716,000,000	204,780,000				100 Persen	655,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	73,319,500	31,372,800	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	3 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	159,727,000	56,069,700	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	3 Dokumen	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	482,953,500	117,337,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	4 Dokumen	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				165,044,000	128,686,000					178,414,000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan	100 Persen	100 Persen	165,044,000	128,686,000				100 Persen	178,414,000	
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	165,044,000	128,686,000				100 Persen	178,414,000	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	81,834,000	58,596,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Setda dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri	20 Dokumen	94,577,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	57,490,000	44,370,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Setda dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri	15 Dokumen	65,367,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	35 Laporan	35 Laporan	25,720,000	25,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Setda dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri	35 Laporan	18,470,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				438,184,000	168,000,000					569,809,000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	438,184,000	168,000,000				100 Persen	569,809,000	
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	438,184,000	168,000,000				100 Persen	569,809,000	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	122,858,000	83,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	4 Dokumen	140,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	61,911,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Laporan	91,809,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	56,648,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dokumen	97,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	45,361,000	20,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dokumen	85,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	151,406,000	25,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	2 Dokumen	155,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				309,600,000	176,096,000					396,842,000	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	2.45 Persen	2.45 Persen	309,600,000	176,096,000				2.45 Persen	396,842,000	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan tender/ seleksi tepat waktu	60 Persen	60 Persen	309,600,000	176,096,000				60 Persen	396,842,000	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	107,754,700	41,419,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	12 Dokumen	140,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	101,453,300	119,976,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	12 Dokumen	136,842,000	SEKRETARIAT DAERAH
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	100,392,000	14,700,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang	300 Orang	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				14,727,053,300	10,486,680,100					13,610,956,400	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	14,727,053,300	10,486,680,100				100 Persen	13,610,956,400	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	24,929,500	6,410,800				100 Persen	205,737,000	
4	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35 Unit	35 Unit	24,929,500	6,410,800	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	35 Unit	22,425,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	75 pasang	75 pasang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	75 pasang	183,312,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4,537,699,400	3,709,919,700				100 Persen	4,229,479,400	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	250,238,000	382,126,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12 Paket	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	703,111,700	802,771,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12 Paket	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	181,172,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Paket	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1,106,178,800	893,489,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12 Paket	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	313,010,600	332,592,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	12 Paket	405,790,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/ Material				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	100,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	20 Laporan	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	1,883,987,500	1,238,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	300 Laporan	1,348,689,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	2,247,750,600	17,123,000				100 Persen	1,400,951,000	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	291,856,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Unit	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	275,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	1 Unit	280,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	25 unit	25 unit	953,905,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	25 unit	395,951,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset lainnya yang diadakan	15 petak	15 petak	726,989,000	17,123,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	15 petak	375,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 Unit						0 Unit		
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,505,392,000	3,465,502,000					3,365,280,000	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	18,188,000	20,398,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	17,280,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,084,604,000	1,070,604,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1,130,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,402,600,000	2,374,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2,218,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,324,579,300	1,576,504,600					2,311,199,000	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit	642,626,000	521,711,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Unit	830,414,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	721,097,500	618,789,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	565,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	52 Unit	232,349,000	166,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52 Unit	335,785,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	728,506,800	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	936,000,000	936,000,000				100 Persen	936,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	420,000,000	420,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidran	12 Paket	420,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidran	12 Paket	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	216,000,000	216,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidran	12 Paket	216,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	1,150,702,500	775,220,000				100 Persen	1,162,310,000	
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	72 Laporan	72 Laporan	1,150,702,500	775,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Laporan	1,162,310,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				441,278,000	685,000,000					973,294,000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	441,278,000	685,000,000				730 Dokumen	973,294,000	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	441,278,000	685,000,000				100 Persen	973,294,000	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	730 Dokumen	730 Dokumen	115,142,100	350,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Kabupten Sidenreng Rappang	730 Dokumen	344,568,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	26 Kasus	26 Kasus	102,452,000	120,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Kabupten Sidenreng Rappang	26 Kasus	303,528,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Aplikasi dokumentasi produk hukum dan sosialisasi hukum yang terlaksana	1 Aplikasi	1 Aplikasi	223,683,900	214,245,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan OPD Lingkup Kabupten Sidenreng Rappang	1 Aplikasi	325,198,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0 Dokumen	0 Dokumen						0 Dokumen		
4	2				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	2				SEKRETARIAT DPRD				38,591,839,000	46,501,256,000					40,738,002,151	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	22,896,289,800	23,515,252,200				100 Persen	23,823,421,151	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	30,209,000	30,209,000				7 Dokumen	30,208,000	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
						Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	6,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,534,000	6,534,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	6,533,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	6,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,600,000	2,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	2,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,835,000	2,835,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	2,835,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,740,000	5,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	5,740,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	2,620,248,900	2,698,949,000				100 Persen	2,618,000,151	
						Pengelolaan Administrasi Keuangan maksimal dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,605,778,900	2,634,479,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	30 Orang/bulan	2,603,530,151	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	8,000,000	58,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Dokumen	8,000,000	SEKRETARIAT DPRD
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	2,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	4,470,000	4,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	14 Laporan	4,470,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	137,764,000	450,000,000				100 Persen	152,764,000	
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	137,764,000	450,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	30 Orang	152,764,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	408,066,600	460,576,000				100 Persen	525,000,000	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60,051,600	57,054,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Paket	26,985,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	0	38,224,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Paket	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	68,333,000	85,616,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Paket	68,333,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	2	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	279,682,000	279,682,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Laporan	279,682,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah terpenuhi	100 Persen	100 Persen	388,739,900	1,200,142,400				100 Persen	1,010,100,000	
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		29 Unit	0	124,842,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	29 Unit	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		60 Unit	0	950,300,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	60 Unit	500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	69 Unit	3 Unit	388,739,900	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Unit	260,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan Pemerintah terpenuhi tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,063,499,400	1,378,710,200				100 Persen	1,484,461,000	
						Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	20,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	287,952,000	498,024,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	305,952,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74,510,000	76,010,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	74,510,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	681,037,400	784,676,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	1,083,999,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	785,380,000	1,028,760,000				100 Persen	546,006,000	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	20,660,000	20,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	26 Unit	20,660,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	308,600,000	394,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	26 Unit	250,786,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		16 Unit	0	32,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	16 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	456,120,000	582,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4 Unit	274,560,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen	100 Persen	16,280,382,000	15,163,905,600				100 Persen	16,394,882,000	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	15,650,882,000	14,527,405,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	35 Orang/ Bulan	15,642,882,000	SEKRETARIAT DPRD
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	437,000,000	437,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4 Paket	559,500,000	SEKRETARIAT DPRD
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	192,500,000	199,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	35 Orang	192,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Cakupan layanan administrasi DPRD	100 Persen	100 Persen	1,182,000,000	1,104,000,000			100 Persen	1,062,000,000		
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Laporan	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	1,032,000,000	954,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	36 Paket	912,000,000	SEKRETARIAT DPRD
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	100 Persen	100 Persen	15,695,549,200	22,986,003,800			100 Persen	16,914,581,000		
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan peraturan daerah yang difasilitasi pembahasannya	100 Persen	100 Persen	647,825,000	584,778,000			100 Persen	647,825,000		
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	78,036,000	83,136,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	15 Dokumen	78,036,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	106,965,000	128,240,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	15 Dokumen	106,965,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	4 Dokumen	462,824,000	373,402,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4 Dokumen	462,824,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Kebijakan anggaran yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	197,500,000	167,500,000			100 Persen	197,500,000		
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	19,500,000	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	19,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	19,500,000	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	19,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	46,500,000	46,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	46,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat Pembahasan APBD Perubahan yang terlaksana	1 Kali	1 Kali	47,500,000	47,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Kali	47,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	64,500,000	34,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	64,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	147,737,200	193,600,400			100 Persen	142,500,000		
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	16,709,000	46,709,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	16,709,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	10,875,000	40,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Laporan	10,875,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	17,562,200	17,562,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	12,325,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	10,875,000	10,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Laporan	10,875,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan	10,800,000	10,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	3 Laporan	10,800,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	17,500,000	33,363,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	17,500,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
4 2 2 2.03 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	53,416,000	23,416,000			0	1 Dokumen	53,416,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen	100 Persen	5,101,125,000	7,779,521,000				100 Persen	5,597,000,000	
4 2 2 2.04 2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	401,329,000	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	6 Dokumen	861,329,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2.04 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	7 Dokumen	7 Dokumen	4,536,301,000	6,236,026,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	7 Dokumen	4,572,176,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2.04 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	126,000,000	126,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	7 Orang	126,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2.04 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	37,495,000	17,495,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Dokumen	37,495,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terserap	100 Persen	100 Persen	2,945,000,000	3,560,342,400				100 Persen	2,945,000,000	
4 2 2 2.05 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan	311,894,000	394,004,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Laporan	311,894,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2.05 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	105 Dokumen	2,633,106,000	3,166,338,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	105 Dokumen	2,633,106,000	SEKRETARIAT DPRD
4 2 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi tugas DPRD	100 Persen	100 Persen	6,653,862,000	10,700,262,000				100 Persen	7,384,756,000	
4 2 2 2.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	29 Dokumen	29 Dokumen	6,653,862,000	10,700,262,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	29 Dokumen	7,384,756,000	SEKRETARIAT DPRD
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 1	PERENCANAAN				8,633,931,100	7,172,550,000					8,992,490,082	
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	5,412,572,700	5,175,300,700				100 Persen	5,961,831,303	
5 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	24,009,700	29,992,200				100 Persen	25,120,962	
5 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	19,125,200	19,977,700	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda Dan OPD Terkait	8 Dokumen	20,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2,681,400	5,838,600	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda Dan OPD Terkait	5 Laporan	2,681,843	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2,203,100	4,175,900	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda Dan OPD Terkait	4 Laporan	2,239,119	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	4,207,238,100	4,114,565,200				100 Persen	4,411,389,426	
5 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ 14 bulan	46 Orang/ 14 bulan	4,166,568,000	4,069,616,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	46 Orang/ 14 bulan	4,362,195,841	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25,979,200	29,992,300	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	12 Dokumen	25,963,585	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	180 Laporan	8,080,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	14,690,900	14,956,400			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	18 Laporan	15,150,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	5,715,700	5,996,900						100 Persen	5,783,967	
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5,715,700	5,996,900			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda Dan OPD Terkait	12 Laporan	5,783,967	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	418,595,500	394,244,600						100 Persen	259,454,587	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5,569,200	4,177,600			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	4 Paket	7,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,633,800	7,300,000			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	4 Paket	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	0	0				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	12 Bulan	19,842,507	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5,400,000	5,400,000			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	5 Dokumen	5,508,540	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	180 Laporan	399,992,500	377,367,000			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Dan Non ASN Lingkup Bappelitbangda	180 Laporan	217,103,540	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	153,131,100	103,271,000						100 Persen	271,632,037	
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	87,808,500	36,455,000			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda	12 Unit	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	65,322,600	66,816,000			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda	2 Unit	221,632,037	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	100 Persen	383,233,600	385,434,800						100 Persen	575,564,433	
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414 Laporan	414 Laporan	4,270,000	4,140,000			Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda dan OPD Terkait	414 Laporan	4,284,420	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Lokasi	Sumber Dana				
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66,420,000	73,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda dan OPD Terkait	12 Laporan	135,513,370	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	312,543,600	307,794,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda dan OPD Terkait	12 Laporan	435,766,643	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	100 Persen	220,649,000	141,796,000				100 Persen	412,885,891	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	109,530,000	80,677,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda	15 Unit	109,870,891	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,000,000	50,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda	1 Unit	153,015,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	11,119,000	11,119,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Bappelitbangda	30 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,737,872,300	1,150,199,800				100 Persen	1,398,302,500	
						Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	98.00 Persen	98.00 Persen						100 Persen		
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100 Persen	100 Persen	1,312,391,000	742,860,000				100 Persen	952,802,500	
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	126,178,400	30,643,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	2 Dokumen	76,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	195,844,200	126,585,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	2 Berita Acara	50,700,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	34,576,500	24,244,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	1 Berita Acara	35,300,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	210,245,000	121,796,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	1 Berita Acara	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1400 Usulan	1400 Usulan	23,065,200	25,864,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	1400 Usulan	50,384,059	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	722,481,700	413,728,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	3 Dokumen	620,418,441	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	221,759,100	180,377,800				100 Persen	245,500,000	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	4 Masukan	4 Masukan	221,759,100	180,377,800	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	4 Masukan	245,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	203,722,200	226,962,000				100 Persen	200,000,000	
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	6 Laporan	203,722,200	226,962,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD Lingkup Pemkab Sidrap	6 Laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100 Persen	1,483,486,100	847,049,500				100 Persen	1,632,356,279	
						Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen								
						Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100 Persen	100 Persen								
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100 Persen	567,181,500	290,793,600				100 Persen	487,802,178	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	25,251,000	2,775,300	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	3 Dokumen	25,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0 Dokumen						0 Dokumen		
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0 Laporan	19,300,000	3,202,800	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	0 Laporan	20,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah						12 Perangkat Daerah		
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	50,344,000	6,671,600	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	12 Laporan	55,550,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	146,202,500	26,329,900	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	12 Laporan	85,822,178	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	105,180,000	38,925,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	3 Dokumen	105,180,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	9,620,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	6 Perangkat Daerah	25,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	50,550,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	6 Perangkat Daerah	50,550,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	6 Laporan	160,734,000	212,889,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda Dan OPD dan Stakeholder Terkait	6 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	100 Persen	321,447,800	142,120,000				100 Persen	346,551,859	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	38,860,000	39,894,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Dokumen	23,230,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	9,620,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Perangkat Daerah	25,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	25,250,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Perangkat Daerah	25,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	105,570,000	27,639,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Laporan	105,570,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	35,919,300	34,169,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Dokumen	20,289,352	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	9,620,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Perangkat Daerah	25,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	21,210,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Perangkat Daerah	21,210,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	75,398,500	40,417,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	3 Laporan	100,502,507	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100 Persen	100 Persen	594,856,800	414,135,900				100 Persen	798,002,242	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	25,252,700	3,137,100	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	6 Dokumen	25,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0 Laporan	25,252,000	4,642,200	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	0 Laporan	25,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur		2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah						2 Perangkat Daerah		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		0 Laporan	25,856,100	47,406,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	0 Laporan	23,230,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Perangkat Daerah			
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	169,438,300	299,208,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	2 Laporan	209,482,125	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen	20,201,300	2,861,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	9 Dokumen	20,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	19,189,600	3,757,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	3 Perangkat Daerah	19,190,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	163,215,500	14,042,800	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	3 Perangkat Daerah	328,950,117	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	146,451,300	39,081,300	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	3 Laporan	146,450,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				729,092,100	369,500,000					651,000,000		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	100 Persen	100 Persen	729,092,100	369,500,000				100 Persen	651,000,000		
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	419,724,900	359,729,500				100 Persen	401,000,000		
5	5	2	2.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	108,821,000	100,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	101,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
5	5	2	2.01	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	87,920,600	59,862,500	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	5	2	2.01	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	63,242,500		0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	49,256,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda OPD dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	83,584,800	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda OPD dan Stakeholder Terkait	1 Rekomendasi	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	26,900,000	199,867,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda OPD dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	104,252,000	0				100 Persen	50,000,000	
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	104,252,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD Dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100 Persen	100 Persen	205,115,200	9,770,500				100 Persen	200,000,000	
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	205,115,200	9,770,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bappelitbangda, OPD dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2	KEUANGAN														
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	31,455,435,400	43,939,053,800				100 Persen	34,547,540,126	
						Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	228,147,700	208,483,100				100 Persen	462,647,261	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30,179,300	21,461,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	26,893,184	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	21,397,600	19,693,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	45,904,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25,621,600	22,719,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	45,904,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12,902,100	9,684,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	45,904,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12,672,100	11,848,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	45,904,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	70,375,000	54,166,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	61,206,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	55,000,000	68,909,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	190,930,077	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	26,727,090,100	39,140,472,497				100 Persen	25,396,217,470	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ bulan	26,642,134,400	38,976,952,497		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang/ bulan	24,832,733,357	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		12 bulan		
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	42,385,700	122,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	135,703,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan						12 bulan		
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10,320,700	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,146,300	28,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100,201,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan						0 Laporan		
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen LHP	12 bulan	12 bulan	12,963,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	20,402,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran	17 Dokumen	17 Dokumen	14,833,600	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Dokumen	256,172,613	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan 6 bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,306,400	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	51,005,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	661,315,000	901,857,603				100 Persen	1,999,136,116	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	10,985,300	9,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	62,051,663	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	30,065,800	264,806,703		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	790,419,196	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	12 bulan	12 bulan						12 bulan		
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	6,860,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	328,939,406	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan dan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	9,940,000	9,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Eksemplar	21,585,316	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan material yang tersedia	35 buah	35 buah	6,824,500	6,936,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 buah	51,005,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 kali	200 kali	587,138,500	598,182,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 kali	643,863,148	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah data Pegawai	12 bulan	12 bulan	9,500,900	12,539,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	50,267,387	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 Dokumen					
5	2	1	2.06	11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	waktu pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	12 bulan	12 bulan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	51,005,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	2,826,000,000	2,561,568,000			100 Persen	4,219,133,600	
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah dokumen pengadaan kendaraan dinas operasional	2 Dokumen	2 Dokumen	2,826,000,000	2,561,568,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	4,219,133,600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	734,401,100	737,045,100			100 Persen	1,659,375,248	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dokumen bermatrai	1000 lembar	1000 lembar	7,500,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1000 lembar	7,633,408	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	294,643,000	357,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	402,633,470	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	412,258,100	354,049,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	1,249,108,370	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan					12 bulan		
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	278,481,500	389,627,500			100 Persen	681,646,047	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperlihara	46 unit	46 unit	256,061,500	241,957,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	46 unit	295,447,597	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah kendaraan dinas atau operasioanl terpelihara	30 unit	30 unit	0	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 unit	86,198,450	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	22,420,000	112,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						jumlah sarana prasarana pendukung bangunan gedung kantor yang dipelihara atau direhabilitasi	1 unit	1 unit					1 unit		
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	133,079,297,000	139,321,725,600			100 Persen	158,433,632,766	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	100 Persen	1,133,974,100	1,986,291,700			100 Persen	2,770,377,890	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	44,812,700	85,333,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	101,643,784	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	63,812,000	56,172,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	70,369,558	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun dan terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	54,104,000	286,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	255,025,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		0 Dokumen					0 Dokumen		
						Tertibnya Penganggaran Pemerintah Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen		
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun dan terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	61,582,200	233,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	247,618,054	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun dan terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	33,539,000	35,385,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	306,025,410	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersusun dan terverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	53,408,800	102,884,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	512,136,105	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	216,618,000	371,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	372,785,344	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	208,666,000	332,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	312,053,691	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen penyusunan regulasi bidang anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	60,859,600	304,359,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		0 Dokumen							0 Dokumen		
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	37,800,000	29,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	185,371,552	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	28,117,800	27,047,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	203,330,412	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	31,799,000	31,799,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	204,018,980	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	2 Orang	2 Orang	238,855,000	89,255,000				2 Orang	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	100 Persen	445,837,800	876,843,100				100 Persen	1,026,070,170	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		0 Dokumen	70,482,000	70,529,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Waktu pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan kas daerah		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
5	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Waktu penyiapan, pelaksanaan dan penerbitan anggaran kas dan SPD	12 Bulan	12 Bulan	17,453,900	7,870,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	72,545,432	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Bulan	12 Bulan	35,801,400	17,151,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	81,723,271	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	12 Bulan	12 Bulan	45,283,800	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	40,767,276	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		0 Dokumen	46,082,800	79,954,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Waktu pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		0 Dokumen	13,760,000	54,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	25,495,395	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Waktu pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen laporan pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Bulan	12 Bulan	62,147,000	58,467,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	91,211,221	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Piutang dan Utang Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	32,095,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	169,108,098	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		0 Dokumen	60,910,800	205,831,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	93,932,848	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		2 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	32,301,000	321,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	21,567,974	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		0 Orang	29,520,100	60,335,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang	429,718,655	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
		Peningkatan kapasitas SDM pelaksana penatausahaan keuangan	2 Bulan	2 Bulan					2 Bulan						
5	2	2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	454,875,000	739,834,000			100 Persen	1,881,155,000		
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu koordinasi dan pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	26,050,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	16,536,841	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi	480 Dokumen	480 Dokumen	162,819,000	208,690,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	480 Dokumen	335,620,255	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		0 Dokumen						0 Dokumen		
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Penyajian Laporan Realisasi APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen	24,572,000	53,658,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Dokumen	68,054,951	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	47,125,000	160,269,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	314,656,986	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	148,100,000	249,905,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	398,455,140	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	40 Persen	40 Persen	47,259,000	16,932,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Persen	263,300,051	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota		0 Orang	0	24,327,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Orang	365,226,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota		2 Kali	2 Kali					2 Kali		
5	2	2	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	130,314,263,000	134,349,799,000				100 Persen	142,889,964,806	
5	2	2	2.04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terbayar sesuai perjanjian	12 Bulan	12 Bulan	1,050,000,000	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	1,224,120,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase terbayar	12 Bulan	12 Bulan	117,892,240,000	120,305,633,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	135,579,811,915	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase terbayar	12 Bulan	12 Bulan	7,000,000,000	6,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	3,060,300,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Peningkatan penerapan bagi hasil	12 Bulan	12 Bulan	4,372,023,000	7,144,166,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	3,025,732,891	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	730,347,100	1,368,957,800				100 Persen	9,866,064,900	
5	2	2	2.05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terealisasinya Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	85,743,600	50,480,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	178,517,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		0 Dokumen	333,214,500	1,202,550,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	9,330,512,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Terlaksananya Implementasi Dan Pembinaan SIPD Bidang Keuangan Daerah		12 Bulan	12 Bulan					12 Bulan		
5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan SIPD Bidang Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	311,389,000	115,926,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	357,035,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	595,142,600	845,002,600				100 Persen	1,239,131,809	
5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	595,142,600	845,002,600				100 Persen	1,239,131,809	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	83,126,600	73,367,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	233,563,116	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
5 2 3 2.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	8,221,600	4,740,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	91,590,699	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 2.01 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		0 Laporan	55,042,600	234,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	121,437,805	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Waktu Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
5 2 3 2.01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Rangka memfasilitasi Inventarisasi barang milik daerah	12 Bulan	12 Bulan	51,225,000	48,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	160,403,584	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 2.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Aset Daerah yang diamankan	5 Dokumen	5 Dokumen	176,657,600	206,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	200,233,389	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 2.01 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah pengujian penghapusan dan penjualan yang diproses	30 Dokumen	30 Dokumen	50,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Dokumen	145,198,994	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Naskah Dinas yang berkaitan dengan penghapusan dan pemindah tanganan aset	2 Dokumen	2 Dokumen	33,082,600	170,144,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	95,193,708	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	101,735,000	32,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	99,400,584	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 2 3 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan akhir barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	36,051,600	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	92,109,930	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 2	KEUANGAN				20,151,240,000	21,058,674,000					19,046,556,730	
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	100 %	100 %	14,535,844,500	13,645,353,100				100 %	13,534,209,630	
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	48,854,900	38,076,000				100 %	51,388,460	
5 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	2 Dokumen	2 Dokumen	25,317,000	22,789,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Dokumen	36,101,460	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	2 Laporan	2 Laporan	21,375,900	13,125,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Laporan	13,125,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan movev)	4 Laporan	4 Laporan	2,162,000	2,162,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4 Laporan	2,162,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	11,788,593,900	10,595,886,000				100 %	10,452,229,790	
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	1204 Orang/bulan	11,689,750,700	10,516,955,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1204 Orang/bulan	10,372,795,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pelaksanaan administrasi tugas ASN	500 Dokumen	770 Dokumen	94,975,000	75,063,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	770 Dokumen	75,063,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,458,200	1,458,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	1 Laporan	1,451,120	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2 Laporan	1,558,000	2,410,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Laporan	1,663,550	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	852,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0 Dokumen	1,257,120	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	0 Laporan						0 Laporan		
5	2	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	100 %	100 %	367,952,300	367,952,300				100 %	384,951,970	
5	2	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	3937 Dokumen	4208 Dokumen	294,132,200	328,624,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4208 Dokumen	341,501,110	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 bulan	23,410,700	2,005,500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 bulan	6,128,460	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicitak	4133 Dokumen	4208 Dokumen	50,409,400	37,322,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4208 Dokumen	37,322,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	100 %	647,197,000	610,047,000				100 %	618,669,650	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	138 Paket	138 Paket	9,131,400	9,131,400	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	138 Paket	14,650,050	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	332 Paket	332 Paket	12,969,000	12,969,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	332 Paket	12,610,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	13220 Paket	13000 Paket	163,760,600	147,352,600	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	13000 Paket	147,975,440	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	252 Dokumen	0 Dokumen	2,520,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0 Dokumen	2,840,160	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen						0 Dokumen		
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	458,816,000	440,594,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	60 Laporan	440,594,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	32,015,000	182,146,100				100 %	247,728,300	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel				20,190,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		41,543,160	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		97,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		16 Unit	11,825,000	182,146,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	16 Unit	109,185,140	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit						0 Unit		
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,350,497,400	1,293,042,700				100 %	1,542,933,360	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	12 Laporan	12 Laporan	3,996,000	3,552,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Laporan	3,874,180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	160,000,000	160,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 Laporan	171,293,220	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	1,186,501,400	1,129,490,700	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0 Laporan	1,367,765,960	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan						12 Laporan		
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	300,734,000	558,203,000				100 %	236,308,100	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	15 Unit	130,526,000	192,995,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	15 Unit	192,435,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
5 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Unit	5 Unit	130,000,000	325,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	5 Unit	19,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73 Unit	27 Unit	40,208,000	40,208,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	27 Unit	24,473,100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Pasar	100 %	100 %	5,615,395,500	7,413,320,900				100 %	5,512,347,100	
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasar)	100 %	100 %	5,615,395,500	7,413,320,900				100 %	5,512,347,100	
5 2 4 2.01 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		0 Dokumen	37,512,000	45,569,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0 Dokumen	50,444,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah objek pajak baru yang terdata	4 Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
5 2 4 2.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		0 Dokumen	154,488,000	115,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0 Dokumen	328,022,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah perda / perbub yang tersusun	5 Dokumen	10 Dokumen						10 Dokumen		
5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		0 Laporan	109,680,000	90,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0 Laporan	63,272,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah petugas dan wajib pajak yang mendapat penyuluhan	1 Laporan	2 Laporan						2 Laporan		
5 2 4 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia	2 Unit	2 Aplikasi	128,885,000	2,414,148,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Aplikasi	139,961,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	0 Laporan	129186 Objek Pajak	64,997,700	67,070,700	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	129186 Objek Pajak	64,997,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	2 Laporan	2 Aplikasi	44,330,500	49,223,300	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	2 Aplikasi	144,655,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
5 2 4 2.01 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang temutahirkan datanya	34000 Obyek Pajak	127109 Obyek Pajak	4,353,510,200	3,797,588,300	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	127109 Obyek Pajak	4,192,865,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	12 Layanan	8 Layanan	71,497,000	110,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	8 Layanan	66,311,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	8000 Dokumen	42414 Dokumen	11,960,700	8,035,700	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	42414 Dokumen	9,824,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	260000 Dokumen	132678 Wajib Pajak	196,192,900	329,744,900	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	132678 Wajib Pajak	188,104,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	1000 Dokumen	4 laporan	269,485,300	200,259,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4 laporan	154,544,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	4 Laporan	4 Laporan	172,856,200	186,682,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	4 Laporan	109,346,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 3	KEPEGAWAIAN											
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
5 3 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17,091,000	7,416,900					18,000,000	
5 3 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	1,021,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	1,021,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Dokumen	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	1,968,000	1,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	2,192,000	1,305,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Dokumen	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	8,931,000	2,524,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		6 Laporan	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,012,109,099			
5	3	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3,124,880,000	3,121,763,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37 Orang/bulan	2,987,109,099	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	20 Dokumen	19,696,500	4,900,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	20 Dokumen	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	2,890,500	2,065,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	10 Laporan	3,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	1,767,800	1,758,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	20 Laporan	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				140,045,500	161,210,500				163,000,000	
5	3	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	140,045,500	161,210,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	150 Laporan	163,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21,074,000	4,542,000				50,000,000	
5	3	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Mebeleur yang diadakan	5 Buah	5 Buah	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5 Buah	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit					0 Unit		
5	3	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	21,074,000	4,542,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	15 Unit	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253,255,300	186,791,300				260,000,000	
5	3	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 Laporan	650 Laporan	5,000,000	4,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	650 Laporan	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75,476,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	70,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	172,779,300	102,791,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	12 Laporan	185,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101,985,000	116,885,000				1,316,000,000	
5	3	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	76,035,000	93,035,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Unit	1,280,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	5,950,000	3,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	7 Unit	6,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3 Unit	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Rata-rata SKP ASN	88.50 Persen	88.50 Persen	1,038,197,400	817,990,800				1,624,959,490	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	63.00 Persen	63.00 Persen					719,234,490	
5	3	2	2.01	1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen					5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen					5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	160 Dokumen	160 Dokumen					500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	5 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5 Dokumen	5 Dokumen					4,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	314 Dokumen	314 Dokumen					20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	2 Lembaga					0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	9 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	5 Dokumen	5 Dokumen					0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4483 Dokumen	4483 Dokumen					165,234,490	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2000 Dokumen	2000 Dokumen					20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN								231,000,000	
5	3	2	2.02	1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	480 Dokumen	480 Dokumen					200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3018 Dokumen	3018 Dokumen					16,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02	3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	200 Dokumen					15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN								406,725,000	
5	3	2	2.03	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	5 Orang					10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	2 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	5 Dokumen					0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	35 Orang					200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.03	5 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	10 Dokumen					20,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
5 3 2 2.03 6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	30 Orang	30 Orang	2,088,500	4,986,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		30 Orang	10,150,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03 8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	3 Orang	3 Orang	3,962,000	4,844,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3 Orang	15,225,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03 9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	10 Dokumen	10 Dokumen	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Dokumen	20,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03 10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	30 Orang	30 Orang	2,054,600	4,705,600		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		30 Orang	25,375,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	30 Orang	30 Orang	24,674,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		30 Orang	25,375,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	300 Orang	40,988,900	3,690,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		300 Orang	80,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				147,928,200	71,991,100					268,000,000	
5 3 2 2.04 1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	3 Dokumen	2,456,000	2,343,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3 Dokumen	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5500 Dokumen	5500 Dokumen	53,562,000	18,084,400		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5500 Dokumen	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	5 Laporan	2,938,900	2,851,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Laporan	8,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	10 Orang	19,767,400	6,721,400		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	300 Orang	15,351,000	11,521,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		300 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	1000 Orang	9,569,900	4,620,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1000 Orang	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	25 Laporan	28,431,500	17,585,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		25 Laporan	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	15 Dokumen	3,298,500	3,044,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		15 Dokumen	3,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	100 Laporan	100 Laporan	12,553,000	5,220,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		100 Laporan	12,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,010,579,000	378,625,000					142,000,000	
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66.22 Persen	66.22 Persen	1,010,579,000	378,625,000					142,000,000	
5 4 2 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				65,899,000	6,994,000					92,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	35 Dokumen	35 Dokumen	65,899,000	6,994,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		35 Dokumen	92,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										50,000,000	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Laporan	200 Laporan	944,680,000	371,631,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		200 Laporan	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	1				INSPEKTORAT DAERAH											
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	10,038,512,000	10,000,249,000				90 %	8,291,954,935	
6	1	1	2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	6,736,332,600	6,081,090,000					6,151,528,000	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	6,736,332,600	6,081,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	58 Orang/bulan	6,151,528,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang naik pangkat tepat waktu	100 %	100 %	408,840,000	299,531,000				100 %	0	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	408,840,000	299,531,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	30 Orang	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	85 %	85 %	428,540,000	574,425,400				85 %	0	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	46,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Paket	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	10000 Paket	12,362,500	8,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10000 Paket	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Paket	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	12,500,000	70,151,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	11 Laporan	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	403,677,500	448,294,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	75 Laporan	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang	85 %	85 %	258,491,000	573,339,100				85 %	0	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	94,991,000	248,789,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Unit	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	163,500,000	324,549,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Unit	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	90 %	162,267,500	178,086,500				90 %	0	
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1,740,000	2,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61,811,000	74,124,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	98,716,500	101,852,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Laporan	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	87 %	87 %	95,760,400	346,982,000				87 %	250,000,000	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	91,045,400	98,496,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	23 Unit	0	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	4,715,000	7,666,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 Unit	0	INSPEKTORAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	240,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	250,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	96 %	96 %	1,745,492,000	1,822,045,000				95 %	1,816,326,935	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK	69 %	69 %	1,479,492,000	1,499,045,000				69 %	1,547,158,935	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan	372,520,000	296,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Laporan	268,470,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan	204,380,000	265,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 Laporan	343,730,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	42,600,000	84,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Laporan	85,500,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	20 Laporan	244,550,000	306,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Laporan	250,800,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	4 Laporan	112,500,000	111,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Laporan	128,992,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	379,142,000	287,285,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kesepakatan	365,766,935	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	123,800,000	147,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	103,900,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan	100 %	100 %	266,000,000	323,000,000				100 %	269,168,000	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan	14 Laporan	266,000,000	323,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 Laporan	269,168,000	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIIP Perangkat Daerah level 2 keatas	35 %	35 %	202,788,500	124,750,000				30 %	74,100,000	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan PKPT	90 %	90 %	31,888,500	0				90 %	0	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	31,888,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Rekomendasi	0	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase wajib LHKPN yang melapor tepat waktu	100 %	100 %	170,900,000	124,750,000				100 %	74,100,000	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	134,820,000	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 perangkat daerah	38,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	23,600,000	10,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Kegiatan	23,600,000	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	12,480,000	76,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	10 perangkat daerah	12,500,000	INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				2,539,425,200	2,495,393,000					2,136,015,990	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2,535,562,700	2,443,975,500				100 Persen	2,089,255,990	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0					10,100,000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 Laporan	10,100,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,207,559,600	2,159,447,000					1,755,123,000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2,207,559,600	2,159,447,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		336 Orang/bulan	1,755,123,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				198,380,300	147,897,500					138,968,945	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	6,757,000	4,103,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket	8,904,680	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	137,404,000	47,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	43,935,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	7,609,800	5,961,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Paket	5,302,500	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7,344,000	12,565,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	6,563,990	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	7,306,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	8,978,900	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	31,959,500	78,077,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	65,283,875	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116,774,800	115,115,000					152,823,585	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	375,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	757,500	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	16,386,000	23,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	20,141,420	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan	100,013,800	91,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	131,924,665	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12,848,000	21,516,000					32,240,460	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	12,848,000	20,016,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	12,995,415	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	0	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 Unit	6,022,125	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	3,122,920	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	10,100,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	1,056,500	50,000,000				100 Persen	19,200,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1,056,500	50,000,000					19,200,000	
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	1,056,500	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	9,600,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	10 Laporan	0	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	9,600,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	1,575,000	630,000				74 Persen	6,060,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				375,000	420,000					3,030,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	375,000	420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	3,030,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,200,000	210,000					3,030,000	
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	6 Laporan	1,200,000	210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Laporan	3,030,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 Persen	100 Persen	1,231,000	787,500				100 Persen	21,500,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1,231,000	787,500					21,500,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	1,126,000	315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	0	262,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	7,250,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 6 2.01 11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	7 Dokumen	7 Dokumen	105,000	210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	7,250,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				325,736,300	284,240,000					379,241,775	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	79,522,300	123,500,000				100 Persen	121,741,775	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				32,241,300	37,503,000					50,084,775	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10,875,000	10,839,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	3,200,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	7,749,900	14,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	16,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	948,400	892,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Paket	2,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2,538,000	2,543,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	2,300,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah Kunjungan Tamu yang di fasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	3,270,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3,300,900	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	180 Laporan	6,860,000	8,719,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		180 Laporan	23,283,875	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38,289,000	55,378,300					62,157,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	350,000	350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	357,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6,739,000	6,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6,800,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31,200,000	48,328,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	55,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	8,992,000	30,618,700				12 bulan	9,500,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4,970,000	5,472,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		5,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Unit	3,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1,522,000	22,646,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Unit	1,500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	246,214,000	160,740,000				74 Persen	257,500,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	120 orang	120 orang	246,214,000	160,740,000				120 orang	257,500,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120 Unit	120 Unit	139,354,000	60,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	120 Unit	250,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	106,860,000	100,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Pokmas / Ormas	7,500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				325,601,500	253,520,000					325,401,835	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	101,339,500	93,350,000				100 Persen	99,171,835	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				47,070,300	40,014,300					46,735,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3,001,500	4,790,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	3,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	14,809,800	7,809,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	14,935,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1,700,000	2,754,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	1,700,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2,735,000	2,735,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	2,200,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2,899,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2,900,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	21,925,000	21,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	22,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46,909,600	44,503,100					46,941,420	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	200,000	250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	200,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6,718,000	5,568,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6,741,420	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	39,991,600	38,685,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	40,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,359,600	8,832,600					5,495,415	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	4,482,600	8,832,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	4,495,415	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	1,885,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	0	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	992,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	224,262,000	160,170,000				74 Persen	226,230,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	120 orang	120 orang	224,262,000	160,170,000				120 orang	226,230,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	216,762,000	90,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Unit	218,730,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	7,500,000	69,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Pokmas / Ormas	7,500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				244,480,000	225,680,000					315,978,850	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	88,930,000	92,450,000				100 Persen	91,018,850	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				32,581,500	34,921,500					42,149,140	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2,692,000	2,712,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	2,704,650	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	12,619,500	12,619,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Paket	13,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1,551,000	1,723,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	1,602,500	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	2,063,990	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2,734,000	1,062,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2,778,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	10,985,000	14,805,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Laporan	20,000,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49,519,500	50,279,500					43,724,665	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	200,000	200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	200,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5,568,000	5,568,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6,600,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43,751,500	44,511,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	36,924,665	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,829,000	7,249,000					5,145,045	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	3,473,000	3,893,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3,500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	1,022,125	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2,356,000	2,356,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	622,920	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	155,550,000	133,230,000				74 Persen	224,960,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				155,550,000	133,230,000					224,960,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	148,050,000	91,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	217,460,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	7,500,000	41,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pokmas / Ormas	7,500,000	KECAMATAN PANCA LAUTANG
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				3,660,858,000	3,633,953,000					3,976,743,180	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 Persen	100 Persen	3,636,249,500	3,572,673,000				100 Persen	3,925,043,180	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3,373,546,000	3,295,366,000				100 Persen	3,559,076,780	
						Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan	3,355,546,000	3,283,366,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN lingkup Kecamatan	14 Orang/ bulan	3,547,076,780	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan						14 Bulan		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	18,000,000	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN lingkup Kecamatan	0 Dokumen	12,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen						12 Dokumen		
						Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	167,059,000	146,431,500				100 %	209,500,000	
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9 Paket	77,809,900	50,483,900	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN lingkup Kecamatan	9 Paket	80,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1181 Paket	1394 Paket	23,082,100	36,059,600	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ASN lingkup Kecamatan	1394 Paket	40,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13718 Paket	18156 Paket	7,823,000	14,278,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	ASN lingkup Kecamatan	18156 Paket	8,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	7,994,000	4,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN lingkup Kecamatan	4 Laporan	10,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan	122 Laporan	50,350,000	41,560,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN lingkup Kecamatan	122 Laporan	70,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	133 Kali	133 Kali				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		133 Kali		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 unit	37 unit	30,471,000	12,879,000				37 unit	70,566,400	
						Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	37 Unit	37 Unit	30,471,000	12,879,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan	37 Unit	70,566,400	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	17 Unit						17 Unit		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	38,860,000	31,955,000				100 Persen	53,900,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	50 Lembar	50 Lembar	500,000	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan	50 Lembar	800,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	30 Laporan						30 Laporan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14,360,000	9,355,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan	12 Laporan	19,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	21,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan	12 Laporan	33,600,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	26,313,500	86,041,500				100 Persen	32,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	19,151,000	18,928,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan	2 Unit	22,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	2 unit	2 unit	1,000,000	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan	2 unit	1,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit							2 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	6,162,500	66,113,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan	1 unit	8,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Unit		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100 Persen	5,621,000	52,080,000				100 Persen	11,200,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	5,621,000	52,080,000				100 Persen	11,200,000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3 Urusan	3 Urusan	2,810,500	1,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan	3 Urusan	5,600,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan							3 Laporan		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	1 Urusan	2,810,500	51,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan	1 Urusan	5,600,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan							2 Laporan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	74 Persen	74 Persen	10,556,000	6,080,000				74 Persen	19,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	74 Persen	74 Persen	2,810,500	1,040,000				74 Persen	9,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2,810,500	1,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa dan ASN Lingkup Kecamatan	1 Laporan	9,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2250 Orang	2250 Orang							2250 Orang		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74 Persen	74 Persen	7,745,500	5,040,000				74 Persen	10,000,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	4,935,000	4,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan dan ASN Lingkup Kecamatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100 Orang	100 Orang							100 Orang		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	6 Kelurahan	6 Kelurahan	2,810,500	1,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan dan ASN Lingkup Kecamatan	6 Kelurahan	5,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	6 Laporan							6 Laporan		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen	100 Persen	8,431,500	3,120,000				100 Persen	21,500,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	8,431,500	3,120,000				100 Persen	21,500,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	6	2.01	3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	3 Desa	3 Desa	2,810,500	1,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa dan ASN Lingkup Kecamatan	3 Desa	8,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen		
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	3 Desa	3 Desa	2,810,500	1,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa dan ASN Lingkup Kecamatan	3 Desa	7,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen		
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	3 Desa	3 Desa	2,810,500	1,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa dan ASN Lingkup Kecamatan	3 Desa	6,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen						3 Dokumen		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				324,598,000	285,440,000				390,000,000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	90,153,000	80,885,000				100 Persen	107,000,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	41,113,800	25,354,000				100 Persen	51,840,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	3 unit	22,250,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	3 unit	25,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	425 unit	425 unit	9,685,800	15,450,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	425 unit	12,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	657 Paket	657 Paket				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		657 Paket		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12070 Paket	12070 Paket	2,493,000	6,035,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12070 Paket	4,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2,045,000	1,139,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	4 Laporan	3,840,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	21 Laporan	4,640,000	2,730,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	21 Laporan	7,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	23 kali	23 kali						23 kali		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	43,400,000	50,060,000				100 Persen	46,660,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	20 Lembar	20 Lembar	200,000	200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	20 Lembar	500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20 Laporan						20 Laporan		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,200,000	6,660,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	8,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	43,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	38,160,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		12 Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5,639,200	5,471,000				100 Persen	8,500,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	3 unit	3 unit	5,139,200	5,471,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	3 unit	7,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit							3 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	1 UNIT	1 UNIT	500,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 UNIT	1,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	74 Persen	74 Persen	234,445,000	204,555,000				90 Persen	283,000,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74 Persen	74 Persen	234,445,000	204,555,000				74 Persen	283,000,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dann ASN Lingkup Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	50 Orang	50 Orang							50 Orang		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	128,921,000	100,915,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dann ASN Lingkup Kelurahan	2 Unit	174,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	565 Orang	565 Orang	103,524,000	101,640,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Messape	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dann ASN Lingkup Kelurahan	565 Orang	106,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas							4 Pokmas / Ormas		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				301,078,000	261,920,000					376,407,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	97,814,000	66,990,000				100 Persen	116,107,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	29,814,100	18,019,000				100 Persen	37,707,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	2 unit	11,402,600	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	2 unit	12,846,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	377 unit	377 unit	9,336,000	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	377 unit	12,361,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	425 Paket	425 Paket							425 Paket		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4731 Exampler	4731 Exampler	2,365,500	6,019,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	4731 Exampler	3,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12038 Paket	12038 Paket							12038 Paket		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Kali	12 Kali	2,110,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Kali	2,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 kali	25 kali	4,600,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	25 kali	7,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3,511,000	0				100 Persen	8,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	1 unit	1 unit	3,511,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	8,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	55,700,000	43,500,000				100 Persen	58,500,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	20 Lembar	20 Lembar	200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	20 Lembar	500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	7,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	8,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan 12 Laporan	48,000,000	36,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Waktu pelayanan administrasi perkantoran Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	12 Bulan 100 Persen	12 Bulan 100 Persen	8,788,900	5,471,000				12 Bulan 100 Persen	11,900,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	3 unit	3 unit	5,139,200	5,471,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	3 unit	6,400,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknya	3 Unit	3 Unit							3 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	1 unit	1 unit	500,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	3,149,700	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	5,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	74 Persen	74 Persen	203,264,000	194,930,000				74 Persen	260,300,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74 Persen	74 Persen	203,264,000	194,930,000				74 Persen	260,300,000	
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Dan ASN Lingkup Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	50 Orang	50 Orang						50 Orang		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam	680 Orang	680 Orang	121,260,000	114,810,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Dan ASN Lingkup Kelurahan	680 Orang	183,800,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit						1 Unit		
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1360 Orang	1360 Orang	80,004,000	78,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Dan ASN Lingkup Kelurahan	1360 Orang	74,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas						4 Pokmas / Ormas		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				358,438,000	289,040,000					463,050,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	71,474,000	68,847,000				100 Persen	150,550,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	20,786,400	18,202,000				100 Persen	50,596,000	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	7 unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	7 unit	25,596,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	405 unit	405 unit	10,237,200	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	405 unit	12,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	425 Paket	425 Paket						425 Paket		
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12404 Paket	12404 Paket	3,443,000	6,202,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12404 Paket	4,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Kali	12 Kali	2,246,200	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Kali	3,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Kali	24 Kali	4,860,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	24 Kali	6,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0					9,640,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	10 unit	10 unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	9,640,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	44,000,000	44,940,000				100 Persen	48,500,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	20 Lembar	20 Lembar	200,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	20 Lembar	500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,800,000	6,540,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	8,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	38,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	40,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	6,687,600	5,705,000				100 Persen	41,814,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	4 unit	4 unit	5,687,600	5,705,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	4 unit	7,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknya	4 Unit	4 Unit							4 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	2 unit	2 unit	1,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	2 unit	1,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	33,314,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	74 Persen	74 Persen	286,964,000	220,193,000				90 Persen	312,500,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74 Persen	74 Persen	286,964,000	220,193,000				74 Persen	312,500,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat Lingkup Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	50 Orang	50 Orang							50 Orang		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	147,660,000	112,953,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat Lingkup Kelurahan	1 Unit	160,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	965 Orang	965 Orang	137,304,000	105,240,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN dan Masyarakat Lingkup Kelurahan	965 Orang	150,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas							4 Pokmas / Ormas		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			276,358,000	237,200,000					329,000,000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	108,210,000	80,965,000				100 Persen	131,500,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	39,193,800	34,884,000				100 Persen	43,500,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	1 unit	12,875,000	10,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	14,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket							1 Paket		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	442 unit	442 unit	13,083,300	16,261,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	442 unit	15,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	605 Paket	605 Paket						605 Paket			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12088 Paket	12088 Paket	4,185,500	6,044,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12088 Paket	5,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2,150,000	1,279,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	4 Laporan	2,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	6,900,000	1,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	10 Laporan	7,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33 Kali	33 Kali							33 Kali		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	12,754,000	0				100 Persen	25,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	51 Unit	51 Unit	12,754,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	51 Unit	25,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	45,360,000	40,610,000				100 Persen	50,500,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	30 Lembar	30 Lembar	300,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	30 Lembar	500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9,060,000	8,210,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	10,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	32,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	40,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	10,902,200	5,471,000				100 Persen	12,500,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	3 unit	3 unit	5,579,600	5,471,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	3 unit	6,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit							3 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	2 unit	2 unit	1,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tello Limpo, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	2 unit	1,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	4,322,600	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	5,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	74 Persen	74 Persen	168,148,000	156,235,000				90 Persen	197,500,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74 Persen	74 Persen	168,148,000	156,235,000				74 Persen	197,500,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Lembaga Kemasyarakatan	2,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	50 Orang	50 Orang						50 Orang		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	110,924,000	100,835,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	130,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1380 Orang	1380 Orang	55,224,000	53,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Toddang Pulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1380 Orang	65,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas						4 Pokmas / Ormas		
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				258,838,000	219,680,000					313,580,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	84,938,000	74,653,000				100 Persen	99,080,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	22,891,700	22,672,000				100 Persen	26,800,000	
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	368 unit	368 unit	10,696,800	12,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	368 unit	12,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	425 Paket	425 Paket						425 Paket		
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12103 Paket	12103 Paket	2,697,500	6,051,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12103 Paket	3,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2,297,400	2,410,500	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	4 Laporan	2,800,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	17 Laporan	7,200,000	2,210,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	17 Laporan	8,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42 Kali	42 Kali						42 Kali		
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3,365,000	0				100 Persen	7,597,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	1 unit	1 unit	3,365,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	7,597,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	49,390,000	46,510,000				100 Persen	53,500,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	25 Lembar	25 Lembar	250,000	250,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	25 Lembar	500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	25 Laporan						25 Laporan		
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,140,000	6,660,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	8,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	39,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	45,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleenggaranganya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	9,291,300	5,471,000				100 Persen	11,183,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	3 unit	3 unit	5,360,300	5,471,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	3 unit	6,183,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit							3 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	1,000,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	2 Unit	1,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	2,931,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	3,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	74 Persen	74 Persen	173,900,000	145,027,000				74 Persen	214,500,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74 Persen	74 Persen	173,900,000	145,027,000				74 Persen	214,500,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan ASN Lingkup Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	50 Orang	50 Orang							50 Orang		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	132,936,000	105,947,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan ASN Lingkup Kelurahan	2 Unit	180,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1025 Orang	1025 Orang	38,964,000	37,080,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Baula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan ASN Lingkup Kelurahan	1025 Orang	32,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas							4 Pokmas / Ormas		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				314,998,000	275,840,000					359,937,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	87,269,000	80,965,000				100 Persen	109,268,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terseleenggaranganya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	23,529,800	28,803,000				100 Persen	30,068,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	1 unit	5,500,000	5,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 unit	10,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket							1 Paket		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	353 Unit	353 Unit	8,665,800	15,193,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	353 Unit	9,068,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	561 Paket	561 Paket							561 Paket		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12058 Paket	12058 Paket	2,558,500	6,029,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12058 Paket	3,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	2,855,500	2,081,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	4 Laporan	3,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	17 Kali	17 Kali	3,950,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	17 Kali	5,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	15,814,000	11,691,000				100 Persen	20,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	4 unit	4 unit	15,814,000	11,691,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 unit	20,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit						2 Unit		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	42,860,000	35,000,000				100 Persen	45,900,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	20 Lembar	20 Lembar	200,000	200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	20 Lembar	500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20 Laporan						20 Laporan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6,660,000	2,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	32,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	12 Laporan	38,400,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5,065,200	5,471,000				100 Persen	13,300,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	5,065,200	5,471,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	3 Unit	8,500,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiknya	3 Unit	3 Unit						3 Unit		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN	74 Persen	74 Persen	227,729,000	194,875,000				90 Persen	250,669,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	74 Persen	74 Persen	227,729,000	194,875,000				74 Persen	250,669,000	
						Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	50 Orang	50 Orang						50 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	131,805,000	100,835,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	1 Unit	137,669,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	785 Orang	785 Orang	93,924,000	92,040,000	Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Arateng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kelurahan	785 Orang	110,000,000	KECAMATAN TELLU LIMPOE
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas						4 Pokmas / Ormas		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				3,918,356,000	3,879,670,000					4,189,803,507	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,907,856,000	3,819,170,000				100 Persen	4,153,803,507	
						Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,475,000	0					5,000,000	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	2,475,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	5,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,650,848,000	3,582,598,000					3,743,677,807	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/ bulan	602 Orang/ bulan	3,650,848,000	3,582,598,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		602 Orang/ bulan	3,743,677,807	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				122,695,900	55,489,600					140,706,500	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	2,103,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	5,419,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	85,245,800	13,747,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	47,811,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3,131,600	2,842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	10,111,500	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	32,215,000	38,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	77,365,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107,765,100	110,882,400					196,199,200	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4,730,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14,508,000	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	16,412,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	89,257,100	89,882,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	175,057,200	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24,072,000	70,200,000					68,220,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	14,072,000	20,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	28,220,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	40,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	3,000,000	53,000,000				100 Persen	11,500,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3,000,000	53,000,000					11,500,000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan	5 Laporan	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	5,750,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	1,500,000	51,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	5,750,000	KECAMATAN WATANG PULU

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	3,000,000	3,000,000				90 Persen	15,000,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1,500,000	1,500,000					10,000,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	10,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,500,000	1,500,000					5,000,000	
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	5,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 Persen	100 Persen	4,500,000	4,500,000				100 Persen	9,500,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4,500,000	4,500,000					9,500,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				294,321,877	289,760,000					490,173,416	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	82,569,569	70,914,000				100 Persen	200,023,416	
7 1 1		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				16,319,069	16,905,000					27,638,816	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13,007,000	13,965,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	24,125,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	1,492,000		Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Lawawoi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	1,488,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,820,069	2,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	2,025,816	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64,184,500	51,009,000					164,784,600	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1,650,000	1,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1,500,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,260,000	6,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7,860,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55,274,500	43,079,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	155,424,600	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,066,000	3,000,000					7,600,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	2,066,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	7,600,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	211,752,308	218,846,000				90 Persen	290,150,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				211,752,308	218,846,000					290,150,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	106,872,308	86,966,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	225,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	104,880,000	131,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Pokmas / Ormas	65,150,000	KECAMATAN WATANG PULU

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7														
7	1										331,473,061	338,000,000		
7	1	1									231,473,061	71,800,168		
											100 Persen	100 Persen		
											100 Persen	100 Persen		
7	1	1	2.06								15,159,061	1,720,168		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			12,303,000	0		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			632,061	608,168		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan			2,224,000	1,112,000		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						211,629,000	65,395,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			1,000,000	625,000		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			5,460,000	5,460,000		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			205,169,000	59,310,000		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,685,000	4,685,000		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit			4,685,000	4,685,000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen			100,000,000	266,199,832		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						100,000,000	266,199,832		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit			100,000,000	99,999,832		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas			0	166,200,000		
7														
7	1										417,010,233	320,720,000		
7	1	1									211,099,641	83,367,000		
											100 Persen	100 Persen		
											100 Persen	100 Persen		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						19,353,941	28,484,300		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			816,000	786,000		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			9,522,000	18,664,000		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			263,800	263,800		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			2,067,141	2,085,500		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan			6,685,000	6,685,000		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						187,890,700	51,527,700		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			1,200,000	500,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10,260,000	9,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7,260,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	176,430,700	41,967,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	168,350,500	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,855,000	3,355,000					124,700,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3,855,000	3,355,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	3,895,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	120,805,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	205,910,592	237,353,000				90 Persen	290,150,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				205,910,592	237,353,000					290,150,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	149,518,592	88,433,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	180,150,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	56,392,000	148,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Pokmas / Ormas	110,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				349,410,740	275,840,000					543,774,280	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	229,908,490	71,800,013				100 Persen	253,624,280	
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				31,493,490	26,516,013					30,457,000	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24,685,000	15,515,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	24,735,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,638,490	3,361,013		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3,915,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4,170,000	7,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1,807,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139,315,000	44,284,000					155,567,280	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6,990,000	6,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6,990,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	132,325,000	38,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	148,577,280	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59,100,000	1,000,000					67,600,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	5,600,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	5,600,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	53,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	62,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	119,502,250	204,039,987				90 Persen	290,150,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119,502,250	204,039,987					290,150,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	107,532,250	99,999,987		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	250,150,000	KECAMATAN WATANG PULU
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	11,970,000	104,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Pokmas / Ormas	40,000,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				408,134,089	380,240,000					602,497,628	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	291,134,089	79,780,000				100 Persen	312,347,628	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
		Cakupan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen					100 Persen				
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34,506,989	6,243,800	40,675,628	
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			26,127,500	0	32,250,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			2,649,489	3,378,800	2,695,628	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan			5,730,000	2,865,000	5,730,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						252,943,100	49,536,200	263,575,000	
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			8,148,000	9,012,000	8,148,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			244,795,100	40,524,200	255,427,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah						3,684,000	24,000,000	8,097,000	
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit			0	4,000,000	4,518,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			3,684,000	20,000,000	3,579,000	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen			117,000,000	300,460,000	90 Persen	290,150,000
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						117,000,000	300,460,000	290,150,000	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit			102,000,000	92,500,000	182,414,500	KECAMATAN WATANG PULU
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas			15,000,000	207,960,000	107,735,500	KECAMATAN WATANG PULU
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1			KECAMATAN						5,456,844,500	5,209,524,000	7,369,288,464	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						5,439,583,500	5,146,399,000	7,308,893,464	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,033,195,000	4,950,452,000	5,201,577,058	
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bln	61 Orang/ Bln			5,033,195,000	4,950,452,000	5,201,577,058	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						80,057,000	46,545,400	104,338,340	
7	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			2,157,000	2,420,400	2,878,962	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket			7,655,000	5,827,000	6,727,408	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			14,355,000	10,730,000	15,399,470	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			55,890,000	27,568,000	79,332,500	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah						60,000,000	15,083,100	218,038,770	
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel						0	0	28,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0	0	50,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit			60,000,000	15,083,100	142,038,770	KECAMATAN MARITENGGAE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				109,858,300	77,829,500				1,715,892,146		
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	9,241,500	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	15,696,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	55,471,310	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	93,162,300	58,829,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1,651,179,336	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				156,473,200	56,489,000					69,047,150	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	17,908,200	19,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	45,393,640	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	0	1,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	1,200,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	138,565,000	35,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	22,453,510	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.00 Persen	100.00 Persen	8,985,000	53,750,000					42,195,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				8,985,000	53,750,000					42,195,000	
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	5,963,000	1,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	21,097,500	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	10 Laporan	3,022,000	51,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	21,097,500	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	3,344,000	3,750,000					7,700,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1,672,000	1,875,000					7,700,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	1,672,000	1,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	7,700,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,672,000	1,875,000					0	
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 Laporan	8 Laporan	1,672,000	1,875,000				8 Laporan	0	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	4,932,000	5,625,000					10,500,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4,932,000	5,625,000					10,500,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1,644,000	1,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1,644,000	1,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1,644,000	1,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				482,857,500	449,360,000					687,713,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				233,497,500	142,875,000					304,342,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5,020,000	12,671,000					41,000,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	756,000	756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	1,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	4,264,000	5,465,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	5,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	6,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	35,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				20,480,500	0					26,500,000	
7 1 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20,480,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	6,500,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				50,637,000	75,108,000					77,000,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6,060,000	13,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	43,377,000	60,208,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				157,360,000	55,096,000					159,842,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	7,360,000	5,096,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	8,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3 Unit	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3 Unit	1,842,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	150,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	249,360,000	306,485,000					383,371,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				249,360,000	306,485,000					383,371,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	0	40,925,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Pangkajene	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	83,371,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	249,360,000	265,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				312,239,900	327,680,000					476,640,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				66,071,900	177,800,000					176,640,000	
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				0	10,640,000					10,640,000	
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	0	10,640,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Lautang Benteng	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	10,640,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				62,285,400	73,373,500					72,000,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,560,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	9,048,000	11,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	51,677,400	61,225,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	60,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,786,500	93,786,500					94,000,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	3,786,500	3,786,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	4,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit		90,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Lautang Benteng	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	90,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	246,168,000	149,880,000					300,000,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				246,168,000	149,880,000					300,000,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	104,988,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	150,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	141,180,000	149,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pokmas / Ormas	150,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				397,078,000	357,920,000					491,795,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				191,188,000	76,285,000					203,000,000	
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				102,332,100	16,437,500					3,000,000	
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	102,332,100	16,437,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72,368,000	54,865,500					45,000,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,520,000	1,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6,564,000	1,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	64,284,000	51,487,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	40,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16,487,900	4,982,000					155,000,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	5,450,900	4,982,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	5,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11,037,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	205,890,000	281,635,000					288,795,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				205,890,000	281,635,000					288,795,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	0	88,795,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Majjelling	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	88,795,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70 Pokmas / Ormas	70 Pokmas / Ormas	205,890,000	192,840,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Majjelling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				337,318,000	298,160,000					334,314,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				78,258,000	114,082,000					150,108,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0	8,000,000					8,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	0	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Paket	1,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	0	7,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Laporan	7,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				0	6,500,000					19,800,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	0	6,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	6,500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		20 Unit	13,300,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				78,258,000	99,582,000					105,500,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	1,750,000	1,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Laporan	10,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9,660,000	5,344,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5,500,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66,848,000	92,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	90,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				0	0					16,808,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3 Unit	4,466,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		4 Unit	2,342,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	10,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	259,060,000	184,078,000					184,206,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				259,060,000	184,078,000					184,206,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	0	63,718,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		8 Unit	64,206,000	KECAMATAN MARITENGNGAE
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	259,060,000	120,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Pokmas / Ormas	120,000,000	KECAMATAN MARITENGNGAE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik								
7															
7	1														
7	1	1													
7	1	1	2.06												
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Laporan	0	KECAMATAN MARITENGGAE	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	4,050,000				4,050,000		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	4,050,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	4,050,000	KECAMATAN MARITENGGAE	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			90,891,600	75,200,500				92,000,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	1,750,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200 Laporan	2,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8,860,000	9,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	10,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80,281,600	64,290,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	80,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208,908,000	12,609,000				13,000,000		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	8,908,000	7,834,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	8,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		200,000,000	4,775,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	5,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	91,701,500	321,740,500				366,040,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			91,701,500	321,740,500				366,040,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	91,701,500	321,740,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	100,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Rijang Pitu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	266,040,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7															
7															
7	1														
7	1	1													
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6,208,000	7,002,500				37,000,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	1,272,500		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Paket	30,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan	86 Laporan	6,208,000	5,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	86 Laporan	7,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46,863,000	16,217,800				26,117,800		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	46,863,000	11,598,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	0	4,619,000	Kab. Sidenreng Rappang, Maritenggae, Majjelling Watang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3 Unit	16,117,800	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60,238,900	74,258,700					67,000,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	1,500,000	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Laporan	2,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,598,000	1,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55,140,900	71,078,700				12 Laporan	60,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17,569,100	13,474,500					25,000,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	5,040,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	5,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	2,900,000	2,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	5,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	9,629,100	3,314,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	15,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	217,479,000	198,246,500					300,000,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				217,479,000	198,246,500					300,000,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	108,279,000	72,846,500		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	150,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	60 Pokmas / Ormas	109,200,000	125,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Pokmas / Ormas	150,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				357,958,000	318,800,000					461,000,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				62,369,000	77,917,000					86,000,000	
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12,000,000	10,650,000					20,000,000	
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	12,000,000	10,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	20,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45,992,000	62,890,000					41,000,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	1,380,000	1,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Laporan	2,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,260,000	9,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	4,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37,352,000	51,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	35,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,377,000	4,377,000					25,000,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	4,377,000	4,377,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	5,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan yang dipelihara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	20,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	295,589,000	240,883,000				375,000,000		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			295,589,000	240,883,000					375,000,000		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	161,669,000	90,763,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 Unit	225,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	133,920,000	150,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pokmas / Ormas	150,000,000	KECAMATAN MARITENGGAE
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN			2,595,592,400	2,599,002,000						4,000,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	2,588,351,800	2,543,151,500				100 %	0	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,354,821,600	2,301,602,000						0	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	2,354,821,600	2,301,602,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			57,309,700	61,999,700						0	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8,633,000	8,633,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	5,996,700	5,996,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	13,155,000	13,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	29,525,000	34,215,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			71,980,100	71,980,100						0	
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	54,904,100	54,904,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	17,076,000	17,076,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73,309,400	76,621,700						0	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69 Laporan	69 Laporan	687,500	690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		69 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8,400,000	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	4,184,000	4,184,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60,037,900	63,347,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30,931,000	30,948,000						0	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	21,433,000	21,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	1,050,000	1,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	8,448,000	8,448,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	2,780,200	51,390,100				100 Persen	4,000,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			2,780,200	51,390,100						4,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 2 2.04	2 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	1,390,100	1,390,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	4,000,000	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 2 2.04	3 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1,390,100	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	2,280,200	2,280,200					0	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1,090,100	1,090,100					0	
7 1 3 2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1,090,100	1,090,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,190,100	1,190,100					0	
7 1 3 2.02	4 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	1,190,100	1,190,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 Persen	100 Persen	2,180,200	2,180,200				100 Persen	0	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2,180,200	2,180,200					0	
7 1 6 2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	1,090,100	1,090,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 6 2.01	7 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	1,090,100	1,090,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				296,957,000	279,440,000					0	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	105,369,000	116,600,000				100 %	0	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Peranakat Daerah				20,058,100	25,981,100					0	
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,550,000	2,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1,909,100	1,909,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	15,599,000	21,522,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				13,000,000	13,000,000					0	
7 1 1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				60,200,400	65,675,400					0	
7 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	475,000	475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,800,000	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51,925,400	56,800,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				12,110,500	11,943,500					0	
7 1 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	7,232,000	7,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	1,842,000	1,842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09	9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3,036,500	3,036,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	74 %	191,588,000	162,840,000				80 %	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				900,000	900,000					0	
7 1 3 2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	900,000	900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				190,688,000	161,940,000					0	
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Paket	2 Paket	97,748,000	60,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3 2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	92,940,000	101,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				291,178,300	225,680,000					0	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	112,468,000	116,600,000				100 %	0	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				18,720,500	22,715,500					0	
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,875,000	2,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1,896,500	1,896,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	13,949,000	17,944,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23,970,600	15,083,100					0	
7 1 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	7,950,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	16,020,600	7,583,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58,982,400	68,015,900					0	
7 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	550,000	550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8,300,000	8,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50,132,400	59,165,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10,794,500	10,785,500					0	
7 1 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	5,916,000	5,907,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	1,842,000	1,842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 1 2.09	9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3,036,500	3,036,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	74 %	178,710,300	109,080,000				80 %	0	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				900,000	900,000					0	
7 1 3 2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	900,000	900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				177,810,300	108,180,000					0	
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Paket	2 Paket	138,630,300	60,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1 3 2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	39,180,000	47,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
7	1										0		
7	1	1	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	294,189,300	258,800,000			100 %	0	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			123,143,300	123,800,000				0	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,537,000	2,537,000	1 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1,919,100	1,919,100	15 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	13,949,000	14,227,000	20 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32,149,700	28,267,600		0	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	20,388,000	17,676,000	3 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	11,761,700	10,591,600	2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63,636,000	69,047,800		0	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	500,000	500,000	50 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,800,000	8,400,000	12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1,842,000	1,842,000	5 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	53,494,000	58,305,800	12 Laporan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,952,500	7,801,500		0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	4,074,000	4,765,000	3 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	1,842,000	0	2 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3,036,500	3,036,500	1 Unit	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	171,046,000	135,000,000		80 Persen	0	
7	1	3	2.01	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				900,000	900,000		0	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	900,000	900,000	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				170,146,000	134,100,000		0	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Paket	2 Paket	105,046,000	60,300,000	2 Paket	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	65,100,000	73,800,000	5 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1			KECAMATAN					2,690,349,000	2,501,104,000		2,915,000,000	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2,654,223,900	2,446,104,000		100 Persen	2,787,000,000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	1,000,000	500,000	100 Persen	1,100,000	
						Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen			100 Persen		
						Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Dua Pitue	1 Laporan	1,100,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	2,258,909,000	2,210,932,000				100 Persen	2,600,000,000	
						Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan						14 Bulan		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2,258,909,000	2,210,932,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Camat Dua Pitue	14 Orang/bulan	2,600,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	66,343,000	93,234,300				100 Persen	53,800,000	
						Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	500,000	480,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	600,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60 Paket	31,947,000	56,462,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Paket	2,700,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	386,000	3,547,300	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151 Laporan	130 Laporan	33,510,000	32,745,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130 Laporan	50,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	43,126,000	10,826,000				100 Persen	5,000,000	
						Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Didirikan	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	54 Unit	43,126,000	10,826,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	54 Unit	5,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	116,140,900	100,720,200				12 Bulan	102,100,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan	84 Laporan	840,000	500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Masyarakat dan Honorer Kantor Camat	84 Laporan	600,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	34,008,000	30,828,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Masyarakat dan Honorer Kantor Camat	12 Laporan	35,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	81,292,900	69,392,200	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Masyarakat dan Honorer Kantor Camat	12 Laporan	66,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	168,705,000	29,891,500				100 Persen	25,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	15,546,000	19,095,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Perlengkapan Gedung Kantor Camat	3 Unit	19,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1,700,000	1,700,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Perlengkapan Gedung Kantor Camat	4 Unit	4,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	151,459,000	9,096,500	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Perlengkapan Gedung Kantor Camat	4 Unit	2,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	4,852,600	50,800,000				100 Persen	15,000,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dan Jenis Usuran Pemerintahan Pelayanan Publik	10 Usuran	10 Usuran	4,852,600	50,800,000				10 Usuran	15,000,000	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	4,102,600	400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan	10 Laporan	12,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	750,000	50,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	17,958,500	1,000,000				52 Persen	95,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 Kegiatan	5 Kegiatan	11,147,500	600,000				5 Kegiatan	75,000,000	
						Tingkat Keberdayaan Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 Persen	52 Persen						52 Persen		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	11,147,500	600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa	5 Laporan	75,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di Evaluasi	2 Kelurahan	2 Kelurahan	6,811,000	400,000				2 Kelurahan	20,000,000	
						Tingkat Keberdayaan Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 Persen	52 Persen						52 Persen		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	6,811,000	400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan	2 Laporan	20,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	13,314,000	3,200,000				100 Persen	18,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	13,314,000	3,200,000				100 Persen	18,000,000	
						Jumlah Desa yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Difasilitasi	8 Desa	8 Desa						8 Desa		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	8,564,000	1,400,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa	8 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	2,750,000	1,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa	8 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN DUA PITUE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	8 Dokumen	8 Dokumen	2,000,000	800,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Desa	8 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
UNSUR KEWILAYAHAN																
KECAMATAN																
7	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	103,000,000	81,730,500				100 Persen	94,300,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	24,788,000	24,541,000				100 Persen	24,500,000	
						Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,788,000	9,766,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Perkantoran Kelurahan	1 Paket	4,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	20,000,000	14,775,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Perkantoran Kelurahan	50 Laporan	20,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	68,722,000	50,644,500				12 Bulan	62,300,000	
						Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen						100 Persen		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160 Laporan	160 Laporan	1,600,000	1,600,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Perkantoran dan Honorer Kelurahan	160 Laporan	1,800,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	10,644,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Perkantoran dan Honorer Kelurahan	12 Laporan	10,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	55,122,000	38,400,500	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Perkantoran dan Honorer Kelurahan	12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	9,490,000	6,545,000				100 Persen	7,500,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	7,490,000	4,545,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor Kelurahan	5 Unit	6,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor Kelurahan	4 Unit	1,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	225,000,000	190,509,500				52 Persen	221,920,500	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 Persen	52 Persen	225,000,000	190,509,500				52 Persen	221,920,500	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	12,260,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10,250,000	KECAMATAN DUA PITUE
						Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100 Orang	100 Orang						100 Orang		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	120,000,000	75,041,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan	4 Unit	104,150,500	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 Pokmas / Ormas	500 Pokmas / Ormas	92,740,000	115,468,500	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan	500 Pokmas / Ormas	107,520,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	99,464,000	109,667,000				100 Persen	97,537,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	26,916,000	38,100,000				100 Persen	27,737,000	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4,788,000	23,325,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	4,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2,128,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3,237,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	20,000,000	14,775,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Laporan	20,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	63,057,000	64,086,000				100 Persen	62,300,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan	1,500,000	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi dan Honorer Kelurahan	150 Laporan	1,800,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10,500,000	11,640,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi dan Honorer Kelurahan	12 Laporan	10,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51,057,000	50,946,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi dan Honorer Kelurahan	12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	9,491,000	7,481,000				100 Persen	7,500,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	7,491,000	5,481,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas Kelurahan	3 Unit	6,000,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	2,000,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kendaraan Dinas Kelurahan	4 Unit	1,500,000	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	253,892,000	221,133,000				52 Persen	276,880,500	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	253,892,000	221,133,000				5 Kegiatan	276,880,500	
		Tingkat Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	52 Persen	52 Persen						52 Persen		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	11,072,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10,250,000	KECAMATAN DUA PITUE
		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100 Orang	100 Orang						100 Orang		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	97,520,000	51,166,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan	4 Unit	104,150,500	KECAMATAN DUA PITUE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 Pokmas / Ormas	500 Pokmas / Ormas	145,300,000	169,967,000	Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan	500 Pokmas / Ormas	162,480,000	KECAMATAN DUA PITUE
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
7 1		KECAMATAN			2,573,893,600	2,274,419,000					2,449,601,000	
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			2,565,962,600	2,216,488,000					2,336,898,000	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,336,868,400	2,004,347,000					2,190,473,000	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,324,868,400	1,986,347,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Orang/bulan	2,172,473,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	18,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
		Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Bulan	36 Bulan						36 Bulan		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				153,921,200	151,949,000					85,194,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2 Unit	2 Unit	2,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	2,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	46,155,000	48,901,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	47,354,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1000 Unit	1000 Unit	105,766,200	103,048,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Unit	35,840,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54,000,000	37,000,000					42,000,000	
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	13,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	24,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	30,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21,173,000	23,192,000					19,231,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	17,941,000	19,782,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	15,821,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3,232,000	3,410,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3,410,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.00 Persen	100.00 Persen	2,266,000	52,266,000					46,583,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2,266,000	52,266,000					46,583,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	1,133,000	1,133,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	1,133,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1,133,000	51,133,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	45,450,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	2,266,000	2,266,000					15,150,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1,133,000	1,133,000					10,100,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	1,133,000	1,133,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	10,100,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,133,000	1,133,000					5,050,000	
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	1,133,000	1,133,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5,050,000	KECAMATAN PITU RIAWA
							Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae					
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	3,399,000	3,399,000					50,970,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3,399,000	3,399,000					50,970,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	1,133,000	1,133,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	24,240,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	1,133,000	1,133,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	23,230,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	10 Dokumen	10 Dokumen	1,133,000	1,133,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				221,672,000	310,880,000					358,036,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				88,427,000	122,000,000					114,289,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,861,000	58,439,000					50,073,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	510,000	510,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4,921,000	31,698,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	10,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket	11,402,000	13,428,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 Paket	14,256,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Yang Disediakan	500 Lembar	500 Lembar	2,500,000	2,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Lembar	800,000	KECAMATAN PITU RIAWA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Yang di Fasilitasi	3 Kali	3 Kali	1,663,000	1,663,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kali	1,663,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	3,865,000	8,640,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	22,854,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				0	0					1,000,000	
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				56,365,000	56,365,000					55,500,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	625,000	625,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1,500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,740,000	7,740,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	48,000,000	48,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	48,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				7,201,000	7,196,000					7,716,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4,725,000	4,720,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	4,716,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	850,000	850,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1,626,000	1,626,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	2,500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	133,245,000	188,880,000					243,747,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				133,245,000	188,880,000					243,747,000	
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100 Orang	100 Orang	1,500,000	1,500,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	1,500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	20,865,000	60,300,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	106,367,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135 Pokmas / Ormas	135 Pokmas / Ormas	110,880,000	127,080,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		135 Pokmas / Ormas	135,880,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	UNSUR KEWILAYAHAN											

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
7	1				154.426.400	245.600.000				290.481.000					
7	1	1			76.296.400	95.660.000				103.798.000					
7	1	1													
7	1	1	2.06							45.740.000					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Unit	1 Unit	510,000	510,000	1 Unit	500,000	KECAMATAN PITU RIAWA		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	17,290,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	500 Unit	500 Unit	12,343,400	12,945,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Unit	14,256,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Yang Disediakan	500 Lembar	500 Lembar	1,424,000	1,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	500 Lembar	800,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Yang di Fasilitas	3 Kali	3 Kali	1,663,000	1,663,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kali	700,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	3,865,000	3,865,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 Laporan	19,484,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.07						0	0				1,000,000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	0	0			1 Unit	1,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,740,000	7,740,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	6,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	42,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	42,000,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.09						6,751,000	8,187,000				7,558,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	4,275,000	4,950,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	4,558,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	850,000	850,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1,626,000	2,387,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	2,500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	3							74.00 Persen	74.00 Persen				186.683.000	
7	1	3	2.02						78.130.000	149.940.000				186.683.000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	100 Orang	100 Orang	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	1,500,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	25,030,000	78,240,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	90,103,000	KECAMATAN PITU RIAWA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	750 Pokmas / Ormas	750 Pokmas / Ormas	51,600,000	70,200,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		750 Pokmas / Ormas	95,080,000	KECAMATAN PITU RIAWA
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				2,246,034,000	2,197,035,000					2,625,578,925	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,231,351,500	2,129,640,000				100 Persen	2,586,078,925	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1,951,446,900	1,906,988,000				100 Persen	2,094,456,925	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/ bulan	294 Orang/ bulan	1,944,784,000	1,899,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS	294 Orang/ bulan	2,053,854,925	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6,662,900	7,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS	12 Laporan	40,602,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	0	0				100 Persen	10,000,000	
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari tertentu yang diadakan	100 Pasang	100 Pasang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	100 Pasang	10,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	86,937,100	84,210,000				100 Persen	149,797,700	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1,015,000	1,494,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	2 Paket	6,963,700	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	928,100	20,615,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	4 Paket	31,330,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,197,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	5 Paket	3,700,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,000,000	2,073,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	1 Paket	7,470,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	9 Laporan	81,797,000	60,028,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	9 Laporan	100,334,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	61,255,000	0				100 Persen	26,562,500	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	47 Unit	47 Unit	31,255,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	47 Unit	26,562,500	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	2 Unit	0	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	107,495,500	111,815,500				100 Persen	220,747,900	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	9 Laporan	360,000	360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	9 Laporan	1,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	13,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	12 Laporan	18,104,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	680,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	5 Laporan	8,338,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	93,455,500	93,455,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	12 Laporan	193,305,900	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	24,217,000	26,626,500				100 Persen	84,513,900	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	14,075,000	20,061,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	3 Unit	30,576,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	700,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	3 Unit	12,750,000	KECAMATAN PITU RIASE

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	9,442,000	6,565,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	3 Unit	41,187,900	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	4,379,000	53,479,000				100 Persen	14,000,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	4,379,000	53,479,000				100 Persen	14,000,000	
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	2,189,500	3,479,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	2,189,500	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	3,735,000	3,479,000				74 Persen	14,000,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 Persen	100 Persen	2,189,500	3,479,000				100 Persen	12,000,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	2,189,500	3,479,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 Persen	100 Persen	1,545,500	0				100 Persen	2,000,000	
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	1,545,500	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS	12 Laporan	2,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 Persen	100 Persen	6,568,500	10,437,000				100 Persen	11,500,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	6,568,500	10,437,000				100 Persen	11,500,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	2,189,500	3,479,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS dan Pemerintah Desa	11 Dokumen	0	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	2,189,500	3,479,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS dan Pemerintah Desa	11 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen	11 Dokumen	2,189,500	3,479,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PNS dan Pemerintah Desa	11 Dokumen	6,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				438,358,000	384,800,000					428,688,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	185,998,000	171,320,000				100 Persen	221,938,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	47,346,000	30,776,000				100 Persen	52,312,300	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,936,000	1,171,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	1 Paket	3,036,300	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	27,598,000	17,290,000	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	3 Paket	30,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	917,000	415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	1 Paket	1,610,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15,895,000	11,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	5 Laporan	17,666,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	17,648,000	9,044,000				100 Persen	133,437,500	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9,044,000	9,044,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	1 Unit	13,437,500	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	8,604,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	2 Unit	120,000,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	106,053,200	116,709,200				100 Persen	25,952,100	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan	500,000	200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	5 Laporan	500,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,746,000	5,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	12 Laporan	4,896,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1,842,000	662,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	4 Laporan	1,862,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95,965,200	109,901,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	12 Laporan	18,694,100	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	14,950,800	14,790,800				100 Persen	10,236,100	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	4,514,000	4,514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	8 Unit	4,424,000	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10,436,800	10,276,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan PNS	2 Unit	5,812,100	KECAMATAN PITU RIASE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	252,360,000	213,480,000				74 Persen	206,750,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 Persen	100 Persen	252,360,000	213,480,000				100 Persen	206,750,000	
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	252,360,000	213,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	11 Pokmas / Ormas	206,750,000	KECAMATAN PITU RIASE
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				3,753,059,500	3,702,144,000					4,348,976,515	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3,741,059,500	3,645,655,000				100 Persen	4,325,896,515	
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	0	0				100 Persen	2,778,000	
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	600,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,498,855,000	3,424,844,000					3,537,359,966	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ bulan	3,498,855,000	3,424,844,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang/ bulan	3,537,359,966	KECAMATAN BARANTI
		Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		14 Bulan		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				156,064,500	125,474,000					209,474,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,771,000	2,225,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	5,050,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	20 Unit	90,269,000	42,330,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	70,700,000	KECAMATAN BARANTI
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Paket		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1,876,000	637,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	5,050,000	KECAMATAN BARANTI
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	3,385,500	1,828,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	2,424,000	KECAMATAN BARANTI
						Waktu Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 Bulan		
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu	1095 Dos	1095 Dos	3,090,000	7,830,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1095 Dos	30,300,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	313 Kali	313 Kali	55,673,000	70,623,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		313 Kali	95,950,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				975,000	0					115,924,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	5 Unit	5 Unit	975,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	15,924,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70,422,000	71,621,500					96,354,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	303 Lembar	303 Lembar	1,400,000	2,000,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		303 Lembar	3,030,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	14,400,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	14,746,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	54,622,000	57,621,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	78,578,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14,743,000	23,715,500					364,006,549	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6 Unit	6 Unit	12,000,000	17,958,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	25,000,000	KECAMATAN BARANTI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	2,743,000	4,126,000	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	8,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lain yang dipelihara/ direhabilitasi	6 Gedung	6 Gedung	0	1,631,500	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Gedung	325,006,549	KECAMATAN BARANTI
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	3,000,000	52,160,000				100 Persen	14,000,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3,000,000	52,160,000					14,000,000	
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Urusan	10 Urusan	1,500,000	51,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Urusan	7,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	1 Urusan	1,500,000	1,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Urusan	7,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	4,500,000	1,947,600					3,020,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1,500,000	1,153,800					2,020,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berprestasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	840 Orang	840 Orang	1,500,000	1,153,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		840 Orang	2,020,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	5 Target	5 Target	3,000,000	793,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Target	0	KECAMATAN BARANTI
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100.00 Persen	100.00 Persen	4,500,000	2,381,400					6,060,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4,500,000	2,381,400					6,060,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	4 Desa	4 Desa	1,500,000	793,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Desa	2,020,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang difasilitasi	4 Desa	4 Desa	1,500,000	793,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Desa	2,020,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4 Desa	4 Desa	1,500,000	793,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Desa	2,020,000	KECAMATAN BARANTI
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN											
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				458,758,000	419,600,000					1,220	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				41,028,700	50,900,900					787	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	650,400	4,924,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	750	KECAMATAN BARANTI
		waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 Bulan		
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 unit	20 unit	17,290,000	24,873,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 unit	12	KECAMATAN BARANTI
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Paket		
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,073,800	998,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu	1095 Dos	1095 Dos	3,099,500	3,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1095 Dos	4	KECAMATAN BARANTI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Pokmas / Ormas			
7		UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1	KECAMATAN			362,278,000	308,000,000					500,443,600		
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			185,438,000	184,040,000					343,643,600		
7	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			44,448,900	34,399,400				36,350,000		
7	1	1	2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5,979,000	818,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	750,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dan Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	17,689,000	17,689,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	12,000,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	939,900	926,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	1,800,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.06 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	2,931,000	2,662,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Paket	3,500,000	KECAMATAN BARANTI
				Waktu Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	12 Bulan		
7	1	1	2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0 Laporan	1,800,000	1,968,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	3,800,000	KECAMATAN BARANTI
				Jumlah Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	12 Bulan		
7	1	1	2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15,110,000	10,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14,500,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16,027,000	0				20,000,000	
7	1	1	2.07 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Dan Jenis Mebel Yang Diadakan	12 Bulan	12 Bulan	16,027,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46,139,500	50,632,500				72,660,000	
7	1	1	2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai Yang Diadakan	12 Bulan	12 Bulan	500,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	7,860,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	9,600,000	13,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	32,400,000	KECAMATAN BARANTI
				Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	12 Bulan		
7	1	1	2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	36,039,500	36,832,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	32,400,000	KECAMATAN BARANTI
				Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	12 Bulan		
7	1	1	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78,822,600	99,008,100				214,633,600	
7	1	1	2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	3,761,500	3,385,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	3,000,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dan Jenis Peralatan Lainnya Yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	700,000	1,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	3,500,000	KECAMATAN BARANTI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lain Yang Dipelihara / Rehabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	74,361,100	93,743,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	208,133,600	KECAMATAN BARANTI
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	176,840,000	123,960,000					156,800,000	
7	1	3	2.02	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				176,840,000	123,960,000				156,800,000		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Dan jenis Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Diadakan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	14,000,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Yang berpartisipasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	146,840,000	123,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	142,800,000	KECAMATAN BARANTI
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				360,838,000	320,480,000				480,443,600		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				138,146,000	134,124,500				323,643,600		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Peranekat Daerah				43,983,200	50,750,300				36,350,000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 bulan	12 bulan	604,600	778,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	750,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	21,662,500	27,162,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	12,000,000	KECAMATAN BARANTI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Paket		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	805,600	943,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1,800,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	2,016,500	2,017,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	3,500,000	KECAMATAN BARANTI
						Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 bulan		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	2,394,000	2,394,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3,800,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	16,500,000	17,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	14,500,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21,467,000	6,012,000				31,200,000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	12 bulan	12 bulan	10,268,000	6,012,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	20,000,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	11,199,000		0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Duampanua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	11,200,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55,231,800	62,278,200				41,460,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	12 bulan	12 bulan	800,000	800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	1,200,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	7,380,000	7,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	7,860,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	47,051,800	54,098,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	32,400,000	KECAMATAN BARANTI
						Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 bulan		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				17,464,000	15,084,000				214,633,600		
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	2,724,000	2,724,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah dan jenis peralatan lainnya yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	4,740,000	2,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	3,500,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	208,133,600	KECAMATAN BARANTI
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	222,692,000	186,355,500					156,800,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				222,692,000	186,355,500					156,800,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	12 bulan	12 bulan	101,012,000	54,475,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	14,000,000	KECAMATAN BARANTI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Unit		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	12 bulan	12 bulan	121,680,000	131,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	142,800,000	KECAMATAN BARANTI
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				349,553,500	295,280,000					484,363,600	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				147,978,200	135,080,000					327,563,600	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				44,554,500	42,682,000					36,350,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2,238,000	2,238,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	750,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dan Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	17,290,000	17,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	12,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,906,000	1,766,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1,800,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	3,401,500	3,578,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3,500,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	232 Dos	232 Dos	3,636,000	3,636,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		232 Dos	3,800,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100 Kali	100 Kali	16,083,000	14,173,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Kali	14,500,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah				36,933,000	23,457,000					35,120,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	10 Unit	10 Unit	21,813,000	23,457,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	20,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15,120,000	0	Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	15,120,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				58,134,700	64,809,000					41,460,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai Yang Diadakan	112 Lembar	112 Lembar	1,400,000	1,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		112 Lembar	1,200,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	8,400,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7,860,000	KECAMATAN BARANTI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	48,334,700	55,889,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	32,400,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,356,000	4,132,000					214,633,600	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4,132,000	4,132,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dan Jenis Peralatan Lainnya Yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	4,224,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	3,500,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	201,575,300	160,200,000					156,800,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				201,575,300	160,200,000					156,800,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Paket	10 Paket	33,718,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	14,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Yang berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100 Orang	100 Orang	167,857,300	160,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	142,800,000	KECAMATAN BARANTI
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				341,638,000	302,480,000					612,043,600	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				153,868,000	163,336,000					312,443,600	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				21,399,900	20,943,400					36,350,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				920,000	920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			750,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dan Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	875,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	12,000,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dan Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Kali	1 Kali	1,714,900	1,714,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kali	1,800,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	2,000,000	2,427,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	3,500,000	KECAMATAN BARANTI
		Waktu Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 Bulan		
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0 Laporan	2,775,000	2,766,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Laporan	3,800,000	KECAMATAN BARANTI
		Jumlah Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 Bulan		
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	13,115,000	13,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	14,500,000	KECAMATAN BARANTI
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	2,312,500					20,000,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	2,312,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	20,000,000	KECAMATAN BARANTI
								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52,109,100	61,311,100					41,460,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai Yang Diadakan	12 Bulan	12 Bulan	1,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1,200,000	KECAMATAN BARANTI
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Laporan		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif		Target				Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	8,400,000	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	7,860,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	42,709,100	50,911,100		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		12 Bulan	32,400,000	KECAMATAN BARANTI
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan						0 Laporan		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80,359,000	78,769,000					214,633,600	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	1,099,000	1,099,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3,000,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	3,060,000	4,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	3,500,000	KECAMATAN BARANTI
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lain Yang Dipelihara / Rehabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	76,200,000	73,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	208,133,600	KECAMATAN BARANTI
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		0 Unit		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	187,770,000	139,144,000					299,600,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				187,770,000	139,144,000					299,600,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				81,690,000	16,864,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			156,800,000	KECAMATAN BARANTI
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				106,080,000	122,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			142,800,000	KECAMATAN BARANTI
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				3,826,430,000	3,771,450,000					3,732,041,400	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	3,816,108,500	3,714,703,000				100 Persen	3,715,965,400	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	3,548,998,000	3,480,004,000				14 Bulan	3,471,255,400	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	14 Bulan	14 Bulan	3,548,998,000	3,480,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Panca Rijang	14 Bulan	3,450,255,400	KECAMATAN PANCA RIJANG
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir	12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Panca Rijang	12 Bulan	21,000,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	128,991,800	99,894,000				12 Bulan	142,599,000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12739 Lembar	12739 Lembar						12739 Lembar		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	7 Unit						7 Unit		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158 Hari	158 Hari						158 Hari		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Unit	60 Unit	63,139,300	30,972,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Unit	0	KECAMATAN PANCA RIJANG
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	79,500,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	7,419,500	5,539,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Paket	7,370,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
						Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12640 Lembar	12640 Lembar						12640 Lembar		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu penyediaan fasilitas kunjungan tamu	11 Bulan	11 Bulan	5,703,000	5,703,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Bulan	5,654,000	KECAMATAN PANCA RIJANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	278 Kali	278 Kali	52,730,000	57,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	278 Kali	50,075,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0					0	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Unit	0	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	116,504,700	110,897,000				12 Bulan	83,265,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar	100 Lembar						100 Lembar		
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	90 Lembar	90 Lembar	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di wilayah kecamatan	90 Lembar	900,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	40,692,000	39,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di wilayah kecamatan	12 Bulan	26,060,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	74,812,700	70,887,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di wilayah kecamatan	12 Bulan	56,305,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	21,614,000	23,908,000				2 Unit	18,846,000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit						1 Unit		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit						2 Unit		
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	14,964,000	17,258,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2 Unit	12,196,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	2,750,000	2,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	7 Unit	2,750,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3,900,000	3,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	2 Unit	3,900,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	1,700,000	51,347,000				100 Persen	7,234,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Non Perizinan	80 Dos	80 Dos	1,700,000	51,347,000				80 Dos	7,234,000	
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Urusan	10 Urusan	1,700,000	1,347,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Di wilayah Kecamatan	10 Urusan	4,734,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	1 Urusan	0	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Di wilayah Kecamatan	1 Urusan	2,500,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	3,392,500	1,620,000				100 Persen	3,520,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	3,392,500	1,620,000				12 Bulan	3,520,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	3,392,500	1,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	3,520,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				0	0					0	
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	0	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kelurahan	0	KECAMATAN PANCA RIJANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	5,229,000	3,780,000				100 Persen	5,322,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	12 Bulan	5,229,000	3,780,000				12 Bulan	5,322,000	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan		
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	12 Bulan	1,743,000	1,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1,774,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	12 Bulan	1,743,000	1,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1,774,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	1,743,000	1,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	1,774,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				445,798,000	406,640,000					468,434,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				222,358,000	105,248,000					181,844,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				44,218,500	32,371,500					37,074,000	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Unit	5 Unit	22,582,500	14,145,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	20,017,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	9000 Lembar	9000 Lembar	3,176,000	3,176,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9000 Lembar	420,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	85 Kali	85 Kali	18,460,000	15,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85 Kali	16,637,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				46,497,000	10,946,000					1,796,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	100 Unit	100 Unit	46,497,000	10,946,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	1,796,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68,468,500	61,456,500					54,250,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	90 Lembar	90 Lembar	550,000	550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Lembar	540,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	14,430,000	14,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8,574,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	53,488,500	46,476,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	45,136,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63,174,000	474,000					88,724,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	3,174,000	474,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	1,474,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	87,250,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	223,440,000	301,392,000					286,590,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				223,440,000	301,392,000					286,590,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	60,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	54,000,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	100 Orang	100 Orang	223,440,000	240,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	232,590,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				395,878,000	356,720,000					403,920,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				97,508,000	98,015,000					104,216,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				19,030,500	19,577,500					31,963,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	5 Unit	7,375,000	7,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	13,149,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2250 Lembar	2250 Lembar	2,035,500	2,582,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2250 Lembar	900,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	86 Kali	86 Kali	9,620,000	9,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		86 Kali	17,914,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77,845,500	77,805,500					70,021,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	90 Lembar	90 Lembar	600,000	750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Lembar	540,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	7,560,000	7,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8,556,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	69,685,500	69,495,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	60,925,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				632,000	632,000					2,232,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	632,000	632,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	2,232,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	298,370,000	258,705,000					299,704,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				298,370,000	258,705,000					299,704,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan	1 kegiatan	1 kegiatan	141,650,000	85,785,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	54,000,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	100 orang	100 orang	156,720,000	172,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 orang	245,704,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				420,598,000	381,440,000					437,129,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				113,618,000	117,560,000					156,019,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				43,541,000	42,933,300					39,428,000	
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	5 Unit	25,802,000	27,332,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	25,303,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2250	2250	1,378,000	1,880,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2250	900,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	86 Kali	86 Kali	16,361,000	13,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		86 Kali	13,225,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19,539,500	15,478,000					17,966,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	100 Unit	100 Unit	19,539,500	15,478,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	17,966,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40,990,100	50,263,300					59,684,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	90 Lembar	90 Lembar	840,000	840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Lembar	540,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	9,680,000	9,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8,692,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,470,100	39,743,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	50,452,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9,547,400	8,885,400					38,941,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	4	3,548,000	2,886,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	2,434,000	KECAMATAN PANCA RIJANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5,999,400	5,999,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	36,507,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	306,980,000	263,880,000					281,110,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				306,980,000	263,880,000					281,110,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan	1 kegiatan	1 kegiatan	60,200,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	55,000,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	70 Orang	70 Orang	246,780,000	263,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Orang	226,110,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				340,438,000	301,280,000					361,475,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				210,358,000	165,800,000					186,544,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24,257,000	12,535,500					18,881,000	
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2250 Lembar	2250 Lembar	3,417,000	1,915,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2250 Lembar	916,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	86 Kali	86 Kali	20,840,000	10,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		86 Kali	17,965,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5,823,500	3,511,000					19,707,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	100 Unit	100 Unit	5,823,500	3,511,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	19,707,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75,219,500	64,996,500					88,375,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	90 Lembar	90 Lembar	1,000,000	600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Lembar	540,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	8,500,000	9,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	8,500,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	65,719,500	54,696,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	79,335,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105,058,000	84,757,000					59,581,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	474,000	1,474,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	474,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	104,584,000	83,283,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	59,107,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	74.00 Persen	74.00 Persen	130,080,000	135,480,000					174,931,000	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				130,080,000	135,480,000					174,931,000	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun dan diadakan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	53,701,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan	60 Orang	60 Orang	130,080,000	135,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	121,230,000	KECAMATAN PANCA RIJANG
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN				1,772,851,000	1,580,256,000					1,906,226,000	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1,754,901,000	1,520,276,000				100 Persen	1,881,226,000	
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1,308,101,000	1,276,506,000				100 Persen	1,499,100,000	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	196 Orang/bulan	1,308,101,000	1,276,506,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kantor Kecamatan Kulo	196 Orang/bulan	1,499,100,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	104,501,400	111,751,900				100 Persen	162,150,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
7 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	1,784,000	2,023,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	40 Paket	3,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	31,026,300	38,026,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	3 Paket	35,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65 Paket	61 Paket	2,290,100	2,290,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	61 Paket	2,500,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5464 Paket	5464 Paket	5,488,000	5,499,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	5464 Paket	6,650,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	221 Laporan	20,130,000	20,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	221 Laporan	35,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	133 Laporan	43,783,000	43,783,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	133 Laporan	80,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	18,554,000	0				100 Persen	7,000,000	
7 1 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	21 Unit	21 Unit	18,554,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Unit	7,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	102,431,100	101,017,100				100 Persen	126,276,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	16,200,000	16,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	17,500,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	83,531,100	81,897,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	105,776,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	221,313,500	31,001,000				100 Persen	86,700,000	
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	16,253,500	15,941,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	3 Unit	39,200,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	5,060,000	5,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	12 Unit	9,500,000	KECAMATAN KULO
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kulo	2 Unit	38,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	5,530,000	50,540,000				100 Persen	11,500,000	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	5,530,000	50,540,000				100 Persen	11,500,000	
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1,930,000	540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4,000,000	KECAMATAN KULO
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	3,600,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7,500,000	KECAMATAN KULO
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	7,200,000	5,300,000				74 Persen	1,500,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen	74 Persen	7,200,000	5,300,000				74 Persen	1,500,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	7,200,000	5,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN KULO
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 Persen	100 Persen	5,220,000	4,140,000				100 Persen	12,000,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	5,220,000	4,140,000				100 Persen	12,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7	1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	1,800,000	1,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN KULO	
7	1 6 2.01 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	1,980,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN KULO	
7	1 6 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	1,440,000	1,080,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		6 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN KULO	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4,459,144,000	4,458,644,000					15,554,357,416		
8	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2,228,307,960	2,209,608,748				100 Persen	2,757,457,416		
8	1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	12,000,000	12,000,000				100 Persen	12,000,000		
8	1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	1 Dokumen	2,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	2 Dokumen	3,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	1 Dokumen	2,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	2 Dokumen	3,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	2 Laporan	2,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1,848,868,360	1,785,001,148				100 Persen	2,202,582,000		
8	1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,844,618,360	1,779,594,148		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup Kesbangpol	18 Orang/bulan	2,198,332,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
									Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
8	1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	750,000	750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	1 Laporan	750,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3,500,000	4,657,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	4 Laporan	3,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	103,811,000	101,291,000				100 Persen	94,820,000		
8	1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	1,998,000	1,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	34 Paket	2,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	2,520,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	24 Dokumen	2,520,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	99,293,000	99,293,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	120 Laporan	90,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	26,257,100	43,079,000				100 Persen	75,255,416		
8	1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	26,257,100	43,079,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	15 Unit	75,255,416	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	167,223,500	170,368,600				100 Persen	172,300,000		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220 Laporan	220 Laporan	2,200,000	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	220 Laporan	2,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	12 Laporan	38,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135,023,500	138,168,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	12 Laporan	132,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	70,148,000	97,869,000				100 Persen	200,500,000		
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	44,908,000	72,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	11 Unit	98,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	3,922,000	3,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	11 Unit	12,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	1 Unit	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	24 Unit	11,318,000	11,318,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Lingkup Kesbangpol	24 Unit	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	50,00 Persen	50,00 Persen	127,736,100	394,573,800				50,00 Persen	156,300,000		
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	50 Persen	50 Persen	127,736,100	394,573,800				50 Persen	156,300,000		
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum dan Pelajar	0 Dokumen	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	630 Orang	630 Orang	67,736,100	366,620,000		Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum dan Pelajar	630 Orang	81,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	630 Orang	630 Orang	60,000,000	27,953,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum dan Pelajar	630 Orang	55,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	0 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum dan Pelajar	0 Laporan	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	3			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	90,00 Persen	90,00 Persen	912,999,940	868,463,252				90,00 Persen	10,923,300,000		
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula	90 Persen	90 Persen	912,999,940	868,463,252				90 Persen	10,923,300,000		
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		4 Dokumen	0	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengurus Partai Politik	4 Dokumen	10,038,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	44 Orang	44 Orang	837,999,940	867,463,252		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengurus Partai Politik	44 Orang	847,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif					Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
8 1 3 2.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	75,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengurus Partai Politik	12 Laporan	38,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan	87,00 Persen	87,00 Persen	40,000,000	18,000,000				87,00 Persen	92,000,000	
8 1 4 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	87 Persen	87 Persen	40,000,000	18,000,000				87 Persen	92,000,000	
8 1 4 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	0 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Lingkup Kabupaten Sidrap	0 Orang	42,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 4 2.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	40,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Lingkup Kabupaten Sidrap	4 Laporan	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90,00 Persen	90,00 Persen	375,000,000	367,998,200				90,00 Persen	794,000,000	
8 1 5 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90 Persen	90 Persen	375,000,000	367,998,200				90 Persen	794,000,000	
8 1 5 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	630 Orang	630 Orang	375,000,000	321,738,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum dan Pelajar	630 Orang	784,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 5 2.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	2 Laporan	0	46,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Umum dan Pelajar	2 Laporan	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100 Persen	100 Persen	775,100,000	600,000,000				100 Persen	831,300,000	
8 1 6 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial	100 Persen	100 Persen	775,100,000	600,000,000				100 Persen	831,300,000	
8 1 6 2.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0 Dokumen	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	0 Orang	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0 Orang	89,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	10 Orang	55,100,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	10 Orang	55,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 2.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	0 Laporan	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 1 6 2.01 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	720,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	12 Dokumen	627,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL					1,236,018,379,000	1,241,360,946,000					1,501,941,711,787	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome), terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Ukuran keberhasilan capaian visi dan misi Kepala Daerah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan indikator nasional. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menggambarkan kemajuan dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya digunakan indikator makro pembangunan. Adapun perubahan target indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Perubahan Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,86	5,76-6,58	5,76-6,58
2	Kemiskinan			
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,11	3,60	3,60
	b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	15,56	11,82	11,82
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,86	0,628	0,628
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,56	4,65	3,50
	a. Jumlah Penganggur (Ribuan orang)	4.877,00	6.600,00	6.600,00
4	Gini Rasio	0,354	0,321	0,321
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,06	72,58	72,68
	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	70,41	70,38	70,6
	b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,04	8,15	8,15
	c. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,01	13,27	13,27
	d. Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	12.379,00	12.535,00	12.535,00
6	PDRB Perkapita			
	a. ADHB (Juta Rupiah)	51,00	51,88	51,88
	b. ADHK (Juta Rupiah)	28,40	30,18	30,18

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2022, diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Perubahan target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,06	72,58	72,68
2	Indeks Pendidikan	Indeks	62,94	64,03	64,03
3	Indeks Kesehatan	Indeks	77,55	77,51	77,85
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	92.2	59,01	59,01
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	51,00	51,88	51,88
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86	5,76-6,58	5,76-6,58
7	Tingkat kemiskinan	%	5,11	3,60	3,60
8	Gini Ratio	Poin	0.354	0,321	0,321
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,56	4,65	3,50
10	Nilai Investasi	Juta Rupiah	4.468,56	3.946,04	3.946,04
11	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan serta Konstruksi (ADHK)	%	9,06	5,81-7,71	9,06-10,96
12	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76,02	77,22	77,22
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,05	67,48	67,48
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53,16 (CC)	71,11 (BB)	71,11 (BB)
15	Nilai SAKIP	Poin	62,60 (B)	78,78 (BB)	78,78 (BB)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	78,85 (B)	88,35 (A)	88,35 (A)
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.32	2,60	2,60
18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7825	0,7854	0,7854
19	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	83,82	85,29	85,29
20	Angka Kriminalitas	Kasus	621	339	339
21	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	74,07	76,11	76,11

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2022, diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023

6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 5 tahun. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah. Adapun target indikator kinerja kunci (IKK) Perubahan RKPDP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perubahan RKPDP Tahun 2023

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPDP 2023	TARGET PERUBAHAN RKPDP 2023	KET.	
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	1	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.86	5,76-6,58	5,76-6,58
1	1	2	Laju Inflasi	%	6.66	3,0 ±1,0	3,0 ±1,0
1	1	3	PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. Juta	51.00	51,88	51,88
1	1	4	Rasio Gini	Poin	0.354	0.321	0.321
1	1	5	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	94.89	96,83	96,83
1	1	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.06	72.58	72.58
1	1	7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.01	13,27	13,27
1	1	8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.04	8,15	8,15
1	1	9	Usia Harapan Hidup	Tahun	70.41	70,38	70,38
1	1	10	Persentase Balita Stunting	%	6.31	7,80	7,80
1	1	11	Angka Partispasi Angkatan Kerja	%	57.63	94,37	94,37
1	1	12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	57.63	59,09	59,09
1	1	13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.56	4,65	4,65
1	1	14	Persentase penduduk yang bekerja	%	96.44	94,65	94,65
1	1	15	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	67.5	37.5	37.5
1	1	16	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	13.28	9.5	9.5
1	1	17	Opini BPK	OPINI	WTP	WTP	WTP
1	1	18	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	81.4	92.5	92.5
1	1	19	Penguatan Cadangan Pangan (Data timpang)	%	100	7.5	7.5
1	1	20	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Data timpang)	%	5.88	100	100
1	1	21	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	22.2	31.72	31.72
1	1	22	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	9.71	10.99	10.99
1	1	23	Produksi sektor pertanian	Ton	640.339	745.398,85	745.398,85
1	1	24	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	7.75	4.74	4.74
1	1	25	Produksi sektor perkebunan	Ton	8.297	9.979,40	9.979,40

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.
1	1	26	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	55.13	55.17	55.17	
1	1	27	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1.34	1.26	1.26	
1	1	28	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10.46	11.6	11.6	
1	1	29	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	14.52	2.99	2.99	
1	1	30	Pertumbuhan PDRB Industri	%	12.17	1	1	
2	2	ASPEK PELAYANAN UMUM						
2	1	URUSAN WAJIB						
2	1	PELAYANAN DASAR						
2	1	PENDIDIKAN						
2	1	1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	%	86,44	100	100	
2	1	2	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	91,88	100	100	
2	1	3	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	%	97,63	100	100	
2	1	4	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	%	64,29	100	100	
2	1	5	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	96,36	100	100	
2	2	KESEHATAN						
2	2	1	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	15,10	15	15	
2	2	2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	%	98,00	96	96	
2	2	3	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	%	98	100	100	
2	2	4	Persentase tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	%	89	90	90	
2	2	5	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terlatih	%	12,80	15,12	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
2	2	6	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	%	100	100	100	
2	2	7	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	74,86	80	80	
2	3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
2	3	1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	58	75	75	
2	3	2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	%	93,49	100	100	

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.
2	3	3	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	93,14	100	100	
2	3	4	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	62,15	10	10	
2	3	5	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	%	65	70	70	
2	3	6	Persentase Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	%	100	100	100	
2	3	7	Persentase bangunan yang tertata	%	100	100	100	
2	3	8	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	59	61	61	
2	3	9	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
2	3	10	Persentase Jumlah Dokumen Yang Tersusun	%	100	100	100	
2	4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
2	4	1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	%	100	100	100	
2	4	2	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	%	75,45	100	100	
2	4	3	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	96,50	100	100	
2	4	4	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	%	75,47	80,19	80,19	
2	5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
2	5	1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda	%	100	100	100	
2	5	2	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	%	92,9	100	100	
2	5	3	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban	%	96	100	100	
2	6	SOSIAL						
2	6	1	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
2	6	2	Persentase warga negara migran yang tertangani	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
2	6	3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang DiBina	%	100	100	100	
2	6	4	Cakupan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
2	6	5	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.	
2	6	6	Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani	%	100	100	100		
3			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
3			TENAGA KERJA						
3	1	1	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	%	100	100	100		
3	1	2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan	%	27,89	91,20	91,20		
3			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
3	2	1	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif	%	100	99	99		
3	2	2	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,02	0,21	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023	
3	2	3	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	%	0,5	0,3	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023	
3	2	4	Cakupan Data Gender dan Anak	%	100	100	100		
3	2	5	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,00	0,001	0,001		
3	2	6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023	
3			PANGAN						
3	3	1	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	0	7,50	7,50		
3	3	2	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	118.92	94	94		
3	3	3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	58.80	100	100		
3			PERTANAHAN						
3	4	1	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	100		
3			LINGKUNGAN HIDUP						
3	5	1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100		
3	5	2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	%	60	100	100		
3	5	3	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	%	20	20	20		
3	5	4	Persentase Pengurangan Limbah B3	%	89	100	100		
3	5	5	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota	%	100	100	100		
3	5	6	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	100		
3	5	7	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023	
3	5	8	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan	%	100	100	100		

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.
			Hidup					
3	5	9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	86,66	100	100	
3	5	10	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	72,50	47,50	47,50	
3	6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
3	6	1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,31	100	100	
3	6	2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	93,03	96	96	
3	6	3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	8,82	97,53	97,53	
3	6	4	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
3	7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
3	7	1	Persentase Peningkatan Perkembangan Desa	%	97	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
3	7	2	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama	%	95	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
3	7	3	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	66,66	25	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
3	7	4	Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	%	100	100	100	
3	8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
3	8	1	Cakupan Pembinaan Kampung KB	%	100	100	100	
3	8	2	Persentase PUS peserta KB Aktif	%	100	90	90	
3	8	3	Cakupan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Poin	100	100	100	
3	9		PERHUBUNGAN					
3	9	1	Persentase Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Dapat Berfungsi Baik	%	97	98	98	
3	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
3	10	1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	
3	10	2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	
3	11		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
3	11	1	Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip Prkoperasian	%	78	57,20	57,20	
3	11	2	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	10,64	8,20	8,20	
3	11	3	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	%	80	75,20	75,20	

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.
3	11	4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM	%	93,70	91,80	91,80	
3	12		PENANAMAN MODAL					
3	12	1	Cakupan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100	100	100	
3	12	2	Cakupan promosi penanaman modal	%	100	100	100	
3	12	3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	90	92	92	
3	12	4	Persentase Perusahaan yang taat Terhadap Ketentuan peraturan Penanaman modal	%	70	90	90	
3	12	5	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dapat diakses	%	100	100	100	
3	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
3	13	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,34	3,31	3,31	
3	13	2	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	%	0	77,43	77,43	
3	13	3	Cakupan pembinaan kegiatan kepramukaan	%	0	75	75	
3	14		STATISTIK					
3	14	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	
3	14	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	
3	15		PERSANDIAN					
3	15	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	37,52	100	100	
3	16		KEBUDAYAAN					
3	16	1	Cakupan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	100	100	100	
3	16	2	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	100	100	
3	16	3	Cakupan Dokumen Sejarah yang direvitalisasi	%	15,63	21,88	21,88	
3	16	4	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	%	37,00	46,30	46,30	
3	16	5	Persentase Peningkatan Pengunjung Museum	%	0	48,31	48,31	
3	17		PERPUSTAKAAN					
3	17	1	Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun	%	40,76	60	60	
3	17	2	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional	%	67,31	5,09	5,09	
3	17	3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	100	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
3	18		KEARSIPAN					

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.	
3	18	1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	72,32	85	85		
3	18	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	50	85	85		
3	18	3	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%	100	100	100		
4	1		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
4	1		KELAUTAN DAN PERIKANAN						
4	1	1	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	100	100	100		
4	1	2	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	100	100	100		
4	1	3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	70	75	75		
4	2		PARIWISATA						
4	2	1	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	0	19,61	19,61		
4	2	2	Persentase peningkatan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	%	0	32,41	32,41		
4	2	3	Persentase Peningkatan jumlah unit usaha ekonomi	%	0	31,11	31,11		
4	3		PERTANIAN						
4	3	1	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	%	139,64	100	100		
4	3	2	Jumlah Produksi daging	Kg	1.510.999	5.358.011	5.358.011		
4	3	3	Jumlah produksi telur	Kg	44.265.103	83.362.100	83.362.100		
4	3	4	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	19,96	100	100		
4	3	5	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	19,96	100	100		
4	3	6	Cakupan pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	%	0	21	21		
4	3	7	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	%	82,78	100	100		
4	3	8	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	82,13	100	100		
4	3	9	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	82,13	100	100		
4	3	10	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP	Rasio	0,05	01:15	01:15		
4	3	11	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Usaha Peternakan/ Kelompok Ternak	Rasio	0,05	01:12	01:12		
4	4		PERDAGANGAN						
4	4	1	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100		
4	4	2	persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai	%	6,20	6,20	6,20		

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.
4	4	3	Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya	%	100	100	100	
4	4	4	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran	%	55,28	100	100	
4	4	5	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	%	41,09	50	50	
4	5	PERINDUSTRIAN						
4	5	1	Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapat pembinaan	%	0,54	20,52	20,52	
4	5	2	Pertumbuhan IKM	%	0,95	1	1	
4	6	TRANSMIGRASI						
4	6	1	Persentase Satuan permukiman yang dibina	%	2,1	2,30	2,30	
4	6	2	Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri	%	24,20	24,70	24,70	
5	1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	1	SEKRETARIAT DAERAH						
5	1	1	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
5	1	2	Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang Mengajukan Proposal	%	79	100	100	
5	1	3	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	%	100	100	100	
5	1	4	Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	
5	1	5	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Dilaksanakan	%	100	100	100	
5	1	6	Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	%	100	100	100	
5	1	7	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	%	2,98	2,45	2,45	
5	2	SEKRETARIAT DPRD						
5	2	1	Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD	%	94	100	100	
6	1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
6	1	PERENCANAAN						
6	1	1	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	%	100	100	100	
6	1	2	Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	%	100	98	98	
6	1	3	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	100	
6	1	4	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan	%	100	100	100	

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.
			SDA					
6	1	5	Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	100	100	
6	2	KEUANGAN						
6	2	1	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu	%	87	100	100	
6	2	2	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	98	100	100	
6	2	3	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Pasar	%	107	100	100	
6	3	KEPEGAWAIAN						
6	3	1	Nilai Rata-rata SKP ASN	%	88,4	88,50	88,50	
6	3	2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	%	62,70	63	63	
6	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
6	4	1	Persentase Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,37	66,22	66,22	
6	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
6	5	1	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	%	95	100	100	
7	1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
7	1	INSPEKTORAT DAERAH						
7	1	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	92,23	96	96	
7	1	2	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	%	30	35	35	
8	1	UNSUR KEWILAYAHAN						
8	1	KECAMATAN						
8	1	1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	
8	1	2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	74	74	
8	1	3	Cakupan Pembinaan & Pengawasan Desa	%	100	100	100	
9	1	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
9	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
9	1	1	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan wawasan Kebangsaan	%	80	50	50	
9	1	2	Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik Yang Mendapatkan Pendidikan Politik	%	100	90	90	
9	1	3	Persentase Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan	%	87	100	0	Tidak dilaksanakan pada T.A. 2023
9	1	4	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	90	90	
9	1	5	Persentasi koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	%	95	100	100	

NO			ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2022	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	KET.
10	1		NON URUSAN					
10	1	1	Cakupan Penunjang Ursan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2022, diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD 2023

6.4. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat beberapa penambahan indikator maupun beberapa perubahan nomenklatur pada indikator penerapan SPM yaitu penambahan 2 (dua) indikator pada jenis pelayanan dasar bidang pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yaitu “rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional”. Sedangkan pada beberapa indikator mengalami perubahan indikator yaitu bidang kesehatan dan bidang sosial yang menambahkan kata “pada saat dan setelah tanggap darurat selesai” yang berarti perlindungan pada korban bencana tidak hanya sampai saat tanggap darurat saja tetapi sampai kepada setelah tanggap darurat. Adapun target pencapaian indikator standar pelayanan minimal Tahun 2023 seperti yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan II Tahun 2023	Target Nasional	Target Tahun 2023
	Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	86%	76.71%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan II Tahun 2023	Target Nasional	Target Tahun 2023
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	87%	83.75%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	44.07%			
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	92%	69.56%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	54.87%			
II	Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83%	42.74%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96%	51.40%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99%	51.55%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82%	45.13%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99%	49.07%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	73%	44.56%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usialanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	76%	48.19%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27%	29.34%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94%	81.04%	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96%	79.57%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan II Tahun 2023	Target Nasional	Target Tahun 2023
11	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	62.4%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97%	48.53%	100%	100%
III Pekerjaan Umum						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93%	82.31%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87%	78.37%	100%	100%
IV Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	80.00%	100%	100%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	20.00%	100%	100%
V Trantibumlinmas						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/ Kota	100%	99.58%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	96%	41.49%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	91.01%	38.86%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamtn dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	92.00%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi	100%	95.78%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Capaian Triwulan II Tahun 2023	Target Nasional	Target Tahun 2023
	kebakaran	korban kebakaran				
VI	Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	27.49%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	51.33%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	51.51%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya glandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	54.56%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	324%	100%	100%

Sumber: Capaian e-SPM Kemendagri, diolah oleh Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023

6.5. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan penyelarasan pencapaian TPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan menetapkan sasaran nasional yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian TPB.

Penyelarasan dan integrasi indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.5
Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

No	PILAR SOSIAL		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 1. Tanpa kemiskinan)					
	Nomor	Indikator				
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5.11%	0.01	0.01	Dinas Sosial
						Bappeda Litbng
2	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	0	1.5	1.5	Dinkes, Dalduk, Dan KB
3	1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ktenagakerjaan.	27.89%	1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
4	1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	2075 KPM	330	330	Dinas Sosial
5	1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	10575 RT	7450	7450	Dinkes, Dalduk, Dan KB
6	1.4.1	Proporsi Penduduk/RT dengan akses terhadap pelayanan dasar		1	1	DinkesppKB
14	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		0	0	BPBD
15	1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	9	4	4	BPBD
16	1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		100%	100%	BPBD
17	1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		1	1	BPBD
18	1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	24	2	2	BPBD
19	1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		0	0	BPBD
20	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		3	3	BPBD
21	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.		25.000 KPM	25.000 KPM	BPBD

22	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.		80%	80%	BPBD
No	PILAR SOSIAL (Tujuan 2. Tanpa Kelaparan)		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	Nomor	Indikator				
23	2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	13.81	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
25	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	4.73	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
26	2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	9.08	30000	30000	Dinas Ketahanan Pangan
27	2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	6.31	3	3	Dinkes, Dalduk, Dan KB
29	2.2.2*	Prevalensi wasting anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
30	2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil 15-49 tahun	8.67	1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
31	2.2.3. (a)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	64.50	95	95	Dinkes, Dalduk, Dan KB
32	2.2.2. (b)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		59 kg/kapita/tahun	59 kg/kapita/tahun	Dinas Ketahanan Pangan
33	2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	250.38 Jt	100 Jt	100 Jt	Dinas Ketahanan Pangan
No	PILAR SOSIAL (Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera)		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	Nomor	Indikator				
34	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	3	0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
35	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	99.7	100	100	Dinkes, Dalduk, Dan KB

36	3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99.30	100	100	Dinkes, Dalduk, Dan KB
37	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0.4	0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
38	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	10.3	0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
39	3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
40	3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
41	3.3.1. (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0	0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
42	3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	202	60	60	Dinkes, Dalduk, Dan KB
43	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	39	5	5	Dinkes, Dalduk, Dan KB
44	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	23 Orang	5 (Kusta)	5 (Kusta)	Dinkes, Dalduk, Dan KB
45	3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	0	0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
46	3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	2%	1%	1%	Dinkes, Dalduk, Dan KB
47	3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0.39	0,130	0,130	Dinkes, Dalduk, Dan KB
48	3.4.2. (a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	11	3	3	Dinkes, Dalduk, Dan KB
49	3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		0,0003	0,0003	Dinkes, Dalduk, Dan KB
50	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		0,0011	0,0011	Dinkes, Dalduk, Dan KB
51	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB

52	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	54.29%	0,9	0,9	Dinkes, Dalduk, Dan KB
53	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	0%	30%	30%	Dinkes, Dalduk, Dan KB
54	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0,1	0,1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
55	3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.19%	1%	1%	Dinkes, Dalduk, Dan KB
56	3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	8.32%	1%	1%	Dinkes, Dalduk, Dan KB
57	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		400,000	400,000	Dinkes, Dalduk, Dan KB
58	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
59	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.		0,2	0,2	Dinkes, Dalduk, Dan KB
60	3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90	1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
61	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		2	2	Dinkes, Dalduk, Dan KB
No	PILAR SOSIAL (Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas)		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	Nomor	Indikator				
62	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		(a) 61%	(a) 61%	Dinas Pendidikan
				(b) 70%	(b) 70%	
				(c) 87	(c) 87	
63	4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		SD:100% MI:100%	SD:100% MI:100%	Dinas Pendidikan
64	4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		SMP: 90% MTS:90%	SMP: 90% MTS:90%	Dinas Pendidikan
65	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	111.63%	110%	110%	Dinas Pendidikan
66	4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	102.3%	130%	130%	Dinas Pendidikan

67	4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		8,25 Tahun	8,25 Tahun	Dinas Pendidikan
68	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	59.06%	68.27%	68.27%	Dinas Pendidikan
69	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		(d) 61%	(d) 61%	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
				(e) 70%	(e) 70%	
				87	87	
70	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		SD/MI:84,16% (L)86,86(P)	SD/MI:84,16%(L)86,86(P)	Dinas Pendidikan
				SMP/MTS:65,24%(L)70,4(P)	SMP/MTS:65,24%(L)70,4(P)	
71	4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		1	1	Dinas Pendidikan
72	4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		100%, 100%	100%, 100%	Dinas Pendidikan
73	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		(a)98%	(a)98%	Dinas Pendidikan
				(b)75%	(b)75%	
				(c)45%	(c)45%	
				(d)1%	(d)1%	
				(e)95%	(e)95%	
				(f)93%	(f)93%	
				(g)90%	(g)90%	
74	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.		TK(2%),SD(70%)SMP(72%)	TK(2%),SD(70%)SMP(72%)	Dinas Pendidikan
No	PILAR SOSIAL		CAPAIAN	OPD Penanggung Jawab		
	(Tujuan 5. Kesetaraan Gender)					
No	PILAR SOSIAL		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	Nomor	Indikator				
75	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	33	36	36	Dinas Pemdes Dan PPA
76	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	4	0	0	Dinas Pemdes Dan PPA
77	5.2.1. (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	3	0	0	Dinas Pemdes Dan PPA

78	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	3	0	0	Dinas Pemdes Dan PPA
79	5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100	1	1	Dinas Pemdes Dan PPA
80	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	125 Orang	0 Orang	0 Orang	Dinas Pemdes Dan PPA
81	5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		25	25	Dinas Pemdes Dan PPA
82	5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).		1,85%	1,85%	Dinas Pemdes Dan PPA
83	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	4	8.57%	8.57%	Dinas Pemdes Dan PPA
84	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	13 Orang	9 Orang	9 Orang	Dinas Pemdes Dan PPA
85	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		0,85	0,85	Dinas Pemdes Dan PPA
86	5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	8.32%	0	0	Dinkes, Dalduk, Dan KB
87	5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
88	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.		1	1	Diskominfo
No	PILAR LINGKUNGAN		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak)					
	Nomor	Indikator				
89	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	93.49%	100	100	Dinas Biciptapera
90	6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		115,00 m3	115,00 m3	Dinas PSDA

91	6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	12	20	20	Dinas Biciptapera
92	6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		1	1	Dinkes, Dalduk, Dan KB
93	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	93.14	95	95	Dinas Biciptapera
94	6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	106 Desa/Kel	200 Desa/Kel	200 Desa/Kel	Dinkes, Dalduk, Dan KB
95	6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	106 Desa/Kel	200 Desa/Kel	200 Desa/Kel	Dinkes, Dalduk, Dan KB
96	6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		0,8	0,8	Dinas Biciptapera
97	6.3.1. (a)	Jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		0,6	0,6	Dinas Biciptapera
98	6.3.1. (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		0.1	0.1	Dinas Biciptapera
99	6.3.2. (a)	Kualitas air danau.		0.1	0.1	Dinas LH
100	6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		0.1	0.1	Dinas LH
101	6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	38	43	43	Dinas PSDA
102	6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1	4	4	Dinas PSDA
103	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	4	4	Dinas PSDA
104	6.5.1. (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	meningkatnya kapasitas, kualitas, dan penataan kelembagaan PSDA	Dinas PSDA
No	PILAR EKONOMI (Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	Nomor	Indikator				
105	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	8.09%	9	9	Diskominfo

106	8.1.1. (a)	PDRB per kapita.	51	51.26	51.26	Diskominfo
107	8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	70	0,45	0,45	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
108	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	7.09%	100%	100%	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
109	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	44.89	25	25	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
110	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	42	68	68	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
111	8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	28.11	50	50	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
112	8.3.1. (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	1.8	40	40	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
113	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	17800	19000	19000	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
114	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	3.56%	4	4	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
115	8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran.	5.59	6	6	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
116	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	11	10	10	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
117	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.		2%	2%	Disporapar
118	8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	45	500	500	Disporapar
119	8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	170.580 orang	125.000 Orang	125.000 Orang	Disporapar
120	8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.		0	0	Disporapar
121	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	1.92%	2.25	2.25	Diskop ukm tkt
No	PILAR EKONOMI		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)					
	Nomor	Indikator				
	9.1.1 (a)	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik	59	0	0	Biciptapera

122	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	14.52%	0.25	0.25	Disperindag
123	9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	12.17%	20	20	Disperindag
124	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	25.19	1	1	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
125	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	0.05%	5	5	Disperindag
126	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	0%	20	20	Disperindag
127	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		100	100	Diskominfo
128	9.c.1. (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		100	100	Diskominfo
129	9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	79.30%	70%	70%	Diskominfo
No	PILAR EKONOMI (Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan)		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	Nomor	Indikator				
130	10.1.1*	Koefisien Gini.	0.354	0.1	0.1	Dinas Sosial
131	10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		3.25	3.25	Dinas Sosial
132	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	1	3	3	Dinas Pemdes Dan PPA
133	10.1.1. (c)	Jumlah desa tertinggal.	0	0	0	Dinas Pemdes Dan PPA
134	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	21	10	10	Dinas Pemdes Dan PPA
135	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	0.5166	60%	60%	Dinas Pemdes Dan PPA
136	10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		18%	18%	Dinas Sosial
137	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		8%	8%	Dinas Sosial
138	10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil.		74,2	74,2	Diskominfo
139	10.3.1.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan	0	0	0	Bagian Hukum

	(d)	lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				
140	10.4.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		80%	80%	Dinas Koperasi, Ukm Tkt
No	PILAR LINGKUNGAN		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang Berkelanjutan)					
	Nomor	Indikator				
141	11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	11.1	80	80	Biciptapera
142	11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		3	3	Bagian Kerjasama
143	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0.02/100rb	0	0	BPBD
144	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	119.2	119.2	119.2	BPBD
145	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	3	3	BPBD
146	11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	5.365.088.000	0	0	BPBD
147	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	99.15%	90%	90%	Dinas LH
148	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		3	3	BPBD
No	PILAR LINGKUNGAN		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	TUJUAN 12 Komsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab					
	Nomor	Indikator				
149	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		5,900,000,000 ton/periode	5,900,000,000 ton/periode	Dinas LH
150	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	7417.17 Ton	14.000 Ton	14.000 Ton	Dinas LH
151	12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		3	3	Dinas LH
No	PILAR LINGKUNGAN		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim)					
	Nomor	Indikator				
152	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	3	3	BPBD

153	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		0	0	BPBD
No	PILAR LINGKUNGAN		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 14. Ekosistem Lautan)					
	Nomor	Indikator				
154	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.		85%	85%	Disnakkan
155	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	121.90	80	80	Disnakkan
156	14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.		230 Orang	230 Orang	Disnakkan
No	PILAR LINGKUNGAN		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 15. Ekosistem Daratan)					
	Nomor	Indikator				
157	15.1.1. (a)	Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan.		0,8	0,8	Dinas LH
158	15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		0,26	0,26	Dinas LH
159	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.		4	4	Bagian Hukum
160	15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	4	4	Dinas LH
No	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh)					
	Nomor	Indikator				
161	16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	Badan Kesbangpol
162	16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	Badan Kesbangpol
163	16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	49	0	0	Badan Kesbangpol
164	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		0.9	0.9	Badan Kesbangpol

165	16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		6	6	Diskominfo
166	16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0	0	Dinas Pemdes Dan PPA
167	16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0	0	0	Dinas Pemdes Dan PPA
168	16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0	0	Dinas Pemdes Dan PPA
169	16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		0.06	0.06	Diskominfo
170	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	0%	95%	95%	Bappeda Litbang
171	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0	WTP	WTP	BKAD
172	16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	0%	67%	67%	Inspektorat
173	16.6.1. (c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	0	1	1	Unit Layanan Pengadaan
174	16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		90	90	Bagian Organisasi
175	16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		95	95	Bagian Organisasi
176	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8.57	20	20	Dinas Pemdes Dan PPA

177	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	20	50	50	Dinas Pemdes Dan PPA
178	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		100	100	Disdukcapil
179	16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		100	100	Disdukcapil
180	16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	93.03	100	100	Disdukcapil
181	16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		0	0	Bagian Hukum
No	PILAR EKONOMI		Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Perubahan Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
	(Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)					
	Nomor	Indikator				
	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	13.52	0.945	0.945	Badan Pendapatan Daerah
182	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	0.49	0.7	0.7	Badan Pendapatan Daerah
183	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	4.72%	57.00%	57.00%	Badan Pendapatan Daerah
184	17.17.1. (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		1	1	Bagian Kerjasama
185	17.17.1. (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		1	1	Bagian Kerjasama
186	17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		1	1	Diskominfo
187	17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.		1	1	Diskominfo
188	17.18.1. (c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		20 Metadata	20 Metadata	Diskominfo

189	17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		1	1	Bappeda Litbang
190	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	Disdukcapil
191	17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		20000	20000	Diskominfo
192	17.19.2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).		1	1	Diskominfo
193	17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		0.6	0.6	Diskominfo
194	17.6.2. (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband		100	100	Diskominfo

Sumber: Data diolah Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2023

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sekaligus berfungsi sebagai dokumen teknis operasional tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis, target pembangunan jangka panjang dan menengah yang kemudian disusun dalam prioritas rencana pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berisi rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dengan tetap memperhatikan sinergitas antara program prioritas daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Mengingat perubahan RKPD merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dokumen Perubahan RKPD harus menjadi acuan bagi Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan acuan bagi Satuan Unit Kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang dengan memperhatikan saran-saran dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

7.2. Kesimpulan

Dalam proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini berorientasi pada proses dengan pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *Top-Down* dan/atau *Bottom-Up*, serta memperhatikan substansi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Diharapkan agar semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mempedomani dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 dan melakukan langkah-langkah sinkronisasi rencana kerja hingga pelaksanaannya serta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang agar mempedomani dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat bermanfaat bagi kemakmuran segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.



Lampiran

**RUMUSAN USULAN TAMBAHAN HASIL PENELAHAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
1	Lanjutan Pembangunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Kanyuara, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
2	Pembangunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000 Meter	Desa Tanete dan Kel. Rijang Pittu, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Maritengngae, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
3	Talud Dan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000 Meter	Desa Tanete, dan Allakuang, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Maritengngae, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
4	Penimbunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Jalan Tani desa Bulu Wattang, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Bulowattang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
5	Pembangunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Jalan Tani Desa Bolabulu, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Bola Bulu	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
6	Kurangnya Saluran Tersier Sehingga Diperlukan Adanya Pembangunan Saluran Tersier	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	50 Ha	Lingkungan 2 Kel. salomallori, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
7	Kondisi Jalan Yang Rusak Dan Tidak Adanya Saluran Sehingga Diperlukan Adanya Pembangunan Talud Dan Timbunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	500 Meter	Jalan Tani Palapparae, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
8	Karena Masih Banyak Kurangnya Jalan Tani Di Beberapa Wilayah Kec. Tellu Limpoe	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Tellu Limpoe, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
9	Penimbunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Desa Dongi, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
10	Untuk Menunjang Hasil Pertanian Yang Baik Maka Perlu Dilakukan Pembangunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	500 Meter	Desa Bila, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Bila	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
11	Pengerjaan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000 Meter	PAJALELE, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
12	Pembangunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000 Meter	TEPPO, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Teppo	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
13	Pembangunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Desa Ajubissue, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ajubissue	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
14	Penimbunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Desa Sumpang Mango, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Sumpangmango	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
15	Penimbunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Salomallori, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
16	Penimbunan Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.000 Meter	Lompok Lasabo, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lombo	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
17	Jalan Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.000 Meter	Talumae, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Talumae	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
18	Pemberdayaan Kelompok Menjahit	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	25 Set	Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
19	Pengadaan Pertukangan Aluminium	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 Set	Wala, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
20	Pengadaan Mesin Jahit	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	50 Unit	Talumae, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Talumae	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
21	Sosialisasi Kewirausahaan Bagi Pemuda	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Paket	Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, WT. Sidenreng, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
22	Sosialisasi Kepemudaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Kelompok	Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Tellu Limpoe, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
23	Pelatihan Kelompok Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	50 Orang	kecamatan Pancarijang, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Panca Rijang, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
24	Pelatihan Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	50 Orang	BILA, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Bila	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
25	Bantuan Pemberdayaan UMKM Untuk Kelompok Remaja Dan Perempuan Di Kecamatan Pitu Riawa Dan Dua Pitue	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	25 Unit	Pitu Riawa dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
26	Pemberdayaan Umkm, Kelompok Umkm Saro Mase	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	25 Set	Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Dua Pitue, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
27	Pemberdayaan Kelompok UMKM Padaidi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	15 Set	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
28	Pemberdayaan Kelompok UMKM Mawar	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30 Set	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
29	Pengadaan Alat Pembuatan Kue 4 Kelompok	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	12 Set	Kelurahan Lakessi dan Kelurahan Wala, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
30	Turnamen Bulutangkis Maluku Sidenreng	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Paket	PB. Maluku, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
31	Turnamen Sepak Bola Maluku Sidenreng	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Paket	Lapangan Sepak Bola Lautang Benteng, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
32	Turnamen Futsal Hamili Cup	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Kegiatan	maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Maritengngae, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
33	Pembinaan Club Sepak Bola		1 Paket	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
34	Pengadaan Bantuan Poliser Beras	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Unit	lautang benteng, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
35	Pengadaan Timbangan Beras Digital	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Unit	lautang benteng, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
36	Kurangnya Ketersediaan Alat Pasca Panen Sehingga Diperlukan Adanya Bantuan Berupa Alat Penggilingan Ayakan Gabah 16 Susun	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 Unit	lakessi, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
37	Bantuan Hand Sprayer Untuk Petani Dalam Kecamatan Pitu Riawa Dan Dua Pitue	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	50 Unit	Pitu Riawa dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Dua Pitue, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
38	Pengadaan Pompanisasi Pertanian Kepada Kelompok Tani Kecamatan Dua Pitue Dan Pitu Riawa	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10 Unit	Dua Pitue dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Dua Pitue, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
39	Pengadaan Handtraktor Untuk Kelompok Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5 Unit	Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
40	Pengadaan Handsprayer	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 Unit	PAJALELE, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
41	Pengadaan Hand Traktor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3 Unit	PAJALELE, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Pajalele	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
42	Pengerukan Saluran Irigasi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	50 Ha	ANABANNAE, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Anabannae	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
43	Pegdaan Kompur Cas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10 Unit	watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, WT. Sidenreng, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
44	Pengadaan Handtraktor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10 Unit	Kec. Maritengngae dan Wt. Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
45	Pengadaan Hansprayer	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	500 Unit	Kecamatan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
46	Kurangnya Ketersediaan Alat Pertanian Berupa Handsprayer	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	60 Unit	kelompok tani Desa Kalosi, Kampale, dan Salomallori, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Dua Pitue, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
47	Untuk Membajak Sawah Maka Kelompok Tani di Wilayah Kec. Watang Sidenreng Memerlukan Beberapa Traktor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2 Unit	Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, WT. Sidenreng, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
48	Pengadaan Handsprayer	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	50 Unit	ABBOKONGENG, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Abbokongeng	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
49	Pengadaan Pompa Air	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	30 Unit	Galung Aserae, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
50	Pengeboran Sumur Bor Untuk Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Titik	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	
51	Penggalian Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.000 Meter	Salomallori, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
52	Penggalian Sungai Pittue	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	500 Meter	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
53	Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Remaja Putus Sekolah Di Pitu Riawa, Pitu Riase, Dan Dua Pitue	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Pitu Riawa, Pitu Riase, dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Dua Pitue, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
54	Pembangunan Gedung SD Desa Leppangeng	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Leppangeng, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lepangeng	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
55	Bantuan Rehab Sekolah Yayasan Al-Amin	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Sekolah	Yayasan Al-Amin, Kab. Sidenreng Rappang, Panca Rijang, Bulowattang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
56	Karena Kondisi PAUD Sekarang Sudah Tidak Layak Di Tempati Maka Masyarakat Dan Pemerintah Desa Mengajukan Pembangunan Gedung PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Maddenra, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Maddenra	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
57	Karena Belum Pernah Di Lakukan Perbaikan Halaman Sekolah Maka Pihak Sekolah Mengajukan Pembangunan Paving Blok	Program Pengelolaan Pendidikan	50 Meter	Pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Pitu Raise, Seluruh Kelurahan/ Desa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
58	Karena Sudah Lama Belum Di Lakukan Pembangunan Pagar Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	70 Meter	Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
59	Karena Belum Memiliki Tempat Beribadah Yang Layak Maka Perlu Di Lakukan Pembanguan Mushollah SMP Satap 10 Batu	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
60	Pembangunan RKB SD Satap 5 Batu Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
61	Karena Mengingat Banyak Guru Yang Dari Luar Mengajar Di SD 9 Batu Maka Perlu Di Lakukan Pembangunan Perumahan Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Batu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
62	Karena TK PGRI Bina Gading Belum Memiliki Pagar Yang Memadai Dan Banyak Hewan Ternak Masuk	Program Pengelolaan Pendidikan	100 Meter	Lagading, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Lagading	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
63	Pembangunan Pagar Pesantren Darul Saada Assadiyah Lancirang	Program Pengelolaan Pendidikan	300 Meter	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
64	Pembangunan Pagar SMP Negeri 4 Dua Pitue	Program Pengelolaan Pendidikan	100 Meter	Ponrangae, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrengae	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
65	Pembangunan Pagar SD Negeri 1 Lancirang	Program Pengelolaan Pendidikan	100 Meter	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
66	Pembangunan Paud	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Soppae, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
67	Sarana Dan Prasarana Pembentukan Sekolah PAUD SDN 16 Pangkajene	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Paket	Wala, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
68	Bantuan Alat Sarana Bermusik Untuk Generasi Muda Lotang Pasa (Lopas Lancirang)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2 Set	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
69	Pembinaan Generasi Muda Pagar Nusa	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1 Paket	Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
70	Bantuan Kelompok Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5 Kelompok	Kecamatan Tellu Limpoe dan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
71	Kejuaraan Bola Volli Pitu Riawa Cup 2023	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	20 Set	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
72	Kejuaraan Badminton Lancirang Cup 2023	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	25 Set	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
73	Turnament Tennis Ahmad Yani Cup 2023	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1 Paket	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
74	Pembinaan Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	25 Set	Desa Ajubissue, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ajubissue	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
75	Pembinaan Generasi Muda Cempa Jawa	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	25 Set	Desa Dongi, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Dongi	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
76	Pembinaan Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	25 Set	Salomallori, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
77	Pembinaan Generasi Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	25 Set	Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
78	Pengadaan Alat Pertukangan Kayu	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	20 Set	Wala dan Lakessi, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
79	Pembangunan Embun	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1 Titik	Pitu Riawa dan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Pitu Riawa, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
80	Pengadaan Pompanisasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5 Titik	Bolabulu, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Bola Bulu	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
81	Pengadaan Pompa Air Di Wilyah Kec. Watang Sidenreng Untuk Memperlancar Pengelolaan Persawahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5 Set	Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, WT. Sidenreng, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
82	Karena Msasyarakat Membutuhkan Beberapa Pompa Air Untuk Ketersedian Musim Kemarau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4 Set	Kulo, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Kulo, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
83	Pembangunan Pintu Air Pengendali Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5 Titik	Lingkungan 2, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
84	Pembangunan Klop Pintu Air, Saluran Air Lompok Lapokki	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5 Titik	Soppae, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
85	Lanjutan Pembanguna Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	500 Meter	Jalan Muh. Zain, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Kalosi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
86	Karena Melihat Kondisi Jembatan Tersebut Sudah Rusak Dan Terkena Longsor Air Sungai	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8 Meter	Abbokongan, Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Abbokongeng	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
87	Pembangunan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	500 Meter	LINGK I TANRU TEDONG, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Tanru Tedong	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
88	Pembangunan Talud	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	500 Meter	TANGKOLI, Kab. Sidenreng Rappang, Baranti, Benteng Utama	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
89	34. Pembangunan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	500 Meter	Ponrangae, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Ponrangae	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
90	Karena Jl. Bola Bulu Belum Pernah Dilakukan Di Lakukan Pembangunan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	600 Meter	Jl. Bola Bulu Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Bila	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
91	Pembangunan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3 Titik	sumpang mango, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Sumpangmango	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
92	Pembangunan Drainase (Saluran Pembuangan Air) Sesi Barat Lapangan Ahmad Yani	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3 Titik	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
93	Pembangunan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	500 Meter	Salomallori, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Salomalori	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
94	6. Pembangunan Drainase Lingkungan 2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	40 Meter	Lingkungan 2, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
95	Peningkatan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2 Titik	Jalan Domba, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Wala	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
96	Renovasi Lapangan Bulutangkis	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Paket	PB Maluku, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lautang Benteng	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	
97	Perbaikan Lapangan Bulutangkis	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Paket	PB Mandala, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, Kanyuara	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisataaan	

No.	Permasalahan	Program	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Validasi Keterangan
98	Penimbunan Lapangan Sepakbola	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Paket	Lapangan Sepak Bola Pujo, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Bola Bulu	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
99	Karena Melihat Kondisi Lapangan Yang Sering Di Jadikan Tempat Hewan Ternak Untuk Makan, Maka Pemerintah Kec. Kulo Mengajukan Pembangunan Pagar Sepak Bola Andi Sulolipu	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	500 Meter	Amparita, Kab. Sidenreng Rappang, Tellu Limpoe, Amparita	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
100	Melihat Banyak Minat Olahraga Di SMP 2 Dua Pitue Maka Pihak Sekolah Mengajukan Pembangunan Lapangan Volli	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Paket	Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Dua Pitue, Dua Pitue, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
101	Renovasi Lapangan Tennis Ahmad Yani	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10 Truk	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
102	Penimbunan Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	50 Meter	Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Lancirang	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
103	Perbaikan Lapangan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	200 Meter	Lakessi, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Lekessi	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Kepariwisata	
104	Sosialisasi Minat Baca	Program Pembinaan Perpustakaan	1 Paket	Watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, WT. Sidenreng, WT. Sidenreng, Seluruh Kelurahan/Desa	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
105	Pelatihan	Program Penyuluhan Pertanian	1 Unit	ANABANNAE, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Riawa, Anabannae	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan	